

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG





GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud perihal tersebut, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
31. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari;

- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
 - c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - f. penutup.
2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan dua pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3B

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2025.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 - 6 - 2025

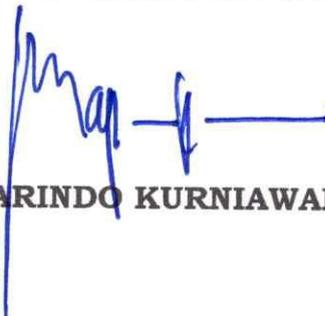
GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG



MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 17



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan	I-4
1.3 Dasar Hukum	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2025	II-1
2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan II-2025.....	II-1
2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan	II-1
3.1.2. Kinerja RKPD Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	II-31
2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s.d Triwulan II-2025	II-37
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan II-2025	III-1
3.1.2. Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan II 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka	III-16
3.1.3. Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2024, Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2025	III-28
3.1.4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2025.....	III-31
3.1.5. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2025.....	III-34
3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah	III-35
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025.....	III-37
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025	III-43
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025	III-47
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 dengan Sasaran Nasional dalam RPJMN 2025-2029.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025	IV-7
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	IV-15
4.3.1 Sasaran Makro Pembangunan Daerah.....	IV-22
4.3.2 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dan Pusat.....	IV-29
4.3.1 Program Unggulan Daerah	IV-31
4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, Prioritas Nasional 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029	IV-49
4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025 - 2029	IV-69
4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-93
4.7 Arah-an Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung	IV-95



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
5.1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2025 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2025	V-1
5.2 Program Prioritas Berdasarkan SPM.....	V-44
5.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	V-57
5.4 Dukungan Program Unggulan Daerah melalui pelaksanaan Progran Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025	V-59
BAB VI PENUTUP	VI-1



DAFTAR GAMBAR

BAB II

Gambar 2. 1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Triwulan I-2025.....	II-4
Gambar 2. 2	Pertumbuhan Ekonomi Se- Sumatera Triwulan I-2025	II-5
Gambar 2. 3	Perkembangan Tingkat Penghunian kamar Hotel Berbintang, Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Provinsi Lampung Maret 2025	II-28

BAB III

Gambar 3. 1	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)	III-1
-------------	---	-------

BAB IV

Gambar 4. 1	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-1
Gambar 4. 2	Pioritas Nasional.....	IV-2



DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2. 1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Triwulan I 2025	II-2
Tabel 2. 2	Pertumbuhan Ekonomi Se- Sumatera Triwulan I-2025	II-7
Tabel 2. 3	Perkembangan Tingkat Penghunian kamar Hotel Berbintang, Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Provinsi Lampung Maret 2025.....	II-9
Tabel 2. 4	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024	II-16
Tabel 2. 5	Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2024	II-20
Tabel 2. 6	Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung April 2025	II-22
Tabel 2. 7	Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2020-2024	II-23
Tabel 2. 8	Perkembangan Keberangkatan Penumpang Kereta Api, Kapal Ferry dan Pesawat Udara di Provinsi Lampung.....	II-27
Tabel 2. 9	Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II-2025	II-32
Tabel 2. 210	Pertumbuhan Ekonomi Se- Sumatera Triwulan I-2025	II-67

BAB III

Tabel 3. 1	PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	III-3
Tabel 3. 2	Laju Pertumbuhan dan sumber Pertumbuhan PDRB TW 1-2025.....	III-4
Tabel 3. 3	Struktur PDRB (ADHB) Provinsi Lampung TW I-2025 Menurut Pengeluaran (Persen)	III-6
Tabel 3. 4	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran (persen)	III-6
Tabel 3. 5	Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan April, 2025 (Persen)	III-9
Tabel 3. 6	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, April 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (2022=100).....	III-9
Tabel 3. 7	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (orang) Tahun 2025	III-19
Tabel 3. 8	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024	III-19
Tabel 3. 9	Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2019–2024 (Ribu Jiwa)	III-21
Tabel 3. 10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024.....	III-25
Tabel 3. 11	IPM dan Komponen IPM Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020-2024.....	III-28
Tabel 3. 12	Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2025.....	III-35
Tabel 3. 13	Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2023–2025 (Rupiah)	III-41
Tabel 3. 14	Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2025 (Rupiah).....	III-42
Tabel 3. 15	Realisasi Belanja Provinsi Lampung Tahun 2023–2025 (Rupiah).....	III-45
Tabel 3. 16	Realisasi dan Proyeksi Belanja Provinsi Lampung Tahun 2025 (Rupiah) ...	III-46
Tabel 3. 17	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2025	III-48
Tabel 3. 18	Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.....	III-48



BAB IV

Tabel 4. 2 Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung.....	IV-13
Tabel 4. 3 Keselarasan RPJMD 2025-2029, Prioritas Pembangunan Daerah 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2025.....	IV-25
Tabel 4. 5 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan RPJMD 2025-2029.....	IV-47
Tabel 4. 6 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	IV-53
Tabel 4. 7 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2024.....	IV-58

BAB V

Tabel 5. 1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2025 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2025.....	V-2
Tabel 5. 2 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung Tahun 2025	V-28
Tabel 5. 3 Alokasi Dukungan Pagu Per Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2025	V-43
Tabel 5. 4 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM sebelum dan sesudah Perubahan RKPD 2025	V-44
Tabel 5. 5 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025	V-57



DAFTAR GRAFIK

BAB II

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019-2024.....	II-4
Grafik 2. 2 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2024.....	II-6
Grafik 2. 3 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2024	II-6
Grafik 2. 4 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2015-2024.....	II-10
Grafik 2. 5 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, Maret 2024 – September 2024 (000 jiwa)	II-10
Grafik 2. 6 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017–2024 (Ribu Jiwa)	II-11
Grafik 2. 7 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota pada Maret 2024	II-12
Grafik 2. 8 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2024.....	II-13
Grafik 2. 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung.....	II-14
Grafik 2. 10 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2024.....	II-15
Grafik 2. 11 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera 2024.....	II-16
Grafik 2. 12 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan April, 2025 (Persen)	II-19
Grafik 2. 13 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2023 – 2024	II-21
Grafik 2. 14 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia.....	II-22
Grafik 2. 15 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021-2024	II-26
Grafik 2. 16 Perkembangan Ekspor Provinsi Lampung, Januari 2024-Maret 2025 (Juta US).....	II-29
Grafik 2. 17 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung samapai dengan Maret Tahun 2025.....	II-31

BAB III

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Lapangan Usaha	III-2
Grafik 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Pengeluaran	III-5
Grafik 3. 3 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2020- 2024 (ADHB, Juta Rupiah).....	III-11
Grafik 3. 4 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024.....	III-12
Grafik 3. 5 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung	
Grafik 3. 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia.....	III-13
Grafik 3. 7 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2024	III-14
Grafik 3. 8 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia	III-15
Grafik 3. 9 Struktur Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2024	III-16
Grafik 3. 10 Tingkat Pengangguran Februari 2022 – Februari 2024 Provinsi Lampung	III-17
Grafik 3. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung Tahun 2019-2024.....	III-17
Grafik 3. 12 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2019-2024	III-18
Grafik 3. 13 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2024	III-20
Grafik 3. 14 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia 2019-2024.....	III-21
Grafik 3. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung	III-22
Grafik 3. 16 IPM Lampung Tahun 2020 – 2024.....	III-23



Grafik 3. 17 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Lampung (tahun), 2020-2024	III-24
Grafik 3. 18 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Lampung, 2020-2024.....	III-26
Grafik 3. 19 Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan Lampung (ribu rupiah), 2020-2024.....	III-27
BAB IV	
Grafik 4. 8 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2024.....	IV-62



BAB I PENDAHULUAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan kerangka pendanaan pembangunan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) harus berpedoman kepada RKPD. Hal ini diperlukan guna menjamin kesinambungan antara proses perencanaan dengan penganggaran. Lebih lanjut, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pula bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

Dokumen RKPD Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan perencanaan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sekaligus tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Diharapkan tahun 2025 sebagai tahun transisi sehingga bisa menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pembangunan baik pusat, provinsi

dan kabupaten/kota dan memperkuat sinergi antar stakeholder pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025, merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional, maupun regional. Dampak berlangsungnya perang antara Rusia - Ukraina dan perubahan iklim secara tidak langsung menjadi ancaman resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara. Munculnya kebijakan fragmentasi global telah menciptakan disrupsi rantai pasok yang dapat meningkatkan risiko krisis pangan, energi dan keuangan dunia, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional hingga daerah. Hal ini turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan jalannya pembangunan termasuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 343 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- Penyesuaian target sasaran pembangunan yang telah tercapai.
- Penyesuaian target indikator makro ekonomi berdasarkan asumsi realisasi Triwulan-I Tahun 2025;
- Penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pelaksanaan pembangunan tahun berjalan;
- Penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang memiliki capaian rendah dan/atau capaiannya sudah terlampaui tinggi, sehingga dilakukan pergeseran anggaran antar program, kegiatan, dan subkegiatan untuk efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah; dan
- Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025 maka Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan arah kebijakan daerah mengacu pada Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 yaitu Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M dan dr. Jihan Nurlela, M.M. Visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Arah Strategis Nasional (Astacita) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian dan penguatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyesuaian ini merupakan bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional, melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor.

Dukungan diarahkan dalam berbagai agenda pembangunan strategis nasional, seperti peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

serta pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong optimalisasi peran sektor unggulan daerah, penguatan konektivitas antarwilayah, serta percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital.

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan perubahan pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dalam rangka memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen tersebut dapat dicapai, serta untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional terutama terkait substansi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, memperkuat Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan serta pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Selain itu juga dalam rangka dukungan terhadap kebijakan nasional yang akan diakomodir dalam perubahan RKPD Tahun 2025, hal tersebut sesuai dengan Pasal 343 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Tujuan

Memperhatikan dinamika pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menjaga konsistensi antara tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk:

- Memberikan gambaran atas perubahan asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 yang akan disusun;
- Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam struktur yang akan disusun dalam Perubahan APBD T.A 2025;

- Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika aspirasi masyarakat yang sejalan dengan permasalahan aktual dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah serta Prioritas pembangunan Nasional;
- Melakukan penyesuaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan prioritas melalui penajaman kegiatan/sub kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, pergeseran anggaran, dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
20. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Nomor 491);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
32. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029;
33. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

1.2. Tujuan

Menjelaskan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum

Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Menjelaskan sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II-2025.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan samapai denga Triwulan II-2025 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2025.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan I-2025, Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan I-2025, Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2025 Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2025 serta Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2025.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2025.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Menjelaskan Tema, Sasaran dan Prioritas Pembangunan berdasarkan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Prioritas Nasional 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Menjelaskan tinjauan kebijakan Pembangunan dalam RKP 2025 serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025.

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2025, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu usulan dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VI PENUTUP

Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025.



BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II-2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I-2025

2.1. Evaluasi RKPD s.d Triwulan I-2025

2.1.1. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan

Penetapan indikator makro pembangunan daerah dalam dokumen RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pembangunan selama satu tahun anggaran. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga agar target-target pembangunan dapat dicapai secara tepat waktu dan terukur, dilakukan evaluasi secara triwulanan. Evaluasi ini penting untuk menilai perkembangan capaian indikator, memahami pola pencapaian dari waktu ke waktu, serta memproyeksikan kemungkinan tercapainya target di akhir tahun. Melalui evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat merespon lebih cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan dan melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan.

Dalam rangka percepatan pembangunan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dilakukan upaya-upaya antara lain melalui upaya peningkatan produktivitas seluruh sektor. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pendekatan pembangunan melalui perencanaan program yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Hal ini penting agar pelaksanaan program dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD Tahun 2025 memungkinkan dilakukannya perubahan kebijakan dengan mempertimbangkan situasi aktual, serta kebutuhan pembangunan yang berkembang. Penyesuaian tersebut dapat mencakup pergeseran, penundaan atau penambahan kegiatan, maupun perubahan alokasi anggaran, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan daya ungkit program terhadap pembangunan daerah.

Sejalan dengan itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah hingga

Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi ini berguna untuk menilai efektivitas anggaran serta seberapa jauh kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan dan penyesuaian kebijakan pembangunan disisa tahun anggaran, guna memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan secara optimal.

Berikut kami sajikan data target sasaran makro pembangunan tahun 2025 Provinsi Lampung, beserta tingkat capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2025	Sasaran pada APBD 2025	Capaian s/d Tw I-2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 - 5.30	5,00 - 5.30	5,47 (Tw 1-2025)
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52.6-54.6	52.6-54.6	51,36 (2024)
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97	72,97	73,13 (2024)
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.0 - 3.86	4.0 - 3.86	4,07 (Feb 2025)
5	Tingkat Kemiskinan (%)	10.0 – 9,50	10.0 – 9,50	10,62 (Sept 2024)
6	Indeks Gini	0,318 – 0,321	0,318 – 0,321	0,301 (Sept 2024)
7	Inflasi (%)	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50	2,80 (April 2025)
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78	78	78,08 (2024)
9	Nilai Tukar Petani	116 - 117	116 - 117	127,90 (April 2025)
10	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,59	6,65	6,87 (2024)
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	13	13	15,86 (2024)

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, diolah 2025

Capaian indikator makro pembangunan Provinsi Lampung hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Dari sebelas indikator utama, delapan di antaranya telah mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan APBD 2025. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang mencapai

5,47%, melebihi batas atas target, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat sebesar 73,13, lebih tinggi dari target 72,97.

Selain itu, capaian positif juga terlihat pada Indeks Gini sebesar 0,301, menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,80% menandakan stabilitas harga yang terjaga, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127,90, jauh melampaui target, mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Kinerja keuangan daerah pun tercermin dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 6,87%. Sementara itu, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 15,86% menunjukkan komitmen Provinsi Lampung terhadap pembangunan berkelanjutan.

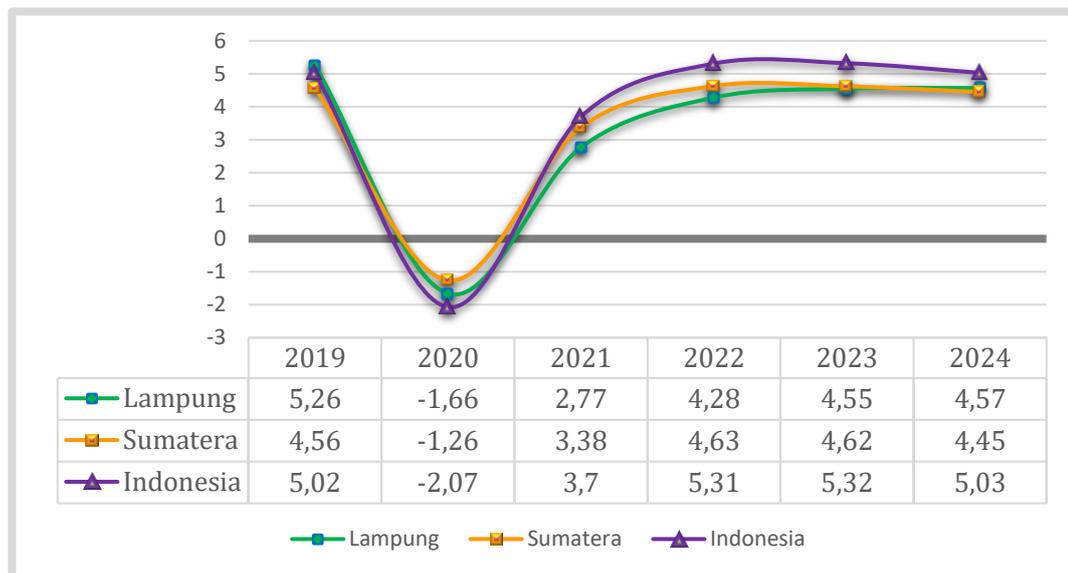
Namun demikian, masih terdapat tiga indikator yang belum mencapai target, yaitu PDRB per kapita ADHB yang berada di angka 51,36 juta rupiah, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,07%, dan tingkat kemiskinan sebesar 10,62%. Capaian ini menjadi perhatian bersama agar ke depan dapat diupayakan intervensi yang lebih efektif, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat tergambar beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 di Provinsi Lampung (c to c), tumbuh sebesar 4,57 persen, menguat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,55 persen. Secara spasial, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan regional Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05) dan Sumatera (4,45). Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada Tahun 2024 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp. 483.882,92 Miliar dan Rp. 281.557,20 Miliar.

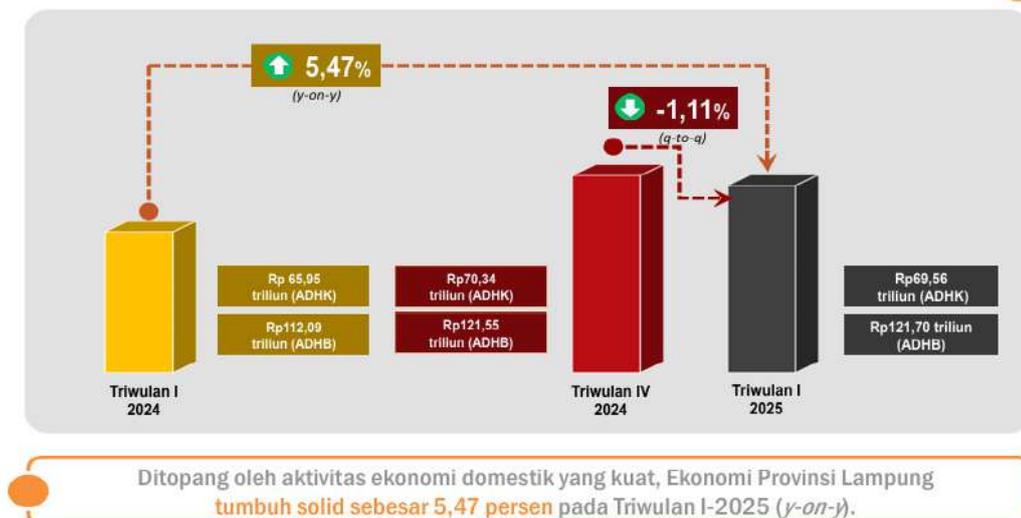
Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber : BPS Indonesia, 2024

Memasuki Triwulan I-2025, Ekonomi Provinsi Lampung membaik, mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen pada triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 mencapai Rp121.701,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,58 miliar.

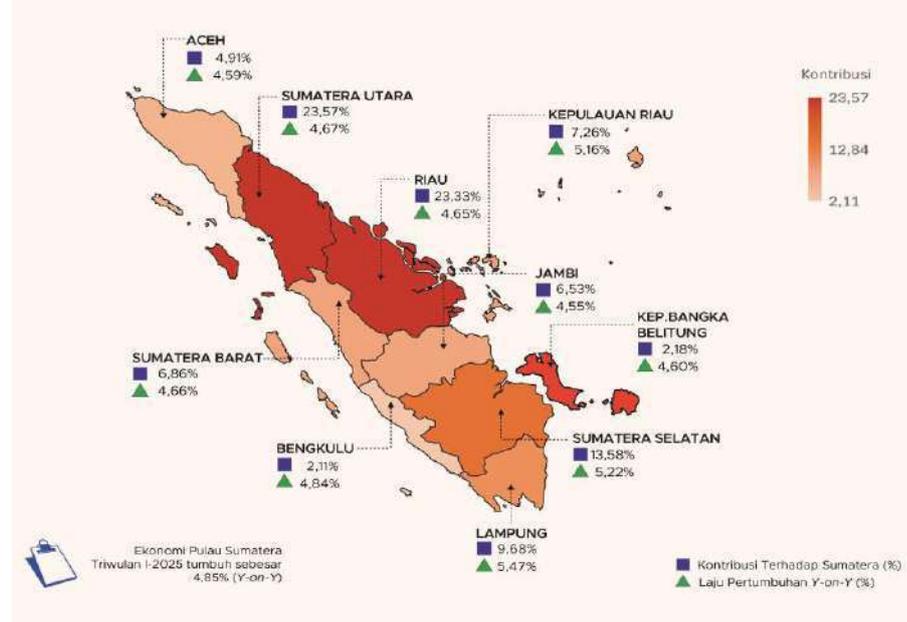
Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Indonesia Triwulan I-2025



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan wilayah regional Sumatera, seluruh provinsi mengalami pertumbuhan positif. Provinsi Lampung **mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 5,47 persen**, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau yang masing masing tumbuh sebesar 5,22 persen dan 5,16 persen.

Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Se- Sumatera Triwulan I-2025



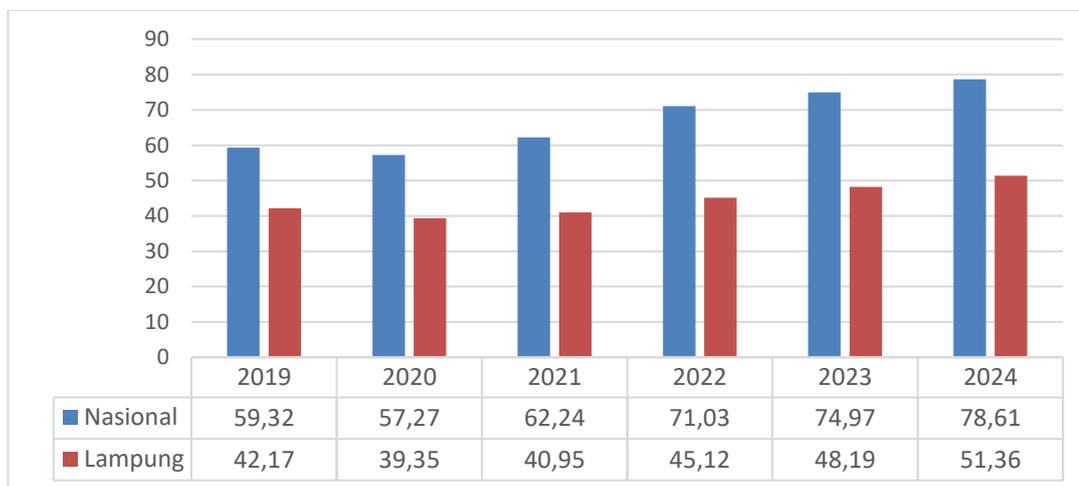
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

2. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita Provinsi Lampung periode 2019-2024 terus mengalami tren positif, meskipun pada masa Pandemi Covid 19 sedikit mengalami penurunan yang diakibatkan menurunnya aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, penurunan pendapatan perkapita menjadi Rp. 39 Juta pada Tahun 2020. Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp 51,36 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah

rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 78,61 Juta Rupiah pada tahun 2024.

Grafik 2. 2 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional 2019-2024

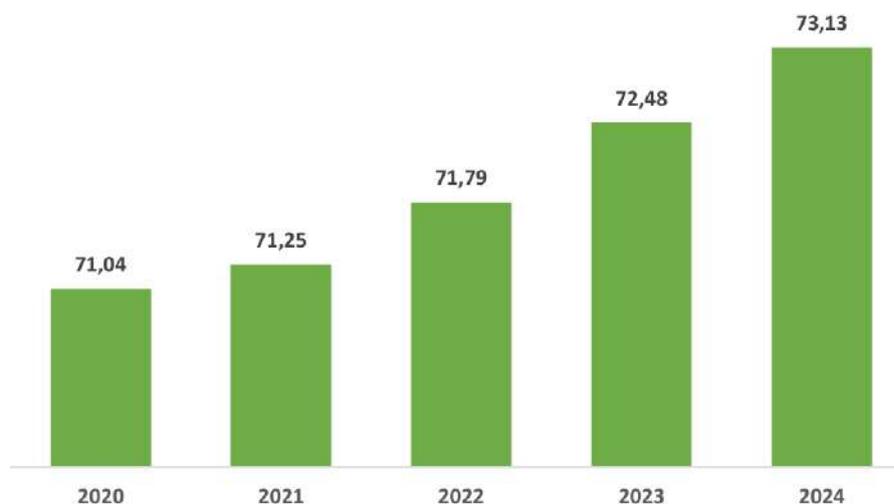


Sumber : BPS Indonesia, 2024

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,73 persen per tahun, dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 73,13 pada tahun 2024.

Grafik 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua peningkatan dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator ini mengalami percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya yaitu dapat dilihat dari peningkatan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,54 persen dibanding tahun sebelumnya 4,19 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) tidak terjadi perubahan dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 0,30 persen. Berbeda dengan dimensi pengetahuan, pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 terjadi perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1,34 persen menjadi 0,84 persen. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah terjadi perlambatan pertumbuhan dari 0,24 persen menjadi 0,08 persen pada tahun 2024. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,66	73,73	73,95	74,17	74,39
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,05	8,08	8,18	8,29	8,36
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.982	10.038	10.336	10.769	11.258
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,04	71,25	71,79	72,48	73,13

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Februari 2025, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,07 persen, mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan Februari 2024. Ini mencerminkan perbaikan akses terhadap kesempatan kerja di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 mencapai 5.085,87 ribu orang, meningkat sebanyak 41,83 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2024. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2025 mencapai 4.879,06 ribu orang, naik sebesar 42,73 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 2.291,00 ribu orang atau 46,96 persen dari total pekerja.

Selain itu, terdapat peningkatan dalam proporsi pekerja formal. Pada Februari 2025, sebanyak 1.434,47 ribu orang atau 29,40 persen bekerja di sektor formal, naik sebesar 1,90 persen poin dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah struktur ketenagakerjaan yang lebih stabil dan terlindungi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2024. TPak pada Februari 2025 sebesar 71,16 persen, turun 0,35 persen poin dibanding Februari 2024. TPak adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPak mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah/negara. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPak laki-laki sebesar 87,38 persen, lebih tinggi dibanding TPak perempuan yang sebesar 54,28 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPak laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,39 persen dan 0,27 persen poin.

Tabel 2. 3 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, 2023–2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Februari 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2024–Feb 2025	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	6.941,98	7.053,58	7.147,00	93,42	1,32
Angkatan Kerja	5.003,14	5.044,04	5.085,87	41,83	0,83
- Bekerja	4.794,03	4.836,33	4.879,06	42,73	0,88
- Pengangguran	209,11	207,70	206,80	-0,90	-0,43
Bukan Angkatan Kerja	1.938,84	2.009,54	2.061,13	51,60	2,57
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,07	71,51	71,16	-0,35	
- Laki-laki	88,39	87,76	87,38	-0,39	
- Perempuan	54,98	54,55	54,28	-0,27	

Sumber: BPS, 2024

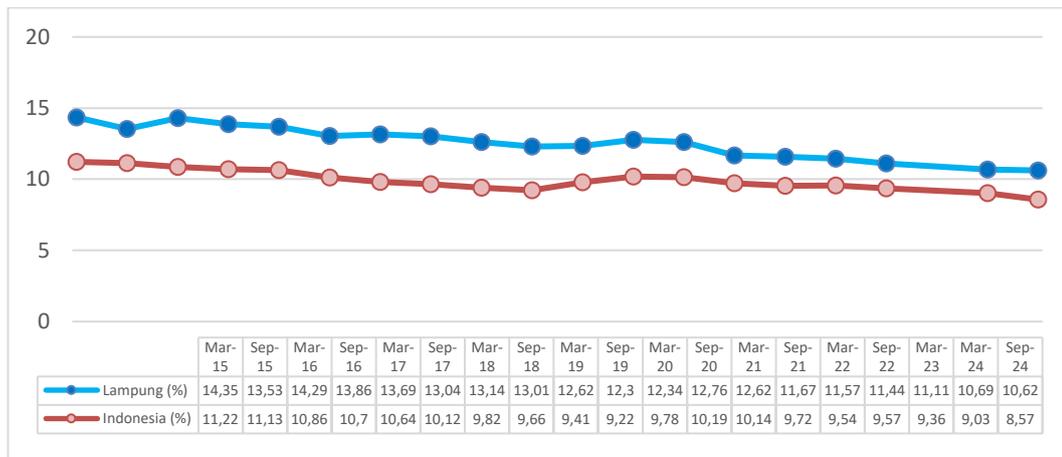
5. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan metode penghitungannya, bahwa tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan).

Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 10,69 pada bulan Maret 2024 menjadi 10,62 persen pada September 2024 (menurun 0,07 persen). Namun, angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 8,57 persen.

Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 939,30 ribu orang, menurun 1,9 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 31,37 ribu orang terhadap Maret 2023.

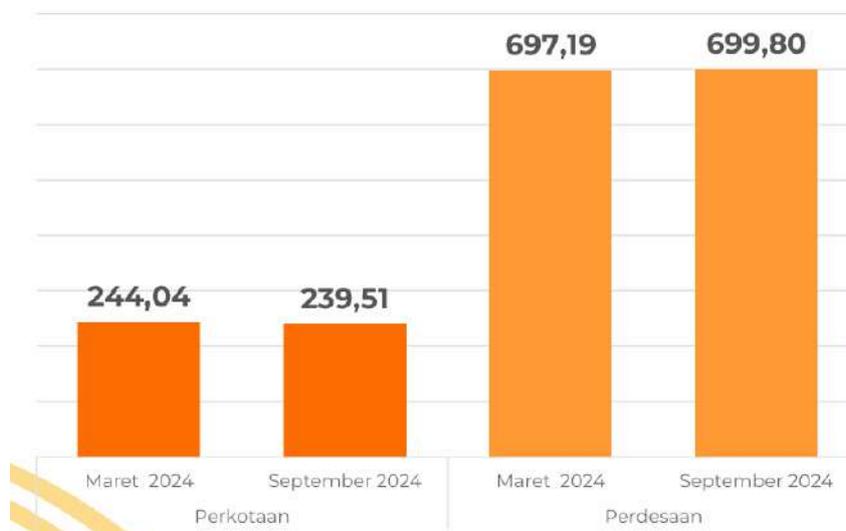
Grafik 2. 4 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2015-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Angka Kemiskinan di Pedesaan lebih besar dibandingkan Angka Kemiskinan di Perkotaan. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Pedesaan 12,04 persen (699,80 ribu orang) dan di Perkotaan sebesar 7,91 persen (239,51 ribu orang).

Grafik 2. 5 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Lampung, Maret 2024 – September 2024 (000 jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir tiga kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Grafik 2.5 menunjukkan pada September 2024 jika dibandingkan data pada Maret 2024, Pada periode Maret 2024–September 2024, penduduk miskin di perdesaan Naik sebanyak 2,6 ribu jiwa, sementara di perkotaan, jumlah penduduk miskin Turun sebanyak 4,5 ribu jiwa.

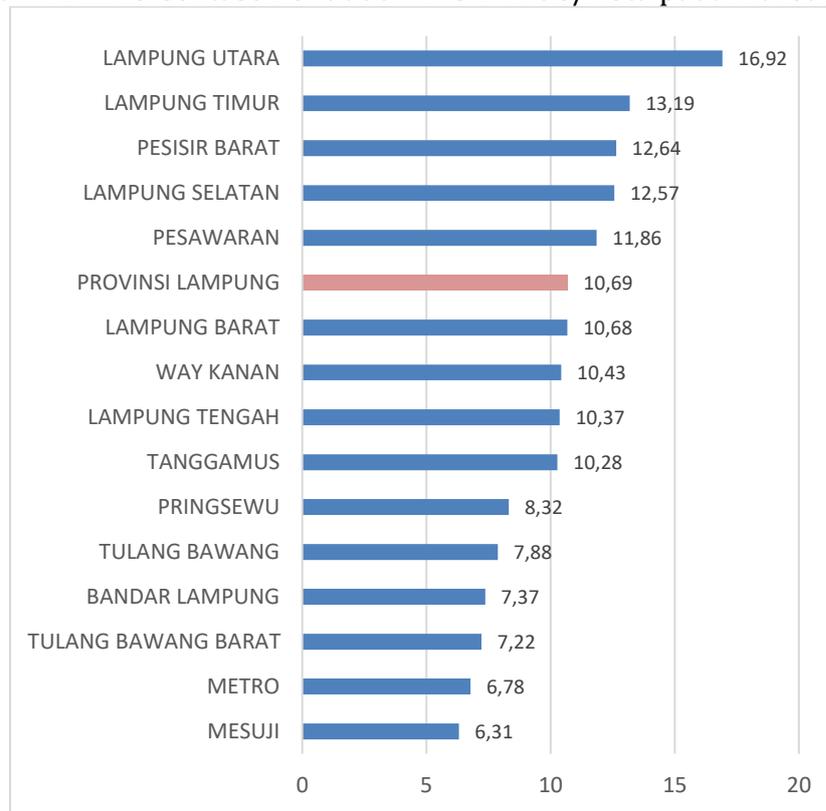
Grafik 2. 6 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2017–2024 (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Selanjutnya berdasarkan Garafik II-6, kondisi kemiskinan ditingkat Kabupaten/Kota juga harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, khususnya kabupaten yang angka kemiskinannya masih diatas rata-rata Provinsi Lampung. Terdapat 5 (lima) kabupaten yaitu : Kabupaten Lampung Utara (16,92 %), Kabupaten Lampung Timur (13,19 %), Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat (12,64%), Kabupaten Lampung Selatan (12,57%) dan Pesawaran (11,86 %).

Grafik 2. 7 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota pada Maret 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

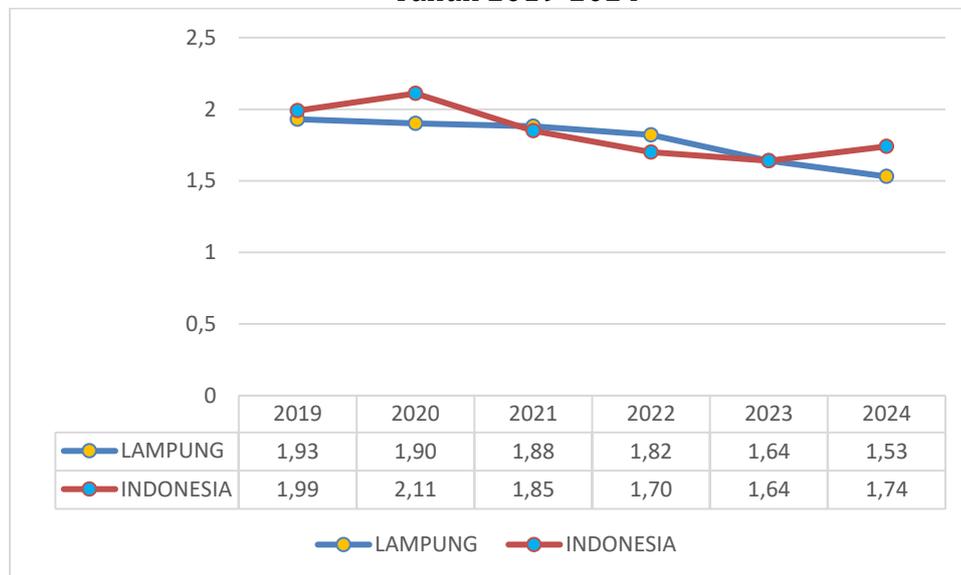
6. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi **Lampung cenderung menurun** dari 1,93 di tahun 2019 menjadi 1,53 pada Tahun 2024. Penurunan nilai P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi

Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada Tahun 2024 berada pada angka 1,74 menurun bila dibandingkan Tahun 2023 (1,64).

Grafik 2. 8 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2024

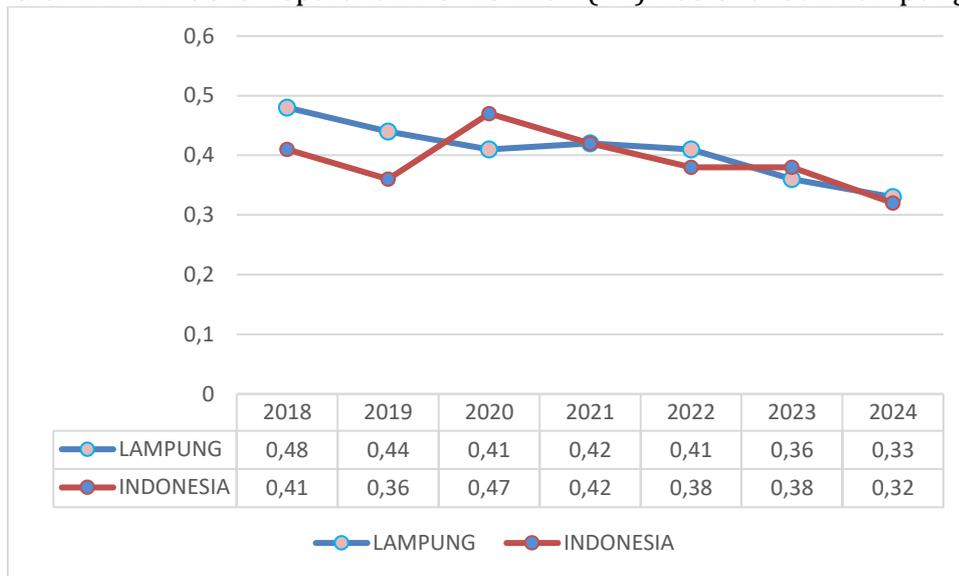


Sumber: BPS Susenas, 2024 diolah

7. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. **Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung cenderung menurun** dari 0,48 di Tahun 2018 menjadi 0,33 di Tahun 2024. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung masih lebih di atas Indeks P2 Nasional yang pada Tahun 2024 berada pada angka 0,32.

Grafik 2. 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

8. Gini Rasio

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Semakin besar nilai Gini Rasio, semakin tinggi tingkat ketimpangannya.

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Lampung adalah sebesar 0,302. Angka ini turun 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,324 dan turun 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,313. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung.

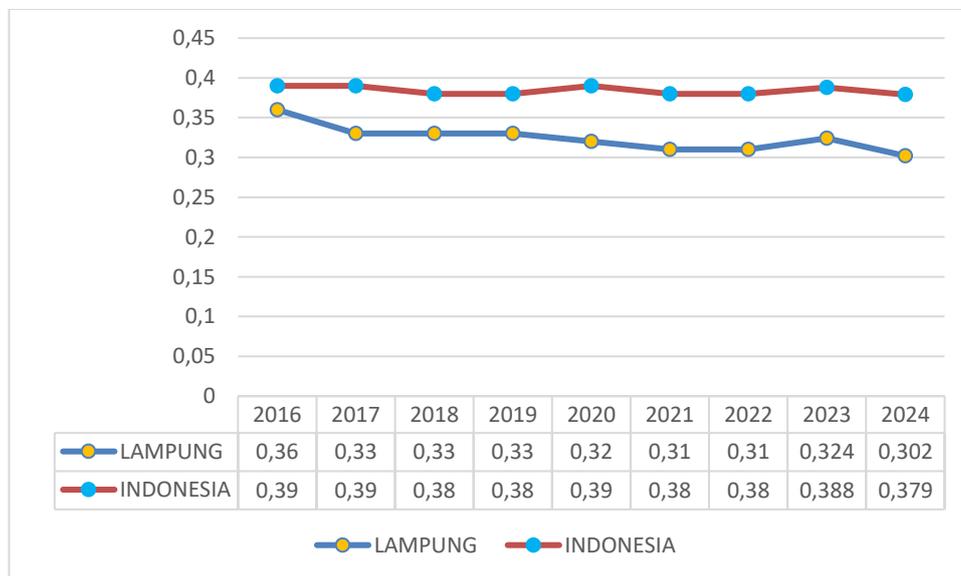
Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,323, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,359 dan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,352. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023

yang sebesar 0,287 dan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan Gini Ratio September 2022.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 22,12 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk Lampung pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,45 persen dan pedesaan sebesar 23,18 persen, yang berarti keduanya tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor (*crosscutting*), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

Grafik 2. 10 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016 – 2024

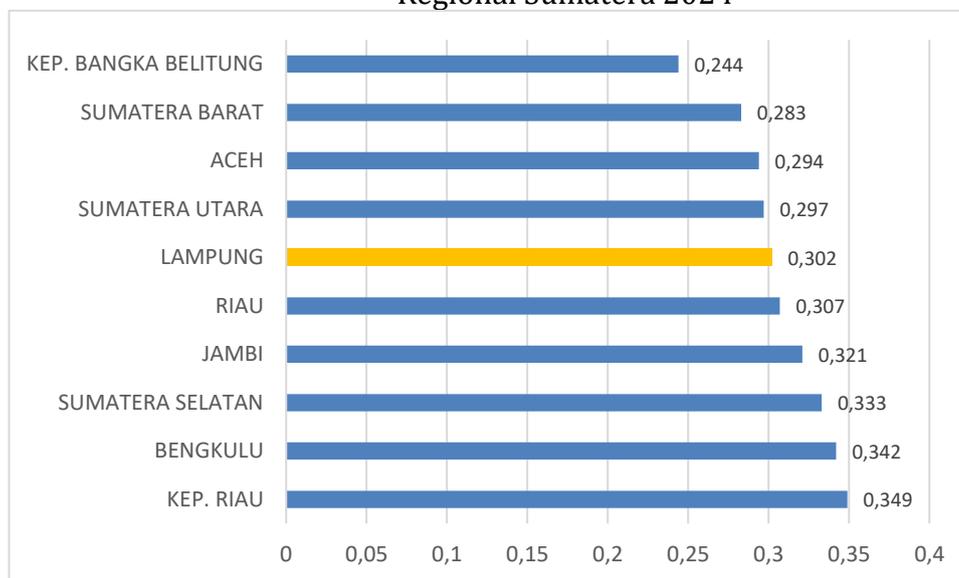


Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Secara regional Sumatera, ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dan menempati urutan 5

terendah bersama-sama Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Grafik 2. 11 Posisi Ketimpangan Pendapatan Provinsi Lampung Lingkup Regional Sumatera 2024



Sumber: BPS Indonesia, 2024 (diolah).

Di Provinsi Lampung, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung, dimana 60 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Timur serta 1 (satu) kota yaitu Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. 4 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Kabupaten	Kontribusi PDRB (%) kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi
1	Lampung Tengah	19,9%
2	Bandar Lampung	16,4%
3	Lampung Selatan	12,4%
4	Lampung Timur	11,7%
5	Lampung Utara	6,5%

No.	Kabupaten	Kontribusi PDRB (%) kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi
6	Tulang Bawang	6,3%
7	Pesawaran	4,4%
8	Tanggamus	4,3%
9	Way Kanan	3,9%
10	Tulang Bawang Barat	3,2%
11	Pringsewu	3,1%
12	Mesuji	2,9%
13	Lampung Barat	2,0%
14	Metro	1,7%
15	Pesisir Barat	1,3%

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024, diolah

9. Tingkat Inflasi

Pada April 2025, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 2,80 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,35. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 3,16 persen, dengan IHK sebesar 113,19 dan terendah terjadi Kota Metro sebesar 2,08 persen dengan IHK sebesar 107,96.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) April 2024 tercatat inflasi sebesar 1,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) April 2025 juga mengalami inflasi sebesar 1,77 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 1,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,39 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,48 persen; kelompok kesehatan 2,68 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 5,85 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,47 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 7,54 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang

mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu: kelompok transportasi 0,03 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,01 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain: emas perhiasan, bawang merah, akademi/ perguruan tinggi, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), cabai merah, bawang putih, minyak goreng, makanan hewan peliharaan, kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, sigaret kretek tangan (skt), sekolah menengah atas, bayam, cumi-cumi, santan jadi, nasi dengan lauk, beras, dan vitamin. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: daging ayam ras, tomat, jeruk, telur ayam ras, ayam hidup, sabun cair/cuci piring, bensin, telepon seluler, pengharum cucian/ pelembut, angkutan udara, tarif pulsa ponsel, ikan kembung, angkutan antar kota, makanan ringan/snack, tarif kendaraan roda 2 online, popok bayi sekali pakai/diapers, susu bubuk, sepatu anak, buku tulis bergaris, dan popok dewasa.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2025, antara lain: tarif listrik, bawang merah, tomat, emas perhiasan, bawang putih, vitamin, tahu mentah, beras, pembalut wanita, jeruk, kontrak rumah, cabai merah, pelicin/pewangi pakaian, santan jadi, sepatu anak, susu bubuk untuk balita, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), ikan lele, dan ice cream. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, bayam, tarif pulsa ponsel, bensin, tarif kendaraan roda 2 online, jagung manis, telepon seluler, semangka, salak, ketimun, shampo, wortel, obat gosok, cumi-cumi, minyak goreng, dan biskuit.

Pada April 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,48 persen; kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga

memberikan andil sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan memberikan andil sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil sebesar 0,10 persen; kelompok pendidikan memberikan andil sebesar 0,36 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,46 persen. Sebaliknya, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan andil sebesar 0,06 persen. Sedangkan kelompok transportasi tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi/deflasi y-on-y Provinsi Lampung.

Grafik 2. 12 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan April, 2025 (Persen)



Sumber: BPS, 2025

10. Kemantapan Jalan

Transportasi memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pengembangan wilayah. Di Provinsi Lampung, pembangunan sektor transportasi diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses terhadap pusat-pusat ekonomi yang masih

terisolasi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Namun, tantangan besar masih dihadapi, terutama pada aspek infrastruktur jalan. Tingkat kerusakan jalan yang mencapai 7–10% per tahun menjadi perhatian serius. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh beban kendaraan yang melebihi kapasitas, konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan standar kelas jalan, serta genangan air akibat sistem drainase yang tidak memadai. Kurangnya integrasi antara pembangunan jalan dan saluran drainase menjadi permasalahan krusial, tidak hanya di Lampung tetapi juga secara nasional. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, yang menyebabkan prioritas lebih diberikan pada peningkatan panjang jalan ketimbang kelengkapan infrastruktur pendukungnya.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, serta utilitas dasar wilayah. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan transportasi adalah tingkat kemantapan jalan provinsi. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana infrastruktur transportasi telah mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang secara terpadu dengan sistem transportasi nasional.

Tabel 2. 5 Kondisi Jalan Ruas Provinsi, 2015 – 2024

TAHUN	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)	KENAIKAN (%)
2015	67,02	32,98	1,97
2016	70,02	29,96	3,00
2017	77,04	22,96	7,02
2018	79,89	20,11	2,85
2019	74,41	25,58	-5,47
2020	75,92	24,08	1,51
2021	74	26	-1,92
2022	76,85	23,15	2,85
2023	78,67	21,33	1,82
2024	78,08	21,92	-0,59

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, 2025 diolah

Pada Tahun 2024 panjang jalan Provinsi Lampung sepanjang 1.695,479 Km. Kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat sepanjang 361,57 Km dan Kondisi baik serta sedang sepanjang 1.333,87 Km.

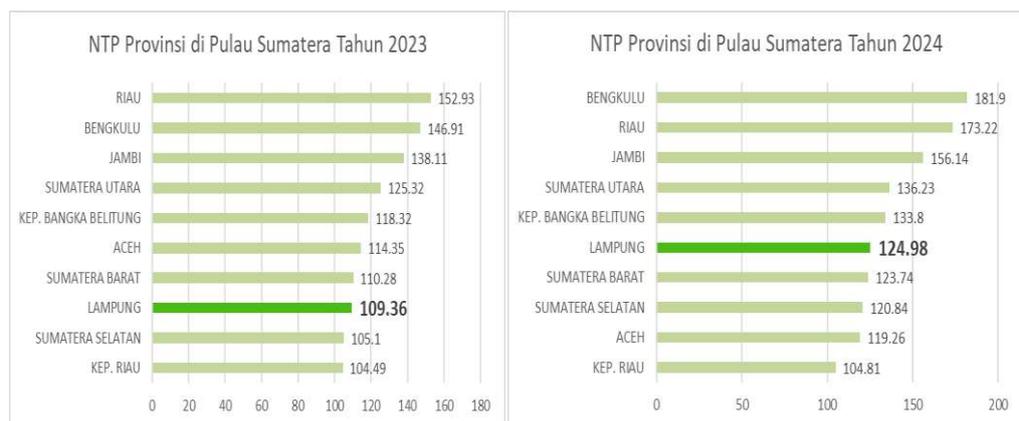
11. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di pedesaan. NTP juga menjadi indikator dari kesejahteraan pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif melambat.

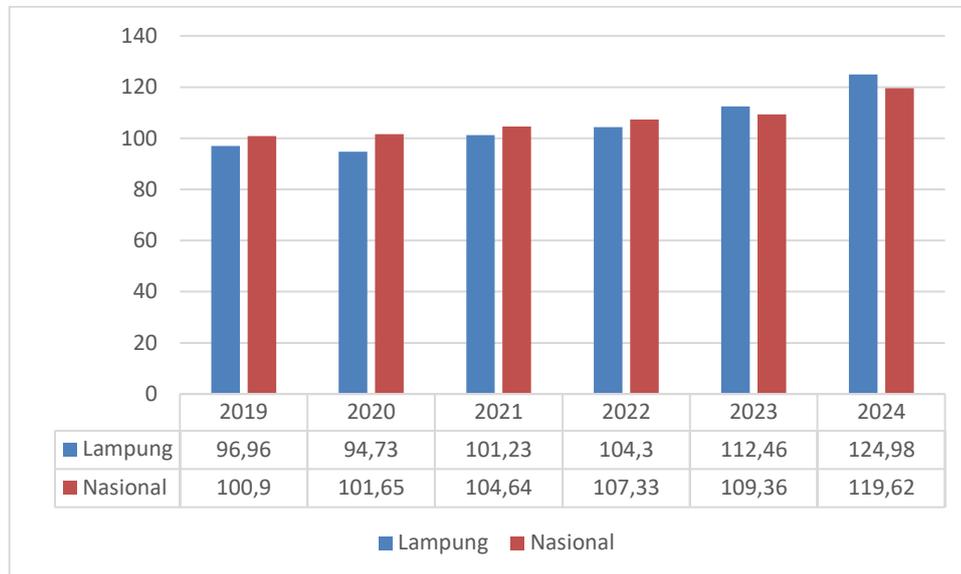
Di lingkup regional Sumatera, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2024 berada pada posisi ke 6 (enam) dengan nilai 124,98. Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang secara regional pada waktu itu berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin .

NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,22, Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 .

Grafik 2. 13 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2023 - 2024



Grafik 2. 14 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2019-2024

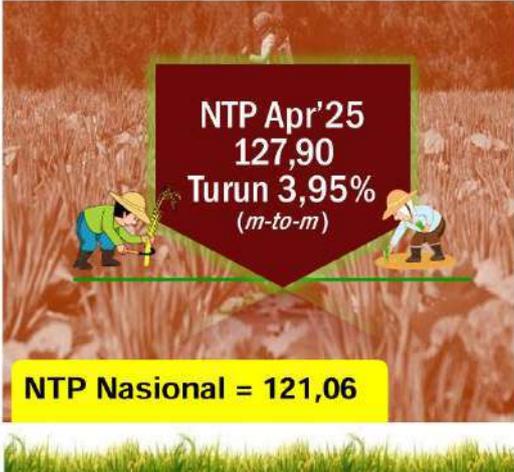


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

(Penghitungan NTP sejak tahun 2020 dst menggunakan tahun dasar 2018=100, dimana terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100).

NTP Provinsi Lampung April 2025 untuk masing-masing subsektor tercatat Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) (100,16), Tanaman Hortikultura (NTP-H) (118,72), Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) (170,39), Peternakan (NTP-Pt) (99,62), Perikanan Tangkap (113,82), dan Perikanan Budidaya (95,70).

Tabel 2. 6 Capaian Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung April 2025



NTP Subsektor	Maret 2025	April 2025	Perubahan (%)
Tanaman Pangan	104,50	100,16	↓ -4,16
Hortikultura	111,40	118,72	↑ 6,56
Tanaman Perkebunan Rakyat	180,16	170,39	↓ -5,42
Peternakan	100,31	99,62	↓ -0,69
Perikanan			
✓ Tangkap	113,53	113,82	↑ 0,26
✓ Budidaya	96,70	95,70	↓ -1,04
NTP	133,17	127,90	↓ -3,95

Sumber : BPS, 2024

12. Persentase Peningkatan PAD (%)

Momentum pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dilakukan melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang jelas untuk mulai mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan. Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBP.

Tabel 2. 7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2020	2.962.401.653.051,14	2.842.286.479.070,36	95,95%
2021	3.336.257.494.574,50	3.249.669.847.265,05	97,40%
2022	3.784.650.845.884,74	3.678.302.294.580,71	97,19%
2023	4.808.699.109.382,17	3.779.539.366.740,31	78,60%
2024	5.150.954.989.413,04	4.039.218.171.476,78	78,42%

Sumber : Bapenda Provinsi Lampung, 2025

Pada Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan hanya tercapai 78,42% dibandingkan target yang telah disepakati. Namun, jika dibandingkan tahun 2023, capaian realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,87%.

Berdasarkan laporan capaian pendapatan dan belanja per Mei 2025, Pemerintah Provinsi Lampung, telah merealisasikan pendapatan sebesar 2,2 Triliun atau 30,23% secara keseluruhan dan Belanja sebesar 24,62%. Secara keseluruhan dengan memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan belanja diluar Kas Daerah (*Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Mei 2025*).

13. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

Intensitas emisi GRK menunjukkan banyaknya emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu negara. Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan PRK, yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output aktivitas ekonomi negara menggunakan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010. Tahun 2010 dijadikan tahun dasar perhitungan PDB oleh Badan Pusat Statistik, mengacu pada rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) dalam penyusunan PDB. Persentase penurunan intensitas emisi GRK mengukur ketercapaian strategi pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Persentase penurunan intensitas emisi GRK diperhitungkan dari perbandingan selisih intensitas emisi GRK dengan intensitas emisi baseline (tahun dasar 2010). Semakin kecil intensitas emisi GRK, mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi yang menurun menandakan

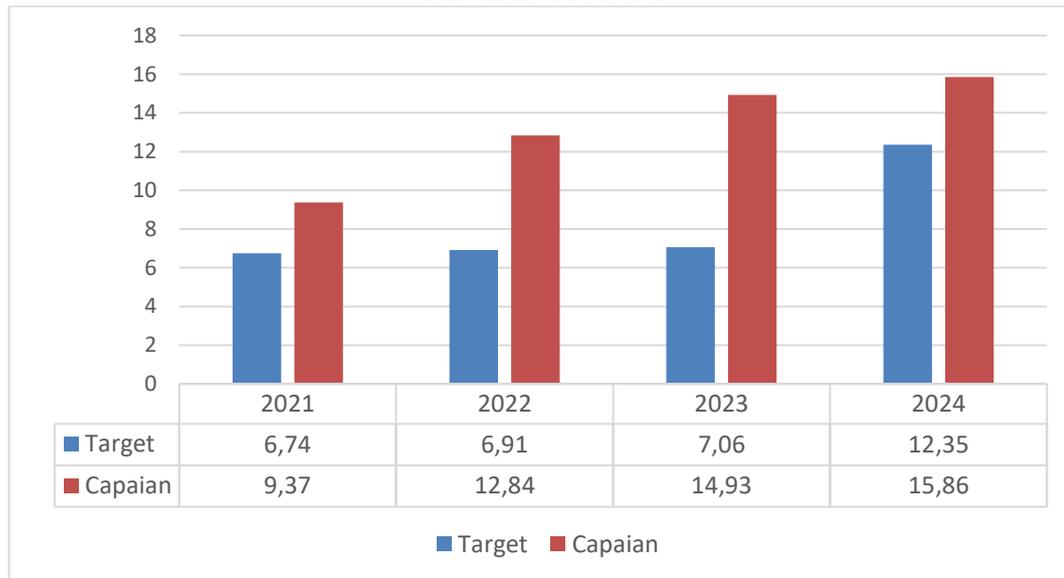
aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Penanganan perubahan iklim dan bencana telah mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung. Sejalan dengan komitmen Persetujuan Paris pada Conference of Parties (COP) 21 UNFCCC tahun 2015, Indonesia terus mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Demikian juga dengan Provinsi Lampung telah mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total Business As Usual/BAU Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton CO₂e. Terbaru, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan telah menentukan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 8,40% berdasarkan Business As Usual (BAU) baseline tahun 2030. Dengan target penurunan sebesar 8,40% pada tahun 2030, maka besar emisi yang direncanakan dapat diturunkan pada tahun 2030 yakni sebesar 2.320.958,83 ton CO₂e dari skenario BAU baseline 27.629.786,24 ton CO₂e. Kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Lampung berhasil memberikan penurunan emisi kumulatif 2010-2023 Provinsi Lampung sebesar 5,59 ton CO₂eq dengan persentase 14,93%.

Sejak tahun 2011 - 2016 dalam implementasi RAN/RAD-GRK hanya terdapat satu indikator kesuksesan yang diukur, yaitu nilai penurunan emisi GRK. Namun, sejak tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas menambahkan satu indikator baru, yaitu penghitungan nilai Intensitas Emisi (IE) GRK yang didefinisikan sebagai jumlah emisi GRK (CO₂e) per satuan output ekonomi (miliar rupiah Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) pada jangka waktu dan wilayah tertentu. Perilaku Intensitas Emisi dalam kurun waktu tertentu dapat menggambarkan relasi kecepatan peningkatan emisi terhadap laju

pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula yang ditangkap dalam aplikasi penerus PEP RAD GRK yakni AKSARA atau Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rendah Karbon Indonesia.

Grafik 2. 15 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021-2024



Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2025,diolah

Selain data Makro Pembangunan diatas, terdapat beberapa data sektoral yang dapat menggambarkan perkembangan capaian pembangunan antara lain: Perkembangan transportasi dapat menggambarkan mobilitas orang dan barang yang ada di suatu wilayah.

Perkembangan Transportasi pada Maret 2025

Jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Lampung pada Maret 2025 sebanyak 71.065 orang, naik sebesar 6,62 persen bila dibandingkan Februari 2025 yaitu sebanyak 66.654 orang.

Jumlah penumpang kapal ferry yang berangkat melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung pada Maret 2025 tercatat sebanyak 32.037 orang, turun sebesar 37,61 persen jika dibandingkan Februari 2025 sebesar 51.348 orang.

Barang yang dimuat melalui Pelabuhan Panjang pada Maret 2025 tercatat sebanyak 3.490.178 ton, naik sebesar 24,04 persen dibandingkan Februari 2025 sebesar 2.813.647 ton. Selanjutnya barang yang dibongkar pada Maret 2025 sebanyak 1.846.491 ton mengalami kenaikan hingga 97,19 persen dibandingkan Februari 2025 sebanyak 936.395 ton.

Penumpang pesawat udara yang berangkat dari Bandara Radin Inten II pada Maret 2025 sebanyak 38.757 orang, mengalami penurunan sebesar 13,43 persen jika dibandingkan Februari 2025 sebanyak 44.767 orang. Penumpang pesawat udara yang datang di Bandara Radin Inten II pada Maret 2025 sebanyak 48.858 orang, naik sebesar 9,44 persen dibandingkan dengan Februari 2025 sebanyak 44.642 orang.

Tabel 2. 8 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Kereta Api, Kapal Ferry dan Pesawat Udara di Provinsi Lampung

Uraian	Keberangkatan Penumpang			% Perubahan Bulan n. n-1	% Perubahan Tahun n. n-1
	Maret 2024	Februari 2025	Maret 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kereta Api	79.268	66.654	71.065	6,62	-10,35
Kapal Ferry	31.439	51.348	32.037	-37,61	1,90
Pesawat Udara	37.602	44.767	38.757	-13,43	3,07
Jumlah	148.309	162.769	141.859	-12,85	-4,35

Sumber : BPS, 2025

Perkembangan Pariwisata Provinsi Lampung

Nilai Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan aktivitas perekonomian, mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas sektor pariwisata.

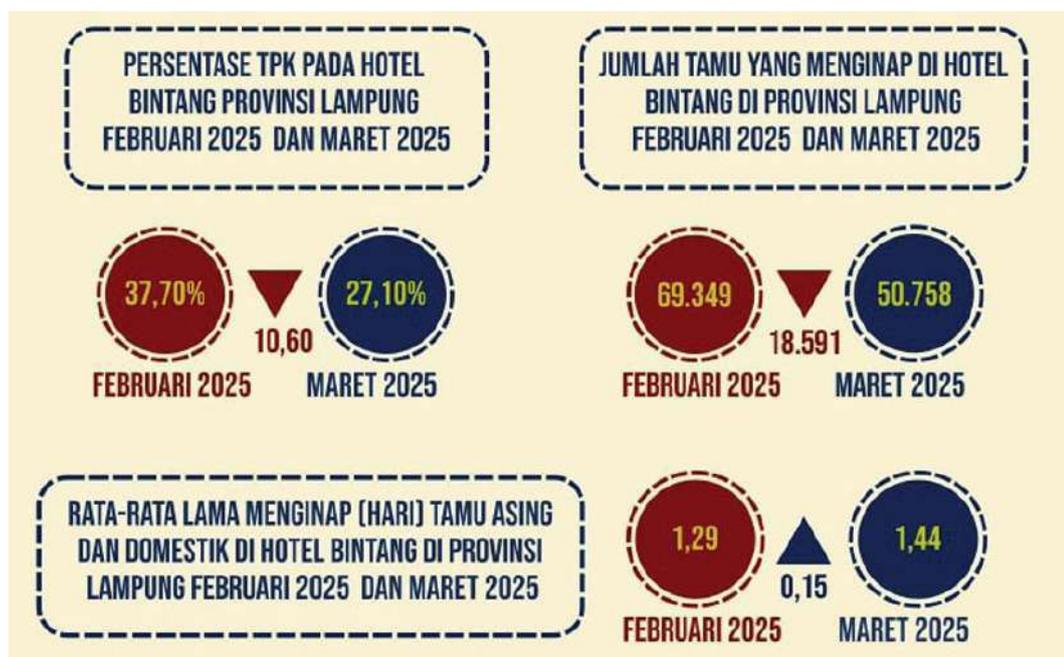
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Lampung pada Maret 2025 tercatat 27,10 persen, turun 10,60 poin dibanding TPK hotel pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 37,70 persen. Bila

dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2024, TPK hotel berbintang turun sebesar 9,64 poin.

Jumlah tamu selama Maret 2025 yang menginap di hotel berbintang mencapai 50.758 orang tamu, terdiri dari 430 orang tamu asing dan 50.328 orang tamu domestik. Kondisi ini mengalami penurunan sebanyak 18.591 orang tamu (26,81 persen) dibandingkan Februari 2025 yang tercatat 69.349 orang tamu.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) pada hotel berbintang di Provinsi Lampung bulan Maret 2025 tercatat 1,44 hari, naik 0,15 hari dibanding RLMT hotel berbintang pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 1,29 hari.

Gambar 2. 3 Perkembangan Tingkat Penghunian kamar Hotel Berbintang, Jumlah Tamu Menginap dan Rata-rata Lama Menginap Provinsi Lampung Maret 2025



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2025.

Perkembangan Ekspor dan Impor

Perkembangan perdagangan luar negeri yang ada di Provinsi Lampung digambarkan dengan nilai ekspor dan impor. Nilai ekspor Provinsi Lampung pada Maret 2025 mencapai US\$578,05 juta, mengalami peningkatan sebesar US\$60,11 juta atau naik 11,61 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencapai US\$517,93 juta. Nilai impor Provinsi Lampung pada Maret 2025 mencapai US\$165,95 juta, mengalami penurunan sebesar US\$117,67 juta atau turun 41,49 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencapai US\$283,62 juta.

Sepuluh golongan barang utama ekspor Provinsi Lampung pada Maret 2025 adalah lemak dan minyak hewan/nabati; kopi, teh, rempah-rempah; bahan bakar mineral; ampas dan sisa industri makanan; olahan dari sayuran, buah, dan kacang; pulp dari kayu; berbagai produk kimia; karet dan barang dari karet; kayu, barang dari kayu; serta ikan, krustasea, dan moluska. Negara utama tujuan ekspor Provinsi Lampung pada Maret 2025 adalah Amerika Serikat, India, Pakistan, Belanda, Inggris, Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, Philipina, dan Selandia Baru. Ekspor menurut sektor selama sebulan terakhir menunjukkan semua sektor mengalami peningkatan, sektor industri pengolahan naik sebesar 15,94 persen; sektor pertambangan dan lainnya naik sebesar 4,40 persen; serta sektor pertanian naik sebesar 3,68 persen.

Grafik 2. 16 Perkembangan Ekspor Provinsi Lampung, Januari 2024-Maret 2025 (Juta US\$)



Sumber : BPS, 2025

Nilai impor Provinsi Lampung pada Maret 2025 mencapai US\$165,95 juta, mengalami penurunan sebesar US\$117,67 juta atau turun 41,49 persen dibandingkan Februari 2025 yang tercatat US\$283,62 juta. Nilai impor Maret 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar US\$165,86 juta atau turun 49,99 persen jika dibanding Maret 2024 yang tercatat US\$331,81 juta. Negara pemasok barang impor ke Provinsi Lampung pada Maret 2025 adalah Angola US\$68,27 juta; Amerika Serikat US\$16,71 juta; Brazil US\$16,28 juta; Australia US\$14,60 juta; Uni Emirat Arab US\$13,44 juta; Tiongkok US\$7,70 juta; Italia US\$7,39 juta; Kanada US\$4,73 juta; Singapura US\$3,53 juta; dan Fed Russia US\$2,71 juta. Nilai impor pada Maret 2025 dibanding Februari 2025 untuk bahan baku/ penolong turun 44,75 persen dan barang modal turun sebesar 28,99 persen, sedangkan barang konsumsi naik sebesar 984,61 persen.

Neraca Perdagangan.

Nilai ekspor Provinsi Lampung pada Maret 2025 mencapai US\$578,05 juta, lebih tinggi dari nilai impor Maret 2025 sebesar US\$165,95 juta. Kondisi ini menjelaskan bahwa neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada Maret 2025 mengalami surplus sebesar US\$412,09 juta.

Surplus neraca perdagangan Provinsi Lampung pada Maret 2025 diperoleh dari kelompok negara lainnya US\$278,81 juta, negara yang tergabung dalam Uni Eropa sebesar US\$58,96 juta, serta kelompok negara ASEAN sebesar US\$52,26 juta.

Grafik 2. 17 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung sampai dengan Maret Tahun 2025.



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2025.

2.1.2. Kinerja RKPД Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Sesuai dengan Permendagri 86/2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPД, disebutkan bahwa Perubahan RKPД disusun berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPД Tahun berkenaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini disampaikan evaluasi hasil RKPД Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Dengan evaluasi ini nantinya akan diketahui capaian realisasi keuangan dan fisik dari masing masing Perangkat Daerah (PD) selama Triwulan II Tahun 2025.

Realisasi keuangan dan fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2. 8 Evaluasi hasil pelaksanaan Progam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I-2025

NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6 *100%		16
6	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN								0,29	248.266.765.166,00															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	6.766.944.681.509,00	100	1.161.224.708.595,00	100	1.506.770.135.339,00	0,94	248.266.765.166,00							0,94	248.266.765.166	100,94	1.409.491.473.761	100,94	20,83	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA, SMK, dan SLB yang berakreditasi minimal B	100	3.050.018.342.057,36	73	116.122.470.895	100	604.461.120.942,50	0	0,00							0,00	0	73,00	116.122.470.895	73,00	3,81	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik jenjang pendidikan menengah dan khusus	69,65	14.248.547.309,00	50	5.935.634.900	60,50	2.405.179.320,00	0	0,00							0,00	0	50,00	5.935.634.900	71,79	41,66	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN								23,82	154.767.779.424,90															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	540.595.975.403,00			100	71.165.717.369,85	12,06	8.579.920.690,00							12,06	8.579.920.690	12,06	8.579.920.690	12,06	1,59	Dinas Kesehatan		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	95	1.333.126.338.351,04	85,10	151.202.984.442	95	163.402.260.971,54	17,37	38.014.250.514,00							17,37	38.014.250.514	102,47	189.217.234.956	107,86	14,19	Dinas Kesehatan		



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
		KESEHATAN MASYARAKAT																						
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	53	25.394.193.215,00	44,55	1.170.093.772	53	1.075.263.000,00	40,37	0,00							40,37	0	84,92	1.170.093.772	160,23	4,61	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100	2.586.500.000,00	100	191.966.840	100	65.000.000,00	0	0,00							0,00	0	100,00	191.966.840	100,00	7,42	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota dengan minimal 80% posyandu Aktif	100	3.453.517.187,00			100	237.000.000,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (RSUAM)	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	195	479.778.663.235,00	0	0	100	550.887.740.829,78	89,22	94.760.874.511,00							89,22	94.760.874.511	89,22	94.760.874.511	45,75	19,75	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelek
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUAM)	Persentase terlaksananya program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	2.500.000.000,00	0	0	100	2.500.000.000,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelek
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (RSJ)	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah	193	74.886.772.860,00	95,83	51.499.189.955	100	50.663.487.426,03	31,55	13.412.733.709,90							31,55	13.412.733.710	127,38	64.911.923.665	66,00	86,68	Rumah Sakit Jiwa Daerah
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSJ)	Persentase terlaksananya program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	428	4.181.841.777,00	87,50	1.964.327.239	100	10.431.257.974,80	0	0,00							0,00	0	87,50	1.964.327.239	20,44	46,97	Rumah Sakit Jiwa Daerah



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSJ)	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	90	759.214.384,00	100	451.532.796	100	338.862.800,00	0	0,00					0,00	0	100,00	451.532.796	111,11	59,47	Rumah Sakit Jiwa Daerah		
19	Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								3,09	139.769.423.826,63													
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Penduduk berakses Air minum layak	5	9.442.295.642,00	200	13.782.689.526	100	2.492.295.642,00	0	21.499.800,00					0,00	21.499.800	200,00	13.804.189.326	4.000,00	146,20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan kumuh	6	6.127.750.864,00	100	2.395.937.586	100	1.377.750.864,00	0	9.500.000,00					0,00	9.500.000	100,00	2.405.437.586	1.666,67	39,25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	6	8.770.109.968,04	300	3.590.954.319	100	1.720.109.968,04	0	23.999.600,00					0,00	23.999.600	300,00	3.614.953.919	5.000,00	41,22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung provinsi dan lingkungannya yang sesuai standar	195	488.919.576.888,17	245,83	225.298.749.524	100	80.121.804.211,00	0	1.836.585.832,00					0,00	1.836.585.832	245,83	227.135.335.356	126,07	46,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	12	253.683.307.870	2.700	39.802.296.951	100	24.672.564.469,00	0	99.409.706,00					0,00		2.700,00		22.500,00				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Meningkatkan pengaturan dan	68	24.841.980.569,25	100	12.642.307.307	100	6.937.116.609,25	0	46.362.000,00					0,00	46.362.000	100,00	12.688.669.307	147,06	51,08	Dinas Perumahan		



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16
		PENATAAN RUANG	pemanfaatan tata ruang																					Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (PKPCK)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,052	138.600.028.350,62	99	37.291.068.084	100	18.101.161.805,62	18,15	2.022.958.931,00							18,15	2.022.958.931	116,76	39.314.027.015	5,69	28,37	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pendataan rumah	14	2.270.569.500	0	0	100	120.569.500,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	15	832.546.500,00	100	808.345.990	100	832.546.500,00	0	0,00							0,00	0	100,00	808.345.990	666,67	97,09	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		PROGRAM PENATAGUNAHAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	19	11.106.013.827,63	100	1.418.149.235	100	1.819.137.086,63	0	470.964.986,63							0,00	470.964.987	100,00	1.889.114.221	526,32	17,01	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
15	Meningkatkan Kualitas Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BMBK)	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,537	52.831.296.304,05	95,83	49.235.118.243	100	52.831.296.304,05	1,21	8.692.532.160,00							1,21	8.692.532.160	97,04	57.927.650.403	6,31	109,65	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	100	975.016.980.881,84	92,23	471.796.118.093	100	975.016.980.881,84	10,97	106.913.889.716,00							10,97	106.913.889.716	103,20	578.710.007.809	103,20	59,35	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	100	1.960.091.900,00	100	3.865.908.051	100	68.925.560,00	0	0,00							0,00	0	100,00	3.865.908.051	100,00	197,23	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
18	Meningkatnya	PROGRAM PENUNJANG	Persentase Pelaksanaan	474	73.003.996.218,00	0	0	100	55.557.747.925,00	19,05	7.992.429.155,00							19,05	7.992.429.155	19,05	7.992.429.155	4,02	10,95	Dinas Pengelola



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	199,54	207.255.044.575,00	95,75	155.642.354.648	100	146.537.737.636,55	0	11.639.291.940,00					0,00	11.639.291.940	95,75	167.281.646.588	47,99	80,71	Sumber Daya Air		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi																			Dinas Pengelola Sumber Daya Air		
19	Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								0	198.406.098.833,98													
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Perumahan	1.161	72.512.175.883,00	44,25	33.327.725.568	100	13.360.875.883,00	0	1.400.836.060,00					0,00	1.400.836.060	44,25	34.728.561.628	3,81	47,89	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan kumuh	2.850	1.073.732.828.967,98	355,77	276.483.880.394	100	197.005.262.773,98	0	197.005.262.773,98					0,00	197.005.262.774	355,77	473.489.143.168	12,48	44,10	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		
32	Meningkatnya stabilitas dan keamanan daerah	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								9,58	13.400.624.122,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (SATPOL PP)	PERSENTASE LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	738	56.653.115.000,00	80,58	45.398.719.686	100	53.611.972.240,63	4,71	8.387.976.620,00					4,71	8.387.976.620	85,29	53.786.696.306	11,56	94,94	Satuan Polisi Pamong Praja		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	193	4.243.251.500,00	83,07	1.653.272.993	100	2.035.299.035,00							0,00	0	83,07	1.653.272.993	43,04	38,96	Satuan Polisi Pamong Praja		



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6*100%		16
		AN DAN KETERTIBAN UMUM	KETERTIBAN UMUM																					
21	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BPBD)	PERSENTASE LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	810	13.668.354.586,00	100	11.269.465.179	100	10.620.642.096,00	12,57	1.140.009.712,00							12,57	1.140.009.712	112,57	12.409.474.891	13,90	90,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Daerah terhadap Penanggulangan Bencana sesuai target dan ketentuan yang berlaku, Upaya Penyelamatan Korban Bencana melalui tanggap darurat serta Penyediaan Logistik, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasc	2,993	49.064.706.343,00	86	28.822.748.381	100	37.519.616.570,00	11,47	3.872.637.790,00							11,47	3.872.637.790	97,47	32.695.386.171	3,26	66,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi Masyarakat miskin									15,00	849.531.361,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	252.743.655,00	100	22.061.760.430	100	16.778.320,00	25	4.280.000,00							25,00	4.280.000	125,00	22.066.040.430	125,00	8.730,60	Dinas Sosial
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten/Kota	100	208.194.250,00	0	0	100	267.827.460,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak	100	968.100.658,00	100	246.956.500	100	176.808.418,00	20	3.344.000,00							20,00	3.344.000	120,00	250.300.500	120,00	25,85	Dinas Sosial



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
		MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kekerasan Asal Lampung yang Tertangani																					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Dilayani dan diRehabilitasi di dalam panti	100	50.476.092.478,00	100	7.591.761.942	100	7.213.398.725,85	20	795.520.361,00							20,00	795.520.361	120,00	8.387.282.303	120,00	16,62	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100	4.069.314.525,00	91,90	1.008.086.000	100	626.887.470,00	20	10.500.000,00							20,00	10.500.000	111,90	1.018.586.000	111,90	25,03	Dinas Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	25.389.289.785,00	100	4.962.734.680	100	14.959.703.143,10	20	35.887.000,00							20,00	35.887.000	120,00	4.998.621.680	120,00	19,69	Dinas Sosial
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	100	18.585.730.987,00	100	337.789.000	100	262.848.100,00	0	0,00							0,00	0	100,00	337.789.000	100,00	1,82	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja									0,70	5.932.847.557,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	2,46 0	40.346.881.227,00	80,83	79.023.962.539	100	28.248.781.475,65	4,17	5.932.847.557,00							4,17	5.932.847.557	85,00	84.956.810.096	3,46	210,57	Dinas Ketenaga Kerjaan
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	155	1.125.000.000,00	50	345.505.497	100	119.281.880,00	0	0,00							0,00	0	50,00	345.505.497	32,26	30,71	Dinas Ketenaga Kerjaan
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Bersertifikat	7,68 0	59.750.000.000,00	37,50	6.381.707.401	100	10.335.000.000,00	0	0,00							0,00	0	37,50	6.381.707.401	0,49	10,68	Dinas Ketenaga Kerjaan
		PROGRAM PENEMPATAN	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Yang	5,48 5	6.810.000.000,00	32,78	955.621.900	100	415.008.000,00	0	0,00							0,00	0	32,78	955.621.900	0,60	14,03	Dinas Ketenaga Kerjaan



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPJMD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6*100%		16
		TENAGA KERJA	Mendapat Layanan Penempatan																							
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	583	3.875.000.000,00	74,62	2.642.783.940	100	1.143.430.820,00	0	0,00							0,00	0	74,62	2.642.783.940	12,80	68,20		Dinas Ketenaga Kerjaan	
		PROGRAM HUBUNGAN KETENAGAKE RJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.458	5.375.000.000,00	54,44	1.217.455.520	100	417.018.000,00	0	0,00							0,00	0	54,44	1.217.455.520	3,73	22,65		Dinas Ketenaga Kerjaan	
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PEMBERDAYA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								3,81	1.736.042.956,00															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan PD yang ditingkatkan	100	64.829.656.974,00	100	11.686.715.615	100	10.923.288.955,00	24,44	1.694.277.956,00							24,44	1.694.277.956	124,44	13.380.993.571	124,44	20,64		Dinas Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun gan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	persentase kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi pengarusutamaa n gender	100	2.972.048.719,00	100	737.104.500	100	392.574.600,00	0	13.315.000,00							0,00	13.315.000	100,00	750.419.500	100,00	25,25		Dinas Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun gan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100	7.972.180.883,00	100	870.352.150	100	1.279.664.100,00	2,22	28.450.000,00							2,22	28.450.000	102,22	898.802.150	102,22	11,27		Dinas Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun gan Anak	
		PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan	100	313.710.564,00	100	134.944.000	100	51.385.000,00	0	0,00							0,00	0	100,00	134.944.000	100,00	43,02		Dinas Pemberda yaan Perempua	



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
			peningkatan ketahanan keluarga																					n dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	100	1.058.561.800,00	100	85.726.760	100	37.541.800,00	0	0,00							0,00	0	100,00	85.726.760	100,00	8,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kab/kota layak anak yang mendapatkan predikat minimal madya	100	1.899.990.000,00	100	330.615.400	100	90.000.000,00	0	0,00							0,00	0	100,00	330.615.400	100,00	17,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	100	834.775.900,00	100	68.244.000	100	115.675.900,00	0	0,00							0,00	0	100,00	68.244.000	100,00	8,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PANGAN								0	0,00													
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	32	956.928.900,00	100	1.387.220.702	100	456.928.900,00	0	0,00							0,00	0	100,00	1.387.220.702	312,50	144,97	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	2,18	573.929.011,00	0	0	5,24	123.319.270,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan.	95	942.732.526,00	100	438.273.845	95	202.563.530,00	0	0,00							0,00	0	100,00	438.273.845	105,26	46,49	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 9+10+11+12			14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
19	Meningkatnya infrastruktur dasar wilayah	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERTANAHAN								0	470.964.986,63															Hortikultura
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	persentase kesesuaian retribusi tanah dan ganti kerugian sesuai dengan aturan	15	832.546.500,00	100	808.546.500	100	832.546.500,00	0	0,00							0,00	0	100,00	808.546.500	666,67	97,12		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
		PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah PEMDA	19	11.106.013.827,63	100	1.418.149.235	100	1.819.137.086,63	0	470.964.986,63							0,00	470.964.987	100,00	1.889.114.221	526,32	17,01		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								0,41	2.507.271.120,00															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku	790	96.192.613.597,24	100	15.177.080.319	100	15.231.610.973,40	4,12	2.497.675.120,00							4,12	2.497.675.120	104,12	17.674.755.439	13,18	18,37		Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen data dan informasi sumber daya alam dan perencanaan lingkungan hidup	20	3.531.624.297,09	100	224.385.958	100	126.599.890,00	0	9.596.000,00							0,00	9.596.000	100,00	233.981.958	500,00	6,63		Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Persentase dokumen pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian	20	3.999.299.050,03	100	290.530.136	100	171.856.450,00	0	0,00							0,00	0	100,00	290.530.136	500,00	7,26		Dinas Lingkungan Hidup	



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16
		LINGKUNGAN HIDUP	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup																							
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	2	283.633.000,00	0	0	100	61.017.480,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		Dinas Lingkung an Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase dokumen Pengelolaan Limbah B3 di Provinsi	10	618.926.121,00	100	162.002.916	100	104.774.200,00	0	0,00							0,00	0	100,00	162.002.916	1.000,00	26,17		Dinas Lingkung an Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	130	438.489.000,00	0	0	100	54.501.700,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Lingkung an Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	5	210.422.500,00	0	0	100	26.040.440,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Lingkung an Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	125	436.282.850,00	0	0	100	36.490.790,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Lingkung an Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Persentase penyelesaian pengaduan dan	40	569.578.000,00	0	0	100	48.894.700,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Lingkung an Hidup	



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9				10	11	12	13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16	
		LINGKUNGAN HIDUP	penanganan kasus lingkungan																					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah Regional	10	2.790.795.646,00	50	952.527.000	100	306.067.500,00	0	0,00						0,00	0	50,00	952.527.000	500,00	34,13	Dinas Lingkungan Hidup	
25	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								0,74	1.195.397.422,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan penunjang kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi lampung	100	21.824.140.656,00	79,79	6.230.222.249	100	5.972.656.224,00	3,69	1.195.397.422,00						3,69	1.195.397.422	83,48	7.425.619.671	83,48	34,02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran Kependudukan di Provinsi Lampung	100	655.716.629,00	100	422.544.739	100	179.451.290,00	0	0,00						0,00	0	100,00	422.544.739	100,00	64,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil di Provinsi Lampung	100	204.627.161,00	100	216.158.900	100	56.000.725,00	0	0,00						0,00	0	100,00	216.158.900	100,00	105,64	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kab/Kota se- Provinsi Lampung	100	161.469.385,00	100	213.122.961	100	44.189.650,00	0	0,00						0,00	0	100,00	213.122.961	100,00	131,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan Provinsi Lampung	100	209.648.775,00	100	120.096.300	100	57.375.000,00	0	0,00						0,00	0	100,00	120.096.300	100,00	57,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
24	Meningkatnya Akuntabilitas	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								2,25	1.515.064.137,00													



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6*100%		16
	Kinerja Instansi Pemerintah																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100	12.653.647.756,00	100	11.995.695.411	100	12.650.147.756,30	4,49	1.515.064.137,00							4,49	1.515.064.137	104,49	13.510.759.548	104,49	106,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	25	2.000.000.000,00	25	1.000.000.000	25	2.000.000.000,00	0	0,00							0,00	0	25,00	1.000.000.000	100,00	50,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								0	0,00													
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	100	232.050.000,00	0	0	100	0,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten/Kota	100	464.100.000,00	100	17.977.000	100	0,00	0	0,00							0,00	0	100,00	17.977.000	100,00	3,87	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kab/kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100	1.440.000.000,00	100	1.759.473.750	100	150.000.000,00	0	0,00							0,00	0	100,00	1.759.473.750	100,00	122,19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1 25	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	URUSAN PEMERINTAHAN DI BADAN PERHUBUNGAN								4,09	2.438.648.069,00											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tata kelola program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	92.196.967.073,00	78,96	17.568.179.440	100	17.540.183.570,95	8,01	2.432.589.866,00					8,01	2.432.589.866	86,97	20.000.769.306	86,97	21,69	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	18.259.313.553,00	87,08	3.022.680.479	100	1.331.824.475,00	0	2.520.000,00					0,00	2.520.000	87,08	3.025.200.479	87,08	16,57	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	100	16.373.855.690,00	0	0	100	45.730.690,00	8,33	3.538.203,00					8,33	3.538.203	8,33	3.538.203	8,33	0,02	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pengelolaan perkeretaapian	100	3.448.100.000,00	0	0	100	0,00	0	0,00					0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
26	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								4,33	5.296.908.917,00											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	2,195	83.598.658.213,00	95,83	67.897.962.743	100	18.406.850.470,00	1,61	3.573.961.717,00					1,61	3.573.961.717	97,44	71.471.924.460	4,44	85,49	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Terkelolanya Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah Provinsi dan Persentase Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di	4,595	71.030.977.195,00	88,89	75.803.938.914	100	15.531.836.455,00	8,33	231.552.000,00					8,33	231.552.000	97,22	76.035.490.914	2,12	107,05	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PERMINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6*100%		16
			Pemerintah Daerah Provinsi	850	43.132.228.539,00	55,56	47.670.813.542	100	9.731.067.760,00	3,05	1.491.395.200,00							3,05	1.491.395.200	58,61	49.162.208.742	6,90	113,98	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12	Pengembangan Sektor koperasi dan UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								3,19	1.400.257.540,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERMINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terpenuhi nya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	90	24.870.000.000,00	100	11.136.754.226	90	16.452.888.279,25	25,50	1.400.257.540,00							25,50	1.400.257.540	125,50	12.537.011.766	139,44	50,41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	36,07	1.240.000.000,00	44,84	283.407.850	32,79	75.000.000,00	0	0,00							0,00	0	44,84	283.407.850	124,31	22,86	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat terhadap aturan perkoperasian sesuai dengan undang-undang yang berlaku	6,10	600.000.000,00	44,35	134.987.000	5,08	50.000.000,00	0	0,00							0,00	0	44,35	134.987.000	727,05	22,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam koperasi	27,87	400.000.000,00	82,30	155.376.400	24,59	30.000.000,00	0	0,00							0,00	0	82,30	155.376.400	295,30	38,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
			yang memiliki kategori sehat																					
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya	6,44	8.000.000.000,00	32,87	4.789.453.610	3,22	310.000.000,00	0	0,00							0,00	0	32,87	4.789.453.610	510,40	59,87	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkatkan volume usahanya	10,17	1.300.000.000,00	23,81	268.678.900	5,08	75.000.000,00	0	0,00							0,00	0	23,81	268.678.900	234,12	20,67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang meningkatkan daya saing usahanya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha	3,42	800.000.000,00	0,52	1.036.811.388	1,71	330.000.000,00	0	0,00							0,00	0	0,52	1.036.811.388	15,20	129,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola dan manajemen usaha menuju skala menengah	7,54	1.400.000.000,00	12,35	527.596.494	3,77	270.000.000,00	0	0,00							0,00	0	12,35	527.596.494	163,79	37,69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL								5,15	3.429.750.412,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	18.375.000.000,00	100	16.391.883.517	100	16.963.792.754,00	30,88	3.429.750.412,00							30,88	3.429.750.412	130,88	19.821.633.929	130,88	107,87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan	100	380.000.000,00	100	509.763.690	100	118.853.370,00	0	0,00							0,00	0	100,00	509.763.690	100,00	134,15	Dinas Penanam



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16
		AN IKLIM PENANAMAN MODAL	Investasi di Provinsi Lampung																					an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peringkat tujuan investasi nasional	19	200.000.000,00	100	169.981.000	26	35.903.320,00	0	0,00							0,00	0	100,00	169.981.000	526,32	84,99	Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan dan penyelesaian izin yang tepat waktu kewenangan daerah	100	1.050.000.000,00	100	409.536.955	100	229.665.890,00	0	0,00							0,00	0	100,00	409.536.955	100,00	39,00	Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	100	300.000.000,00	100	1.074.466.000	100	38.801.550,00	0	0,00							0,00	0	100,00	1.074.466.000	100,00	358,16	Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase capaian realisasi investasi terhadap target nasional	100	150.000.000,00	100	75.000.000	100	41.095.400,00	0	0,00							0,00	0	100,00	75.000.000	100,00	50,00	Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pemanfaatan	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								1,94	32.126.374.897,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Asset dan Administrasi	0	0,00	0	80.924.431.632	100	62.613.121.368,72	7,76	32.126.374.897,00							7,76	32.126.374.897	7,76	113.050.806.529	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13= 9+10+11+12	14= 7 +13	15= 14/6 *100%	16
			Umum Kepegawaian Perangkat daerah																				
		PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang Ditingkatkan	0	0,00	100	11.646.690.093	100	3.761.112.370,00	0	0,00					0,00	0	100,00	11.646.690.093	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANG AN DAYA SAING KEOLAHRAGA AN	Persentase Atlet Olahraga Pelajar yang Berprestasi dan Berdaya Saing	0	0,00	100	36.165.710.176	100	9.461.225.350,00	0	0,00					0,00	0	100,00	36.165.710.176	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS KEPRAMUKAA N	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang ditingkatkan	0	0,00	100	205.487.000	100	30.271.745,00	0	0,00					0,00	0	100,00	205.487.000	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	Dinas Kepemud aan dan Olahraga	
26	Meningk atnya Kualitas Impleme ntasi Sistem Pemerin tah Berbasis Elektron ik	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG STATISTIK								0	0,00												
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggarany a Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data Statistik Sektoral dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.26 0	456.891.496,00	100	613.977.608	100	109.451.535,00	0	0,00					0,00	0	100,00	613.977.608	7,94	134,38	Dinas Komunika si, Informati ka dan Statistik	
26	Meningk atnya Kualitas Impleme ntasi Sistem Pemerin tah Berbasis Elektron ik	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERSANDIAN								0	0,00												



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggarany a Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100	414.960.591,00	100	788.873.307	100	111.193.870,00	0	0,00					0,00	0	100,00	788.873.307	100,00	190,11	Dinas Komunika si, Informati ka dan Statistik		
31	Meningk atnya kehidup an masyara kat yang berbuda ya	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KEBUDAYAAN								0	0,00													
		PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah objek budaya (seni) yang dikembangkan	91,5 0	10.354.221.109,00	80	2.467.476.320	87,50	2.300.000.000,00	0	0,00					0,00	0	80,00	2.467.476.320	87,43	23,83	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an		
		PROGRAM PENGEMBANG AN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan	32	2.329.527.631,00	85,19	1.445.429.410	20	347.103.570,00	0	0,00					0,00	0	85,19	1.445.429.410	266,22	62,05	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an		
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan (WBtB)	45	1.388.922.798,00	91,25	447.279.696	33	256.956.880,00	0	0,00					0,00	0	91,25	447.279.696	202,78	32,20	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAA N CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	52	1.955.584.630.471,00	82	461.163.810	44	398.424.370,00	0	0,00					0,00	0	82,00	461.163.810	157,69	0,02	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an		
		PROGRAM PENGELOLAA N PERMUSEUMA N	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat	100	18.131.338.241,00	54,69	4.383.477.467	100	3.956.295.000,00	0	0,00					0,00	0	54,69	4.383.477.467	54,69	24,18	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an		
25	Meningk atnya Pelayan an Publik Prima	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERPUSTAKAAN								8,21	2.964.773.858,00													
		PROGRAM PENUNJANG	Persentase layanan	100	13.761.203.677,00	0	0	100	14.476.516.283,85	21,71	2.952.719.158,00					21,71	2.952.719.158	21,71	2.952.719.158	21,71	21,46	Dinas Perpustak		



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16
		URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	penunjang urusan pemerintah daerah																					aan dan Kearsipan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA AN	Persentase SDM Pengelola Perpustakaan dan Unit perpustakaan yang dibina	40	637.769.593,00	39	935.359.600	40	670.921.100,00	1,04	5.280.000,00					1,04	5.280.000	40,04	940.639.600	100,10	147,49		Dinas Perpustak aan dan Kearsipan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	10	159.859.063,00	2	122.779.900	10	420.421.495,00	1,88	6.774.700,00					1,88	6.774.700	3,88	129.554.600	38,80	81,04		Dinas Perpustak aan dan Kearsipan	
25	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KEARSIPAN								0	0,00													
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah dokumen arsip yang terpelihara	2.270	280.286.629,00	2.360	661.229.186	2.160	294.856.035,00	0	0,00					0,00	0	2.360,00	661.229.186	103,96	235,91		Dinas Perpustak aan dan Kearsipan	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								15.200	4.409.842.521,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	110.693.144.000,00	100	19.183.816.013	100	21.393.325.807,55	25	4.309.713.441,00					25,00	4.309.713.441	125,00	23.493.529.454	125,00	21,22		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	5,19	7.400.000.000,00	100	429.144.980	5,19	313.712.370,00	0	7.855.080,00					0,00	7.855.080	100,00	437.000.060	1.926,78	5,91		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	### ###	90.800.000.000,00	#### ###	1.797.526.290	190,609	924.160.675,00	50,984,10	39.884.000,00					50,984,10	39.884.000	238,793,26	1.837.410.290	105,32	2,02		Dinas Kelautan dan Perikanan	



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp
				###	###	###	###	###	###	###	###	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUKTIK	Produksi Perikanan Budidaya	### ###	6.385.000.000,00	205.2 25	2.295.189.310	180.6 16	729.970.575,00	40.18 8,35	28.870.000,00					40.188, 35	28.870.000	245.41 2,85	2.324.059.310	120,72	36,40	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ha)	168, 698	5.450.000.000,00	100	351.495.038	152.0 96	332.307.640,00	0	5.000.000,00					0,00	5.000.000	100,00	356.495.038	0,06	6,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	45,7 9	13.485.000.000,00	14,69 4,03	760.436.929	39,50	660.692.785,00	0	18.520.000,00					0,00	18.520.000	14,694, 03	778.956.929	32,090, 04	5,78	Dinas Kelautan dan Perikanan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PARIWISATA								0,63	1.592.653.225,00											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	191	17.300.000.000,00	100	12.705.154.448	100	13.916.597.046,88	3,13	1.592.653.225,00					3,13	1.592.653.225	103,13	14.297.807.673	53,99	82,65	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan	838	2.203.685.280,00	20,83	4.955.938.600	100	943.312.710,00	0	0,00					0,00	0	20,83	4.955.938.600	2,49	224,89	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan	16	5.000.000.000,00	40	7.302.855.380	100	2.986.034.300,00	0	0,00					0,00	0	40,00	7.302.855.380	250,00	146,06	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan	107	1.900.000.000,00	95	836.657.000	100	588.539.390,00	0	0,00					0,00	0	95,00	836.657.000	88,79	44,03	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	Persentase kualitas pengembangan	2,23 1	4.725.782.351,00	45	2.868.662.405	100	1.206.148.820,00	0	0,00					0,00	0	45,00	2.868.662.405	2,02	60,70	Dinas Pariwisata dan



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16	
		DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan																					Ekonomi Kreatif	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERTANIAN							131.810	7.356.253.876,00															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (KPTPH)	Nilai SAKIP Dinas KPTPH Provinsi Lampung	73,2 0	204.743.588.888,00	0	0	72,60	44.637.891.835,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (KPTPH)	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	100	2.659.426.082,00	0	0	100	571.426.910,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (KPTPH)	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	5	50.824.728.975,00	0	0	100	10.920.633.594,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (DISBUN)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi (%)	1,51 9	15.297.072.164,00	100	16.263.829.458	100	16.534.303.247,00	21,41	3.316.431.097,00							21,41	3.316.431.097	121,41	19.580.260.555	7,99	128,00	Dinas Perkebunan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (DISBUN)	Persentase penyediaan peredaran benih bermutu dan sarana pertanian (%)	207	225.591.060,00	5	554.840.494	100	267.714.170,00	0	0,00							0,00	0	5,00	554.840.494	2,42	245,95	Dinas Perkebunan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Peningkatan produktivitas	86	4.748.197.477,00	3	3.165.825.674	100	4.258.577.260,00	2,08	830.832.000,00							2,08	830.832.000	5,08	3.996.657.674	5,91	84,17	Dinas Perkebunan	



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6*100%		16
		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (DISBUN)	komoditas perkebunan (%)																					
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (DISBUN)	Persentase penurunan serangan hama dan penyakit tanaman (%)	550	157.639.877,00	25	290.049.159	100	0,00	0	0,00							0,00	0	25,00	290.049.159	4,55	183,99	Dinas Perkebunan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (DISBUN)	Persentase penilaian usaha perkebunan (%)	22	27.500.000,00	30	771.142.350	100	0,00	0	0,00							0,00	0	30,00	771.142.350	136,36	2.804,15	Dinas Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan mutu produk perkebunan (%)	1.101	1.329.293.196,00	20	2.422.095.530	100	0,00	0	0,00							0,00	0	20,00	2.422.095.530	1,82	182,21	Dinas Perkebunan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (KPTPH)	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	99,50	776.636.850,00	100	406.708.850	99,50	166.874.800,00	0	0,00							0,00	0	100,00	406.708.850	100,50	52,37	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (KPTPH)	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani di Provinsi Lampung.	100	3.540.301.569,00	100	1.316.362.059	100	760.699.310,00	0	0,00							0,00	0	100,00	1.316.362.059	100,00	37,18	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (KESWAN)	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	500	121.138.687.075,00	0	0	100	20.240.116.205,49	5,72	3.107.605.279,00							5,72	3.107.605.279	5,72	3.107.605.279	1,14	2,57	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (KESWAN)	Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung	###	52.102.911.400,00	100	17.404.724.213	2.285,825	6.176.620.990,00	2.240,647	57.926.000,00							2.240,647	57.926.000	2.240,747	17.462.650.213	95,48	33,52	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Capaian Pembangunan/	500	1.906.000.000,00	100	3.131.609.580	100	113.757.790,00	0	0,00							0,00	0	100,00	3.131.609.580	20,00	164,30	Dinas Peternakan dan



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16	
		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rehabilitasi Prasarana yang Sesuai Kebutuhan																						Kesehatan Hewan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi Lampung	91	22.634.309.000,00	0	0	87	1.042.300.075,00	100	43.459.500,00							100,00	43.459.500	100,00	43.459.500	109,89	0,19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (KESWAN)	Persentase UPH peternakan terdata yang tersertifikasi izin usaha (izin edar/organik/halal/PIRT)	54,40	2.100.000.000,00	100	551.384.400	44,80	30.370.350,00	0	0,00							0,00	0	100,00	551.384.400	183,82	26,26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (KESWAN)	Jumlah laporan kelompok ternak dan pelaku usaha sektor peternakan yang memperoleh penyuluhan, pendampingan dan pembinaan teknis	5	5.634.500.000,00	0	0	1	337.637.500,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KEHUTANAN								1,74	14.951.406.379,00														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	760	12.811.326.129,00	96,17	61.048.188.910	100	64.920.200.667,00	8,68	14.951.406.379,00							8,68	14.951.406.379	104,85	75.999.595.289	13,80	593,22	Dinas Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Tutupan Lahan	0	0,00	257,76	1.329.501.272	31	363.302.220,00	0	0,00							0,00	0	257,76	1.329.501.272			Dinas Kehutanan	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan di Tahura	0	0,00	16	598.696.400	40	87.549.140,00	0	0,00							0,00	0	16,00	598.696.400			Dinas Kehutanan	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat	0	0,00	5	1.347.984.650	5	308.181.375,00	0	0,00							0,00	0	5,00	1.347.984.650			Dinas Kehutanan	



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
		DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial																					
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0	0,00	25	103.403.000	12,5	52.969.000,00	0	0,00							0,00	0	25,00	103.403.000			Dinas Kehutanan
17	Meningkatnya Ketahanan Energi	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG SUMBER DAYA MINERAL								1,98	3.091.693.858,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	23,6 57	82.539.855.346,00	83,54	17.340.264.880	100	17.733.081.026,00	4,91	3.072.829.858,00							4,91	3.072.829.858	88,45	20.413.094.738	0,37	24,73	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	354	618.335.380,00	100	474.511.950	100	132.860.800,00	0	0,00							0,00	0	100,00	474.511.950	28,25	76,74	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	145	827.058.337,00	100	905.300.719	100	177.708.790,00	0	0,00							0,00	0	100,00	905.300.719	68,97	109,46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Daerah	45	1.510.159.420,00	100	983.227.682	100	414.128.840,00	5	18.864.000,00							5,00	18.864.000	105,00	1.002.091.682	233,33	66,36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	992	27.593.639.410,00	100	1.174.661.000	100	1.065.846.999,50	0	0,00							0,00	0	100,00	1.174.661.000	10,08	4,26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1	Meningkatnya Pertumbuhan	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERDAGANGAN								4,17	3.453.837.560,00													



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16	
	uhan Ekonomi Sektor Unggulan																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	89.055.000.000,00	90,54	15.757.147.428	100	17.562.812.755,80	25	3.417.426.260,00							25,00	3.417.426.260	115,54	19.174.573.688	115,54	21,53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan implementasi pasar lelang komoditas (PLK)	80	760.000.000,00	100	37.491.000	70	40.000.000,00	0	0,00							0,00	0	100,00	37.491.000	125,00	4,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Andil Inflasi Bahan Makanan	3	8.640.000.000,00	50	2.224.495.030	2,50	591.000.000,00	0	0,00														
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase IKM yang berhasil melakukan ekspor dari IKM yang memperoleh fasilitasi	20	7.675.000.000,00	100	225.143.100	10	421.000.000,00	0	0,00							0,00	0	100,00	225.143.100	500,00	2,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan Barang beredar yang diawasi	20	8.375.000.000,00	74,78	619.571.457	17,50	593.500.000,00	0	36.411.300,00							0,00	36.411.300	74,78	655.982.757	373,90	7,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk	10	3.400.000.000,00	100	217.474.426	2	110.000.000,00	0	0,00							0,00	0	100,00	217.474.426	1.000,00	6,40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN								0	29.850.000,00														



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNJ JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16							
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung	6	22.185.000.000,00	83	2.449.063.004	2	12.290.006.500,00	0	29.850.000,00					0,00	29.850.000	83,33	2.478.913.004	1.388,8 3	11,17	Dinas Perindust rian dan Perdagan gan		
		PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25	1.350.000.000,00	100	109.742.200	15	125.000.000,00	0	0,00					0,00	0	100,00	109.742.200	400,00	8,13	Dinas Perindust rian dan Perdagan gan		
		PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Besar, Sedang dan IKM serta Perusahaan Kawasan Industri kab/kota yang masuk SIIINAS	45	845.000.000,00	50	66.118.900	35	80.800.000,00	0	0,00					0,00	0	50,00	66.118.900	111,11	7,82	Dinas Perindust rian dan Perdagan gan		
2	Meningk atnya Penyera pan Tenaga Kerja	URUSAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TRANSMIGRASI								1,50	1.515.064.137,00													
		PROGRAM PERENCANA N KAWASAN TRANSMIGRA SI	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	100	12.653.647.756,00	100	11.995.695.411	100	12.650.147.756,30	4,49	1.515.064.137,00					4,49	1.515.064.137	104,49	13.510.759.548	104,49	106,77	Dinas Pemberda yaan Masayara kat dan Transmig rasi		
		PROGRAM PENINGKATA N KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	25	2.000.000.000,00	25	1.000.000.000	25	2.000.000.000,00	0	0,00					0,00	0	25,00	1.000.000.000	100,00	50,00	Dinas Pemberda yaan Masayara kat dan Transmig rasi		
		PROGRAM PENGEMBANG AN KAWASAN TRANSMIGRA SI	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	100	114.461.120,00	100	70.514.000	100	114.461.120,00	0	0,00					0,00	0	100,00	70.514.000	100,00	61,61	Dinas Pemberda yaan Masayara kat dan Transmig rasi		
24	Meningk atnya Akuntab ilitas Kinerja	SEKRETARIAT DAERAH								11,1 5	17.319.978.555,00													



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9				10	11	12	13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6*100%		16	
	Instansi Pemerintah																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	51	1.559.266.500,00	0	0	100	730.010.300,00	3,33	34.800.000,00							3,33	34.800.000	3,33	34.800.000	6,53	2,23	BIRO ADMINIS TRASI PEMBAN GUNAN
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRAS I PEMBANGUNA N	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggara n Pembangunan yang Tertib Administrasi	161	3.777.378.000,00	83	299.081.556	100	276.823.430,00	0	3.840.000,00							0,00	3.840.000	82,78	302.921.556	51,42	8,02	BIRO ADMINIS TRASI PEMBAN GUNAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BIRO PEREKONOMI AN)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan DAerah yang Ditingkatkan	245	2.774.041.475,00	75	641.918.764	100	478.125.330,00	5,21	90.464.940,00							5,21	90.464.940	80,21	732.383.704	32,74	26,40	BIRO PEREKON OMIAN
		PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	135	7.121.363.323,00	51,85	1.052.113.575	100	781.446.800,00	19,91	72.910.900,00							19,91	72.910.900	71,76	1.125.024.475	53,16	15,80	BIRO PEREKON OMIAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BIRO HUKUM)	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	132 0	8.828.750.000,00	104,5 5	1.179.500.799	100	828.450.615,00	15,03	108.503.032,00							15,03	108.503.032	119,58	1.288.003.831	9,06	14,59	BIRO HUKUM
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasika n	319 0	8.211.772.324,00	137,5 0	1.063.540.270	100	866.327.765,00	21,83	35.153.200,00							21,83	35.153.200	159,33	1.098.693.470	4,99	13,38	BIRO HUKUM
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan DAerah yang Ditingkatkan	54	1.444.146.320,00	0	0	100	1.121.388.700,00	0	0,00							0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	BIRO PEMERIN TAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAH AN DAN	Persentase Penyampaian Laporan	81	2.425.071.700,00	71,83	913.915.900	100	1.738.611.300,00	0	0,00							0,00	0	71,83	913.915.900	88,68	37,69	BIRO PEMERIN TAHAN



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	4	5	6		7		8		9				10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
		OTONOMI DAERAH	Pemerintahan Tepat Waktu																							DAN OTONOMI DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BIRO KESRA)	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114	1.675.000.000,00	97,41	599.989.886	100	723.419.370,00	19,07	62.941.028,00					19,07	62.941.028	116,48	662.930.914	102,18	39,58				BIRO KESEJAH TERAAN RAKYAT	
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	941	87.224.518.960,00	97,67	73.549.752.203	100	88.897.815.300,00	0	972.471.353,00					0,00	972.471.353	97,67	74.522.223.556	10,38	85,44				BIRO KESEJAH TERAAN RAKYAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BIRO PBJ)	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	270	9.569.717.400,00	80	7.397.953.133	100	434.918.280,00	26,81	102.656.856,00					26,81	102.656.856	106,81	7.500.609.989	39,56	78,38				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	320	16.122.518.050,00	100	8.426.384.588	100	1.064.323.124,00	33,33	94.939.150,00					33,33	94.939.150	133,33	8.521.323.738	41,67	52,85				BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BIRO UMUM)	Persentase Pelaporan Capaian Kerumahtanggaan, Administrasi Keuangan dan Aset serta Ketatausahaan yang tepat waktu	100	6.868.671.985.809,00	96,67	664.741.798.116	100	147.586.128.930,90	11,55	15.741.298.096,00					11,55	15.741.298.096	108,22	680.483.096.212	108,22	9,91				BIRO UMUM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BIRO ADPIM)	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,193	2.782.437.928,00	30,23	299.313.800																		BIRO ADMINIS TRASI PIMPINAN	
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD								16,27	71.770.973.578,00															



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Layanan Administrasi Umum DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi	4,00 0	169.836.947.095,68	165,6 0	355.474.714.663	100	156.129.350.096,00	19,51	30.307.067.345,00							19,51	30.307.067.345	185,11	385.781.782.008	4,63	227,15	SEKRETA RIAT DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	2,70 0	221.274.747.710,64	220,4 9	526.638.703.709	100	203.984.025.658,00	13,02	41.463.906.233,00							13,02	41.463.906.233	233,51	568.102.609.942	8,65	256,74	SEKRETA RIAT DPRD	
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PERENCANAAN								18,5 9	5.352.530.669,00														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	3,66 2	107.432.535.514,00	99,75	25.047.044.778	100	25.329.439.220,00	43,26	5.025.676.518,00							43,26	5.025.676.518	143,01	30.072.721.296	3,91	27,99	BAPPEDA	
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	648	17.433.765.682,00	100	4.481.537.161	100	3.852.228.500,00	12,50	151.351.673,00							12,50	151.351.673	112,50	4.632.888.834	17,36	26,57	BAPPEDA	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bidang Perekonomian serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	96	17.583.935.630,00	100	5.480.642.493	100	3.885.410.600,00	0	175.502.478,00							0,00	175.502.478	100,00	5.656.144.971	104,17	32,17	BAPPEDA	



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7 +13		15= 14/6 *100%		16
22	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	KEUANGAN								20,10	144.867.592.610,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BPKAD)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,285	849.348.954.850,31	0	0	100	153.710.755.644,00	4,31	21.085.812.986,00							4,31	21.085.812.986	4,31	21.085.812.986	0,10	2,48	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Persentase Pengelolaan keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Aktif	63,025	7.127.180.355.010,35	89,47	2.763.520.327.255	100	1.290.872.481.757,00	14,84	97.676.777.012,00							14,84	97.676.777.012	104,31	2.861.197.104.267	0,17	40,14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah	250	26.079.279.749,53	76,92	12.167.181.938	100	4.719.692.388,00	23,08	329.992.483,00							23,08	329.992.483	100,00	12.497.174.421	40,00	47,92	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI (BAPENDA)	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Pelaksanaannya Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	3,110	654.481.346.561,00	0	0	100	77.744.700.137,97	33,28	25.737.045.393,00							33,28	25.737.045.393	33,28	25.737.045.393	1,07	3,93	BADAN PENDAPAN DAERAH



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	760	94.412.940.000,00	100	26.025.731.204	100	13.372.489.200,00	24,97	37.964.736,00							24,97	37.964.736	124,97	26.063.695.940	16,44	27,61	
28	Meningkatnya Penguatan Implementasi Sistem Merit	KEPEGAWAIAN								18,39	2.498.797.130,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	1510	59.540.239.731,00	96,03	16.777.652.270	100	17.975.893.051,00	20,52	2.012.961.648,00							20,52	2.012.961.648	116,55	18.790.613.918	7,72	31,56	BADAN KEPEGA WAIAN DAERAH
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	89,280	39.607.994.561,00	0	0	100	2.166.141.990,00	16,25	485.835.482,00							16,25	485.835.482	16,25	485.835.482	0,02	1,23	BADAN KEPEGA WAIAN DAERAH
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								37,45	4.096.490.261,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangat Daerah	75,20	112.203.238.526,00	99,16	19.796.653.168	74,92	19.442.696.749	74,90	4.096.490.261,00							74,90	4.096.490.261	174,06	23.893.143.429	231,46	21,29	DINAS PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, & Fungsional, Persentase Realisasi Pendidikan Pelatihan yang Dilaksanakan, Persentase ASN yang Memiliki	48,28	68.570.864.186,00	93,17	10.660.574.925	0	5.650.551.500,00	0	0,00							0,00	0	93,17	10.660.574.925	192,98	15,55	DINAS PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16
			Sertifikasi Kompetensi, Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Teknis																					
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PENGEMBANGAN								9,18	1.635.105.414,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan urusan pemerintahan daerah	1,241	72.786.449.599,35	100	8.873.888.735	100	9.476.004.325,12	18,36	1.635.105.414,00						18,36	1.635.105.414	118,36	10.508.994.149	9,54	14,44		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	26.298.914.438,00	100	2.454.183.200	100	921.926.438,00	0	0,00						0,00	0	100,00	2.454.183.200	100,00	9,33		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
25	Meningkatnya Pelayanan Publik Prima	PENGELOLAAN PENGHUBUNGAN								14,31	3.359.425.052,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	% layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	97.904.377.976,00	100	16.779.999.627	100	17.022.216.485,84	20,29	3.234.228.352,00						20,29	3.234.228.352	120,29	20.014.227.979	120,29	20,44		BADAN PENGHUBUNGAN
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNGAN	% tingkat kualitas pelayanan Badan Penghubung	100	7.805.937.600,00	100	1.350.749.500	100	1.266.226.200,00	8	125.196.700,00						8,33	125.196.700	108,33	1.475.946.200	108,33	18,91		BADAN PENGHUBUNGAN
23	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	INSPEKTORAT DAERAH								5,85	4.413.189.861,00													



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPD PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13= 9+10+11+12			14= 7+13		15= 14/6*100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	1.Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2.Nilai SAKIP Inspektorat	82	218.044.162.808,00	100	34.378.727.607	80	48.209.479.613,32	17,56	4.312.131.861,00					17,56	4.312.131.861	117,56	38.690.859.468	143,37	17,74	INSPEKT ORAT			
		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASAN	1.Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang Selesai ditindaklanjuti, 2. Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Sudah Diselesaikan , 3. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan kriteria nilai ≥ BB	93	16.412.251.642,00	100	12.331.340.384	91	2.259.933.100,00	0	101.058.000,00					0,00	101.058.000	100,00	12.432.398.384	107,53	75,75	INSPEKT ORAT			
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	1.Capaian Nilai MCP KPK, 2. Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Sesuai Peraturan. 3.Persentase unit kerja yang terbina zona integritas WBK/WBBM)	92	1.258.243.800,00	100	1.653.920.057	88	178.243.800,00	0	0,00					0,00	0	100,00	1.653.920.057	108,70	131,45	INSPEKT ORAT			
30	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								0	0,00														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	69,9 0	106.926.055.127,30	72	391.890.521.735	69,10	20.147.091.669,78	0	0,00					0,00	0	72,00	391.890.521.735	103,00	366,51	BADAN KESATUA N BANGSA DAN POLITIK			



NO	SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD PROVINSI TAHUN 2029		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI SAMPAI DENGAN RKPd PROVINSI TAHUN LALU (N-2/ 2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD PROVINSI s/d TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12		14= 7+13		15= 14/6*100%		16							
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	6,80	14.750.000.000,00	30	1.719.751.250	6	2.750.000.000,00	0	0,00					0,00	0	30,00	1.719.751.250	441,18	11,66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	100	6.000.000.000,00	20	522.647.400	20	1.000.000.000,00	0	0,00					0,00	0	20,00	522.647.400	20,00	8,71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	69	2.975.000.000,00	30	272.932.600	65	475.000.000,00	0	0,00					0,00	0	30,00	272.932.600	43,48	9,17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	6,80	3.625.000.000,00	30	324.608.500	6	525.000.000,00	0	0,00					0,00	0	30,00	324.608.500	441,18	8,95	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	74	6.000.000.000,00	30	397.695.730	70	1.000.000.000,00	0	0,00					0,00	0	30,00	397.695.730	40,54	6,63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										11,14	901.857.296.681,38													
PREDIKAT KINERJA										SANGAT RENDAH														

Berdasarkan capaian kinerja pada Perangkat Daerah yang telah disajikan menggunakan Formulir E.1, dalam Permendagri 86/2017 dikatakan bahwa penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1.

Tabel 2. 9 Skala Penilaian Peringkat Kinerja
(Tabel T-E1, Permendagri 86 Tahun 2017)

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Predikat kinerja pada Perangkat Daerah memberikan informasi, mana Perangkat Daerah yang telah mencapai kinerja pada triwulan I Tahun 2025. Adapun rekapitulasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT KINERJA
			Kinerja	Keu		
2.15	Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	4,55	12,89	8,72	Sangat Rendah
2.16	Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3,55	12,07	7,81	Sangat Rendah
2.17	Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8,03	7,96	7,99	Sangat Rendah
2.18	Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23,12	19,68	21,4	Sangat Rendah
2.19	Urusan Pemerintahan di	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5,25	42,35	23,8	Sangat Rendah

KODE	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT KINERJA
			Kinerja	Keu		
	Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
2.20	Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3,55	12,07	7,81	Sangat Rendah
2.21	Urusan Pemerintahan di Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3,55	12,07	7,81	Sangat Rendah
2.22	Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,29	11,74	1,47	Sangat Rendah
2.23	Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,38	18,69	15,53	Sangat Rendah
2.24	Urusan Pemerintahan di Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,01	11,81	6,41	Sangat Rendah
3.25	Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,01	11,81	6,41	Sangat Rendah
3.26	Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,5	8,11	5,3	Sangat Rendah
3.27	Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	9,62	19,14	14,38	Sangat Rendah
3.27	Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian	Dinas Perkebunan	11,6	19,69	15,64	Sangat Rendah
3.27	Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9,83	11,38	10,6	Sangat Rendah
3.28	Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan	4,59	7,36	5,97	Sangat Rendah
3.29	Urusan Pemerintahan di Bidang Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2,41	15,84	9,12	Sangat Rendah
3.30	Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8,12	10,95	9,53	Sangat Rendah
3.31	Urusan Pemerintahan di	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8,12	10,95	9,53	Sangat Rendah



KODE	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PREDIKAT KINERJA
			Kinerja	Keu		
	Bidang Perindustrian					
3.32	Urusan Pemerintahan di Bidang Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	2,65	9,74	6,19	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Administrasi Pembangunan	1,39	3,84	2,61	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Perekonomian	12,5	12,97	12,73	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Hukum	17,65	8,48	13,06	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	0	0	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Kesejahteraan Rakyat	7,65	1,16	4,4	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	29,22	13,18	21,2	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Umum	11,29	10,67	10,98	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat	Biro Administrasi Pimpinan	26,86	18,03	22,45	Sangat Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	13,61	19,93	23,57	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	BAPPEDA	17,11	16,19	16,65	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	BPKAD	11,12	22,09	9,67	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	17,71	12,41	15,06	Sangat Rendah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	13,27	16,33	14,8	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,62	15,73	13,48	Sangat Rendah
5.07	Pengelolaan Penghubung	Badan Penghubung	17,69	18,37	18,03	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	Inspektorat	10,08	8,71	9,35	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,82	5,88	3,35	Sangat Rendah
	TOTAL		11,14	11,96	11,55	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan dari 49 Perangkat Daerah, sebanyak 48 Perangkat Daerah masih berada pada predikat “Sangat Rendah” atau dengan persentase 97,91%. Hanya terdapat 1 Perangkat Daerah yang telah mencapai predikat “Sedang”. Hal ini masih masuk dalam kategori wajar, mengingat pada Triwulan I Tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, pada pemenuhan target kinerja masih dalam proses pelaksanaannya, sehingga pada Triwulan I Tahun 2025 tingkat capaian kinerja baik fisik maupun keuangan masih rendah. Perlu adanya konsolidasi internal di masing-masing Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga hasil capaian pada periode Triwulan II peningkatan kinerja fisik dan keuangan dapat ditingkatkan walaupun terdapat kebijakan berupa efisiensi.

2.2. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi RKPD s.d Triwulan I-2025.

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung T.A 2025 dilaksanakan sampai dengan Triwulan II 2025. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan dengan penelaahan dan pencermatan atas input capaian pelaksanaan RKPD Provinsi Lampung dalam aplikasi Simonev dan laporan Evaluasi Renja OPD s.d. Triwulan II.

Secara umum, kondisi daerah sampai dengan Triwulan II-2025 dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat digambarkan dalam indikator makro pembangunan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Sampai dengan Triwulan II-2025, Capaian Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung, secara umum masih terkendali. Indikasinya pada capaian Indikator makro berdasarkan data yang diperoleh, capaian Indikator Makro ter-update pada Tw-1 2025 relatif berada dalam rentang

Sasaran RKPD 2025, bahkan beberapa diantaranya telah melewati target tahunan 2024.

Catatan khusus terkait capaian laju pertumbuhan ekonomi TW 1-2025. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,47 persen, menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,30 persen (y-on-y).

Meskipun capaian tahunan masih akan berubah namun setidaknya capaian pertengahan tahun ini menjadi acuan dalam upaya perbaikan dan peningkatan capaian Sasaran dan target pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan efisiensi anggaran pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada setiap perangkat daerah. Efisiensi anggaran tersebut sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal Provinsi Lampung dan kebutuhan realokasi sumber daya. Efisiensi ini pula berdampak pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada PD yang dilakukan penyesuaian, baik penyesuaian volume, pergeseran waktu pelaksanaan, hingga penundaan pelaksanaan sub kegiatan tertentu. Hal ini mempengaruhi capaian kinerja fisik dan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Data paling ter update terkait capaian realisasi SDGs Provinsi Lampung tahun 2023 yang telah di *realease* di Tahun 2024, dengan data-data capaian berdasarkan data yang bersumber dari BPS serta data-data sektoral yang bersumber dari perangkat daerah. Namun untuk beberapa data capaiannya belum tersedia. Seperti dijelaskan oleh para stakeholder TPB bahwa salah satu tantangan terbesar untuk mengukur capaian TPB adalah masalah ketersediaan data.

a) Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori SUDAH TERCAPAI adalah pada Pilar Sosial sebanyak

73,3% (77 indikator dari total 105 indikator), kemudian Pilar Ekonomi sebesar 61,7% (29 indikator dari total 47 indikator).

b) Pilar yang memiliki persentase tertinggi pada status keberhasilan dalam kategori TIDAK TERCAPAI adalah Pilar lingkungan sebanyak 41,7% (15 indikator dari total 36 indikator)

- Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

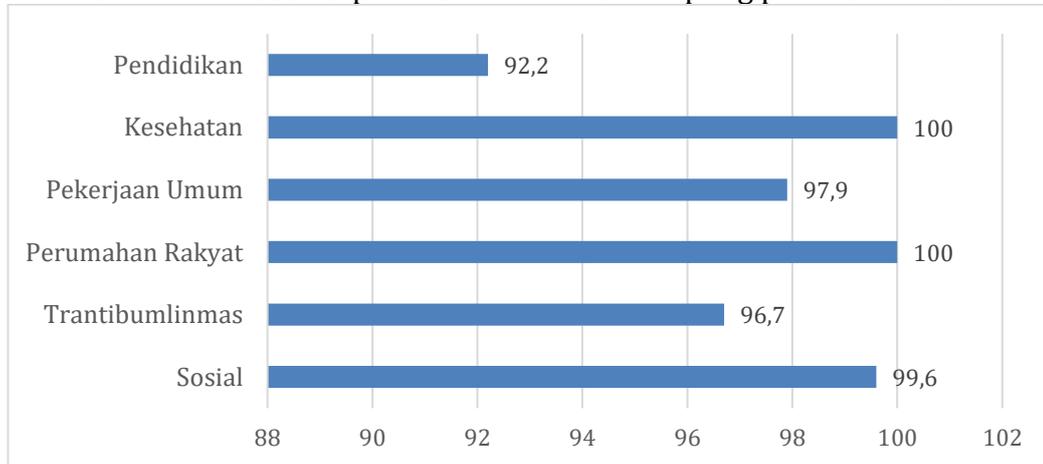
Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai urusan pemerintahan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Target capaian SPM tersebut umumnya berada pada angka **100%**, yang mencerminkan harapan pencapaian maksimal dalam pelaksanaan layanan dasar di setiap sektor.

Jika dibandingkan dengan target tersebut, realisasi capaian menunjukkan bahwa beberapa sektor telah mencapai target sepenuhnya, yaitu sektor **Perumahan Rakyat** dan **Kesehatan**, yang masing-masing mencatat **100% capaian**. Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan dasar di dua sektor tersebut telah dilaksanakan dengan optimal. Sementara itu, sektor lainnya mencatat realisasi yang mendekati target, meskipun belum mencapai 100%. Sektor **Sosial** mencapai **99,6%**, **Pekerjaan Umum** **97,9%**, dan **Trantibumlinmas** **96,7%**, yang semuanya menunjukkan kinerja sangat baik dan hanya terpaut sedikit dari target yang ditetapkan.

Di antara 6 sektor SPM tersebut, sektor **Pendidikan** masih menunjukkan capaian yang paling rendah, yaitu **92,2%**, sehingga menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan program SPM lebih lanjut agar dapat tercapaia di tahun 2025.

Capaian SPM sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 4. 1 Tabel Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2024



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2024

- Proses Pembangunan SPAM dan SPALD Lintas Kabupaten/Kota (Regional) ini merupakan kesatuan rangkaian yang panjang baik secara teknis maupun non teknis yang membutuhkan anggaran besar serta kebijakan, seperti kesepakatan dan kerjasama kab/kota yang terlibat dalam infrastruktur Regional. Sehingga Proses pembangunan ini membutuhkan waktu yang panjang. SPAM dan SPALD Lintas Kabupaten/Kota (Regional) masih dalam Penyusunan Readiness Criteria (RC)
- Pemenuhan Target SPM Lintas Kab/Kota (Regional) masih dalam perencanaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, pada triwulan I - 2025, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year) sekaligus pertumbuhan tertinggi Provinsi Lampung dibanding Provinsi se- Sumatera.. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor jasa lainnya yang tumbuh 9,66 persen, serta peningkatan ekspor barang dan jasa sebesar 12,96 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,07 persen, mengalami

penurunan 0,05 persen poin dibandingkan Februari 2024. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu 46,96 persen dari total penduduk bekerja. Mempertimbangkan Hasil telaahan dan pencermatan terhadap hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II-2025 secara teknis juga menghasilkan beberapa catatan rekomendasi sebagai berikut :

1. Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Sektor Unggulan:

Mendorong diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, seperti jasa lainnya dan ekspor barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung.

2. Meningkatkan Daya Tarik Investasi.

Peningkatan investasi dapat dilakukan melalui : Percepatan perizinan dan penyederhanaan regulasi di sektor pariwisata, industri pengolahan, dan properti wisata, Promosi peluang investasi secara agresif ke tingkat nasional dan internasional, dengan fokus pada sektor unggulan seperti agroindustri, pariwisata bahari, dan energi terbarukan dan Peningkatan kepastian hukum dan keamanan investasi, termasuk penguatan lembaga promosi dan pendampingan investor.

3. Pengembangan Sektor Pariwisata

melalui Meningkatkan Daya Tarik Investasi, Pengembangan Infrastruktur Pendukung dengan prioritas pembangunan akses ke destinasi wisata utama, seperti jalan menuju Pantai Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Pahawang, Penguatan SDM dan Ekonomi Lokal melalui Pelatihan keterampilan kerja di sektor pariwisata (hospitality, bahasa asing, digital marketing) dan fasilitasi UMKM local pariwisata serta membangun Bangun platform digital pariwisata Provinsi Lampung yang terintegrasi dengan sistem reservasi, peta wisata, dan agenda event.

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja:

Meskipun TPT menurun, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasional perlu ditingkatkan, terutama di sektor-sektor yang



menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan.

5. **Pengembangan Ekspor dan Industri Pengolahan:** Memperluas pasar ekspor dan mengembangkan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, seperti kopi robusta, CPO, serta ikan dan udang.
6. **Stabilisasi Konsumsi Rumah Tangga:** Menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok.
7. **Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja:** Mengatasi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal dan mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025

BAB III

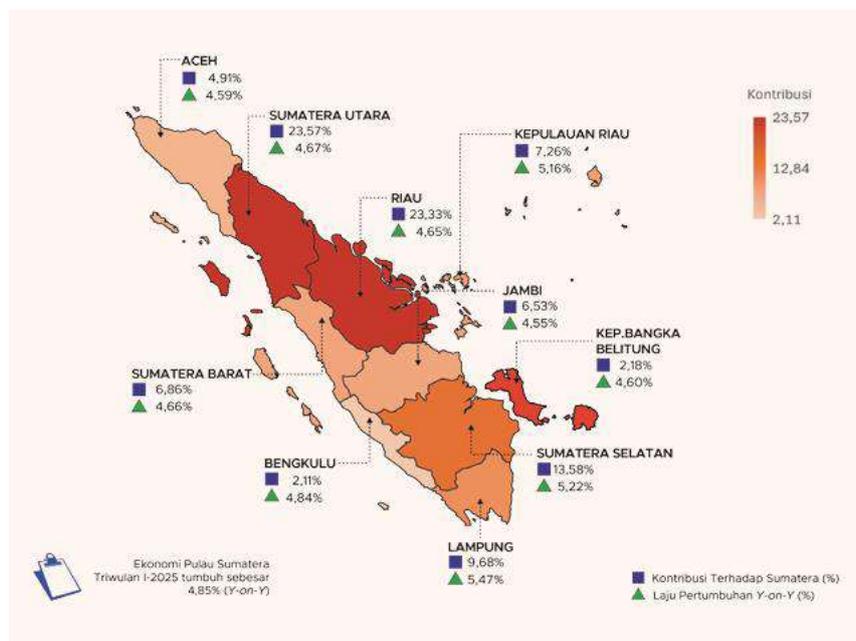
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah s.d Triwulan I-2025

Secara spasial, Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 5,47 persen, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau yang masing masing tumbuh sebesar 5,22 persen dan 5,16 persen dan memberikan kontribusi sebesar 9,68 persen pada PDRB wilayah Sumatera.

Gambar 3. 1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan I-2025 (y-on-y) (persen)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 yang tumbuh sebesar 5,47 persen, menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,30 persen (y-on-y). Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 9,66 persen. Selanjutnya, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan dan Transportasi dan Pergudangan yang

tumbuh sebesar 8,79 persen dan 8,20 persen. Lapangan usaha lain yang juga tumbuh pesat adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Informasi dan Komunikasi; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh masing-masing sebesar 7,84 persen; 7,83 persen; dan 7,29 persen. Di sisi lain, masih ada lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Pertambangan dan Pengalihan dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 3,32 persen.

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025, diolah

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 24,37 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,52 persen; Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,95 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 58,83 persen.

Tabel 3. 1 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)		
	Triw I-2024	Triw IV-2024	Triw I-2025	Triw I-2024	Triw IV-2024	Triw I-2025
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.593,87	29.662,29	29.654,38	14.588,48	15.702,17	15.379,25
B. Pertambangan dan Penggalian	6.382,60	6.217,67	6.122,84	3.375,80	3.359,64	3.263,58
C. Industri Pengolahan	21.241,68	23.934,57	23.754,34	12.047,01	13.325,92	13.105,62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	111,69	134,74	119,04	89,80	107,77	96,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110,12	118,75	121,35	68,75	71,57	72,14
F. Konstruksi	11.113,66	11.883,19	11.281,12	7.042,32	7.481,97	7.110,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.433,94	17.914,95	18.188,57	10.021,92	10.677,87	10.669,37
H. Transportasi dan Pergudangan	8.554,78	9.018,62	9.436,40	4.612,25	4.830,69	4.990,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.814,62	2.043,05	2.005,49	1.088,61	1.197,70	1.167,93
J. Informasi dan Komunikasi	4.594,61	4.848,52	4.898,09	3.928,96	4.184,49	4.236,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.349,26	2.354,79	2.480,33	1.335,49	1.319,12	1.381,29
L. Real Estat	3.076,48	3.287,24	3.366,12	2.011,21	2.115,64	2.147,09
M,N. Jasa Perusahaan	192,48	213,57	204,89	109,30	117,82	113,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.778,36	3.585,21	3.879,18	2.167,08	2.102,74	2.185,96
P. Jasa Pendidikan	3.369,38	3.518,65	3.546,68	1.977,59	2.007,62	2.037,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.112,56	1.278,86	1.229,82	712,62	804,41	768,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.262,84	1.534,16	1.413,10	776,63	931,18	851,65
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	112.092,92	121.548,78	121.701,75	65.953,82	70.338,39	69.560,58

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2025 yang sebesar 5,47 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,61 persen; diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,20 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,98 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,57 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,11 persen. Laju Pertumbuhan dan sumber Pertumbuhan PDRB TW 1-2025 Menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan dan sumber Pertumbuhan PDRB TW 1-2025

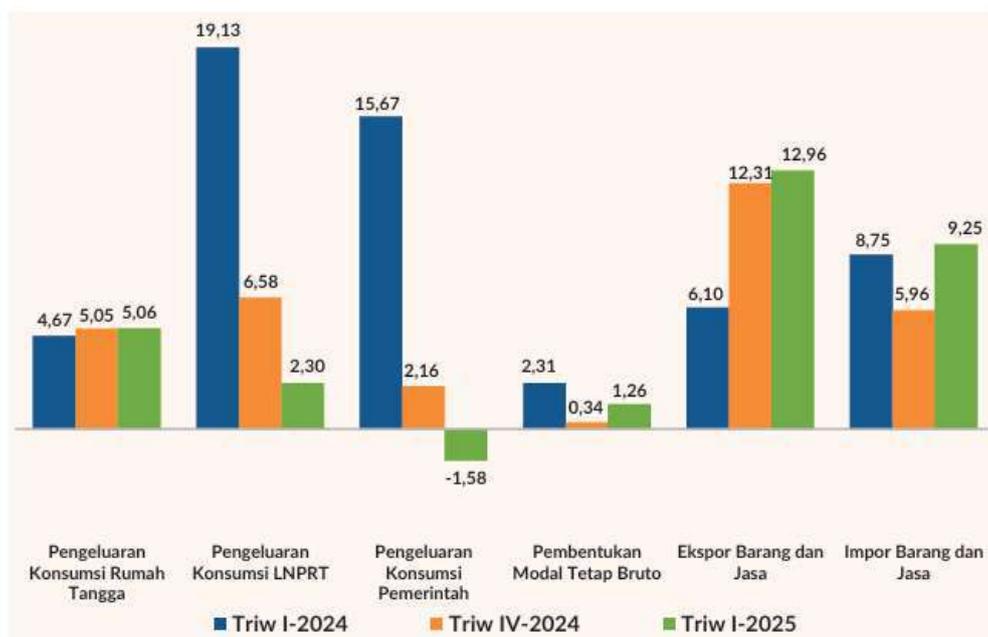
Komponen	Triw I-2025 Terhadap Triw IV-2024 (q-to-q)	Triw I-2025 Terhadap Triw I-2024 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025 (y-on-y)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,06	5,42	1,2
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,86	-3,32	-0,17
C. Industri Pengolahan	-1,65	8,79	1,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-10,65	7,23	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,79	4,93	0,01
F. Konstruksi	-4,97	0,96	0,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,08	6,46	0,98
H. Transportasi dan Pergudangan	3,31	8,2	0,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,49	7,29	0,12
J. Informasi dan Komunikasi	1,25	7,83	0,47
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,71	3,43	0,07
L. Real Estat	1,49	6,76	0,21
M,N. Jasa Perusahaan	-3,72	3,79	0,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	0,87	0,03
P. Jasa Pendidikan	0,67	2,2	0,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,47	7,84	0,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-8,54	9,66	0,11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,11	5,47	5,47

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Dari sisi Pengeluaran, Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan

terjadi pada seluruh komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi sebesar 1,58 persen. Komponen pengeluaran yang tumbuh signifikan adalah Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 12,96 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,06 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,30 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,26 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 9,25 persen.

Grafik 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS Lampung, 2024, diolah

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 64,79 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 55,27 persen; Komponen PMTB sebesar 30,52 persen; Komponen PK-P sebesar 5,26 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,87 persen; dan Komponen Perubahan

Inventori sebesar 0,90 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 58,62 persen.

Tabel 3. 3 Struktur PDRB (ADHB) Provinsi Lampung TW I-2025 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	Tahun 2024	2024		Triw I - 2025
		Triw-I	Triw-IV	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63,21	65,64	63,97	64,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,83	1,95	1,9	1,87
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,57	5,69	8,71	5,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,1	32,22	32,79	30,52
5. Perubahan Inventori	-0,24	0,48	-1,4	0,9
6. Ekspor Barang dan Jasa	55,73	52,87	55,37	55,27
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	58,19	58,87	61,34	58,62
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Pada Triwulan I-2025, ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,47% (y-on-y), meskipun berkontraksi -1,11% (q-to-q). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% dan menyumbang 3,17 poin persentase, serta ekspor barang dan jasa yang melonjak 12,96% dengan kontribusi 6,46 poin persentase. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah dan investasi (PMTB) masing-masing turun -1,58% dan -6,75% (q-to-q), memberikan tekanan terhadap pertumbuhan. Kenaikan impor sebesar 9,25% juga membatasi pertumbuhan, meski penurunan kuartalannya justru berdampak positif terhadap PDRB.

Tabel 3. 4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triw I-2025 terhadap Triw IV-2024 (q-to-q)	Triw I-2025 terhadap Triw I-2024 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025 (y-on-y)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,59	5,06	3,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,87	2,3	0,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-39,78	-1,58	-0,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,75	1,26	0,41

Komponen	Triw I-2025 terhadap Triw IV-2024 (q-to-q)	Triw I-2025 terhadap Triw I-2024 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025 (y-on-y)
5. Perubahan Inventori			
6. Ekspor Barang dan Jasa	-4,55	12,96	6,46
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-8,29	9,25	4,89
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,11	5,47	5,47

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Inflasi Daerah

Pada April 2025, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 2,80 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,35. Inflasi di Provinsi Lampung sedikit lebih tinggi jika dibanding nasional yang sebesar 1,95 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 3,16 persen, dengan IHK sebesar 113,19 dan terendah terjadi Kota Metro sebesar 2,08 persen dengan IHK sebesar 107,96

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 1,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,39 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,48 persen; kelompok kesehatan 2,68 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 5,85 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,47 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 7,54 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu: kelompok transportasi 0,03 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,01 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain: emas perhiasan, bawang merah, akademi/perguruan tinggi, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), cabai merah, bawang putih, minyak goreng, makanan hewan peliharaan, kontrak

rumah, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, sigaret kretek tangan (skt), sekolah menengah atas, bayam, cumi-cumi, santan jadi, nasi dengan lauk, beras, dan vitamin. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: daging ayam ras, tomat, jeruk, telur ayam ras, ayam hidup, sabun cair/cuci piring, bensin, telepon seluler, pengharum cucian/pelembut, angkutan udara, tarif pulsa ponsel, ikan kembung, angkutan antar kota, makanan ringan/snack, tarif kendaraan roda 2 online, popok bayi sekali pakai/diapers, susu bubuk, sepatu anak, buku tulis bergaris, dan popok dewasa.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2025, antara lain: tarif listrik, bawang merah, tomat, emas perhiasan, bawang putih, vitamin, tahu mentah, beras, pembalut wanita, jeruk, kontrak rumah, cabai merah, pelicin/pewangi pakaian, santan jadi, sepatu anak, susu bubuk untuk balita, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (skm), ikan lele, dan ice cream. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, bayam, tarif pulsa ponsel, bensin, tarif kendaraan roda 2 online, jagung manis, telepon seluler, semangka, salak, ketimun, shampo, wortel, obat gosok, cumi-cumi, minyak goreng, dan biskuit.

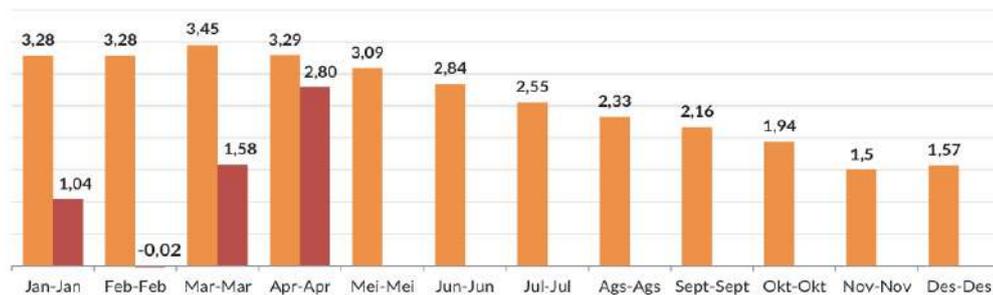
Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,48 persen; kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan memberikan andil sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil sebesar 0,10 persen; kelompok pendidikan memberikan andil sebesar 0,36 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran memberikan andil sebesar 0,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,46 persen. Sebaliknya, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok informasi,

komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan andil sebesar 0,06 persen. Sedangkan kelompok transportasi tidak memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi/deflasi y-on-y Provinsi Lampung.

Perbandingan inflasi antar tahun pada April 2025, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Lampung sebesar 2,80 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,77 persen. Sedangkan tingkat inflasi y-on-y untuk April 2024 sebesar 3,29 persen dan tingkat inflasi y-to-d April 2024 sebesar 0,55 persen.

Tabel 3. 5 Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung bulan April, 2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	April 2024	April 2025
(1)	(2)	(3)
Month to Month (m-to-m)	-0,01	1,19
Year to Date (y-to-d)	0,55	1,77
Year on Year (y-on-y)	3,29	2,80



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Tabel 3. 6 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, April 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (2022=100)

Kabupaten/Kota	April 2025		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kab. Lampung Timur ¹⁾	113,19	3,16	1,19
2. Kab. Mesuji ¹⁾	114,17	2,94	0,92
3. Kota Bandar Lampung ²⁾	108,91	2,71	1,27
4. Kota Metro ²⁾	107,96	2,08	0,66
Provinsi Lampung	110,35	2,80	1,19

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Seluruh kota IHK di Provinsi Lampung yang berjumlah 4 kabupaten/kota mengalami inflasi secara year on year (y-on-y). Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 3,16 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,19. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu bawang merah sebesar 1,30 persen; kopi bubuk sebesar 0,38 persen; bawang putih sebesar 0,37 persen; sigaret kretek mesin (skm) sebesar 0,22 persen; dan emas perhiasan sebesar 0,18 persen.

Sementara itu, inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Metro yaitu sebesar 2,08 persen dengan IHK sebesar 107,96. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu emas perhiasan sebesar 0,38 persen; cabai merah sebesar 0,30 persen; bahan bakar rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelapa; dan mobil masing-masing sebesar 0,16 persen.

Sedangkan secara m-to-m inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 1,27 persen, dengan IHK sebesar 108,91. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu tarif listrik sebesar 0,93 persen; emas perhiasan sebesar 0,15 persen; tomat sebesar 0,10 persen; bawang merah sebesar 0,08 persen; dan vitamin sebesar 0,07 persen.

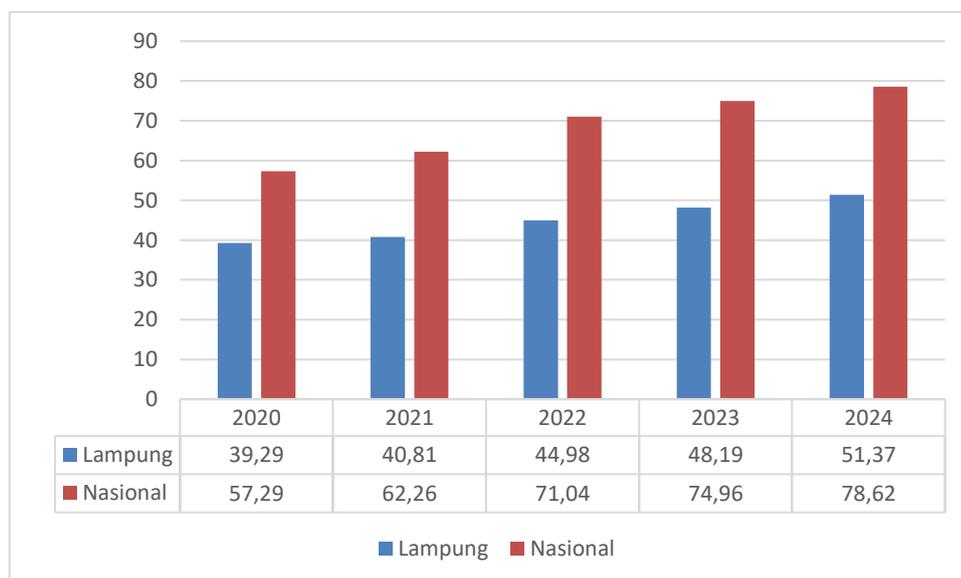
Sedangkan inflasi m-to-m terendah terjadi di Kota Metro yaitu sebesar 0,66 persen, dengan IHK sebesar 107,96. Komoditas yang dominan dalam memberikan andil inflasi m-to-m yaitu tarif listrik sebesar 0,84 persen; emas perhiasan sebesar 0,15 persen; tomat; mobil; dan bawang merah masing-masing sebesar 0,04 persen.

Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita atau Pendapatan Per Kapita digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan. PDRB Perkapita Provinsi Lampung selama kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan dari Rp. 32,29 juta menjadi Rp. 51,37 juta.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi, pendapatan perkapita di Provinsi Lampung, mulai menunjukkan peningkatan sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp 51,37 Juta. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas perekonomian baik dalam hal produksi maupun pengeluaran. Namun bila dibandingkan secara nasional, PDRB Perkapita Lampung juga masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita Nasional yang tercatat sebesar 78,62 Juta Rupiah pada tahun 2024.

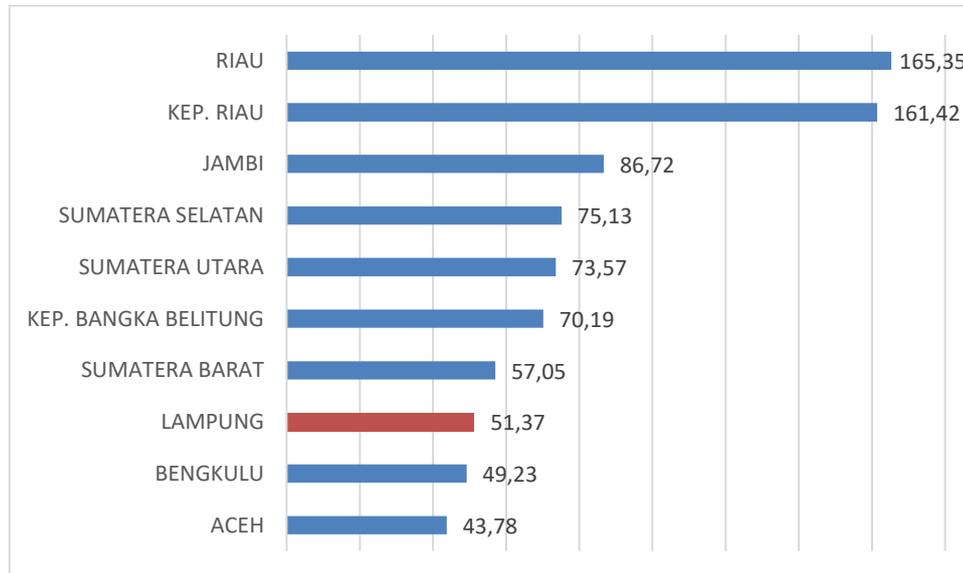
Grafik 3. 3 PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 (ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Bila dibandingkan dengan regional Sumatera, PDRB Perkapita Provinsi Lampung hanya menempati 3 terendah bersama-sama Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor strategis di Provinsi Lampung yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3. 4 PDRB Perkapita Regional Sumatera Tahun 2024
(ADHB, Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan Kabupaten Lampung Barat merupakan Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan perkapita tertinggi sebesar 6,98 persen, diikuti Kabupaten Lampung Utara sebesar 6,59 persen dan Kabupaten Way Kanan sebesar 6,54 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita terendah berada di Kabupaten Pesisir Barat dan Tulang Bawang, masing-masing sebesar 4,97 persen dan 5,44 persen. Pada Tahun 2024, Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar dengan capaian sebesar Rp. 67,7 juta, lebih tinggi dibandingkan dari PDRB per kapita Provinsi Lampung sebesar Rp. 51,3 juta.

Grafik 3. 5 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
Tahun 2021-2024

Wilayah	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)				% Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	
Lampung Barat	24.502.694	26.801.605	28.854.916	31.347.021	6,98%
Tanggamus	25.238.434	27.644.069	29.594.580	31.620.859	6,32%
Lampung Selatan	42.846.721	47.030.522	50.673.994	53.891.022	6,44%
Lampung Timur	39.143.064	43.947.196	46.272.810	49.274.275	6,47%
Lampung Tengah	50.444.973	55.288.835	59.708.174	63.664.190	6,55%
Lampung Utara	38.888.157	41.758.340	44.752.273	48.212.108	5,99%
Way Kanan	30.641.179	33.480.705	35.886.165	38.655.675	6,54%
Tulang Bawang	55.622.657	59.076.967	63.391.442	67.725.407	5,44%
Pesawaran	34.880.325	38.102.217	40.902.935	43.307.742	6,04%
Pringsewu	28.482.974	30.984.113	33.389.120	35.551.935	6,20%
Mesuji	47.213.617	51.038.184	54.420.551	58.581.693	6,02%
Tulang Bawang Barat	41.430.714	45.295.611	48.701.623	52.209.912	6,50%
Pesisir Barat	29.718.448	31.971.817	33.782.387	35.621.996	4,97%
Bandar Lampung	52.259.393	57.257.683	61.967.899	65.758.733	6,46%
Metro	38.592.844	42.000.965	45.236.830	48.263.553	6,26%
Provinsi Lampung	40.806.713	44.982.396	48.191.037	51.369.893	6,47%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

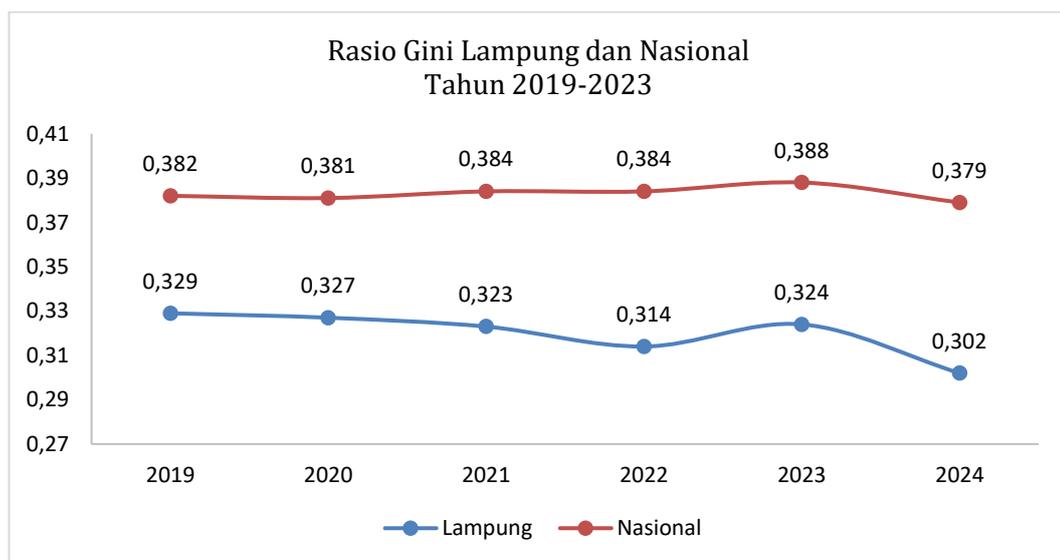
Indeks Gini

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2019 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,330 tahun 2019 menjadi 0,313 pada Tahun 2022, Namun pada tahun 2023 Rasio Gini Provinsi Lampung sedikit meningkat menjadi 0,319 dan nilai ini masih berada dibawah rata-rata Nasional (0,385), dan pada Tahun 2024 nilai Rasio Gini Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,301 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu turun sebesar 0,018 point. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Beberapa upaya dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor (*crosscutting*), perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, percepatan pembangunan pedesaan serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan.

Grafik 3. 6 Rasio Gini Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2020 – 2024



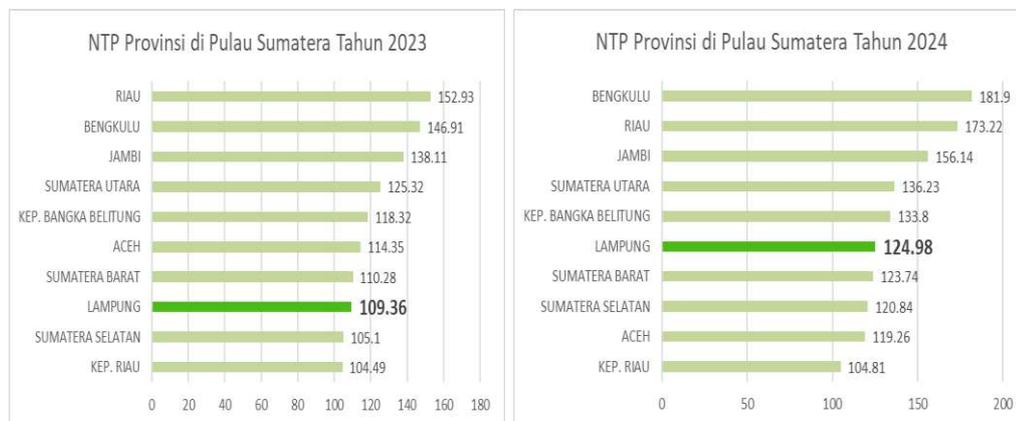
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025, diolah.

Nilai Tukar Petani

Nilai NTP kurang bersaing secara nasional. Data statistik ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir masih menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 27-30 persen) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar

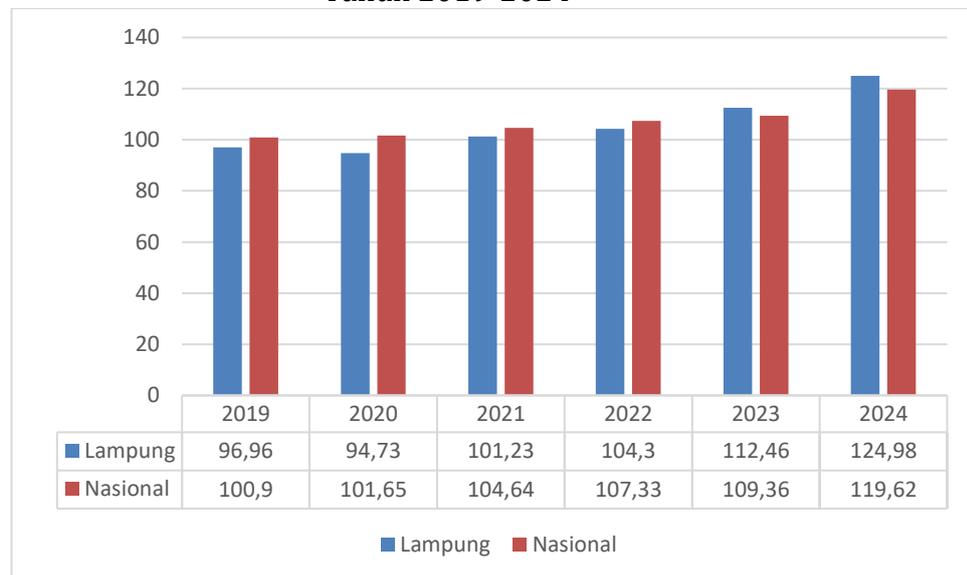
43 persen penduduk yang bekerja. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan pada sektor ini juga merupakan tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan menjadi *bumper* untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antar penduduk. Capaian pertumbuhan 2 persen di tahun 2022 merupakan capaian terbaik sepanjang periode pengamatan tahun 2017-2022 perlu terus dijaga kesinambungannya.

Grafik 3. 7 NTP Provinsi di Sumatera Tahun 2024



Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di pedesaan. NTP juga menjadi indikator dari kesejahteraan pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif melambat. Di lingkup regional Sumatera, Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung berada pada posisi ke 6(enam) dengan nilai 124,98, NTP tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan nilai 181,9. Riau 173,,22 , Jambi 156,34, Sumatera Utara 136,23 dan Kep Bangka Belitung 134,8. NTP terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1104,81 . Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada tahun 2023 berada pada posisi ke 8 sebesar 109,36, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada NTP Provinsi Lampung yakni sebesar 15,62 poin .

Grafik 3. 8 Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2019-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

(Penghitungan NTP sejak tahun 2020 dst menggunakan tahun dasar 2018=100, dimana terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100).

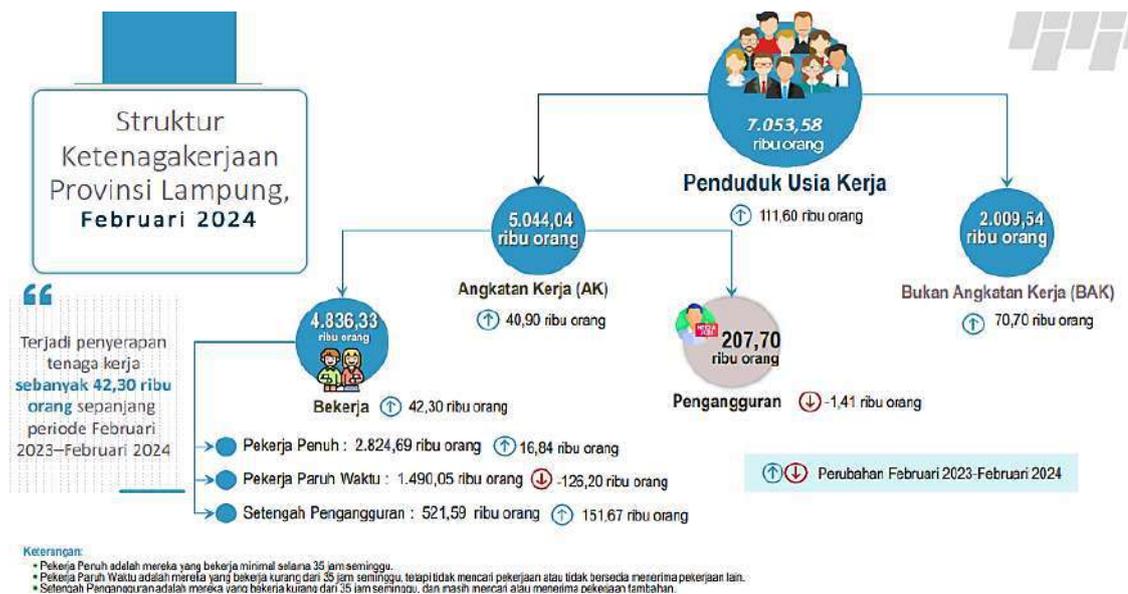
3.1.2. Perkembangan Sosial Ekonomi Daerah s.d Triwulan I 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Seiring membaiknya perekonomian di Lampung, pada periode Februari 2023 sampai dengan Februari 2024 pasar tenaga kerja mampu menyerap 42,30 ribu tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sebanyak 1,41 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada **Februari 2024 sebesar 4,12% turun dari 4,18% pada Februari 2023.**

Jika dibandingkan se Wilayah Sumatera, TPT Provinsi Lampung terendah ke-5 setelah Sumatera Selatan (3,97), Riau (3,85), Bangka Belitung (3,85%) dan Bengkulu (3,17%). TPT tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (6,94%).

Grafik 3. 9 Struktur Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung Tahun 2024

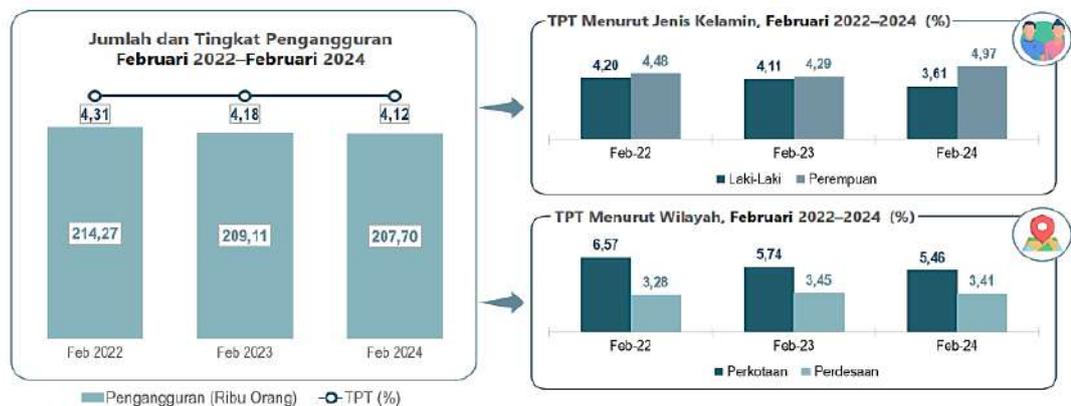


Sumber: BPS Lampung, 2024

Grafik 3. 10 Tingkat Pengangguran Februari 2022 – Februari 2024 Provinsi Lampung

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUN

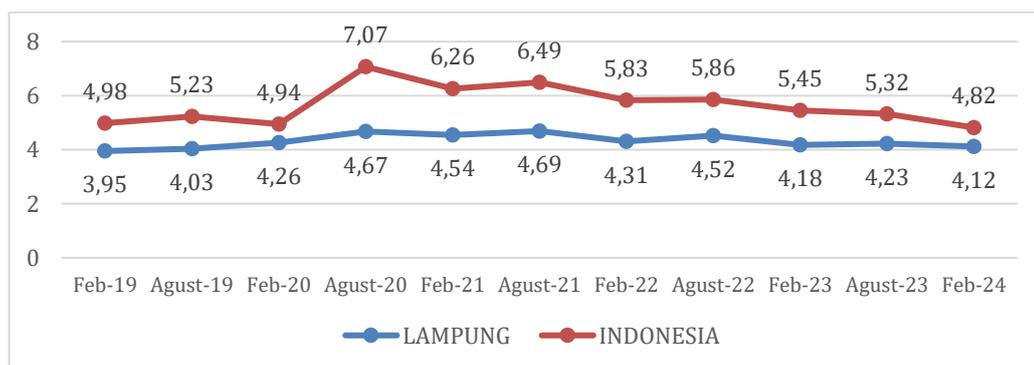
Terjadi penurunan jumlah dan tingkat pengangguran



Sumber: BPS Lampung, 2024

Sejak Pandemi Covid-19 di Tahun 2020, TPT Provinsi Lampung periode Februari sangat tinggi hingga mencapai 4,26 dan terus meningkat menjadi 4,54 di Tahun 2021. Pada Tahun 2022, TPT Provinsi Lampung sudah mulai menunjukkan penurunan menjadi 4,31 dan turun kembali pada Tahun 2023 menjadi 4,18. Pada Februari 2024, TPT Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,06 poin, hal ini merupakan indikasi mulai pulihnya perekonomian yang mengakibatkan berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan dibandingkan dengan Februari 2022. Secara nasional capaian TPT Provinsi Lampung lebih baik dibandingkan TPT Nasional (4,82) pada Tahun 2024.

Grafik 3. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia dan Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Indonesia, 2024

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Tahun 2023, terbanyak berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, yaitu sebanyak 12.108 orang dan diikuti dengan pendidikan Diploma I/II/III/Akademi sejumlah 7.621 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar dengan jumlah paling sedikit berada pada pendidikan Tidak/Belum Tamat SD sejumlah 38 orang dan pendidikan dari Universitas berjumlah 2.641. Dari data terlihat bahwa pencari kerja terbanyak saat ini berada pada pendidikan SMA dan pendidikan Diploma I/II/III/Akademi.

Tabel 3. 7 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin (orang) Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	-	-
Tidak/Belum Tamat SD	5	33	38
Sekolah Dasar	2.887	2.487	5.374
Sekolah Menengah Pertama	2.699	3.546	6.245
Sekolah Menengah Atas	6.121	5.987	12.108
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	3.652	2.598	6.250
Diploma I/II/III/Akademi	3.974	3.647	7.621
Universitas	1.654	987	2.641
Jumlah	20.992	19.285	40.277

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Di tingkat kabupaten/kota TPT tertinggi berada di Kota Bandar Lampung yang mencapai 7,44% diikuti Lampung Utara (5,85%), Lampung Selatan (4,84%) dan Pesawaran yang mencapai 4,36%. Sedangkan Lampung Barat berada di posisi terendah untuk kategori TPT dengan angka 2,09%.

Tabel 3. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024

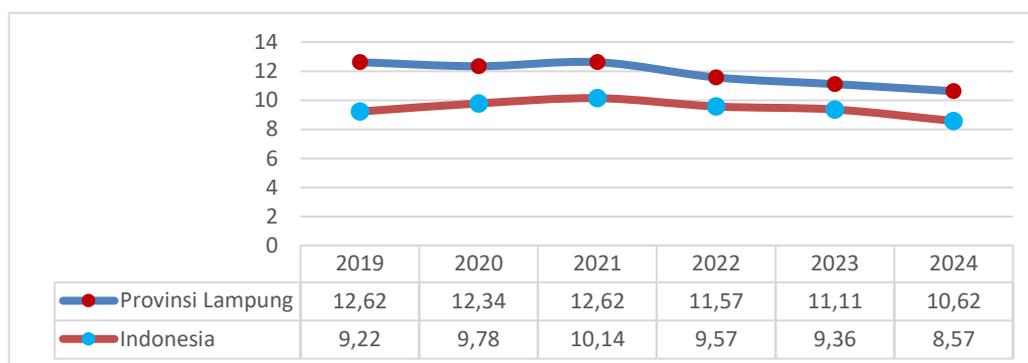
Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	2,83	2,1	2,25	2,09
Tanggamus	2,93	3,7	3,35	3,19
Lampung Selatan	5,27	5,31	4,95	4,84
Lampung Timur	3,05	3,3	3,09	3,02
Lampung Tengah	4,31	3,56	3,25	3,33
Lampung Utara	6,14	6,15	5,73	5,85
Way Kanan	3,36	3,28	3,07	3,27
Tulang Bawang	4,1	3,52	3,46	3,23
Pesawaran	4,19	5,06	4,76	4,36
Pringsewu	4,85	4,77	4,66	4,39
Mesuji	3,42	3,22	2,46	2,85
Tulang Bawang Barat	3,35	4,12	3,89	4,12
Pesisir Barat	3,08	3,73	3,47	3,04
Bandar Lampung	8,85	7,91	7,43	7,44
Metro	5	4,34	3,6	3,71
Provinsi Lampung	4,69	4,52	4,23	4,19

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 12,76 persen di tahun 2020 menjadi 10,62 persen September 2024, namun angka kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 8,57 persen. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 939,30 ribu orang, menurun 1,9 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 31,37 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 7,91 persen, dibandingkan Maret 2024 menurun sebesar 0,27 persen. Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,04 persen, meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,07 persen.

Grafik 3. 12 Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Indonesia 2019-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Tingkat kemiskinan diklasifikasikan menjadi desa dan kota, yang menjadi faktor pembeda terletak pada garis kemiskinan antara kota dan desa. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kecukupan untuk hidup layak yang berbeda antara kota dan desa. Penduduk miskin di Provinsi Lampung terkonsentrasi di perdesaan yang jumlahnya hampir tiga kali lipat dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Tabel 3.13 menunjukkan, bila dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 4,50 ribu orang (dari 244,04 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 239,51 ribu orang pada September 2024). Sementara itu,

pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebanyak 2,60 ribu orang (dari 697,19 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 699,80 ribu orang pada September 2024).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024-September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 4,50 ribu orang, sedangkan di pedesaan naik sebesar 2,60 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,18 persen menjadi 7,91 persen. Sementara itu, di pedesaan naik dari 11,97 persen menjadi 12,04 persen.

Tabel 3. 9 Jumlah Penduduk Miskin Lampung 2019–2024 (Ribu Jiwa)

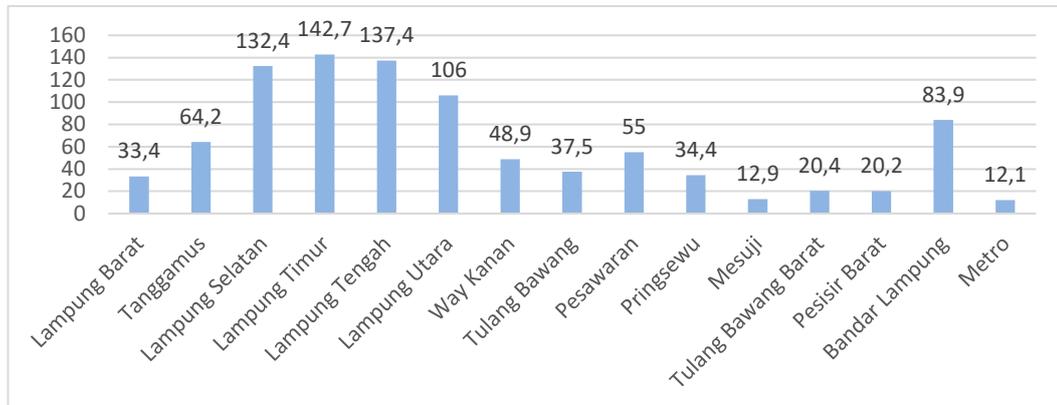
LOKASI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KOTA	224.69	259.28	236.48	239.11	232.96	239,51
DESA	816.79	831.86	770.54	756.48	737.71	699,80
KOTA+DESA	1041.48	1091,14	1007.02	995.59	970.67	939,30

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Hal yang patut dicermati bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perkotaan, trend cenderung menurun, namun akibat *pandemic covid-19*, pada Tahun 2020 meningkat sebesar 15,39 persen. Selanjutnya menurun di Tahun 2021 namun kembali meningkat di Tahun 2022. Untuk Tahun 2023 kembali menurun dan di Tahun 2024 kembali meningkat dan masih belum lebih baik dibandingkan Tahun 2019. Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan, trend pertumbuhannya menurun tiap tahunnya, walaupun di Tahun 2020 sempat meningkat. Hal ini menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tidak stabil dan memiliki karakteristik khas perkotaan yang memerlukan penanggulangan kemiskinan yang berbeda dengan karakteristik pedesaan.

Untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota, empat (4) Kabupaten terbanyak penduduk miskin adalah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara, walaupun dengan persentase penduduk miskin terbesar namun dari segi jumlah penduduk miskin, menempati urutan keempat setelah Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Selatan.

Grafik 3. 13 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2024

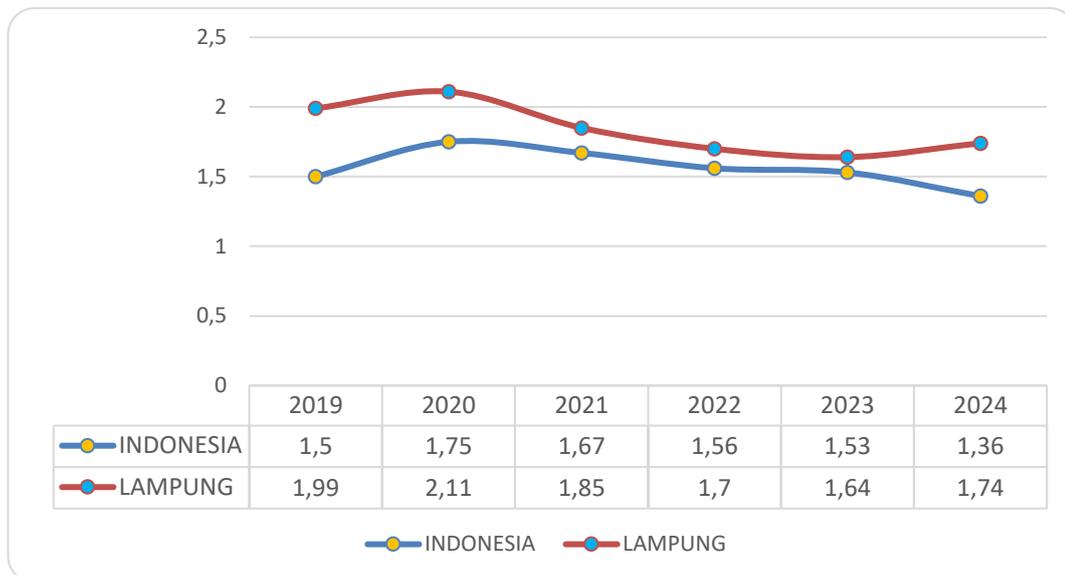


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 1,99 di tahun 2019 menjadi 1,64 pada Tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 1,74 di Tahun 2024. Penurunan P1 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin mendekati garis kemiskinan, begitu juga sebaliknya. Peningkatan Nilai P1 di Provinsi Lampung seharusnya diwaspadai karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin ini semakin jauh atau semakin dalam dari garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P1 Nasional yang pada September 2024 berada pada angka 1,36 (menurun dari 1,53 menjadi 1,36).

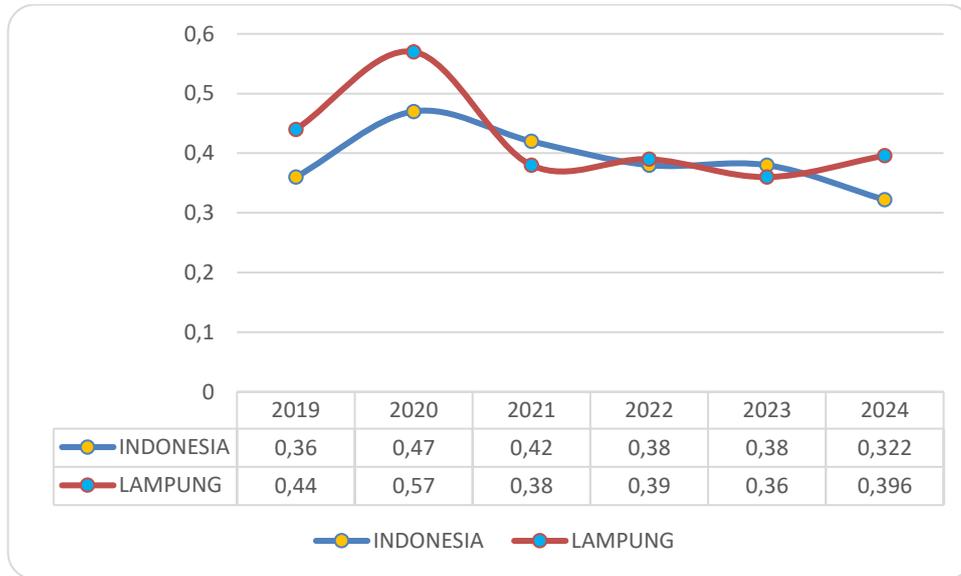
Grafik 3. 14 Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Lampung dan Indonesia 2019-2024



Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berguna untuk memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Trend Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung menurun dari 0,44 Tahun 2019 menjadi 0,396 di September 2024. Hal ini berarti bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil. Dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,396, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,331. Bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Lampung masih berada di atas Indeks P2 Nasional yang pada September 2024 berada pada angka 0,322, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,347.

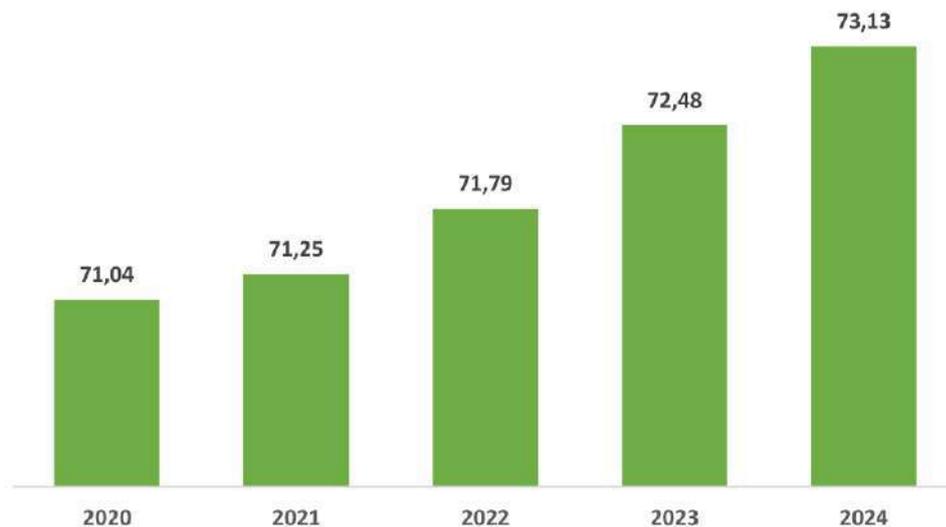
Grafik 3. 15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional dan Lampung



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Lampung terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Lampung rata-rata meningkat sebesar 0,73 persen per tahun, dari 71,04 pada tahun 2020 menjadi 73,13 pada tahun 2024.

Grafik 3. 16 IPM Lampung Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua peningkatan dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator ini mengalami

percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya yaitu dapat dilihat dari peningkatan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,54 persen dibanding tahun sebelumnya 4,19 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) tidak terjadi perubahan dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 0,30 persen. Berbeda dengan dimensi pengetahuan, pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 terjadi perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1,34 persen menjadi 0,84 persen. Begitu pula dengan Harapan Lama Sekolah terjadi perlambatan pertumbuhan dari 0,24 persen menjadi 0,08 persen pada tahun 2024. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024

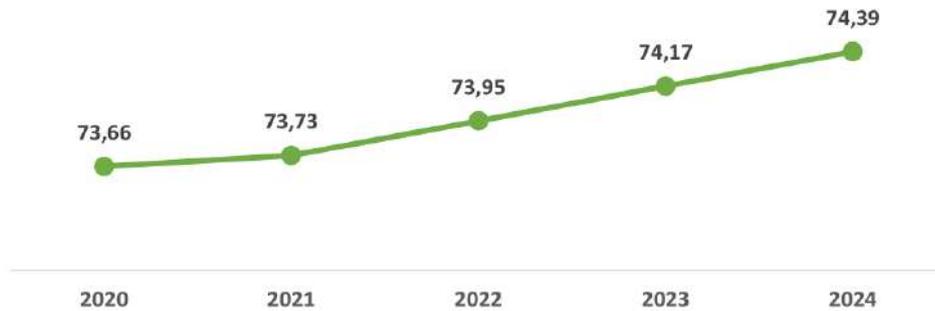
Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,66	73,73	73,95	74,17	74,39
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,05	8,08	8,18	8,29	8,36
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.982	10.038	10.336	10.769	11.258
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,04	71,25	71,79	72,48	73,13

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,73 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Lampung adalah 73,66 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,39 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun (0,30 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,23 persen per tahun.

Grafik 3. 17 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Lampung (tahun), 2020-2024

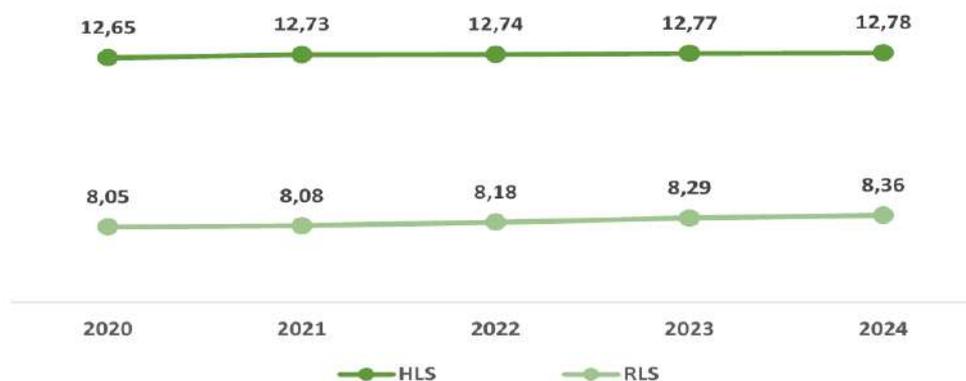


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Lampung rata-rata meningkat 0,26 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 sebesar 0,32 persen. Sedangkan RLS, pada tahun 2024 meningkat 0,07 tahun (0,84 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 sebesar 0,99 persen.

Grafik 3. 18 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Lampung, 2020-2024

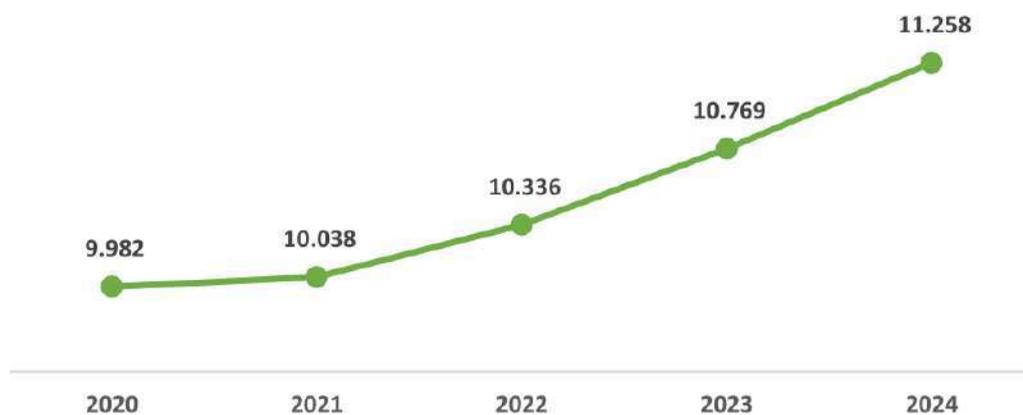


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Lampung mencapai Rp11,258 juta per tahun. Capaian ini meningkat 489 ribu rupiah (4,54 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,57 persen per tahun.

Grafik 3. 19 Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan Lampung (ribu rupiah), 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi status capaian, terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian IPM. Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro meningkat dari status “tinggi” ke “sangat tinggi”. Selain itu, ada 3 kabupaten yang berubah status capaian IPM dari status “sedang” ke “tinggi”, yaitu Kabupaten Tanggamus, Pesawaran dan Tulang Bawang Barat. Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 kabupaten/kota. Sedangkan 1 kabupaten lainnya masih berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), yaitu kabupaten Mesuji.

Tabel 3. 11 IPM dan Komponen IPM Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)					Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lampung Barat	73,42	73,47	73,63	73,78	73,96	12,25	12,26	12,27	12,29	12,3
2	Tanggamus	73,44	73,51	73,69	73,87	74,08	12,18	12,19	12,3	12,31	12,33
3	Lampung Selatan	73,79	73,85	74,03	74,22	74,46	12,5	12,52	12,54	12,64	12,65
4	Lampung Timur	73,52	73,56	73,75	73,95	74,19	12,85	12,86	12,96	12,97	12,98
5	Lampung Tengah	73,79	73,82	73,99	74,17	74,38	12,92	12,93	12,95	13,04	13,17
6	Lampung Utara	73,48	73,54	73,73	73,91	74,12	12,48	12,49	12,54	12,55	12,56
7	Way Kanan	73,68	73,73	73,93	74,11	74,31	12,36	12,37	12,42	12,43	12,44
8	Tulangbawang	73,44	73,47	73,64	73,81	74,02	11,89	11,95	12,28	12,29	12,3
9	Pesawaran	73,44	73,5	73,65	73,8	74	12,36	12,59	12,61	12,62	12,63
10	Pringsewu	73,9	73,98	74,15	74,33	74,56	12,83	12,84	12,91	12,92	12,93
11	Mesuji	73,35	73,4	73,56	73,71	73,9	11,63	11,64	11,8	11,81	11,82
12	Tulang Bawang Barat	73,59	73,62	73,83	74,02	74,23	12,05	12,06	12,09	12,1	12,12
13	Pesisir Barat	73,39	73,46	73,61	73,75	73,93	11,99	12	12,13	12,14	12,16
14	Kota Bandar Lampung	74,1	74,14	74,33	74,53	74,79	14,64	14,7	14,71	14,72	14,73
15	Kota Metro	74,7	74,73	74,92	75,14	75,43	14,47	14,75	14,76	14,77	14,79
	Lampung	73,66	73,73	73,95	74,17	74,39	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.3. Kerangka Ekonomi Daerah s.d Akhir Tahun 2024, Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Global Tahun 2025

Pada Triwulan I 2025, perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan performa yang kuat dengan mencatat pertumbuhan sebesar **5,47% (year-on-year)** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2024 (quarter-to-quarter), terjadi kontraksi sebesar **1,11%**. Penurunan ini bersifat musiman dan lazim terjadi pada awal tahun seiring dengan menurunnya belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi pasca liburan akhir tahun.

Sumber Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2025 terutama didorong oleh kinerja positif dari sisi pengeluaran. Komponen **ekspor barang dan jasa** mencatatkan pertumbuhan paling signifikan, yakni

sebesar **12,96%**. Kinerja ekspor yang kuat ini menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah, mencerminkan meningkatnya permintaan dari pasar luar negeri terhadap komoditas unggulan Lampung.

Selain itu, **konsumsi rumah tangga** juga memberikan kontribusi penting dengan pertumbuhan stabil sebesar **5,06%**. Peningkatan konsumsi ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran masyarakat, khususnya dalam rangka menyambut **Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)**, yang mendorong perputaran ekonomi domestik.

Di sisi lain, **pengeluaran konsumsi pemerintah** mengalami kontraksi yang cukup tajam sebesar **-39,78%**. Penurunan ini sejalan dengan pola musiman anggaran di mana realisasi belanja pemerintah cenderung rendah pada awal tahun, sehingga belum mampu memberikan dorongan signifikan terhadap aktivitas ekonomi.

Dari sisi produksi, struktur perekonomian Provinsi Lampung pada Triwulan I 2025 menunjukkan bahwa sektor "**jasa lainnya**" mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni sebesar **9,66%**. Capaian ini mencerminkan peningkatan aktivitas pada bidang jasa sosial dan kemasyarakatan, termasuk layanan hiburan, rekreasi, dan kegiatan sosial lainnya yang turut menopang dinamika ekonomi daerah.

Sektor-sektor tradisional seperti **pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan**, serta **perdagangan besar dan eceran** tetap menjadi tulang punggung utama perekonomian Lampung. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan total andil sebesar **58,83%**. Hal ini mencerminkan ketergantungan Lampung terhadap sektor primer dan kegiatan ekonomi berbasis produksi serta distribusi barang.

Prospek Ekonomi Global Tahun 2025

Pada tahun 2025, prospek ekonomi global diperkirakan mengalami **pertumbuhan yang moderat**, di tengah tantangan global yang cukup kompleks. Dinamika ekonomi di berbagai kawasan masih dipengaruhi oleh ketidakpastian perdagangan, tekanan geopolitik, serta perubahan arah kebijakan moneter di banyak negara.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai **3,3%** pada tahun 2025 dan berlanjut dengan angka yang sama pada tahun 2026. Meskipun menunjukkan pemulihan, proyeksi ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan global sebelum pandemi COVID-19 yang berada di kisaran **3,7%**. Hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi dunia belum sepenuhnya kembali ke kondisi normal dan masih menghadapi berbagai tantangan.

Senada dengan IMF, **Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)** juga memprediksi pertumbuhan global sebesar **3,3%** pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 3,2%, mencerminkan adanya perbaikan bertahap di berbagai sektor ekonomi global.

Sementara itu, **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** melalui laporan *World Economic Situation and Prospects 2025* memberikan proyeksi yang lebih konservatif. PBB memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan tetap stagnan di angka **2,8%**, sama seperti tahun sebelumnya. Stagnasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan struktural dan eksternal yang menghambat percepatan pemulihan ekonomi secara global.

Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 menunjukkan arah yang positif, sejumlah risiko utama diperkirakan masih akan membayangi dan berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi dunia. Salah satu risiko terbesar adalah **ketegangan perdagangan internasional**, khususnya antara Amerika Serikat dan negara-negara mitra

dagangnya. Peningkatan tarif, kebijakan proteksionis, serta ketidakpastian regulasi dapat menekan arus investasi global dan menghambat kegiatan ekspor-impor, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas rantai pasok dan perdagangan dunia.

Selain itu, **ketidakstabilan geopolitik** menjadi ancaman serius yang turut menciptakan iklim ketidakpastian global. Konflik regional, persaingan geopolitik antarnegara besar, dan ketegangan politik di berbagai belahan dunia menurunkan kepercayaan pelaku pasar serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan komoditas.

Di sisi lain, **inflasi dan kebijakan moneter** juga tetap menjadi isu sentral. Meskipun tren inflasi global menunjukkan penurunan, tekanan harga masih dirasakan di banyak negara, terutama di negara berkembang. Biaya hidup yang meningkat, harga barang pokok yang fluktuatif, serta suku bunga yang masih tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

3.1.4 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal, serta menjaga stabilitas makroekonomi di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tekanan risiko inflasi di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik, berikut adalah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung yang perlu mendapatkan perhatian:

1. **Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Ekosistem ekonomi desa.** Di tengah tantangan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis melalui kebijakan pertumbuhan ekonomi berbasis **ekosistem ekonomi desa**. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki setiap desa. Pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang saling terhubung antara

pelaku usaha desa seperti petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes, dengan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan.

Salah satu pilar utama kebijakan ini adalah penguatan **BUMDes** sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pemerintah Provinsi memberikan dukungan modal, pelatihan manajerial, dan akses pemasaran bagi BUMDes agar mampu mengelola unit usaha produktif yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Lampung, yang dikenal sebagai produsen kopi, singkong, pisang, dan lada, juga didorong untuk melakukan hilirisasi produk melalui pengembangan industri pengolahan berskala kecil dan menengah. Desa-desa tidak lagi hanya menjadi produsen bahan mentah, melainkan juga pelaku utama dalam rantai nilai ekonomi.

Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi semata, tetapi juga merangkul potensi sosial dan budaya desa. Pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian nilai-nilai lokal menjadi bagian penting dari ekosistem yang dibangun. Pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. **Peningkatan produktivitas sektor primer (hulu)** dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program Asta Cita. Dalam hal ini, termasuk optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dan tepat guna; intensifikasi penggunaan bibit unggul, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung aktivitas tanam; dan perluasan good agricultural practice (GAP). Dalam hal penerapan GAP, aspek keberlanjutan juga perlu menjadi perhatian, terutama pada komoditas perkebunan berorientasi ekspor (kelapa sawit, kopi, karet, kakao, kayu) di tengah meningkatnya tuntutan tanggung jawab ekologi dan sosial, khususnya dari negara-negara Uni Eropa yang menjadi salah satu tujuan ekspor utama Lampung.

3. **Akselerasi program hilirisasi komoditas SDA unggulan** (kelapa sawit, karet, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) untuk meningkatkan nilai tambah produk industri pengolahan dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global. Dalam hal ini, kegiatan reseach & development untuk pengembangan inovasi pangan berbasis SDA unggulan perlu terus didorong melalui sinergi pemerintah daerah, pihak swasta, industri dan perguruan tinggi. Selain itu perlu optimalisasi dan pembukaan kawasan industri baru dalam rangka mempercepat transformasi sektor primer menuju sektor industri.
4. Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja, Pemerintah Daerah perlu **mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan** daerah guna memastikan setiap pengeluaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Untuk memastikan keberlanjutan program efisiensi anggaran, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja pada program-program prioritas dan produktif yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat seperti membangun infrastruktur yang berkualitas dan menghindari inefisiensi, subsidi kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang lebih efektif. Selain itu Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi pengelolaan anggaran yang lebih efisien melalui digitalisasi keuangan pemerintah dan simplifikasi sistem pembayaran pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah.
5. **Meningkatkan peran sektor pariwisata** dalam mendukung perekonomian daerah melalui Tourism Led Growth Hypothesis dimana pariwisata menjadi determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jumlah tamu baik wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Lampung. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa alternatif kebijakan yaitu (1) membuat bisnis model pariwisata yang inklusif dengan melibatkan penduduk miskin atau setempat sebagai karyawan, pengusaha, supplier dan distributor, (2) meningkatkan human

capital melalui training untuk meningkatkan kualitas pelayanan, (3) membangun institutional capacity yang meliputi asosiasi hotel, tourist guide, Kadin, universitas dan SMK yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan (4) kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung tingkat persaingan (competitiveness) dan inklusifitas penduduk miskin.

6. **Mendorong partisipasi sektor swasta** untuk meningkatkan investasi melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar pendukung konektivitas; perbaikan iklim investasi melalui simplifikasi regulasi dan jaminan kepastian hukum; inovasi skema insentif fiskal untuk mendorong minat investor; serta memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan termasuk penyelesaian debottlenecking kendala proyek potensial untuk mencapai status clean and clear.
7. **Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah** melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan berkesinambungan, secara meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Tabel 3. 12 Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Provinsi Lampung

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target Provinsi sesuai RKP Tahun 2025	Target RKPD Provinsi 2025	Target Perubahan RKPD Perubahan 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 - 5,30	4,90 - 5,30	4,20 - 5,50
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86 - 4,00	3,86 - 4,00	3,86 - 4,00
3.	Rasio Gini	0,318 - 0,321	0,318 - 0,321	0,300 - 0,295
4.	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,54	0,54	0,54
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 - 10,00	9,50 - 10,00	9,50 - 10,00
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	62,79	62,79	62,79

Sumber : Bappeda, Diolah, 2025

3.1.5. Perubahan Kerangka Ekonomi Tahun 2025

Meninjau perkembangan perekonomian daerah terkini yang telah diuraikan sebelumnya, serta dengan memperhatikan tantangan dan prospek serta berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan bahwa asumsi dasar makro ekonomi daerah tahun 2025, mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2025

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2025	Sasaran pada APBD 2025	Capaian s/d Tw II-2025	Sasaran pada Perubahan RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 - 5,30	5,00 - 5,30	5,47 (Tw 1-2025)	5,2 – 5,5
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52,6-54,6	52,6-54,6	51,36 (2024)	54,5 – 60,0
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97	72,97	73,13 (2024)	73,70
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 3,86	4,0 - 3,86	4,07 (Feb 2025)	4,00 - 3.86
5	Tingkat Kemiskinan (%)	10,0 – 9,50	10,0 – 9,50	10,62 (Sept 2024)	10,00 – 9,50
6	Indeks Gini	0,318 – 0,321	0,318 – 0,321	0,301 (Sept 2024)	0,300-0,295
7	Inflasi (%)	1,50 – 3,50	1,50 – 3,50	2,80 (April 2025)	1,50 – 3,50
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78	78	78,08 (2024)	78,29
9	Nilai Tukar Petani	116 - 117	116 - 117	127,90 (April 2025)	129,23
10	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,59	6,65	6,87 (2024)	--
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	13	13	14,62 (2024)	15,32
12	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	-	-	60,64 (2024)	62,79

Sumber : Bappeda, Diolah, 2025

3.2. Kerangka Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK dan adanya perubahan kerangka kebijakan keuangan negara tahun 2024.

Selain itu dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Provinsi Lampung akan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;

- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Manengah (UMKM).

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan Anggaran Tahun 2025, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :
 1. Mengoptimalkan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
 3. Mengoptimalkan pembayaran pajak melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan melakukan penghapusan Pokok Tunggakan PKB, denda tunggakan PKB, denda berjalan PKB sehingga masyarakat hanya membayar Pokok PKB 1 tahun berjalan saja.
 4. Mengoptimalkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1

(pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).

5. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.
6. Mengupayakan adanya *reward* bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
7. Mengoptimalkan pendataan dan pemungutan Pajak Alat Berat sebagai tindaklanjut UU Nomor 1 Tahun 2022.
8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
9. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
10. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian Bahan Bakar Minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
11. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.
12. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
13. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
14. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
15. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.

16. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan stakeholder penghasil pendapatan daerah.
17. Bekerjasama dengan BPKAD dan OPD dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah dalam mengoptimalkan PAD.
18. Mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta
20. Mengoptimalkan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

2) Pendapatan Transfer yang meliputi :

1. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di Provinsi Lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Psl 21.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
3. Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer.
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan .



Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan Tahun 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3. 14 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2023–2025 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025	Realisasi APBD 2025 s.d Mei	% Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH	6.987.319.981.739,03	7.451.586.834.830,78	7.557.909.717.848,21	2.256.611.499.764,61	29,9%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.766.194.060.533,03	4.039.218.171.476,78	4.020.052.532.113,21	1.152.279.518.274,61	28,7%
4.1.01	Pajak Daerah	3.232.821.385.715,00	3.301.063.910.591,76	2.921.136.897.166,00	869.780.611.264,56	29,8%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.066.246.737,00	485.949.536.889,25	450.121.878.920,00	141.067.434.594,49	31,3%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.110.035.229,39	193.520.241.461,01	316.148.941.374,21	27.350.092.457,96	8,7%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	475.196.392.851,64	58.684.482.534,76	332.644.814.653,00	114.081.379.957,60	34,3%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.210.209.160.206,00	3.401.546.333.354,00	3.524.066.287.000,00	1.102.370.301.490,00	31,3%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.178.010.152.004,00	3.375.379.510.190,00	3.489.381.614.000,00	1.101.529.000.490,00	31,6%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.199.008.202,00	26.166.823.164,00	34.684.673.000,00	841.301.000,00	2,4%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.916.761.000,00	10.822.330.000,00	13.790.898.735,00	1.961.680.000,00	14,2%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.962.951.000,00	10.822.330.000,00	13.790.898.735,00	1.961.680.000,00	14,2%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.953.810.000,00	-	-	-	

Sumber : Bappeda, Diolah, 2025



Tabel 3. 15 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2025 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	Realisasi APBD 2025 s.d Mei 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH	7.114.050.629.066,21	7.557.909.717.848,21	2.256.611.499.765,00	7.550.505.476.743,00	-7.404.241.106,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.710.910.739.734,21	4.020.052.532.113,21	1.152.279.518.275,00	4.057.947.607.743,00	37.895.075.629,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.817.166.899.379,00	2.921.136.897.166,00	869.780.611.265	3.375.837.033.233	454.700.136.067
4.1.02	Retribusi Daerah	419.450.084.328,00	450.121.878.920,00	141.067.434.594	458.409.354.873	8.287.475.953
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	61.148.941.374,21	316.148.941.374,21	27.350.092.458	27.601.917.196	-288.547.024.179
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	413.144.814.653,00	332.644.814.653,00	114.081.379.958	196.099.302.441	-136.545.512.212
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.389.348.990.597,00	3.524.066.287.000,00	1.102.370.301.490,00	3.431.742.520.000,00	-92.323.767.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354.664.317.597,00	3.489.381.614.000,00	1.101.529.000.490	3.397.057.847.000	-92.323.767.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.684.673.000,00	34.684.673.000,00	841.301.000	34.684.673.000	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.790.898.735,00	13.790.898.735,00	1.961.680.000,00	60.815.349.000,00	47.024.450.265,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.790.898.735,00	13.790.898.735,00	1.961.680.000	60.815.349.000	47.024.450.265

Sumber : Bappeda, Diolah, 2025

Berdasarkan Rapat TAPD tanggal 11 Februari 2025 sebagai tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan efisiensi ke seluruh Perangkat Daerah. Efisiensi juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan pagu tunda bayar tahun 2024. Total Pagu **hasil efisiensi sebesar 437 Milyar** dari target awal sebesar 625 milyar. Berdasarkan hasil pembahasan Target Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2025 diperkirakan ada penurunan dan kenaikan dari beberapa komponen pendapatan. Secara total Proyeksi pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2025 turun sebesar Rp. 7.404.241.105,- dibanding Proyeksi Pendapatan pada APBD Tahun 2025.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diarahkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) agar lebih efisien dan produktif yang dilakukan melalui :

- Memprioritaskan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah seperti : gaji dan tunjangan pegawai, kepala daerah dan anggota dewan; belanja transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bunga, pembayaran pokok utang daerah, atau belanja sejenis lainnya; termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Daerah juga dialokasikan untuk melaksanakan sasaran pembangunan serta program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024,



dan mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional pasca *Covid-19*; yang diselaraskan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program, kegiatan, atau sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.



Tabel 3. 16 Realisasi Belanja Provinsi Lampung Tahun 2023–2025 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025	Realisasi APBD 2025 s.d Mei 2025	% Realisasi
5	BELANJA DAERAH	7.048.993.246.382	7.506.810.403.825	7.632.909.517.648,21	1.856.404.576.194,38	24,3%
5.1	BELANJA OPERASI	4.628.237.542.976	5.164.775.276.916	5.203.967.155.913,75	1.439.787.231.571,38	27,7%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.066.144.093.644	2.386.292.035.527	2.916.687.302.416,00	834.699.280.016,00	28,6%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.392.255.140	1.978.510.550.970	1.897.854.129.785,63	449.625.574.181,38	23,7%
5.1.03	Belanja Bunga	3.112.977.135	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	2.800.000.000	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	570.388.618.057	797.803.865.119	385.958.861.512,62	155.177.977.374,00	40,2%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.399.599.000	2.168.825.300	3.466.862.199,50	284.400.000,00	8,2%
5.2	BELANJA MODAL	1.207.289.357.587	797.024.095.018	980.196.729.933,19	319.659.701.978,00	32,6%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.794.882.500	1.077.864.999	42.472.500.000,00	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.794.882.500	1.077.864.999	42.472.500.000,00	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892	1.406.273.131.801,27	96.957.642.645,00	6,9%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.210.671.463.319	1.543.933.166.892	1.405.273.131.801,27	96.957.642.645,00	6,9%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	1.000.000.000,00	-	-

Sumber : Bappeda, Diolah, 2025



Tabel 3. 17 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Belanja Provinsi Lampung Tahun 2025 (Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	Realisasi APBD 2025 s.d Mei 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ Berkurang
5	BELANJA DAERAH	7.632.909.517.648,21	7.632.909.517.648,21	1.856.404.576.194,38	7.619.429.069.345,63	-13.480.448.302,58
5.1	BELANJA OPERASI	5.203.967.155.913,75	5.203.967.155.913,75	1.439.787.231.571,38	5.077.519.091.827,26	-126.448.064.086,49
5.1.01	Belanja Pegawai	2.916.687.302.416,00	2.916.687.302.416,00	834.699.280.016,00	2.891.542.715.926,43	-25.144.586.489,57
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.897.854.129.785,63	1.897.854.129.785,63	449.625.574.181,38	1.781.071.988.647,33	-116.782.141.138,30
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	385.958.861.512,62	385.958.861.512,62	155.177.977.374,00	403.532.375.054,00	17.573.513.541,38
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.466.862.199,50	3.466.862.199,50	284.400.000,00	1.372.012.199,50	-2.094.850.000,00
5.2	BELANJA MODAL	980.196.729.933,19	980.196.729.933,19	319.659.701.978,00	1.253.035.345.788,63	272.838.615.855,44
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.472.500.000,00	42.472.500.000,00	0	21.236.250.000,00	-21.236.250.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	42.472.500.000,00	42.472.500.000,00	-	21.236.250.000,00	-21.236.250.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.406.273.131.801,27	1.406.273.131.801,27	96.957.642.645,00	1.267.638.381.729,74	-138.634.750.071,53
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.405.273.131.801,27	1.405.273.131.801,27	96.957.642.645,00	1.260.638.381.729,74	-144.634.750.071,53
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00

Sumber : Bappeda, Diolah, 2025

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, akan dimanfaatkan secara efisien bagi kegiatan yang lebih bernilai ekonomis.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaan modal investor daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada pembayaran pokok utang sebagai kewajiban atas pinjaman yang telah dilaksanakan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam Tabel sebagai berikut :



Tabel 3. 18 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2025

Kode Rekening	Uraian	Realisasi APBD 2023 (Rp)	Realisasi APBD 2024 (Rp)	APBD 2025	Realisasi APBD 2025 s.d Mei 2025	% Realisasi
6	Pembiayaan Daerah	186.794.115.257	125.120.850.614,70	75.000.000.000,00	0,00	0,0%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	292.676.358.793	125.120.850.614,70	75.000.000.000,00	0,00	0,0%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	292.676.358.793	125.120.850.614,70	75.000.000.000,00	0,00	0,0%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.882.243.536				
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	105.882.243.536				

Sumber : BPKAD, Diolah, 2025

Tabel 3. 19 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	APBD 2025	Realisasi APBD 2025 s.d Mei 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/Berkurang
6	Pembiayaan Daerah	75.000.000.000,00	0,00	68.923.592.603,64	-6.076.407.396,36
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00	0,00	68.923.592.603,64	-6.076.407.396,36
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000,00	0,00	68.923.592.603,64	-6.076.407.396,36
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				0,00

Sumber : BPKAD, Diolah, 2025



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 dengan Sasaran Nasional dalam RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang sinergis antara pusat dan daerah, penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan secara seksama **keselarasan sasaran pembangunan daerah** dan indikatornya dengan sasaran Nasional serta **prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029**. RPJMD Provinsi Lampung telah selaras dengan prioritas nasional seperti pada tabel di bawah ini. Hal ini mencerminkan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam RPJMN.

Tabel 4. 1 Keselarasan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung dengan Prioritas Nasional (PN)

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
	Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif				
1	Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PMTB • Pertumbuhan sektor industri pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan • Terwujudnya transformasi ekonomi hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat) • Indonesia Blue Economy Index (IBEI) • Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) • Indeks Ekonomi Hijau • Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas • Pengolahan Sampah (%) • Persentase Penurunan Emisi Gas • Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) • Persentase Penurunan Emisi Gas • Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) • Indeks Pengelolaan • Keanekaragaman Hayati • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
				<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Lahan Indeks Kualitas Air Laut 	
			<ul style="list-style-type: none"> Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) 	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan dan Pemberantasan Kemiskinan
			<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio PDB Industri Pengolahan (%) Biaya Logistik (% PDB) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB 	<ul style="list-style-type: none"> Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) Aset Perbankan/PDB (%) Aset Dana Pensiun/PDB (%) Aset Asuransi/PDB (%) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) Total Kredit/PDB (%) Inklusi Keuangan (%) 	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
			<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%) Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) 	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
			melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan		
	Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas) Indeks Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus) Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus) 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Ketahanan Pangan Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) Indeks Ketahanan Air Nasional Kapasitas tampungan air (m³/kapita) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan(%) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Desa Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa mandiri (%) 	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
	Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> PDRB Sektor Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya nilai tambah pariwisata Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio PDB Pariwisata (%) Devisa Pariwisata (Miliar USD) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
					Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemantapan Jalan • Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar • Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus) 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Ketahanan Energi • Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemiskinan • Tingkat inflasi • Tingkat Pengangguran Terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan • Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemiskinan (%) • Tingkat kemiskinan ekstrem (%) • Proporsi penduduk kelas menengah (%) • Cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan (%) • Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) • Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2	Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif				
	Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata rata lama sekolah • Harapan Lama sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) • Harapan lama sekolah (tahun) • Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains • Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi • Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) • Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) 	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
			<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya masyarakat yang bebas dari 		Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
			penyalahgunaan narkoba		Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games Peringkat pada Asian Games Peringkat pada Asian Para Games Peringkat pada SEA Games 	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Usia Harapan Hidup Prevalensi Stunting 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kesehatan untuk semua 	<ul style="list-style-type: none"> Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun) Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Perlindungan Anak Indeks Ketimpangan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Ketimpangan Gender Indeks Pembangunan Gender Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) 	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
					Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
			<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Hak Asasi Manusia 	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
3	Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Pemerintahan yang efektif dan berintegritas				
	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan Tercapainya tingkat inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> Asia Power Index (Military Capability) Asia Power Index (Diplomatic Influence) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) Global Cybersecurity Index Indeks Keamanan Laut Nasional Indeks Pembangunan Hukum Indeks Persepsi Korupsi Indeks Materi Hukum Indeks Integritas Nasional Indeks Integritas Partai Politik Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Pelayanan Publik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri Return on Asset (ROA) BUMN (%) Tingkat Inflasi (%) 	<p>Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan</p>

NO	RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2025-2029		RPJMN 2025-2029		
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS NASIONAL
			yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Indeks Resiko Bencana • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) 	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
	Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Demokrasi Indonesia • Ekspresi Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) • Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

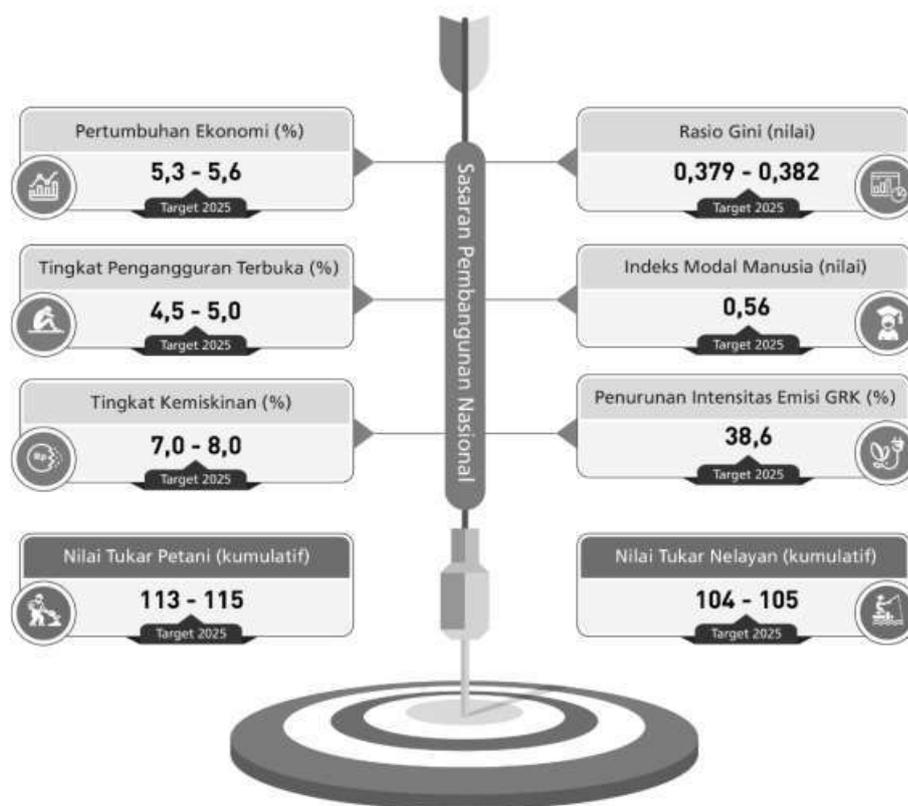
4.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk **mewujudkan Indonesia Emas 2045**. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar 4. 1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar 4. 2 Prioritas Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi "Indonesia Emas 2045", yakni menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kerangka ini, arah kebijakan nasional dirinci ke dalam depalan **Prioritas Nasional (PN)**, yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 berdasarkan masing-masing Prioritas Nasional.

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkuat ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2)

pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Prioritas Nasional 2, Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan,

menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan. Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan

jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga. Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah

internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce,

reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

Prioritas Nasional 3, Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

Prioritas Nasional 4, Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya



berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

Prioritas Nasional 7 dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Untuk mendukung dan menyelaraskan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RKP Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 : **“Sinergi Memperkuat Kapasitas Dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia”**.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Prioritas Pembangunan daerah sebelum dan Susudah Perubahan pada RKPD Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Tahun 2025	
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan pemerataan pembangunan; 2. Peningkatan kualitas hidup SDM; 3. Pembangunan Infrastruktur 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Reformasi Birokrasi; 6. Pemantapan kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi; 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif; 3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi. 4. Pengentasan Kemiskinan; 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas; 6. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya; 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

Prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;

Prioritas Daerah 1, yaitu *Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi*, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Misi 1: *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif*. Fokus utama dari prioritas ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui pengolahan dan industrialisasi, sehingga nilai ekonominya meningkat sebelum dipasarkan atau diekspor.

Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan di Provinsi Lampung. Faktor investasi dan hilirisasi industri, menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, mengembangkan ekonomi berbasis desa, memanfaatkan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta inisiasi lumbung energi terbarukan—saling terkait dan dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;

Prioritas Daerah 2: Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Inovatif merupakan fondasi utama dalam rangka mewujudkan Misi 2: Memperkuat SDM yang Unggul dan Produktif. Kualitas SDM menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang, karena pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika didukung oleh manusia-manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan menjadi pendorong utama dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga budaya. Untuk itu, pengembangan SDM harus difokuskan pada peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi.

Penguatan SDM yang unggul dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, di mana akses pendidikan yang merata dan fasilitas yang memadai menjadi fondasi yang sangat penting. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membentuk karakter dan pola pikir yang kritis serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, inovasi menjadi faktor yang tak kalah penting. SDM yang inovatif tidak hanya mampu menguasai pengetahuan yang ada, tetapi juga mampu menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada di

masyarakat dan dunia industri. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan teknis, penguatan kreativitas, dan kemampuan berpikir out-of-the-box harus menjadi bagian integral dalam pengembangan SDM.

3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi;

Prioritas Daerah 3: Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif. Infrastruktur yang andal dan berkelanjutan berperan sebagai katalis utama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan memperkuat daya saing wilayah.

Dari sisi ekonomi, infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan produktivitas dengan memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan mempermudah akses ke pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat sektor industri serta jasa.

Di sisi sosial, infrastruktur yang berkualitas seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang sangat penting. Infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan akses yang merata, menciptakan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang baik seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang publik meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

4. Pengentasan Kemiskinan;

Prioritas Daerah 4: Pengentasan Kemiskinan merupakan manifestasi nyata dari komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkeadilan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan langsung dengan Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif, di mana aspek inklusivitas menjadi prinsip utama.

Upaya-upaya dilakukan dengan memberikan akses ke sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka, maka mereka akan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Tidak kalah penting, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, perumahan yang layak, dan air bersih sangat berpengaruh dalam mengurangi beban kemiskinan.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;

Prioritas Daerah 5: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas merupakan bagian penting sistem pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel, serta menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari kecepatan birokrasi, tetapi juga dari kemampuannya menyelenggarakan pelayanan publik yang adil, merata, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam konteks ini, integritas aparatur negara dan institusi publik menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memperkuat kohesi sosial.

Pemerintahan yang efektif memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, integritas memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip moral yang tinggi. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus dapat menghasilkan dampak yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat, tanpa pemborosan anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan yang efektif juga memprioritaskan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, integritas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang berintegritas menuntut para pejabat dan aparatnya untuk selalu bertindak dengan jujur, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;

Prioritas Daerah 6: Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tatanan sosial yang inklusif, toleran, dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Prioritas ini menjadi pilar penting dalam mencapai Misi 3, yang menekankan pentingnya kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan serta tata kelola yang berintegritas.

Masyarakat yang harmonis dan berbudaya adalah fondasi dari peradaban yang kuat. Keharmonisan sosial tercipta ketika masyarakat hidup dalam toleransi, menghormati keberagaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, etika, dan saling menghargai. Di sisi lain, kebudayaan menjadi identitas kolektif yang memperkuat rasa kebangsaan dan membentuk karakter masyarakat yang beradab.

Kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berbudaya merupakan bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Keharmonisan memungkinkan saling menghargai meski ada perbedaan, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai. Keamanan juga penting, karena masyarakat yang aman memungkinkan semua orang beraktivitas tanpa rasa takut, menjaga ketertiban, dan meningkatkan kualitas hidup. Keamanan mencakup perlindungan fisik serta stabilitas sosial, memastikan kenyamanan emosional dan psikologis bagi setiap anggota masyarakat. Penguatan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat. Melestarikan tradisi, seni, dan adat istiadat lokal tidak hanya memberikan kekayaan budaya, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang mendalam di antara masyarakat.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;

Prioritas Daerah 7: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan merupakan upaya nyata Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa proses pembangunan tidak merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Langkah ini sejalan langsung dengan Misi 3, yang menekankan pentingnya kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Dukungan Kualitas lingkungan hidup adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai tidak merusak keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan produktif, sehingga dapat terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam jangka panjang.

4.3.1 Sasaran Makro Pembangunan Daerah

Secara garis besar, keseluruhan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 diarahkan pada pencapaian sasaran makro pembangunan. Penetapan sasaran makro pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan target RPJMN tahun 2025-2029. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II-2025, maka sasaran makro pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Lampung

No.	Indikator	Sasaran pada RKPD 2025	Sasaran pada APBD 2025	Capaian s/d Tw II-2025	Sasaran pada Perubahan RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90 - 5,30	5,00 - 5,30	5,47 (Tw 1-2025)	5,2 - 5,5
2.	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	52,6-54,6	52,6-54,6	51,36 (2024)	54,5 - 60,0
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97	72,97	73,13 (2024)	73,70
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 3,86	4,0 - 3,86	4,07 (Feb 2025)	4,00 - 3,86
5	Tingkat Kemiskinan (%)	10,0 - 9,50	10,0 - 9,50	10,62 (Sept 2024)	10,00 - 9,50
6	Indeks Gini	0,318 - 0,321	0,318 - 0,321	0,301 (Sept 2024)	0,300-0,295
7	Inflasi (%)	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	2,80 (April 2025)	1,50 - 3,50
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	78	78	78,08 (2024)	78,29
9	Nilai Tukar Petani	116 - 117	116 - 117	127,90 (April 2025)	129,23
10	Persentase Peningkatan PAD (%)	2,59	6,65	6,87 (2024)	1,07
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	13	13	14,62 (2024)	15,32
12	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	-	-	60,64 (2024)	62,79

Sumber : Bappeda Prov. Lampung

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2025

Pada awalnya, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen RKPD 2025 sebesar 4,90–5,30 persen, sedangkan dalam dokumen APBD 2025 targetnya sedikit lebih tinggi, yakni 5,00–5,30 persen. Target ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pada saat perencanaan, serta proyeksi perkembangan ekonomi global, nasional, dan regional.

Hingga Triwulan II tahun 2025, capaian pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan hasil yang menggembirakan, yakni mencapai 5,47 persen. Angka ini melampaui batas atas dari target awal yang ditetapkan, baik dalam RKPD maupun APBD. Merespons capaian tersebut, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen Perubahan RKPD 2025. Target baru ditingkatkan menjadi 5,20–5,50 persen. Penyesuaian target ini mencerminkan optimisme terhadap tren pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika dan realisasi capaian di masyarakat. Dengan penyesuaian ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dapat terus dipacu secara berkelanjutan, seiring dengan penguatan sektor-sektor strategis dan perbaikan iklim investasi di daerah.

2. PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)

Dalam dokumen perencanaan awal, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sasaran PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2025 dalam rentang Rp52,6 juta hingga Rp54,6 juta. Target ini tercantum secara konsisten dalam RKPD maupun APBD 2025 sebagai cerminan harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang merata.

Berdasarkan data capaian terakhir, yaitu tahun 2024, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp51,36 juta. Selama periode enam tahun dari 2019-2024, rata-rata pertumbuhan tahunan PDRB per kapita Provinsi Lampung mencapai 4,19 persen. Dalam satuan nominal, PDRB per kapita Lampung meningkat rata-rata sebesar Rp1,84 juta per tahun, dari Rp42,17 juta pada tahun 2019 menjadi Rp51,36 juta pada tahun 2024.

Provinsi Lampung melakukan penyesuaian melalui dokumen Perubahan RKPD 2025. Target PDRB per kapita Tahun 2025 **disesuaikan menjadi Rp53 juta hingga Rp54 juta.**

3. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2025, target IPM yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebesar 72,97.

Berdasarkan data capaian IPM hingga Triwulan II tahun 2025, yang mengacu pada data tahun 2024, tercatat bahwa IPM telah mencapai angka 73,13. Selama periode 2020 hingga 2024, **IPM Provinsi Lampung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,52 poin per tahun.** Kenaikan ini menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup konsisten dan positif dalam aspek pembangunan manusia. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2022 ke 2023, yaitu sebesar **0,69 poin.**

Pada dokumen Perubahan RKPD 2025 Provinsi Lampung melakukan penyesuaian terhadap target IPM, dengan menaikkan **target menjadi 73,70.**

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas pembangunan ekonomi daerah. Pada dokumen perencanaan tahun 2025, Pemerintah

Provinsi Lampung menetapkan sasaran TPT dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada rentang **4,00% hingga 3,86%**.

Berdasarkan data capaian hingga Triwulan II tahun 2025 (per Februari 2025), TPT Provinsi Lampung tercatat sebesar **4,07%**. Angka ini sedikit lebih tinggi dari batas atas target yang telah ditetapkan, yaitu 4,00%. Selama periode Februari 2023 hingga Februari 2025, TPT di Provinsi Lampung menurun rata-rata sebesar 0,055% per tahun. Penurunan ini berlangsung secara perlahan dan stabil, mencerminkan adanya perbaikan kecil namun konsisten dalam penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, percepatan pengurangan pengangguran masih diperlukan agar target TPT bisa tercapai secara lebih signifikan.

Pada dokumen **Perubahan RKPD 2025**, pemerintah daerah **tidak melakukan perubahan** terhadap target TPT. Sasaran tetap dipertahankan pada rentang **4,00% - 3,86%**

5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan sasaran penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2025 dalam dokumen RKPD dan APBD, yaitu berada pada kisaran **10,0% hingga 9,5%**. Namun demikian, capaian tingkat kemiskinan hingga Triwulan II tahun 2025 (berdasarkan data September 2024) tercatat masih sebesar **10,62%**. Angka ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan masih berada di atas ambang batas maksimal dari sasaran RKPD 2025. Selama periode **2020 hingga 2024**, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami **penurunan rata-rata sebesar 0,535% per tahun**. Penurunan ini menunjukkan tren yang positif, meskipun diperlukan percepatan untuk mencapai target di bawah 10% pada tahun 2025.

Pada dokumen **Perubahan RKPD 2025**, Pemerintah Provinsi Lampung **tetap mempertahankan** target semula, yaitu pada kisaran **10,0% – 9,5%**.

6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Pada dokumen RKPD dan APBD Tahun 2025, Pemerintah Daerah menetapkan sasaran Indeks Gini pada kisaran **0,318 – 0,321**. Namun, berdasarkan capaian hingga Triwulan II Tahun 2025, nilai Indeks Gini tercatat sebesar **0,301** (data per September 2024). Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat positif karena nilai tersebut lebih rendah (lebih baik) dibandingkan sasaran awal. Melihat perkembangan tersebut, Provinsi Lampung melakukan penyesuaian terhadap target dalam dokumen **Perubahan RKPD Tahun 2025**, dengan menurunkan target sasaran menjadi **0,300 – 0,295**.

Keberhasilan menurunkan nilai Indeks Gini sejauh ini mencerminkan implementasi kebijakan yang tepat sasaran, terutama dalam upaya peningkatan inklusi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan perlindungan sosial. Langkah ke depan akan difokuskan pada penguatan intervensi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan, agar tren positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

7. Inflasi

Indikator inflasi menjadi salah satu parameter penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan data capaian hingga Triwulan II tahun 2025 (per April 2025), angka inflasi tercatat sebesar 2,80%. Angka ini menunjukkan bahwa laju inflasi daerah masih berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan, yakni 1,50% hingga 3,50% sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 dan APBD 2025. Target dalam dokumen **Perubahan RKPD Tahun 2025** tetap antara 1,50% hingga 3,50%.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengendalian harga di Provinsi Lampung, terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan jasa

strategis, berjalan dengan efektif. Stabilitas inflasi ini juga mengindikasikan bahwa koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta intervensi kebijakan yang telah dilakukan mampu menahan tekanan harga secara signifikan.

8. Tingkat Kemantapan Jalan

Pada tahun 2025, indikator Tingkat Kemantapan Jalan ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen RKPD dan APBD Tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 78%. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai penopang utama mobilitas dan konektivitas wilayah.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, berdasarkan data capaian tahun 2024, Tingkat Kemantapan Jalan telah mencapai 78,08%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah melampaui target awal yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi indikasi positif bahwa program dan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan kualitas jalan telah berjalan dengan efektif. Pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, target indikator ini ditargetkan naik menjadi 78,29%. Kenaiakan target ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendorong peningkatan kinerja sector infrastruktur lebih baik ke depan.

9. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan petani, khususnya dalam hal daya beli terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, target NTP ditetapkan dalam rentang 116–117, baik pada RKPD maupun APBD. Target ini menunjukkan harapan agar petani tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami peningkatan pendapatan riil.

Berdasarkan data capaian bulanan pada bulan April 2025, NTP telah mencapai 127,90. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani dari penjualan hasil produksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Capaian ini secara jelas menggambarkan peningkatan signifikan dalam daya beli petani serta keberhasilan intervensi kebijakan di sektor pertanian. Rata-rata pertumbuhan NTP Lampung dari 2019–2024 adalah 5,60 poin per tahun. Pada dokumen Perubahan RKPDP Tahun 2025, target NTP disesuaikan naik menjadi 129,23.

10. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki arah yang jelas guna mengembalikan dan mengangkat trajectory pertumbuhan ke tingkat yang lebih baik. Proses pemulihan ekonomi, baik secara global maupun domestik, secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya dari sisi penerimaan.

Salah satu indikator penting dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan secara mandiri. Berdasarkan data realisasi PAD selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kinerja pendapatan daerah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Selama periode lima tahun terakhir, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Dimulai dari angka sebesar **Rp 2,84 triliun pada tahun 2020**, PAD meningkat secara konsisten hingga mencapai **Rp 4,04 triliun pada tahun 2024**. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerah. Jika dilihat dari persentase pertumbuhan tahunan, rata-rata kenaikan realisasi PAD dalam periode 2020–2024 mencapai sekitar **9,22% per tahun**.

11. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

Indikator penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi salah satu elemen penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indikator ini termasuk salah satu Indikator baru mengikuti Pusat. Indikator sebelumnya menggunakan indicator Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Karena indicator baru maka pada dokumen perencanaan tahun 2025, baik **RKPD maupun APBD awal tahun** belum menetapkan target khusus untuk indikator ini.

Pada tahun 2024, capaian penurunan intensitas emisi GRK telah mencapai 60,64%, dan dalam Perubahan RKPD tahun 2025, pemerintah menetapkan target baru yaitu sebesar 62,79%. Penetapan target ini menunjukkan adanya komitmen yang mulai mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan dan kesadaran terhadap pentingnya pengurangan emisi karbon.

4.3.2 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dan Pusat

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan pembahasan dengan Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemendagri). Berikut disampaikan keselarsan target Indikator makro pembangunan dalam RPJMN dan hasil Rapat koordinasi Teknis Pembangunan daerah Tahun 2024.

Tabel 4. 4 Keselarasan target sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dengan target sasaran pada Perubahan RKPd Tahun 2025.

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Target RKP 2025	Target P RKPd 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5,2 – 5,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	4,00 - 3.86
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	10,00 – 9,50
4	Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	0,300-0,295
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	0,54
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	62,79

Sumber : RPJMN tahun 2025-2029

Tabel 4. 5 Sasaran Makro Provinsi Lampung Tahun 2025 (Hasil pembahasan di Forum Rakortekrenbang Tahun 2024)

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKPd 2025
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.1-1.3
2.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	73,21
3.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	21-23
4.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.42-0.43
5.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	32,5
6.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	5.15
7.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5.8
8.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	680
9.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	27.65
10.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	18.5-19.4
11.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.63
12.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	3.9
13.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	-
14.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	70
15.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	75,56
16.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	79.36-82.61
17.	PDRB per kapita	Rp Juta	52.6-54.6
18.	Tingkat Kemiskinan	%	9.5-10
19.	Rasio Gini	Indeks	0,318 – 0,321
20.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	26.69
21.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	22
22.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	2.19-2.23
23.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.54
24.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	62.79
25.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.9-5.3
26.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,0-3,86

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2025
27.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53-54
28.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.4
29.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.1
30.	Tingkat Inflasi	%	1.5-3.5
31.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	6.2

Sumber : Desk Pembahasan Indikator Makro di Forum Rakortekbang Tahun 2024 dan Pemutakhiran Target Indikator Makro Provinsi Lampung

4.3.1 Program Unggulan Daerah

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan sinergi dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi lima program unggulan yang bersifat strategis dan berdampak langsung pada masyarakat. Kelima program ini dirancang untuk memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat, membangun ketahanan pangan dan energi, serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu:

1. Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan terhadap MBG dilakukan dengan memastikan ketersediaan makanan sehat dan bergizi bagi siswa sekolah dasar dan menengah, utamanya di daerah tertinggal, terpencil, dan miskin. Pemerintah Provinsi Lampung akan:

- Menyediakan infrastruktur dapur umum berbasis sekolah atau komunitas.
- Mendorong pelibatan UMKM lokal dan petani dalam penyediaan bahan pangan bergizi.
- Melakukan edukasi gizi seimbang bagi guru, orang tua, dan anak.

2. Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa melalui Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi.

Desa merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan program peningkatan

kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi. Diharapkan BUMDes dan koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tapi juga simpul distribusi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.. Strategi utama dalam program ini meliputi:

- Pelatihan manajerial dan digitalisasi usaha bagi pengurus BUMDes dan koperasi.
- Penyediaan akses pembiayaan dan modal usaha produktif.
- Pendampingan usaha melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pelaku industri.
- Integrasi produk BUMDes dalam rantai pasok lokal dan nasional.

3. Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional

Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi pertanian yang signifikan, Lampung mengusung target besar menjadi *Lumbung Pangan Nasional*. Dengan target swasembada dan ekspor produk pertanian unggulan (seperti jagung, padi, singkong, kopi, dan pisang), Lampung diarahkan menjadi poros ketahanan pangan di Sumatera dan nasional.

- Modernisasi pertanian berbasis teknologi.
- Penguatan ketersediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
- Peningkatan luas dan produktivitas lahan pertanian.
- Revitalisasi infrastruktur irigasi dan pasca-panen.

4. Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan.

Sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi Program Lumbung Energi Terbarukan sebagai langkah strategis menuju transisi energi hijau.

Program ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang melimpah di wilayah Lampung—seperti tenaga

surya, bioenergi, mikrohidro, dan angin—sekaligus memperkuat kemandirian energi hingga ke tingkat desa. Upaya yang dilakukan antara lain :

- Mendorong pembangunan infrastruktur energi terbarukan berbasis komunitas;
- Mengembangkan desa mandiri energi melalui pemanfaatan sumber daya lokal;
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga riset;
- Menyediakan insentif bagi investasi hijau di sektor energi.

5. Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kemandirian ekonomi lokal, Provinsi Lampung menjalankan program stabilisasi harga pangan. Langkah strategis mencakup:

- Penguatan peran Satgas Pangan dan digitalisasi sistem distribusi logistik.
- Penyediaan subsidi transportasi untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
- Pemanfaatan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan pasar tani sebagai simpul kendali harga.
- Kebijakan afirmatif untuk menyerap hasil pertanian dan produk UMKM lokal di pasar lokal dan instansi pemerintah.



Tabel 4. 6 Program Unggulan Daerah

NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
1.	Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Jumlah Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	66	602	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Keswan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Koperasi dan UMKM 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi 7. Dinas PKPCK 8. Dinas PPPA 9. Dinas Perkebunan	1 Dinas KPTPH : Peningkatan Produksi bahan pangan dan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan,Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat (BGN) • Pemerintah Kab/Kota • Bulog • PLN • Bpom • Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi • Posyandu • Kanwil Kementerian Agama • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Perhubungan • Dinas Bina Marga Bina Konstruksi • Bappeda
		Prevalensi Stunting	13,2	11,32	2 Dinas peternakan dan Kesehatan hewan : kampanye gizi dan Fasilitasi UMKM Pendukung Makan Bergizi , Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.		
					3 Dinas kelautan dan perikanan : Jumlah		



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
					10. Dinas Pendidikan 11. Dinas BMBK	<p data-bbox="1373 375 1715 687">Produksi Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Jumlah Volume Ekspor Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.</p> <p data-bbox="1373 687 1715 1267">4 Dinas koperasi dan UMKM : Persentase UMKM yang meningkat daya saing usahanya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Persentase usaha kecil yang terfasilitasi dalam peningkatan tata kelola dan manajemen usaha menuju skala menengah, Program Pengembangan UMKM Persentase koperasi yang meningkat volume</p>	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
						<p>usahanya, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.</p> <p>5 Dinas PMDT : Pembinaan dan pengawasan Bumdes, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan desa, untuk kegiatan pembinaan pengawasan Bumdes Program administrasi pemerintah desa.</p> <p>5 Dinas Perkebunan : Pembibitan Tanaman Perkebunan, Peremajaan Tanaman Sawit, Peremajaan tanaman tebu, Intensifikasi tanaman lada, Rehabilitasi Lada, Intercropping tanaman lada pada kebun kopi, Peremajaan Lada, Pasca Panen Kakao, Hilirisasi Kelapa (Pengolahan Kelapa) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Demplot lada</p>	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT	
						<p>organic Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian OPT tanaman lada, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Pembinaan, pengawalan, dan pemantauan harga Program Penyuluh Pertanian.</p>		
						6	<p>Dinas BMBK : Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk memperlancar distribusi makan bergizi gratis.</p>	
						7	<p>Dinas PKPCK : Perbaikan Jalan Desa, Pembuatan Akses Jalan Desa</p>	
						8	<p>Dinas Pendidikan : Menentukan target penerima manfaat (misalnya, siswa dari keluarga kurang mampu), Memastikan makanan bergizi gratis didistribusikan</p>	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
						<p>tepat waktu dan sesuai kebutuhan siswa</p> <p>9 Dinas Kesehatan : Memastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang diberikan, memastikan gizi makanan yang diberikan sesuai standar.</p>	
						<p>10 Dinas Perindag : Program Perencanaan dan pembangunan Industri pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan</p>	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT	
						Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		
						11 Dinas PPPA : Program Peningkatan Kualitas Keluarga		
						12 Bappeda : Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		
2.	Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi	Persentase BUMDes berkembang dan maju	35,47	45,33	1. Dinas PMDT 2. Dinas KPTPH 3. Dinas Koperasi dan UMKM 4. Dinas Perindag 5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6. Dinas Peternakan 7. Dinas Kominfotik 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Dinas Tenaga Kerja	1	Dinas Koperasi : Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/ Pemkot ❖ PERBANKAN ❖ OJK ❖ BI ❖ BIRO PEREKONOMIAN ❖ PERGURUAN TINGGI
		Persentase Koperasi Yang Berkualitas	24,11	30,05		2	Dinas Perindag : Program Pengembangan Ekspor, Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, Program perencanaan dan pembangunan industri	
						3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program AdministrasiDesa	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT								
					10. Dinas PKPCK	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1290 368 1368 639">4</td> <td data-bbox="1368 368 1724 639">Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1290 639 1368 879">5</td> <td data-bbox="1368 639 1724 879">Dinas Perkebunan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1290 879 1368 1023">6</td> <td data-bbox="1368 879 1724 1023">Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif,Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1290 1023 1368 1254">7</td> <td data-bbox="1368 1023 1724 1254">Dinas KPTPH, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</td> </tr> </table>	4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5	Dinas Perkebunan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7	Dinas KPTPH, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
5	Dinas Perkebunan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
6	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
7	Dinas KPTPH, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian														



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
						<p>8 Dinas Perikanan : Melakukan pendampingan teknis dalam budidaya ikan, pengelolaan kolam, hingga pemasaran hasil perikanan, Mendorong BUMDes untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan, seperti abon ikan, kerupuk ikan, atau nugget ikan.</p> <p>9 Dinas Tenaga Kerja : Mengadakan pelatihan kerja gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja.</p> <p>10 Dinas KPCK : Penyediaan jalan lingkungan, saluran drainase, dan penerangan jalan di kawasan permukiman,</p>	
3.	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Indeks Ketahanan Pangan	83,07	85,11	1. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Dinas KPTPH : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program	<ul style="list-style-type: none"> ❖ BULOG ❖ BUMD ❖ BUMDES ❖ Perguruan Tinggi ❖ Dinas Koperasi UKM



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
					2. Dinas Peternakan dan Keswan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Perindag 5. Dinas PSDA 6. Dinas Koperasi dan UMKM 7. Dinas Perkebunan	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyuluhan Pertanian	❖ Dinas PMDT
		Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan	8,5	4,75		2 Dinas Kelautan dan Perikanan : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	
						3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
						4 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air : Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
						5 Dinas Koperasi UKM : Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi,	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
						<p>Program Penilaian Kesehatan Ksp / Usp Koperasi, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Pengembangan UMKM</p> <p>6 Dinas Peternakan dan Keswan : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>7 Dinas Perkebunan : Program Penyuluh Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p>	
4.	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	35,22	37,8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kehutanan 2. Dinas ESDM 3. Dinas LH 4. Dinas Perindag 	1 Dinas Kehutanan : Pengelolaan kawasan hutan yang berada di atas cadangan panas bumi, Program Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/ Pemkot ❖ PLN ❖ Pertamina



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
					5. Bappeda 6. Biro Perekonomian 7. Dinas PKPCK	<p>2 Dinas Lingkungan Hidup : Izin Lingkungan serta Regulasi dan pengawasan dampak lingkungan dari pengembangan EBT, Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Fasilitasi pengembangan industri pengolahan bioenergi dan produk energi baru terbarukan, Program Pengendalian Izin Usaha Industri</p> <p>4 Bappeda : Perencanaan strategis dan penganggaran program EBT, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>5 Biro Perekonomian : Koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung investasi energi hijau,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perguruan Tinggi /Akademisi ❖ Investor ❖ Akademisi ❖ BUMD ❖ BBWS ❖ FORUM CSR ❖ BRIN ❖ Dinas PSDA ❖ BALITBANGDA ❖ Dinas PKPCK



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
						<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>6 Dinas PKPCK : Penyediaan ruang dan regulasi tata ruang untuk pengembangan infrastruktur EBT, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>	
						<p>7 Dinas ESDM : Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Penyusunan roadmap pengembangan energi baru terbarukan, Inventarisasi Energi Baru terbarukan, review RUED, Fasilitasi Pemanfaatan Energi baru Terbarukan,</p>	
5.	Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	INFLASI	2,5 + 1	2,5 + 1	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 	<p>1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Dukungan Pengendalian Inflasi melalui pelaksanaan pasar murah, dan fasilitas pasar Lelang, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemerintah Pusat ❖ Pemkab/ Pemkot ❖ PLN ❖ Pertamina ❖ Perguruan Tinggi /Akademisi ❖ Distributor ❖ Akademisi



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
					3. Biro Perekonomian 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Perhubungan 8. Satpol PP 9. Dinas Kominfo		Sarana Distribusi Perdagangan.	❖ BUMD
						2	Biro Perekonomian: Koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung stabilisasi harga pangan, Program Perekonomian Masyarakat.	❖ Bank Indonesia
						3	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura: Pasar Mitra Tani merupakan salah satu cara untuk memotong rantai distribusi, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (TPID), Perlindungan Produsen dan Konsumen, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	
						4	Dinas Perhubungan: Pengendalian inflasi melalui 4K – ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga,	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
						kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif), Program Pembinaan, pengawalan dan pemantauan harga	
						5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan: Pembinaan, pengawasan dan pendampingan bagi pelaku usaha peternakan, Program Penyuluhan Peternakan.	
						6 Dinas Kelautan dan Perikanan: Peningkatan Produksi Perikanan untuk mendukung ketersediaan produk perikanan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.	
						7 Dinas Perhubungan: Fasilitasi terhadap kelancaran distribusi, Program Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	



NO.	PROGRAM UNGGULAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2029	OPD UTAMA SEBAGAI PENGAMPU	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	STAKEHOLDER UTAMA YANG TERKAIT
						8 Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	
						9 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik: Penyebarluasan informasi, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	

4.4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, Prioritas Nasional 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun awal dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 pada saat perubahan RKPD 2025 masih berproses pada tahap Rancangan RPJMD. Substansi visi, misi dan sasaran pembangunan masuk ke dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025. Pembangunan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025-2029 : **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”**.

Memperhatikan visi pembangunan tersebut dan Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan 2025 dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025.

Tabel 4. 7 Keselarasan RPJMD 2025-2029, Prioritas Pembangunan Daerah 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional 2025

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 : “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” .		
Keselarasan		
Misi / Cita Pembangunan Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2025
Misi 1 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Prioritas Daerah 3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
	Prioritas Daerah 1 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 : “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.		
Keselarsan		
Misi / Cita Pembangunan Tahun 2025- 2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2025
		Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
	Prioritas Daerah 4. Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Misi 2 : Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	Prioritas Daerah 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Prioritas Daerah 5. Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
	Prioritas Daerah 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	Prioritas Daerah 6. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Visi Pembangunan Lampung Tahun 2025-2029 : "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".		
Keselarasan		
Misi / Cita Pembangunan Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PD) Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2025
		Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan perencanaan secara *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025; Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2025 terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut:



Tabel 4. 8 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2025

NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
1	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
					Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Rumah Sakit
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
			Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RTRW Provinsi
					Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
4	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
5	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
					Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota
6	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
7	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
8	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
					peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
					Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
10	Prioritas Nasional 3 :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
					Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan sampah Regional
					Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
12	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
					Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
					Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
13	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
14	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
					Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
					Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
15	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)
	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
16	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
					Pelayanan Informasi Publik
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
					Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas
					Penyediaan Akses Internet
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
17	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
18	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
19	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Seleksi Atlet Daerah
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
20	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
					Peningkatan kualitas statistik sektoral



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
21	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
22	Prioritas Nasional 3 :Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya
					Pengembangan Cagar Budaya
					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
23	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
24	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi
					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
25	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
					Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir
					Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
					Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi
26	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi
					Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
					Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
					Fasilitasi Kekayaan Intelektual



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
					Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
27	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
28	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
					Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
					Penyiapan Perhutanan Sosial
29	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pencapaian Ketahanan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
					Pelaksanaan kegiatan konservasi energi
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
					Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
30	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
					Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang Internasional/Nasional
					Peningkatan Citra Produk Ekspor
31	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
32	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota
					Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
33	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



NO.	PRIORITAS NASIONAL	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUB KEGIATAN
	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				



4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengacu pada sasaran pokok dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, maka dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD 2025 - 2029, yaitu:



Tabel 4. 9 Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan RPJMD 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2025	OPD PENDUKUNG
Visi: BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS							
Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif							
1	Prioritas Daerah 1. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;		Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,57 (2024)	5,2 - 5,5	-
			Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,46	3,47	-
			Gini Rasio	indeks	0,301	0,300 - 0,295	-
		1.1 Meningkatnya investasi dan hilirisasi komoditas unggulan	Pertumbuhan PMTB	persen	1,78 (2024)	3,9	Bapenda, Dinas PMPTSP
			Pertumbuhan sektor industri pengolahan	persen	9,09 (2024)	8,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti luas)	persen	-2,09	1,2	Dinas KPTPH, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan
			Indeks Ketahanan Pangan	indeks	81,56 (2023)	83,07	Dinas KPTPH, Dinas PSDA, Disbun, BMBK
		1.3 Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri	persen	23,51	23,67	Dinas PMDT



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2025	OPD PENDUKUNG
		1.4 Meningkatnya Ekonomi Daerah Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	5,58	5,64	Disparekraf, DiskopUKM
2	Prioritas Daerah 3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	2.1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur pembangunan dan energi Berkelanjutan	Kemantapan Jalan	persen	78,08	78,29	Dinas BMBK
			Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	19,45	20,17	Dinas PKPCK
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	35,22	36	Dinas ESDM, Perindag, KPTPH, Kehutanan, LH
3	Prioritas Daerah 4. Pengentasan Kemiskinan	3.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Tingkat kemiskinan	persen	10,62	10,0-9,50	Dinas KPTPH, , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Ekraf, Dinas BMBK, Dinas PKPCK, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial,



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2025	OPD PENDUKUNG
							Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo
			Tingkat inflasi	persen	1,5	2,5 + 1	Dinas Perindag, Biro Perekonomian Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan
			Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,19	4,0 - 3,86	Dinas Tenaga Kerja
Misi 2: Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif							
4	Prioritas Daerah 2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif		Indeks Modal Manusia	indeks	0,52 (2023)	0,53	-
		4.1 Meningkatnya Kualitas daya Saing Pendidikan	Rata rata lama sekolah	tahun	8,36	8,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
			Harapan Lama sekolah	tahun	12,78	12,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2025	OPD PENDUKUNG
		4.2 Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	53,17 (2023)	53,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dispora, Dinkes, PPPA
		4.3 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	74,39	74,55	Dinas Kesehatan, RSUAM, RSJ, RSBNH
			Prevalensi Stunting	persen	15,9 (2024)	13,2	Dinas Kesehatan, RSAM, Dinas KPTPH, Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, PKPCK, Dinas PPPA, Dinas PMDT, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo
		4.4 Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga serta pemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	Indeks Perlindungan Anak	indeks	64,78 (2022)	66,22	Dinas PPPA, Dinas Sosial
			Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,43 (2023)	0,422	Dinas PPPA, Dinas Sosial, Disnaker
Misi 3: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Lingkungan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas							
5	Prioritas Daerah 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,5	-



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2025	OPD PENDUKUNG
		5.1 Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	82,68	83,5	Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat, Kominfo, Litbang, BKD, BPSDM, Set DPRD, Badan Penghubung, Dukcapil, Dinas Perpustakaan dan Arsip
6	Prioritas Daerah 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	60,64	62,79	-
		6.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	70,57 (2023)	70,99	DLH, Dinas Kehutanan, DKP
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,1	129,97	Badan Penanggulangan Bencana
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	persen	9,15	9,52	Dinas Kehutanan, KPTPH, Perkebunan, DKP, DLH, PKPCK, ESDM, Perindag, Perhubungan
7	Prioritas Daerah 6. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.		Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79,5	-
			Indeks pembangunan Kebudayaan	indeks	57,82 (2023)	58,5	-



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2025	OPD PENDUKUNG
		7.1 Terwujudnya Semangat Lampung Bersama	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	78,32 (2022)	79,5	Badan Kesbangpol, Satpol PP
			Ekspresi Budaya	persen	26,14 (2023)	37,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Biro Kesra

Penetapan Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Penetapan target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKD mencerminkan capaian kinerja utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Target IKD ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian RPJMD yang sedang berjalan, serta mempertimbangkan kondisi dan tantangan aktual daerah. Penetapan ini juga mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Permendagri terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta indikator makro pembangunan seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), dan lain sebagainya.

Proses penetapan target IKD dilakukan secara partisipatif dan akuntabel, melibatkan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Setiap indikator disusun dengan menetapkan satuan, baseline, dan target capaian yang realistis sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja yang terukur. Target IKD yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 ini menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, RKA, serta sebagai alat monitoring dan evaluasi atas efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penetapan target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPDP Tahun 2025

(Sesuai dengan Indikator kinerja pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029)

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,07	Dinas KPTPH
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan**	%	8,5	Dinas KPTPH
3	Kapasitas Air Baku (m ³ /kapita)**	m ³ /kapita	0,44	Dinas PSDA
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan **	%	18,72	Dinas PKPCK
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	70,99	DLH
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	5	Dinas PKPCK
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	Ton/hari	4.719,02	DLH
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah**	%	14,46	Dinas PKPCK
9.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**			Dinas LH, Kehutanan, KPTPH, ESDM, PKPCK, Perhubungan, DKP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PSDA, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Bappeda
	a. Kumulatif**		9,52	
	b. Tahunan**		15,32	
10	Indeks Risiko Bencana**	Angka	129,97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		0,537	Dinas LH
12	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,17	BPS/ Disdukcapil
14	Rasio Jenis Kelamin	%	104,12	BPS/ Disdukcapil
	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	283,67	BPS/ Disdukcapil
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2-5,5	BPS
2	Tingkat Kemiskinan**	%	10,0-9,50	BPS, Dinsos
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	54,5 – 60,0	KPTPH, Disbun, Disnak, DKP, Dispar, Diskop, Disperindag, dll
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	4,0 – 3,86	BPS, Disnaker
5	Indeks Gini	Angka	0,298	BPS
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,53	BPS

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,55	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,27	Dinkes
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**	Angka	122	Dinkes, RSAM, RSJ, RSBNH
9	Prevalensi Stunting**	%	13,2	Dinkes
10	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	90	Dinkes
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)**	%	60	Dinas Kesehatan
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**	%	95	Dinas Kesehatan, RSAM, RSBNH
11	Cakupan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (%)**	%	70	Dinas Kesehatan
12	Rata-Rata Lama Sekolah**	Tahun	8,46	Disdikbud
13	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	12,82	Disdikbud
14	Angka Literasi **	%	69,26	Disdikbud
	Angka Numerasi**		66,23	
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:**	%	30,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Literasi membaca		20,3	
	- Numerasi			
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)**	%	7,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)**	%	72,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	65,77	Dinas Perpustakaan dan Arsip
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja (%)**	%	22	Dinas Tenaga Kerja
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	38,39	BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	74,1	Kemenag
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Angka	58,5	Disdikbud
24	Indeks Perlindungan Anak**	Angka	66,22	Dinas PPPA
25	Indeks Ketimpangan Gender**	Angka	0,38	Dinas PPPA
26	Indeks Pembangunan Pemuda**	Angka	53,51	Dispora
27	Persentase Penurunan Konflik Sosial**	%	100	Badan Kesbangpol
28	Ketahanan Sosial Budaya	%	81,8	Badan Kesbangpol

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
29	Persentase Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana	%	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)	%	47,3	BPS
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	18,97	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,62	BPS/Disparekraf
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)**	ribu orang	6,5	BPS/Disparekraf
5	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,54	BPS
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	NA	BPS/Disparekraf
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**		2,65	Dinas Koperasi dan UKM
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)**			Dinas Perindag
8.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**	%	0,66	Dinas Koperasi dan UKM
9.	Rasio Kewirausahaan Daerah**	%	2,9	Dinas Koperasi dan UKM
10.	Return on Asset (ROA) BUMD**	%	4,06	Biro Perekonomian
11.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**		32	Dinas Tenaga Kerja
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,6	Dinas Tenaga Kerja
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	55,34	Dinas PPPA
				Dinas Tenaga Kerja
14.	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	65,7	Balitbangda
15.	Indeks Ekonomi Hijau**	Angka	59,19	Dinas Kehutanan, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas KPTH, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
16.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	36	Dinas ESDM, Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Perindustrian
17.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Angka	5,85	Dinas Kominfo
19.	Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	2,28	BPS/DPM PTSP
20.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	%	68,95	Dinas PKPCK
21.	Nilai Survey Penilaian Integritas**	Angka	67,33	Inspektorat

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
22.	Persentase Desa Mandiri	%	23,67	Dinas PMDT
23.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	1,8	BPKAD
24.	Tingkat Inflasi**	%	2,5 + 1	Biro Perekonomian
25.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**	%	14	BI/OJK/Biro Perekonomian
26.	Aset Dana Pensiun/PDRB**	%	-	BI/OJK/Biro Perekonomian
27.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi**	Juta Rupiah	-	BI/OJK/Biro Perekonomian
28.	Total Kredit/PDRB**	%	20	BI/OJK/Biro Perekonomian
29.	Inklusi Keuangan**	%	85,5	BI/OJK/Biro Perekonomian
30.	Persentase BUMD Berkinerja Sehat	%	67	Biro Perekonomian
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum**	Angka	87,5	Biro Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Angka	4,1	Dinas Kominfo
3	Indeks Pelayanan Publik**	Angka	4,3	Bapenda, DPM PTSP, RSAM, RSJ, RSBNH
4	Persentase Penegakan Perda**	%	78	SatPol PP
5	Persentase Capaian Aksi HAM**	%	75	Badan Kesbangpol
6	Indeks Demokrasi Indonesia**	Angka	79,5	Badan Kesbangpol
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**	Angka	73	Satpol PP
8	Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	3,47	Balitbangda
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,5	Biro Organisasi
10	Nilai Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	%	83,1	Badan Penghubung
		%	89,8	BAPENDA
		%	82	RSUAM
		%	89,5	RSJ
		Indeks	3,44	PMPTSP
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah	%	72,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus	%	61,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan			
1	Prevalensi Wasting	%	6,8	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu	kasus	122	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi	%	12,62	Dinas Kesehatan
4	Notifikasi Kasus Tuberkulosis	%	90	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	70	Dinas Kesehatan
6	Laju Kematian/Net Death Rate	%	27	RSUD Abdul Moeloek

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
7	Readmission Rate (Tingkat Rawat Inap Ulang)	%	5	RS Jiwa Daerah
8	Jumlah layanan spesialis	orang	5	RS Bandar Negara Husada
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan penyediaan lahan untuk kepentingan umum	persen	41	PKPCK
2	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	persen	100	PKPCK
3	Tingkat kemantapan jalan	persen	78,29	BMBK
4	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (pada WS kewenangan provinsi)	persen	27,63	PSDA
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir ROB pada WS kewenangan provinsi	persen	24,86	PSDA
6	Persentase luas layanan irigasi multi komoditas (pada DI kewenangan provinsi)	persen	71	PSDA
	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	persen	2	PKPCK
2	Persentase Rumah tidak Layak huni yang tertangani	persen	66,29	PKPCK
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses air minum Aman	persen	9,84	PKPCK
4	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses sanitasi Aman	persen	2,49	PKPCK
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	82	Satpol PP
	Sosial			
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi yang Tertangani	%	19,71	Dinas Sosial
2	Persentase penguatan dan pemahaman penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	20	Dinas Sosial
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
	Tenaga Kerja			
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	96	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase	%	34	Dinas Tenaga Kerja
	Tenaga Kerja Perusahaan yang Mendapat Perlindungan Ketenagakerjaan			
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	5,7	Dinas PPPA
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	Dinas PPPA
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	100	Dinas PPPA
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	Dinas PPPA
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	Dinas PPPA
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	76	Dinas PPPA
	Pangan			
1	Persentase Rata-rata Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu) dan Hortikultura (Aneka Cabai, Bawang Merah, Pisang dan Nanas)	%	100	Dinas KPTPH
	- Padi	Ton	3.500.000	
	- Jagung	Ton	3.008.103	
	- Ubi Kayu	Ton	7.285.241	
	- Aneka Cabai	Ton	38.948	
	- Bawang Merah	Ton	1.661	
	- Pisang	Ton	1.593.967	
	- Nanas	Ton	711.102	
	Lingkungan Hidup			
1	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	persen	9,11	DLH

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
2	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	persen	94	DLH
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	persen	92,5	Disdukcapil
2	Persentase pemanfaatan data kependudukan	persen	82,05	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase Desa Mandiri	persen	23,67	Dinas PMDt
2	Persentase BUMDes Maju	persen	2,26	Dinas PMDt
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	Indeks	64,6	Dinas PPPA
	Perhubungan			
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,26	Dinas Perhubungan
2	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Provinsi	persen	28,92	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	Indeks	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	72	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	%	0,8	Dinas Koperasi dan UKM
	Penanaman Modal			
1	Realisasi dan Investasi	Triliun Rupiah	9,85	DPMPTSP
2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	3,44	DPMPTSP
	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase pemuda Aktif Dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan (%)	%	6,58	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi Lampung Yang Meraih Juara 1, 2 dan 3 pada Event - event Nasional dan Internasional	Orang	85	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
3	Jumlah Keikutsertaan Masyarakat Sebagai Peserta dalam event-event Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	Orang	5000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Statistik			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Persandian			
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI v.5.0	300	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Kebudayaan			
1	Persentase warisan seni dan budaya tak benda yang bersertifikasi nasional	%	92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan			
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	70,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kearsipan			
1	Nilai Pengawasan Kearsipan (NHPK)	Nilai	87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	86,4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	Kelautan dan Perikanan			
1	Nilai Tukar Nelayan	persen	110,26	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Pembudidaya	persen	97,62	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata			
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	juta orang	1,9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan (length of stay)	hari	1,3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Rata-rata pengeluaran wisatawan (spending money)	juta rupiah	1,8	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Pertanian			
1	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	ton	871.199	Dinas Perkebunan
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	1,36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	87	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	persen	54,47	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Kehutanan			

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
1	Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dan atau KUPS	kelompok	45	Dinas Kehutanan
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	persen	0,5	Dinas Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer* (%)	persen	36	ESDM
2	Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)**	SBM/Rp	176	ESDM
3	Konsumsi listrik per kapita (kWh)**	kWh	680	ESDM
4	Rasio Elektrifikasi	persen	99,9	ESDM
Perdagangan				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	Persen	11,96	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	Nilai	≤ 5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian				
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	18,97	BPS/Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi				
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100	100	Dinas PMDT
2	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina	100	100	Dinas PMDT
IV UNSUR PENDUKUNG				
Sekretariat Daerah				
1	Indeks RB Provinsi Lampung	Indeks	83,00-84,00	Sekretariat Daerah
2	Skor RB General		74	Sekretariat Daerah
3	Skor RB Tematik		9	Sekretariat Daerah
4	Nilai Kematangan Organisasi Daerah		41,5	Biro Organisasi
5	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan		11,5	Biro Organisasi
6	Pencapaian Kinerja LPPD	skor	2,8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah yang terlegitimasi.	%	80	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
8	Nilai survey kepuasan pelayanan internal dan eksternal pada Biro Administrasi Pimpinan	nilai	70	Biro Administrasi Pimpinan
9	Persentase rancangan produk hukum provinsi dan daerah yang diharmonisasi	%	100	Biro Hukum

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
10	Persentase jumlah perkara hukum yang difasilitasi	%	100	Biro Hukum
11	Nilai survey kepuasan pelayanan internal	skor/nilai	81	Biro Umum
12	Persentase pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	skor/nilai	71,7	Biro Umum
13	Efektivitas (ketepatan) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	%	72,00	Biro Administrasi Pembangunan
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai	78	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat DPRD				
1	Persentase Jumlah Peraturan Daerah	%	100	Sekretariat DPRD
V UNSUR PENUNJANG				
Perencanaan				
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks	94	Bappeda
2	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi	nilai	25	Bappeda
3	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi	nilai	21	Bappeda
Kuangan				
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	-9,12	Bapenda
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpajakan	%	89,8	Bapenda
Kepegawaian				
1	Indeks sistem merit	Nilai	304,5	BKD
Pendidikan dan Pelatihan				
1	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya sesuai sasaran pelatihan	Persen	70	BPSDM
2	Nilai Survey Kepuasan Peserta Pelatihan	Nilai	87	BPSDM
Penelitian dan Pengembangan				
1	persentase rumusan kebijakan (<i>policy paper</i>) yang dimanfaatkan dan atau didesiminasikan	Persen	60	Balitbangda
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	65,7	Balitbangda
VI UNSUR PENGAWASAN				
Inspektorat Daerah				
1	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Indeks	3,17	Inspektorat
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	Indeks	16,85	Inspektorat

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	PRODUSEN DATA / PD PENGAMPU
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	3,01	Inspektorat
4	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3,06	Inspektorat
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	79,5	
2	Persentase Penurunan Konflik Sosial	%	70	

4.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Lampung

Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB untuk periode 2025–2030. Dokumen ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

RAD TPB Provinsi Lampung bertujuan untuk menerjemahkan 17 tujuan dan 169 target SDGs ke dalam konteks lokal, sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi daerah. Penyusunan RAD ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dokumen tematik lainnya seperti RPKD (Penanggulangan Kemiskinan Daerah), RAD-PG (Pangan dan Gizi), dan RAD-PD (Penyandang Disabilitas). Dokumen RAD TPB ini memuat indikator-indikator terpilih yang menjadi acuan dalam pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dalam penyusunannya, pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta, guna menciptakan sinergi lintas sektor yang kuat dan partisipatif.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menyadari berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan kurangnya pemahaman terhadap SDGs di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, strategi inovatif diterapkan, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta mendorong pembiayaan pembangunan alternatif melalui kolaborasi multipihak.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa **program utama** yang menjadi fokus RAD TPB Provinsi Lampung, antara lain:

- 1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola SDGs**
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi TPB, termasuk harmonisasi indikator SDGs dengan kebijakan daerah.
- 2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial**
Provinsi Lampung akan melanjutkan program-program pengurangan kemiskinan, baik melalui skema perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun peningkatan akses layanan dasar.
- 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**
Akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang bermutu akan menjadi prioritas utama, didukung oleh peningkatan infrastruktur, tenaga pendidik dan medis, serta digitalisasi layanan.
- 4. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**
Melalui dukungan terhadap UMKM, pertanian berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi hijau, program ini diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berwawasan lingkungan.
- 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana**
Pemerintah daerah akan memperkuat upaya pelestarian lingkungan,

mitigasi perubahan iklim, dan kesiapsiagaan bencana, guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

6. Kemitraan dan Kolaborasi Multi-Pihak.

Dalam semangat kolaborasi, Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun kemitraan strategis lintas sektor guna mempercepat pencapaian target SDGs, termasuk pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif seperti CSR dan filantropi.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator TPB/SDGs Provinsi Lampung tahun 2023 sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Tabel Capaian Indikator TPB/SDGS Provinsi Lampung Per Tujuan Tahun 2024

TPB		KATEGORI TPB				INDIKATOR	
NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan	24	3	1	4	32	13%
2	Tanpa Kelaparan	8	5	1	1	15	6%
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	29	4	0	1	34	14%
4	Pendidikan berkualitas	18	4	0	6	28	12%
5	Kesetaraan Gender	11	2	0	3	16	7%
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	1	1	3	12	5%
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	0	0	3	1%
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	9	5	0	24	10%
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	4	2	0	0	6	2%
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	2	0	1	11	5%

TPB		KATEGORI TPB				INDIKATOR	
NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5	2	0	2	9	4%
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	2	1	0	0	3	1%
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1	0	0	0	1	0%
14	Ekosistem Laut	3	3	0	0	6	2%
15	Ekosistem Darat	4	1	0	0	5	2%
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	16	5	0	10	31	13%
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	0	0	0	6	2%
JUMLAH		158	45	8	31	242	100%
PERSENTASE		65%	19%	3%	13%	100%	100%

Sumber : Laporan Capaian TPB Provinsi Lampung Tahun 2024

Keterangan : Laporan Capaian TPB Tahun 2024 belum release.

Dari data diatas terlihat bahwa capaian 17 tujuan, indikator TPB Provinsi Lampung mencapai yaitu 65%, sedangkan yang belum tercapai hanya 19% dan tidak ada data 3% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%. Sedangkan capaian 242 indikator TPB Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi 4 pilar yang, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial dan pilar hukum dan tata kelola, kategori capaian terhadap 4 pilar tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut:

1. Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan pembangunan yaitu :

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
7	Energi Bersih dan Terjangkau Total	2	1	0	0	3	6,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Total	10	9	5	0	24	48,00
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Total	4	2	0	0	6	12,00
10	Berkurangnya Kesenjangan Total	8	2	0	1	11	22,00
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Total	6	0	0	0	6	12,00
	TOTAL PILAR EKONOMI	30	14	5	1	50	100,00
	PERSENTASE	60	28	10	2	100	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Pembangunan Ekonomi terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 60%, sedangkan yang belum tercapai hanya 28% dan tidak ada data 10% serta masih menggunakan data sebelumnya 2%.

2. Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan Pembangunan antara lain :

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak Total	7	1	1	3	12	33,33
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Total	5	2	0	2	9	25,00
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Total	2	1	0	0	3	8,33
13	Penanggulangan Perubahan Iklim Total	1	0	0	0	1	2,78

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
14	Ekosistem Laut Total	3	3	0	0	6	16,67
15	Ekosistem Darat Total	4	1	0	0	5	13,89
	TOTAL PILAR LINGKUNGAN	22	8	1	5	36	100,00
	PERSENTASE	61,11	22,22	2,78	13,89	100,00	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 6 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 61,11%, sedangkan yang belum tercapai hanya 22,22% dan tidak ada data 2,78% serta masih menggunakan data sebelumnya 13%.

3. Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan pembangunan yaitu :

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
1	Tanpa Kemiskinan Total	24	3	1	4	32	25,60
2	Tanpa Kelaparan Total	8	5	1	1	15	12,00
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Total	29	4	0	1	34	27,20
4	Pendidikan berkualitas Total	18	4	0	6	28	22,40
5	Kesetaraan Gender Total	11	2	0	3	16	12,80
	TOTAL PILAR SOSIAL	90	18	2	15	125	100,00
	PERSENTASE	72	14,4	1,6	12	100	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar Lingkungan terdiri dari 5 TPB dengan, indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 72%, sedangkan yang belum tercapai hanya 14,4% dan tidak ada data 1,6% serta masih menggunakan data sebelumnya 12%.

4. Pilar Pembangunan hukum dan tata kelola dengan 1 tujuan pembangunan yaitu

NO TPB	URAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Tercapai	tidak tercapai	Jenis data realisasi capaian yang tersedia berbeda dengan data target yang ditetapkan	Data realisasi capaian masih memakai data sebelumnya	Jumlah	Persentase (%)
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Total	16	5	0	10	31	100,00
	TOTAL PILAR LINGKUNGAN	16	5	0	10	31	100,00
	PERSENTASE	51,6	16,1	-	32,3	100,0	

Dari data diatas terlihat bahwa pilar hukum dan tata kelola dengan 1 TPB dengan indikator TPB Provinsi Lampung pada kategori tercapai yaitu 51,6%, sedangkan yang belum tercapai hanya 16,1% dan tidak ada data 0 serta masih menggunakan data sebelumnya 32,3%.

4.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024 menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai urusan pemerintahan

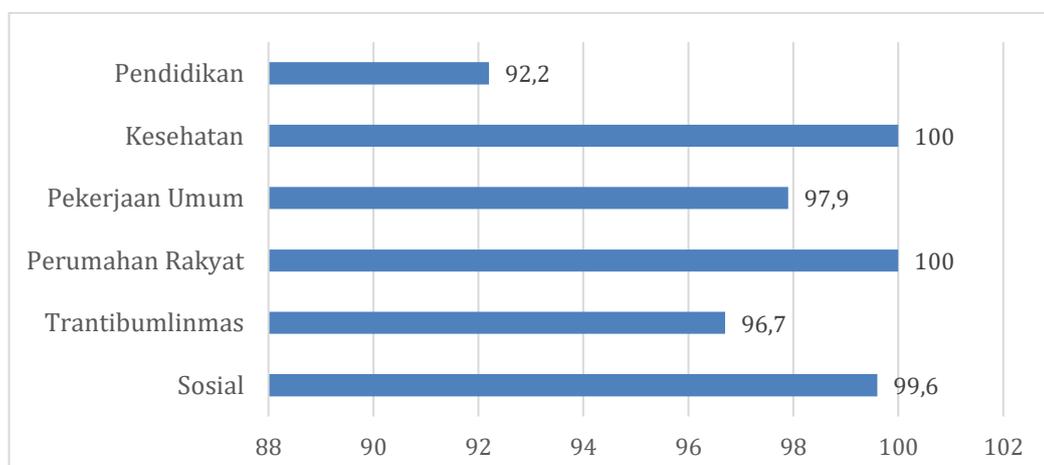
sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Target capaian SPM tersebut umumnya berada pada angka **100%**, yang mencerminkan harapan pencapaian maksimal dalam pelaksanaan layanan dasar di setiap sektor.

Jika dibandingkan dengan target tersebut, realisasi capaian menunjukkan bahwa beberapa sektor telah mencapai target sepenuhnya, yaitu sektor **Perumahan Rakyat** dan **Kesehatan**, yang masing-masing mencatat **100% capaian**. Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan dasar di dua sektor tersebut telah dilaksanakan dengan optimal. Sementara itu, sektor lainnya mencatat realisasi yang mendekati target, meskipun belum mencapai 100%. Sektor **Sosial** mencapai **99,6%**, **Pekerjaan Umum** **97,9%**, dan **Trantibumlinmas** **96,7%**, yang semuanya menunjukkan kinerja sangat baik dan hanya terpaut sedikit dari target yang ditetapkan.

Di antara 6 sektor SPM tersebut, sektor **Pendidikan** masih menunjukkan capaian yang paling rendah, yaitu **92,2%**, sehingga menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan program SPM lebih lanjut agar dapat tercapai di tahun 2025.

Capaian SPM sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 4. 1 Capaian SPM Provinsi Lampung pada tahun 2024



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2024

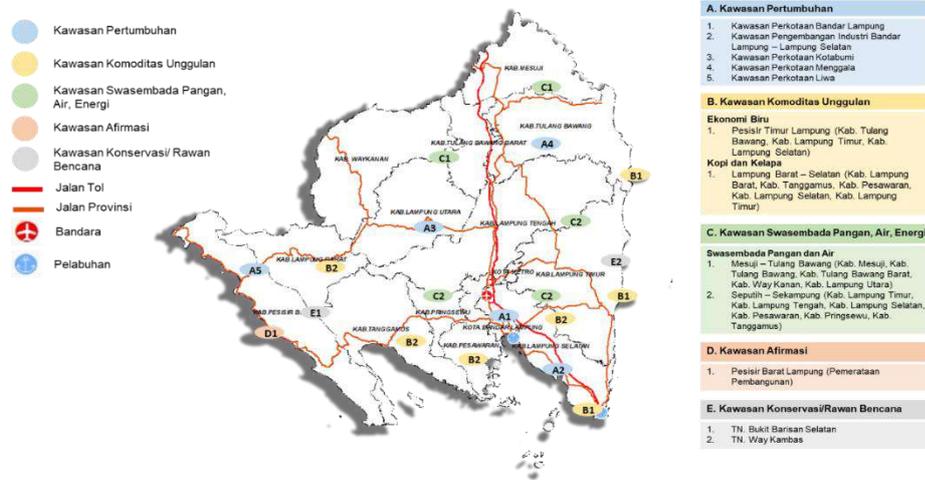
4.7 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung

Arah pembangunan kewilayahan sangat penting karena menjadi landasan bagi pembangunan yang adil, berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai wilayah. Pembangunan yang berarah ini memastikan bahwa setiap daerah dapat memanfaatkan potensi uniknya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Arah pembangunan kewilayahan yang jelas dan terukur sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan arah pembangunan kewilayahan yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pembiayaan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pembiayaan lainnya.

Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN di Provinsi Lampung yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Arah pengembangan kewilayahan Provinsi Lampung pada RPJMN dibagi menjadi 5 (lima) kawasan, yaitu: Kawasan Pertumbuhan; Kawasan Komoditas Unggul; Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi; Kawasan Afirmasi serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.5 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Lampung yang Tercantum pada RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Dukungan program dan kegiatan pada Arah Pengembangan Kewilayahan RPJMN 2025-2029, tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 pada bab IV. Lokasi prioritas rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan highlight indikasi intervensi antara lain:

Tabel 4. 12 Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan Highlight Indikasi Intervensi

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
A. KAWASAN PERTUMBUHAN		
1	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung	a. Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
2	Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan	

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		c. Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu a.l. VCO, tepung kelapa dan arang tempurung serta produk hilirisasi lanjutankelapa a.l. krimer nabati, santan instan dan karbon aktif
		d. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu a.l. raw sugar, GKP, molase, bagasse serta produk hilirisasi lanjutan tebu a.l. bioetanol, sirup glukosa dan bioplastik
		e. Pengembangan pelabuhan Panjang
		f. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (PHTC)
		g. Pengembangan SPAM Regional Pesawaran-Bandar Lampung-Lampung Selatan
		h. Pembangunan Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang
		i. Preservasi jalan ruas Bandar Lampung- Gedongtataan-Pringsewu-Kota Agung dan Bandar Lampung-Metro-Sukadana
		j. Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Interkoneksi Sumatera-Jawa (Jembatan Selat Sunda)
		k. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 Kv Kalianda-Merak (Interkoneksi 500 Kv Sumatera-Jawa)
		l. Pembangunan TPST Regional Bandar Lampung-Metro-Lampung Selatan
		m. Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bandar Lampung
		n. Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung
		o. Pembangunan Infrastruktur PLTP Rajabasa
		p. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Serta Kotabumi produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
		3

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		<p>d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukit kemuning–Blambangan Umpu</p> <p>e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Mayor Jenderal HM Ryacudu Kotabumi (PHTC)</p> <p>f. Pengembangan kota agropolitan Kotabumi</p>
4	Kawasan Perkotaan Menggala	<p>a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Menggala, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan <p>b. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial (PHTC)</p> <p>c. Pengembangan SPAM Perkotaan Menggala</p> <p>d. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Menggala– Wiralaga Mulya dan Menggala–Pancaragan</p> <p>e. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu- anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Menggala Tulang Bawang (PHTC)</p> <p>f. Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang Bawang Barat (hinterland Kawasan Perkotaan Menggala)</p> <p>g. Pengembangan kota agropolitan Menggala</p>
5	Kawasan Perkotaan Liwa	<p>a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Liwa, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan <p>b. Pengembangan SPAM Perkotaan Liwa</p> <p>c. Peningkatan/pelebaran jalan ruas Liwa–Bukit Kemuning dan Liwa–Krui</p>

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		d. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/ Kota, khususnya pada RSUD Alimuddin Umar Liwa (PHTC)
		e. Pengembangan kota agropolitan Liwa
		f. Pengembangan kota agropolitan Liwa
B. KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN		
1	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung yaitu Pesisir Timur Lampung (Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan)	<p>a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan</p> <p>c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap</p> <p>d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan tangkap</p> <p>e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat</p> <p>f. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan</p> <p>g. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan</p> <p>h. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan</p>
2	Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa yaitu Lampung Barat - Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur)	<p>a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (kopi, kelapa)</p> <p>b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (kopi, kelapa)</p> <p>c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (kopi, kelapa)</p> <p>d. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi, kelapa)</p> <p>e. Pengembangan Produk Bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura</p> <p>f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi dan kelapa</p>
C. KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR DAN ENERGI		
1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji-Tulangbawang	<p>a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Rawajitu, D.I. Way Rarem, D.I. Way Umpu, D.I. Rawapitu, dan D.I.R. Rawa Mesuji Ata</p> <p>b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah</p> <p>c. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi)</p>

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
(Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kab. Lampung Utara)	d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
	e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
	f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
	g. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu
	h. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, Sub-DAS Way Umpu
	i. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
	j. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pascapanen
	k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
	l. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian

	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah c. Peningkatan luas lahan pertanian (Ekstensifikasi) d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (Intensifikasi) e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) f. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura g. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura h. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas i. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/ pakan organik k. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen l. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
		pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		m. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
D. KAWASAN AFIRMASI		
1	Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan)	<p>a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan</p> <p>b. Peningkatan ketahanan bencana</p> <p>c. Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah</p> <p>d. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perkebunan (kopi) dan pariwisata bahari</p> <p>e. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah</p> <p>f. Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat</p> <p>g. Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui</p> <p>h. Pengembangan SPAM Perkotaan Krui</p> <p>i. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan Krui (PHTC)</p> <p>j. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi & akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital</p> <p>k. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan</p> <p>l. Peningkatan tips RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Pesisir Barat</p>
E. KAWASAN KONSERVASI DAN RAWAN BENCANA		
1	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana yaitu: TN Bukit Barisan Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat) dan TN Way Kambas (Kab.	<p>a. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi</p> <p>b. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi</p> <p>c. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik</p> <p>d. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri</p> <p>e. Penguatan Hutan Lestari Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p> <p>f. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi</p>

Lokasi Prioritas		Highlight Indikasi Intervensi
	Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah)	g. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana h. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
	2 Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung (Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Lampung Barat)	a. Penerapan Nature Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Pesisir Selatan Lampung (Megathrust Selat Sunda) b. Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
PROVINSI LAMPUNG		a. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita b. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah • Revitalisasi pendidikan nonformal • Penguatan penyetaraan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
		c. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan kematian ibu dan anak • Pencegahan dan Penurunan stunting • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
		d. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan TBC • Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa • Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
		e. Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan <p>f. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR <p>g. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan • Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi • Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik • Penerapan Internet of things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time • Perluasan penggunaan kendaraan listrik <p>h. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan infrastruktur digital • Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital • Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok <p>i. Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital • Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN • Digitalisasi layanan publik prioritas • Pengembangan ekosistem layanan Publik digital <p>j. Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) • Penanggulangan judi dan penyelundupan • Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2025-2029, 2025

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap wilayah memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda—

baik dari segi sumber daya alam, letak geografis, budaya, maupun sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang selaras dengan potensi tersebut akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Pada daerah dengan potensi pariwisata tinggi, pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas pendukung wisata akan membuka akses, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, wilayah dengan potensi pertanian atau perikanan memerlukan infrastruktur irigasi, jalan produksi, dan sarana logistik yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur berbasis potensi akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih resilient, inklusif, dan mandiri. Pada dokumen RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 telah tercantum kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung berdasarkan potensi wilayahnya. Rencana pembangunan ini merupakan kewenangan provinsi dimana pembangunannya bersumber pada alokasi dana APBD Provinsi ataupun diusulkan melalui pembiayaan APBN. Berikut adalah rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan potensi wilayah di Provinsi Lampung.

Tabel 4. 13 Rencana Pembangunan Infrastruktur
berdasarkan Potensi Wilayah

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi		
1	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pendidikan Terpadu Kota Metro • Kawasan Agropolitan Metro • WPPI Kawasan Industri Lampung Tengah • Terminal Tipe A Betan Subing Lampung Tengah • WPPI Lampung Timur • Jalan akses KSPN • Dukungan perwujudan Sistem Prasarana Jaringan Perkeretaapian Pringsewu-Rejosari-Metro-Sukadana • Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya
2	Bandar Lampung –	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Jaringan KA Tanjung Karang –Pringsewu • Kawasan Industri Tegineneng • Kawasan Pangkalan Utama TNI AL Pesawaran

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
	Pesawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal Barang Tegineneng • Pembangunan Jalur Lintas Kereta Api Tegineneng – Bandar Lampung - Tarahan
3	Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Waterfront City • Kawasan Pendidikan UNILA-ITERA-UIN RIL • Kawasan Industri Tegineneng • Kawasan sekitar bandara Radin Inten II • Kawasan Kota Baru Jatiagung • Kawasan Industri Lampung • Pengembangan Jalan Tol Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Pembangunan Stasiun Relung Helok, Karang Sari, Sabah Balau, dan Stasiun Bandara
Koridor Ekonomi Wilayah II : Super Hub Agro Industri dan Culture Tourism		
1	Lampung Utara – Way Kanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara; • Bendung Way Besai dan Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara • Pengembangan Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan Pengembangan Panas Bumi Way Umpu
2	Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan industri Tulang Bawang • Kawasan industri Tulang Bawang Barat • Kawasan industri Mesuji • Dermaga Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat • Pelabuhan Pengumpan regional • Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; • Pelabuhan perikanan pantai Teladas di Kabupaten Tulang Bawang; • Pengembangan Dermaga Gunung Terang • Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Megow Pak yang melintasi sungai Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji
Koridor Ekonomi Wilayah III : Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis Sumber Daya Alam		
1	Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Industri Maritim • Kawasan geothermal ulu belu • Pelabuhan Perikanan • Sentra industri kelautan • Sentra industri pengolahan ikan • Jalan Tol Pelabuhan Panjang – Padang Cermin – Sp. Kota Agung • Pembangunan Dermaga di Pematang Sawa • Pembangunan Pelabuhan di Pekon Martanda dan Pekon Tampang Tua • Pengembangan Pelabuhan Laut Batu Balai, Kecamatan Kota Agung Timur

No.	Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Potensi Wilayah
2	Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Pringsewu dan Rejosari-Pringsewu • Bagian dari pengembangan Jalan Tol Bandar Lampung (SS Natar) – Kota Agung – BTS. Bengkulu
3	Pesisir Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Bandar Udara Muhamad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat • Sistem jaringan air bersih terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. • Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Pisang • Pengembangan Kawasan Industri • Jalan Tol Bengkuntat – Batas Provinsi Lampung – • Pembangunan Jalan Lingkar Exit Tol Wilayah Barat
4	Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kabupaten Lampung Barat; • Rencana pelabuhan Heni Arong di Kabupaten Lampung Barat • Penyediaan Infrastruktur Hijau seperti Kebun Raya Liwa • Pengembangan Akses menuju Geopark • Revitalisasi dan Pengembangan Pelabuhan Dermaga Lumbok, sebagai pelabuhan pengumpan pada perairan berdasarkan Potensi Wilayah Danau Ranau, yang melayani antar Provinsi dan Kabupaten maupun lokal • Penataan kawasan permukiman tradisional, guna meningkatkan nilai tambah KSPN Danau Ranau • Restorasi ekosistem taman TNBBS



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 pada dasarnya merupakan program prioritas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program dan kegiatan yang dirancang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 secara lebih detail disajikan pada Lampiran I. Adapun uraian dalam sub bab ini merupakan rekapitulasi dari program dan kegiatan berdasarkan : 1) Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2025 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2025, 2) Urusan pemerintahan; dan 3) Perangkat Daerah serta Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Arah Kebijakan Nasional dan Daerah mengacu pada Asta cita dan Kepala Daerah Terpilih.

5.1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2025 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2025

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam enam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

Rencana program prioritas dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 adalah sebagaimana matrik di bawah ini.



Tabel 5. 1 Keselarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dalam Rancangan RKP 2025 serta Dukungan Pendanaan Program pada Perubahan RKPD 2025

No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pengelolaan Pendidikan	746.489.102.000,00	Program Pengelolaan Pendidikan	607.401.120.943,00
2	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Pengembangan Kebudayaan	2.500.000.000,00	Program Pengembangan Kebudayaan	2.300.000.000,00
3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	500.000.000,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	347.103.570,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
4	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	500.000.000,00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	398.424.370,00
5	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Pengelolaan Permuseuman	4.500.000.000,00	Program Pengelolaan Permuseuman	3.956.295.000,00
6	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	203.291.568.180,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	187.069.589.536,71
7	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.833.215.215,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	331.769.700,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
8	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	195.000.000,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	52.000.000,00
9	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	625.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	225.908.000,00
10	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.652.911.999,60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	187.069.589.536,71



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
11	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.549.802.225,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	187.069.589.536,71
12	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	441.322.801.000,59	Program Penyelenggaraan Jalan	998.972.851.936,00
13	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	5.535.597.000,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.945.398.690,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
14	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	46.622.690.410,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	156.461.116.636,55
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.152.805.200,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.492.295.642,00
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.377.750.864,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.452.355.400,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.720.109.968,04
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Penataan Bangunan Gedung	14.739.520.400,00	Program Penataan Bangunan Gedung	80.121.804.211,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	260.479.600,00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	24.672.564.469,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.440.000.000,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.937.116.609,25
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengembangan Perumahan	300.000.000,00	Program Pengembangan Perumahan	120.569.500,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Kawasan Permukiman	2.700.000.000,00	Program Kawasan Permukiman	13.360.875.883,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.645.702.460,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	197.005.262.773,98
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	260.000.000,00	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	832.546.500,00
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Penatagunaan Tanah	300.000.000,00	Program Penatagunaan Tanah	1.819.137.086,63



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
26	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.136.058.000,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.815.175.665,00
27	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Penanggulangan Bencana	1.925.740.600,00	Program Penanggulangan Bencana	43.140.471.270,00
28	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	320.000.000,00	Program Pemberdayaan Sosial	277.970.340,00
29	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	185.999.500,00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	176.808.418,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
30	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	7.791.159.389,00	Program Rehabilitasi Sosial	6.536.790.908,50
31	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	520.000.000,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	626.887.470,00
32	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	Program Penanganan Bencana	1.117.505.677,00	Program Penanganan Bencana	10.330.379.143,10



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
33	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pengentasan Kemiskinan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	294.171.000,00	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	262.848.100,00
34	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.600.000.000,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.635.000.000,00
35	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	3.325.000.000,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.116.159.630,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
36	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Pelayaran	950.000.000,00	Program Pengelolaan Pelayaran	40.730.690,00
37	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	9.449.127.000,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	15.059.081.800,00
38	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10.314.000.000,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	9.548.407.550,00
39	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	350.876.400,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	58.122.810,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru					
40	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	305.000.000,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61.202.450,00
41	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	350.000.000,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	5.600.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
42	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	150.000.000,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	0,00
43	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	200.000.000,00	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	5.600.000,00
44	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	5.161.677.000,00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	60.000.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
45	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	350.000.000,00	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5.600.000,00
46	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengentasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	600.000.000,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	255.600.000,00
47	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	450.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.000.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
48	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	6.366.430,00
49	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pelayanan Penanaman Modal	525.000.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	128.040.800,00
50	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.077.200.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00
51	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	75.000.000,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
52	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pembinaan Perpustakaan	930.000.000,00	Program Pembinaan Perpustakaan	572.965.100,00
53	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	175.000.000,00	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	420.421.495,00
54	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pengelolaan Arsip	805.000.000,00	Program Pengelolaan Arsip	166.035.060,00
55	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	640.000.000,00	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	147.815.470,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
56	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	12.345.000.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	229.271.235,00
57	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.760.366.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	273.522.560,00
58	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	665.000.000,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	65.410.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
59	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.350.000.000,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	290.752.170,00
60	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.640.000.000,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	107.000.000,00
61	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pemasaran Pariwisata	2.500.000.000,00	Program Pemasaran Pariwisata	1.371.000.000,00
62	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	575.000.000,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	116.138.000,00
63	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.385.880.000,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.698.528.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
64	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	550.000.000,00	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	60.000.000,00
65	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000,00	Program Perizinan Usaha Pertanian	62.596.780,00
66	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Penyuluhan Pertanian	2.987.562.500,00	Program Penyuluhan Pertanian	377.840.000,00
67	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	130.000.000,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.698.528.000,00
68	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	965.000.000,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	974.094.135,00
69	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Perizinan Usaha Pertanian	100.000.000,00	Program Perizinan Usaha Pertanian	62.596.780,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
70	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.500.000.000,00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	20.740.000,00
71	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	929.000.000,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	116.138.000,00
72	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Hutan	2.482.076.000,00	Program Pengelolaan Hutan	221.356.464,00
73	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	991.216.000,00	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	286.687.209,00
74	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.634.539.300,00	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	314.721.000,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
75	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	123.915.000,00	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	16.304.000,00
76	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	553.410.000,00	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	132.860.800,00
77	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	1.019.250.000,00	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	177.708.790,00
78	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.053.715.000,00	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	414.128.840,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
79	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.903.624.999,50	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	565.846.999,50
80	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000,00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0,00
81	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.378.611.300,00	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	676.999.970,00
82	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Kesejahteraan Rakyat	60.710.042.000,00	Program Kesejahteraan Rakyat	93.397.815.300,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
83	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	1.220.259.000,00	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	321.814.550,00
84	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	2.628.749.000,00	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	576.189.502,00
85	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.086.281.000,00	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	164.214.865,00
86	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Penataan Organisasi	1.591.801.500,00	Program Penataan Organisasi	340.698.550,00
87	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.726.103.000,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.350.098.300,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
88	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.590.916.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.277.471.690,00
89	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.490.556.251,00	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	784.426.438,00
90	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00	Program Pelayanan Penghubung	1.194.475.200,00
91	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyeludupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	877.945.000,00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	178.243.800,00
92	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.750.000.000,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.502.837.400,00



No	RKP 2025		RKPD 2025 Sebelum Perubahan		RKPD 2025 Sesudah Perubahan	
	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Program Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
93	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.000.000.000,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	201.773.200,00
94	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	525.000.000,00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	99.919.030,00
95	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham)	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	284.224.540,00

Tabel 5. 2 Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Provinsi Lampung
Tahun 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.239.619.018.711,70	1.492.488.370.214,95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	746.489.102.000,00	607.401.120.943,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.010.000.000,00	4.565.179.320,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.500.000.000,00	2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	500.000.000,00	347.103.570,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	500.000.000,00	256.956.880,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	500.000.000,00	398.424.370,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.500.000.000,00	3.956.295.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.501.143.704,40	72.337.235.328,02	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	203.291.568.180,00	187.069.589.536,71	DINAS KESEHATAN
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.833.215.215,00	331.769.700,00	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	195.000.000,00	52.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	625.000.000,00	225.908.000,00	DINAS KESEHATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0,00	RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0,00	RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA
16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0,00	RUMAH SAKIT BANDAR NEGARA HUSADA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	473.868.220.829,78	558.126.191.269,77	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.652.911.999,60	2.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	506.600.000,00	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.611.272.209,58	51.554.425.077,58	RUMAH SAKIT JIWA
21	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.549.802.225,00	11.762.444.169,59	RUMAH SAKIT JIWA
22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	558.100.400,00	686.845.700,00	RUMAH SAKIT JIWA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.531.440.466,05	52.890.118.459,89	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	441.322.801.000,59	998.972.851.936,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
25	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.535.597.000,00	1.945.398.690,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.232.102.855,00	55.507.747.925,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
27	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.622.690.410,00	156.461.116.636,55	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.000.000,00	18.101.161.805,62	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
29	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.152.805.200,00	2.492.295.642,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.749.136.940,00	1.377.750.864,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.452.355.400,00	1.720.109.968,04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.739.520.400,00	80.121.804.211,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
33	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	260.479.600,00	24.672.564.469,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.440.000.000,00	6.937.116.609,25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.248.514.618,83	18.101.161.805,62	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
36	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	300.000.000,00	120.569.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
37	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.700.000.000,00	13.360.875.883,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
38	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.645.702.460,00	197.005.262.773,98	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
39	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	260.000.000,00	832.546.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
40	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000,00	1.819.137.086,63	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.416.895.583,90	53.269.215.640,63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
42	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.136.058.000,00	1.815.175.665,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
	SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.151.448.031,57	10.522.531.875,57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
44	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.925.740.600,00	43.140.471.270,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.136.296.900,55	22.423.200.767,22	DINAS SOSIAL
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	320.000.000,00	277.970.340,00	DINAS SOSIAL
47	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	185.999.500,00	176.808.418,00	DINAS SOSIAL
48	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.791.159.389,00	6.536.790.908,50	DINAS SOSIAL
49	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	520.000.000,00	626.887.470,00	DINAS SOSIAL
50	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.117.505.677,00	10.330.379.143,10	DINAS SOSIAL
51	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	294.171.000,00	262.848.100,00	DINAS SOSIAL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.745.170.669,65	27.311.365.707,65	DINAS TENAGA KERJA
53	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	175.000.000,00	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
54	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.600.000.000,00	10.635.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
55	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	920.000.000,00	149.095.000,00	DINAS TENAGA KERJA
56	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.271.395.950,00	1.104.836.980,00	DINAS TENAGA KERJA
57	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	755.000.000,00	219.881.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.512.122.560,80	10.784.016.120,80	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
59	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	618.098.000,00	392.574.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
60	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	888.904.200,00	1.212.633.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
61	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	110.852.000,00	51.385.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.849.200,00	29.949.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
63	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	422.200.000,00	45.131.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
64	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	147.595.800,00	226.784.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
65	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	44.800.000,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
66	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	53.470.000,00	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	179.200.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.403.618.724,40	15.127.961.574,34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	282.197.000,00	111.446.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	447.208.000,00	150.719.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	163.924.000,00	23.317.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
72	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	188.518.000,00	43.790.299,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
73	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	139.020.000,00	40.121.760,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	66.524.000,00	25.874.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	90.057.000,00	21.467.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
76	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000,00	46.745.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	700.614.000,00	246.067.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.131.852.352,00	5.899.049.319,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
79	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	685.000.000,00	139.383.228,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
80	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	157.556.000,00	28.398.627,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
81	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	159.261.000,00	35.692.460,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
82	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	131.426.000,00	50.675.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.484.710.280,05	12.804.819.546,30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
84	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	170.560.000,00	2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
85	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.438.745.000,00	472.319.275,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.175.760.000,00	712.661.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
87	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000,00	64.461.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.526.681.351,21	17.174.097.932,21	DINAS PERHUBUNGAN
89	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.325.000.000,00	1.116.159.630,00	DINAS PERHUBUNGAN
90	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	950.000.000,00	40.730.690,00	DINAS PERHUBUNGAN
91	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	30.000.000,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.902.016.328,00	16.922.103.370,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
93	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.449.127.000,00	15.059.081.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
94	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	10.314.000.000,00	9.548.407.550,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	350.876.400,00	58.122.810,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	305.000.000,00	61.202.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.377.291.968,96	15.232.712.960,80	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
98	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	350.000.000,00	5.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
99	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.000.000,00	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
100	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000,00	5.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
101	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.161.677.000,00	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	350.000.000,00	5.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
103	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	600.000.000,00	255.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
104	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	568.400.000,00	224.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.854.360.966,86	16.785.130.004,86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
106	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	450.000.000,00	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
107	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	6.366.430,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
108	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	525.000.000,00	128.040.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
109	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.077.200.000,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
110	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	75.000.000,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.193.252.616,45	58.480.921.368,72	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
112	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.650.000.000,00	3.640.945.710,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
113	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.650.000.000,00	9.211.351.350,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
114	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	30.271.745,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
115	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.730.675.024,85	14.381.541.283,85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
116	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	930.000.000,00	572.965.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
117	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	175.000.000,00	420.421.495,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
118	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	805.000.000,00	166.035.060,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.651.495.638,80	21.528.617.466,55	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
120	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	640.000.000,00	147.815.470,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
121	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	12.345.000.000,00	229.271.235,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
122	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.760.366.000,00	273.522.560,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
123	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	665.000.000,00	65.410.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
124	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.350.000.000,00	290.752.170,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.830.235.218,88	13.721.266.496,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
126	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.640.000.000,00	107.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
127	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.500.000.000,00	1.371.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
128	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	978.097.100,00	219.356.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
129	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.831.280.000,00	721.686.790,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.593.047.491,32	16.795.618.957,00	DINAS PERKEBUNAN
131	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	575.000.000,00	415.403.180,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
132	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.385.880.000,00	3.655.196.210,00	DINAS PERKEBUNAN
133	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	550.000.000,00	198.343.865,00	DINAS PERKEBUNAN
134	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000,00	62.596.780,00	DINAS PERKEBUNAN
135	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.987.562.500,00	784.334.554,00	DINAS PERKEBUNAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.819.084.327,16	21.648.990.240,45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
137	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.645.500.000,00	3.188.175.295,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
138	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	130.000.000,00	6.945.790,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
139	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	965.000.000,00	974.094.135,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
140	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100.000.000,00	30.370.350,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
141	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	409.500.000,00	120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	850.000.000,00	43.928.170.952,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
143	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
144	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.500.000.000,00	20.740.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
145	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	300.000.000,00	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
146	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	250.000.000,00	14.140.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.745.554.696,00	43.928.170.952,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
148	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	929.000.000,00	116.138.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
149	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.520.094.992,75	10.698.528.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
150	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	400.000.000,00	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
151	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.350.000.000,00	377.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.871.632.087,85	64.572.182.693,43	DINAS KEHUTANAN
153	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.482.076.000,00	221.356.464,00	DINAS KEHUTANAN
154	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	991.216.000,00	286.687.209,00	DINAS KEHUTANAN
155	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.634.539.300,00	314.721.000,00	DINAS KEHUTANAN
156	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	123.915.000,00	16.304.000,00	DINAS KEHUTANAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.167.328.523,40	17.733.081.026,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
158	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	553.410.000,00	132.860.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
159	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.019.250.000,00	177.708.790,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
160	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.053.715.000,00	414.128.840,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
161	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.903.624.999,50	565.846.999,50	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.555.968.621,40	17.026.666.555,80	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
163	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	80.000.000,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
164	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	640.000.000,00	561.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
165	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	550.000.000,00	321.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
166	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.060.000.000,00	386.654.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
167	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	375.000.000,00	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
168	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.385.785.000,00	11.821.143.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
169	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	250.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
170	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	SEKRETARIAT DAERAH			
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.121.388.700,00	344.878.320,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
172	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.378.611.300,00	676.999.970,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	SEKRETARIAT DAERAH			
173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	843.609.000,00	723.419.370,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
174	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	60.710.042.000,00	93.397.815.300,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	SEKRETARIAT DAERAH			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.355.082.000,00	525.574.640,00	BIRO HUKUM
176	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.220.259.000,00	321.814.550,00	BIRO HUKUM
	SEKRETARIAT DAERAH			
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.187.643.500,00	334.878.700,00	BIRO PEREKONOMIAN
178	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.872.636.300,00	669.451.320,00	BIRO PEREKONOMIAN
	SEKRETARIAT DAERAH			
179	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	871.251.000,00	394.908.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
180	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.628.749.000,00	576.189.502,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	SEKRETARIAT DAERAH			
181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	913.719.000,00	339.202.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
182	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.086.281.000,00	164.214.865,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	SEKRETARIAT DAERAH			
183	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.608.198.500,00	367.071.904,00	BIRO ORGANISASI
184	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.591.801.500,00	340.698.550,00	BIRO ORGANISASI
	SEKRETARIAT DAERAH			
185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	145.671.254.826,90	158.486.128.930,90	BIRO UMUM
	SEKRETARIAT DAERAH			
186	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.000.000.000,00	2.225.709.092,25	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	SEKRETARIAT DPRD			
187	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	172.932.114.712,00	157.256.432.496,00	SEKRETARIAT DPRD
188	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	217.067.885.288,00	203.984.025.658,00	SEKRETARIAT DPRD
	PERENCANAAN			
189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.165.746.291,00	24.967.945.169,84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
190	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.996.458.600,00	3.425.935.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
191	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.986.065.500,00	3.305.410.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	KEUANGAN			
192	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.329.341.571,12	174.552.516.038,30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
193	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.784.579.683.667,30	1.244.065.311.214,44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
194	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.446.888.520,00	5.519.692.388,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	KEUANGAN			
195	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.406.206.417,97	95.542.091.037,97	BADAN PENDAPATAN DAERAH
196	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	16.726.103.000,00	14.350.098.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	KEPEGAWAIAN			
197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.636.661.386,00	17.975.893.050,94	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
198	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.500.600.000,00	2.173.843.990,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
199	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.349.229.455,70	19.350.729.883,79	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
200	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.590.916.000,00	6.277.471.690,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.586.653.157,12	9.278.952.565,52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
202	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.490.556.251,00	784.426.438,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
203	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.936.174.885,84	16.896.164.485,84	BADAN PENGHUBUNG
204	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.939.985.000,00	1.194.475.200,00	BADAN PENGHUBUNG
	INSPEKTORAT DAERAH			

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH
205	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.721.700.787,32	46.167.849.766,82	INSPEKTORAT
206	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.812.888.000,00	2.259.933.100,00	INSPEKTORAT
207	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	877.945.000,00	178.243.800,00	INSPEKTORAT
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
208	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.899.995.549,78	20.159.941.669,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
209	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.750.000.000,00	1.502.837.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
210	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.000.000.000,00	201.773.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
211	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	475.000.000,00	106.747.180,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
212	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	525.000.000,00	99.919.030,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
213	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.000.000.000,00	284.224.540,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH



Tabel 5. 3 Alokasi Dukungan Pagu Per Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah
1	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;	106
2	Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;	88
3	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi.	76
4	Pengentasan Kemiskinan;	32
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;	237
6	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya;	37
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;	30



5.2 Program Prioritas Berdasarkan SPM

Tabel 5. 4 Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM sebelum dan sesudah Perubahan RKPD 2025

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5,210,000,000.00	4.491.451.550,00
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	800,000,000.00	73.727.770,00
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000.00	0,00
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000.00	0,00
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	2,150,000,000.00	3.802.110.103,00
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600,000,000.00	206.506.070,00
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	18,314,572,000.00	4.575.840.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	5,758,000,000.00	3.969.898.390,00
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19,201,767,000.00	0,00
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8,600,027,000.00	0,00
11	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	24,227,742,300.00	0,00
12	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6,787,000,000.00	0,00
13	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	400,000,000.00	2.215.805.350,00
14	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600,000,000.00	206.506.070,00
15	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25,280,556,700.00	4.575.840.000,00
16	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8,721,500,000.00	7.159.606.050,00
17	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	3,431,385,000.00	0,00
18	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	7,820,625,000.00	0,00
19	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	438,373,000.00	0,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
20	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	180,000,000.00	180.000.000,00
21	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300,000,000.00	206.506.070,00
22	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	250,000,000.00	4.575.840.000,00
23	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3,720,000,000.00	2.463.879.620,00
24	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	225,000,000.00	0,00
25	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,000,000,000.00	292.323.000,00
26	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,000,000,000.00	283.938.000,50



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
27	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,152,805,200.00	2.492.295.642,00
28	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2,452,355,400.00	1.720.109.968,04
29	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	300,000,000.00	120.569.500,00
30	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14,850,000.00	9.422.000,00
31	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	1,000,000.00	1.000.000,00
32	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	15,884,000.00	9.833.800,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
		telantar di dalam panti					
33	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	296,435,399.00	164.547.500,00
34	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4,740,000.00	1.896.000,00
35	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000.00	2.000.000,00
36	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	1,000,000.00	1.000.000,00
37	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	23,000,000.00	15.567.500,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
38	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	53,109,000.00	47.309.000,00
39	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	573,637,500.00	559.509.000,00
40	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	89,906,700.00	67.929.289,90
41	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	587,469,800.00	9.422.000,00
42	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	7,450,000.00	2.955.000,00
43	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	174,465,820.00	9.833.800,00
44	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	349,572,810.00	164.547.500,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
45	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16,580,000.00	1.896.000,00
46	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12,160,142.00	2.000.000,00
47	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	373,038,050.00	45.804.571,00
48	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	186,145,600.00	15.567.500,00
49	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	1,590,405,000.00	1.552.067.900,00
50	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	50,917,103.00	47.309.000,00
51	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	240,487,000.00	67.929.289,90
52	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,100,000.00	9.422.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
53	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2,500,000.00	1.000.000,00
54	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	12,960,000.00	9.833.800,00
55	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	169,934,300.00	18.278.300,00
56	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5,000,000.00	1.896.000,00
57	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,000,000.00	2.000.000,00
58	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	20,452,000.00	20.448.800,00
59	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	14,250,000.00	1.000.000,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
		telantar di dalam panti					
60	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	294,126,000.00	15.567.500,00
61	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	35,153,700.00	35.153.700,00
62	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	920,852,000.00	559.509.000,00
63	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	65,612,279.00	67.929.289,90
64	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7,225,000.00	7.218.700,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
65	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	2,000,000.00	795.000,00
66	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	5,000,000.00	2.000.000,00
67	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	122,911,597.00	9.833.800,00
68	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	51,570,000.00	18.278.300,00
69	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	24,611,200.00	24.611.200,00



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
70	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	5,000,000.00	1.998.000,00
71	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	10,000,000.00	2.532.750,00
72	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6,304,429.00	47.309.000,00
73	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	273,750,000.00	559.509.000,00
74	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	19,302,500.00	67.929.289,90



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
75	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	363,800,000.00	9.574.221.599,00
76	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	417,810,377.00	418.600.114,10
77	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	28,500,000.00	559.509.000,00
78	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	19,640,000.00	67.929.289,90



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SESUDAH PERUBAHAN
79	SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	287,755,300.00	290.169.930,00

5.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, terdapat 48 perangkat daerah yang melaksanakan 214 program yang terdiri dari 663 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan tahun 2025 terdapat pada buku II RKPD Provinsi Lampung tahun 2025.

Tabel 5. 5 Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8	19	2,000,618,120,711.70	8	18	2.111.713.450.297,95
2	Dinas Kesehatan	5	20	292,445,927,099.40	5	20	260.016.502.564,73
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada			0	3	6	1.211.360.638,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	3	6	494,027,732,829.38	2	4	560.626.191.269,77
5	Rumah Sakit Jiwa	3	9	51,719,174,834.58	3	9	64.003.714.947,17
6	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	3	12	507,389,838,466.64	3	12	1.053.808.369.085,89
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	10	101,854,793,265.00	2	9	211.968.864.561,55
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	12	23	50,298,514,618.83	12	22	348.561.195.312,52
9	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	58,552,953,583.90	2	10	55.084.391.305,63
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	11,077,188,631.57	2	11	53.663.003.145,57
11	Dinas Sosial	7	18	31,365,132,466.55	7	18	40.634.885.146,82
12	Dinas Tenaga Kerja	6	20	33,466,566,619.65	6	18	39.445.178.687,65
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	23	14,128,091,760.80	8	21	12.892.473.920,80
14	Dinas Lingkungan Hidup	10	21	17,611,680,724.40	10	18	15.837.511.783,84
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	8,265,095,352.00	5	16	6.153.198.634,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	5	11	16,769,775,280.05	5	11	16.054.261.321,30
17	Dinas Perhubungan	4	20	22,831,681,352.21	3	13	18.330.988.252,21
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5	14	35,321,019,728.00	5	12	41.648.917.980,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	17	19,757,368,968.96	7	12	15.789.112.960,80
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	20,181,560,966.86	4	9	16.921.537.234,86
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	15	61,693,252,616.45	4	15	71.363.490.173,72
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14	15,640,675,024.85	4	12	15.540.962.938,85

NO.	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	25	39,411,861,638.80	6	24	22.535.388.901,55
24	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	16	21,779,612,318.88	5	12	16.140.309.286,88
25	Dinas Perkebunan	6	15	25,341,489,991.32	6	12	21.911.493.546,00
26	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6	20	30,069,084,327.16	6	17	25.968.575.810,45
27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	9	23	59,844,649,688.75	7	15	55.215.556.952,00
28	Dinas Kehutanan	5	21	71,103,378,387.85	5	19	65.411.251.366,43
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	21	22,697,328,522.90	5	21	19.023.626.455,50
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	19	23,996,753,621.40	7	15	30.201.464.455,80
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	6	2,500,000,000.00	2	6	1.021.878.290,00
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	2	8	61,553,651,000.00	2	7	94.121.234.670,00
33	Biro Hukum	2	5	2,575,341,000.00	2	5	847.389.190,00
34	Biro Perekonomian	2	7	3,060,279,800.00	2	6	1.004.330.020,00
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2	9	3,500,000,000.00	2	9	971.097.702,00
36	Biro Administrasi Pembangunan	2	7	2,000,000,000.00	2	7	503.416.865,00
37	Biro Organisasi	2	5	3,200,000,000.00	2	5	707.770.454,00
38	Biro Umum	1	10	145,671,254,826.90	1	10	158.486.128.930,90
39	Biro Administrasi Pimpinan	1	7	6,000,000,000.00	1	7	2.225.709.092,25
40	Sekretariat DPRD	2	16	390,000,000,000.00	2	16	361.240.458.154,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	40,148,270,391.00	3	15	31.699.291.069,84
42	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	15	1,913,355,913,758.42	3	15	1.424.137.519.640,74
43	Badan Pendapatan Daerah	2	9	145,132,309,417.97	2	9	109.892.189.337,97
44	Badan Kepegawaian Daerah	2	9	116,137,261,386.34	2	9	20.149.737.040,94
45	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	10	28,940,145,455.70	2	10	25.628.201.573,79
46	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	12	12,077,209,408.12	2	10	10.063.379.003,52
47	Badan Penghubung	2	8	20,876,159,885.84	2	7	18.090.639.685,84
48	Inspektorat	3	11	58,412,533,787.32	3	10	48.606.026.666,82
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	6	12	24,649,995,549.78	6	12	22.355.443.019,78
JUMLAH		208	665	7,139,050,629,066.23	200	606	7.619.429.069.345,63

5.4 Dukungan Program Unggulan melalui pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025

Dalam rangka mempercepat capaian pembangunan dan memastikan program unggulan daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung mengintegrasikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai pendekatan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2025.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) adalah salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza-Jihan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan yang signifikan dan berdampak langsung pada masyarakat dalam waktu singkat. Dalam implementasinya, PHTC difokuskan pada beberapa kegiatan utama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif secara langsung dan cepat:

1. Pengembangan Pupuk Organik Cair untuk mendukung Kemiskinan dan Stunting Melalui Pembinaan Kawasan Padi

Dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting melalui pembinaan kawasan padi, Pemerintah Daerah menetapkan kegiatan Belanja Pupuk Organik Cair sebagai bagian dari program penataan prasarana pertanian. Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Cepat 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2025–2029.

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp. 10.350.430.950, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sarana/Perlengkapan Instalasi Pengolahan Pupuk Organik Cair (POC) untuk kapasitas 500 unit dialokasikan sebesar Rp. 5.451.890.000,-.
- b) Pembuatan Microba Center (Swakelola): Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.935.298.546,-.

- c) Operasional Kegiatan (meliputi Verifikasi/CPCL, Pendampingan, dan Monitoring & Evaluasi): Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.321.389.000,-.
- d) Dukungan Manajemen: Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 641.853.404,-.

2. Penanganan Jalan dan Jembatan di Provinsi Lampung

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mencatat total panjang ruas jalan provinsi mencapai 1.695,479 kilometer, tersebar dalam 98 ruas jalan dan 16 koridor utama yang menghubungkan wilayah strategis di Provinsi Lampung. Dari total panjang tersebut, kondisi jalan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sepanjang 1.323,908 km, atau sekitar 78,08% dari total ruas jalan.
- Jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) sepanjang 371,571 km, atau 21,92%.

No.	Nama Ruas	KABUPATEN	Panjang Ruas (Km)	Kondisi Perkerasan (Km)				Pagu Kegiatan (Rp.)
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Jabung - Sp. Labuhan Maringgai	Lampung Timur	22,962	14,332	3,83	1,2	3,6	10.800.000.000
2	Bandar Jaya - Sp. Mandala	Lampung Tengah	37,016	16,356	12,08	2,98	5,6	13.230.000.000
3	Kalirejo - Bangunrejo	Lampung Tengah	14,086	4,3	3,786	0,4	5,6	15.660.000.000
4	Padang Ratu - Kalirejo	Lampung Tengah	22,603	12,203	3,3	0,6	6,5	5.656.750.400
5	Kotabumi - Bandar Abung	Lampung Utara	19,725	11,625	6,9	0,9	0,3	5.100.000.000
6	Metro - Tanjung Kari	Lampung Timur	24,251	18,501	4,05	1,3	0,4	5.100.000.000
Total								55.546.750.400

3. Bantuan mesin pengering padi (dryer)

Dalam mendukung RPJMN 2025–2029 serta mewujudkan swasembada pangan, pengendalian inflasi, dan semangat hilirisasi pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2025 memberikan bantuan mesin pengering padi (dryer) kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok Tani (Poktan). Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas gabah kering giling serta beras, guna memperkuat daya saing produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Lampung.

Program hibah 24 dryer oleh Pak Gubernur Lampung adalah suatu terobosan di hilirisasi pertanian di Lampung. Dampak positif bagi petani Lampung :

- Dryer kapasitas 20 ton mampu mengeringkan hasil panen dari 2–3 hektar gabah atau jagung.
- Mempercepat proses pengeringan Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dari 36 jam (pengeringan manual) menjadi 12 jam.
- Membantu petani saat panen raya dengan menahan GKP agar dapat dijual sebagai GKG dengan harga lebih tinggi.
- Mengurangi risiko penurunan mutu gabah akibat penumpukan hasil panen.
- Hibah 24 unit dryer dapat mengolah hingga 480 ton GKP per hari, setara dengan panen 72 hektar lahan.

4. Dukungan Anggaran Jalan Lingkungan Menuju Lokasi RMU dan Dryer.

Provinsi Lampung telah mengakomodir dukungan jalan lingkungan/desa menuju industri pertanian yang menjalankan kegiatan industri pertanian Rice Mill Unit (RMU) dan Dryer Padi/Jagung di beberapa kabupaten, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Desa	Kec	Kabupaten	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa Bandar Rejo Kec Natar Kab Lampung Selatan	Bandar Rejo	Natar	Lampung Selatan	999.450.000,00
2	Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa Taman Sari Kec Purbolinggo Kab Lampung Timur	Taman Sari	Purbolinggo	Lampung Timur	999.450.000,00
3	Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa Wonomarto Kec Kotabumi Utara Kab Lampung Utara	Wonomarto	Kotabumi Utara	Lampung Utara	999.450.000,00
4	Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa Tambah Rejo Kec Gadingrejo Kab Pringsewu	Tambah Rejo	Gadingrejo	Pringsewu	999.450.000,00
	TOTAL				3.997.800.000,00

5. Program DESAKU MAJU

Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Program Desaku Maju sebagai salah satu program unggulan dalam agenda pembangunan daerah. Diluncurkan pada masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendorong kemajuan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Desaku Maju hadir dengan visi menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif. Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fokus Program Desaku Maju:

a) Penguatan Ekonomi Desa

Melalui dukungan terhadap hilirisasi hasil pertanian dan pengembangan UMKM, program ini mendorong desa menjadi sentra produksi dan distribusi yang mandiri.

b) Peningkatan Infrastruktur

Perbaikan dan pembangunan jalan desa, serta sarana produksi seperti instalasi pengolahan pupuk dan alat pengering hasil pertanian, menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing desa.

c) Pemberdayaan SDM dan Pelatihan Vokasi

Program ini juga memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa agar mereka memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal.

d) Revitalisasi Peran BUMDes

Badan Usaha Milik Desa diperkuat sebagai pengelola usaha strategis desa, agar mampu menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.



Dukungan Program Desaku Maju dilakukan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar 152.453.710,- rencana kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen BUMDesa, Pelaksanaan Laporan Keuangan BUMDes, Pengembangan Usaha BUMDes, Program Makan Siang Bergizi dan Program Pupuk Organik Cair, Peserta Kegiatan : 25 BUMDesa (Lokus Desa Unggul) dari 13 Kabupaten se Provinsi Lampung. Selanjutnya Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar 100.000.000,- rencana kegiatan : Sosialisasi dan Pembinaan BUMDesa, Peserta Kegiatan : 180 orang (Lokus Desaku Maju) terdiri dari unsur : Dinas PMD Kabupaten, TA PM Kabupaten, Kepala Desa, Pengurus BUMDesa dan Pegiat Ekonomi Desa.



BAB VI PENUTUP

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025



BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yaitu "Lampung Maju dan Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Rakyat", menjadi dasar utama dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi yang mencakup peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi daerah, penguatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan berkelanjutan. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMD, Perubahan RKPD 2025 diarahkan agar program dan kegiatan tahunan selaras dengan visi-misi pembangunan jangka menengah, guna menjamin kesinambungan dan efektivitas pencapaian target pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 disusun untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025. Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko pembangunan ke dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan program, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Perpres ini menekankan pentingnya identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, serta pemantauan risiko secara sistematis untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Manajemen risiko pembangunan merupakan instrumen penting dalam mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan, baik yang bersumber dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, maupun kejadian luar biasa seperti bencana dan krisis global. Di tingkat daerah, penerapan manajemen risiko diarahkan untuk meningkatkan daya adaptif, responsif, dan ketangguhan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gangguan terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah **“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL



MATRIKS PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG





01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																			196.249.205.800,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.992.118.120.711,70	2.126.743.819.669,70	2.098.514.670.477,95	106.396.549.766,25								193.856.478.700,00			
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.992.118.120.711,70	2.126.743.819.669,70	2.098.514.670.477,95	106.396.549.766,25								193.856.478.700,00			
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan				100 %	100 %	1.239.619.018.711,70	1.511.304.101.669,70	1.491.648.370.215,45	-1.230.504.511.111,70								9.114.507.600,00			
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tepat waktu				100 %	100 %	375.000.000,00	375.000.000,00	200.290.450,00	-174.709.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung		300.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		150.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	78.211.260,00	-71.788.740,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			150.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		150.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	92.354.190,00	-57.645.810,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			150.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	29.725.000,00	-45.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu				100 %	100 %	1.217.318.652.161,70	1.494.059.635.119,70	1.478.548.566.928,70	261.229.914.767,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung		0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15461 Orang/ Bulan	16969 Orang/ Bulan	1.217.318.652.161,70	1.493.289.635.119,70	1.477.778.566.928,70	260.459.914.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	770.000.000,00	770.000.000,00	770.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu				100 %	100 %	1.017.544.400,00	1.017.544.400,00	239.199.775,00	-778.344.625,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung		1.035.895.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	917.544.400,00	917.544.400,00	207.320.605,00	-710.223.795,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			935.895.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	18.455.330,00	-31.544.670,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	13.423.840,00	-36.576.160,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	434.342.550,00	-565.657.450,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	434.342.550,00	-565.657.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.818.612.000,00	1.818.612.000,00	658.010.325,00	-1.160.601.675,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		1.446.984.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			18.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	-37.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	10.612.000,00	10.612.000,00	2.653.000,00	-7.959.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			10.824.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	255.000.000,00	255.000.000,00	91.882.975,00	-163.117.025,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			260.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	80.000.700,00	-319.999.300,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	910.000.000,00	910.000.000,00	352.973.650,00	-557.026.350,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			928.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	293.998.000,00	-1.206.002.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	49.678.000,00	-700.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	244.320.000,00	-505.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran				100 %	100 %	9.726.134.300,00	4.672.234.300,00	4.639.732.300,00	-5.086.402.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.110.414.300,00	1.110.414.300,00	1.110.414.300,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.615.720.000,00	3.561.820.000,00	3.529.318.000,00	-5.086.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang perkantoran				100 %	100 %	1.370.661.350,00	1.370.661.350,00	754.512.320,00	-616.149.030,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			729.365.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				7 Unit	7 Unit	406.960.000,00	406.960.000,00	406.960.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				14 Ruang	14 Ruang	4.734.860.000,00	0,00	0,00	-4.734.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			4.829.557.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0010		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	2.095.856.000,00	0,00	0,00	-2.095.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.137.773.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0011		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	363.174.000,00	0,00	0,00	-363.174.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			370.437.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0014		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				36 Unit	36 Unit	9.916.926.000,00	0,00	0,00	-9.916.926.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			10.115.264.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0019		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				165 Ruang	165 Ruang	19.201.767.000,00	0,00	0,00	-19.201.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			19.201.767.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0020		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				33 Ruang	33 Ruang	6.437.773.000,00	0,00	0,00	-6.437.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			6.566.528.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0027		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	136.231.000,00	0,00	0,00	-136.231.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			138.955.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0028		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				12 Ruang	12 Ruang	2.266.212.000,00	0,00	0,00	-2.266.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.311.536.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0036		Pengadaan Mebel Sekolah																		
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				48 Paket	48 Paket	1.860.000.000,00	0,00	0,00	-1.860.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.897.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0039		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1000 Paket	1000 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0041		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				100 Paket	42 Paket	18.314.572.000,00	4.575.840.000,00	4.575.840.000,00	-13.738.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			18.680.863.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0045		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																		
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				12063 Peserta didik	12063 Peserta didik	5.758.000.000,00	5.008.000.000,00	3.969.898.390,00	-1.788.101.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			5.758.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				700 Peserta Didik	700 Peserta Didik	0,00	375.000.000,00	294.314.230,00	294.314.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0051		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	2.150.000.000,00	3.050.000.000,00	3.022.110.102,50	872.110.102,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0053		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				513 Satuan Pendidikan	513 Satuan Pendidikan	265.889.830.000,00	277.662.788.000,00	277.662.788.000,00	11.772.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0057		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	206.506.070,00	-393.493.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	375.000.000,00	257.932.770,00	257.932.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0066		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				50000 Buku	50000 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0071		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				21 Ruang	21 Ruang	4.181.123.000,00	0,00	0,00	-4.181.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			4.264.745.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.01.0072		Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	8.600.027.000,00	0,00	0,00	-8.600.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			8.772.027.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausahaan				52 %	52 %	370.373.640.000,00	302.270.760.000,00	300.347.916.170,00	-70.025.723.830,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	SMK		91.702.740.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.02.0001		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.787.000.000,00	6.000.000.000,00	5.967.628.860,00	-819.371.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			6.922.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0004		Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				18 Ruang	18 Ruang	24.227.742.300,00	0,00	0,00	-24.227.742.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0005		Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				59 Ruang	59 Ruang	21.573.108.000,00	0,00	0,00	-21.573.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			22.004.570.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0006		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	1.432.420.000,00	0,00	0,00	-1.432.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.461.068.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0007		Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	379.614.000,00	0,00	0,00	-379.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			387.206.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0010		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				47 Unit	47 Unit	7.109.023.000,00	0,00	0,00	-7.109.023.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			7.251.203.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0016		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				15 Ruang	15 Ruang	2.161.769.000,00	0,00	0,00	-2.161.769.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.205.004.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0018		Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	2 Ruang	494.120.000,00	0,00	0,00	-494.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			504.002.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0028		Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				133 Paket	133 Paket	4.835.000.000,00	0,00	0,00	-4.835.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			4.931.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0031		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0033		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	32 Paket	25.280.556.700,00	37.040.000.000,00	37.040.000.000,00	11.759.443.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			25.786.167.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0037		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8051 Peserta didik	8051 Peserta didik	8.721.500.000,00	8.221.500.000,00	7.159.606.050,00	-1.561.893.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				700 Peserta Didik	700 Peserta Didik	0,00	150.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0043		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	400.000.000,00	55.805.350,00	-344.194.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0046		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				487 Satuan Pendidikan	487 Satuan Pendidikan	246.519.750.000,00	249.509.260.000,00	249.509.260.000,00	2.989.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0050		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	205.615.910,00	-394.384.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0061		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				50000 Buku	50000 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0063		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik																		
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				5 Ruang	5 Ruang	3.431.385.000,00	0,00	0,00	-3.431.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			3.500.012.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0064		Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				13 Ruang	13 Ruang	8.600.027.000,00	0,00	0,00	-8.600.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			8.772.027.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.02.0069		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				43 Ruang	43 Ruang	7.820.625.000,00	0,00	0,00	-7.820.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			7.977.037.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase SLB yang menjadi Sekolah Penggerak				51.61 %	51.61 %	16.822.111.000,00	15.512.330.000,00	14.123.815.210,00	-2.698.295.790,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	PKLK		1.071.834.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.1.03.0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.1.03.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	178.934.000,00	0,00	0,00	-178.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			182.512.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.1.03.0008		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	178.934.000,00	0,00	0,00	-178.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			182.512.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.1.03.0010		Pembangunan Kantin Sekolah																			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	442.950.000,00	0,00	0,00	-442.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			451.809.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.1.03.0035		Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIKIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.1.03.0038		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.03.0040		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	228.300.000,00	228.300.000,00	-21.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.03.0044		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2085 Peserta Didik	2085 Peserta Didik	3.720.000.000,00	3.620.000.000,00	2.463.879.620,00	-1.256.120.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.03.0048		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	200.000.000,00	200.000.000,00	180.643.000,00	-19.357.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.03.0050		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.03.0051		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				31 Satuan Pendidikan	31 Satuan Pendidikan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.03.0052		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				31 Satuan Pendidikan	31 Satuan Pendidikan	10.332.920.000,00	10.884.030.000,00	10.884.030.000,00	551.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.03.0056		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	86.962.590,00	-213.037.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.1.03.0059		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah</i>				3 Ruang	3 Ruang	438.373.000,00	0,00	0,00	-438.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat</i>				3 Ruang	3 Ruang	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat				40,44 %	40,44 %	6.010.000.000,00	6.010.000.000,00	2.405.179.320,00	-6.010.000.000,00							0,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	<i>Persentase guru dan tenaga kependidikan yang bersertifikat jenjang SMA, SMK, dan SLB</i>				40,44 %	40,44 %	6.010.000.000,00	6.010.000.000,00	2.405.179.320,00	-3.604.820.680,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	73.727.770,00	-726.272.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.210.000.000,00	5.210.000.000,00	2.331.451.550,00	-2.878.548.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.500.000.000,00	8.356.295.000,00	7.258.779.820,00	-1.241.220.180,00							2.392.727.100,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							8.500.000.000,00	8.356.295.000,00	7.258.779.820,00	-1.241.220.180,00							2.392.727.100,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya				35 %	35 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.300.000.000,00	-107.272.900,00							2.392.727.100,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase jumlah objek budaya (seni) yang dikembangkan</i>				48 %	48 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.300.000.000,00	-200.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Objek Budaya		2.392.727.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan</i>				24 Objek	24 Objek	1.055.138.000,00	1.845.811.000,00	1.845.811.000,00	790.673.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.076.240.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				80 Orang	80 Orang	1.290.673.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	-990.673.000,00	Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa	PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.316.486.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	154.189.000,00	154.189.000,00	154.189.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.02.1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.02.1.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Pusat, Palapa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase warisan budaya tak benda yang difilemkan (dokumenter)				20 %	20 %	500.000.000,00	500.000.000,00	347.103.570,00	-500.000.000,00								0,00	
2.22.03.1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pekan kebudayaan daerah				86.67 %	86.67 %	500.000.000,00	500.000.000,00	347.103.570,00	-152.896.430,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	SDM Kesenian			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.1.01.0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				2250 Orang	2250 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	347.103.570,00	-152.896.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	256.956.880,00	-500.000.000,00								0,00	
2.22.04.1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	256.956.880,00	-243.043.120,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.04.1.01.0001		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				150 Orang	150 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	256.956.880,00	-243.043.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi nasional				44 %	44 %	500.000.000,00	500.000.000,00	398.424.370,00	-500.000.000,00								0,00	
2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan				46.67 %	46.67 %	500.000.000,00	500.000.000,00	398.424.370,00	-101.575.630,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Cagar Budaya			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.1.02.0004		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya																			
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				110 Orang	110 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	398.424.370,00	-101.575.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PAJAK DAERAH	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat				100 %	100 %	4.500.000.000,00	4.356.295.000,00	3.956.295.000,00	-4.500.000.000,00								0,00	
2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Jumlah Koleksi Cagar Budaya Museum yang dirawat				14.72 %	14.72 %	4.500.000.000,00	4.356.295.000,00	3.956.295.000,00	-543.705.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Cagar Budaya Museum			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																				
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				500 Unit	500 Unit	1.107.671.500,00	1.065.387.800,00	1.065.387.800,00	-42.283.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Sukaraja	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																				
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				6 Unit	6 Unit	2.649.873.600,00	2.670.835.700,00	2.370.835.700,00	-279.037.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Sukaraja	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	742.454.900,00	620.071.500,00	520.071.500,00	-222.383.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Rajabasa, Gedong Meneng Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Sukaraja	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
J U M L A H									2.000.618.120.711,70	2.135.100.114.669,70	2.105.773.450.297,95	479.167.077.423,58							196.249.205.800,00			



02 DINAS KESEHATAN



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							292.445.927.099,40	251.605.123.023,04	260.016.502.564,73	-32.429.424.534,67							394.652.462.783,20	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							292.445.927.099,40	251.605.123.023,04	260.016.502.564,73	-32.429.424.534,67							394.652.462.783,20	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							292.445.927.099,40	251.605.123.023,04	260.016.502.564,73	-32.429.424.534,67							394.652.462.783,20	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	86.501.143.704,40	79.024.662.057,00	71.875.478.328,02	27.333.463.578,80							113.834.607.283,20	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	84.632.000,00	-65.368.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	16.232.000,00	-3.768.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	10.900.000,00	-29.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Prov Lampung				100 %	100 %	60.852.636.918,40	59.508.713.271,00	57.077.278.271,00	-3.775.358.647,40			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		84.772.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				374 Orang/Bulan	374 Orang/Bulan	59.755.436.918,40	56.411.513.271,00	56.003.513.271,00	-3.751.923.647,40	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			81.931.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.026.000.000,00	3.026.000.000,00	1.026.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	9.230.250,00	-3.769.750,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.868.400,00	-5.131.600,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	8.245.000,00	-3.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	10.442.300,00	-5.557.700,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	15.200.000,00	15.200.000,00	9.979.050,00	-5.220.950,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	55.000.000,00	55.000.000,00	30.293.150,00	-24.706.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.942.500,00	-4.057.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	24.350.650,00	-20.649.350,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	70.768.000,00	76.200.000,00	25.504.940,00	-45.263.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		374.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	5.568.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	-68.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	1.062.880,00	-4.137.120,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	950.480,00	-4.049.520,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	53.000.000,00	16.963.580,00	-33.036.420,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	1.028.000,00	-3.972.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.514.638.450,00	2.567.502.611,00	828.948.156,85	-1.685.690.293,15			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung	4.455.442.750,20	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	111.916.850,00	87.006.300,00	45.599.150,00	-66.317.700,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	618.104.000,00	599.990.000,00	61.095.000,00	-557.009.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			706.317.524,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.029.800,00	42.164.658,00	-57.835.342,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			192.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200.589.600,00	215.429.160,00	93.808.020,00	-106.781.580,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			632.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	184.028.000,00	166.114.000,00	47.028.500,00	-136.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			302.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	241.191.700,00	67.929.600,00	-132.070.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			445.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	98.509.000,00	44.215.250,00	-55.784.750,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000.000,00	1.059.232.651,00	403.926.276,85	-596.073.723,15	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.623.784.439,20	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.481.256.293,00	1.208.973.040,00	292.302.760,00	-1.188.953.533,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		1.568.526.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	350.894.953,00	300.791.000,00	6.276.760,00	-344.618.193,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			205.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	620.361.340,00	260.635.000,00	300.000,00	-620.061.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			332.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	300.000,00	-99.700.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	410.000.000,00	547.547.040,00	9.136.000,00	-400.864.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			387.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	13.394.492.340,00	7.041.645.520,00	6.755.696.644,00	-6.638.795.696,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		12.659.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.184.149.340,00	2.214.881.520,00	1.928.273.644,00	-255.875.696,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.210.343.000,00	4.826.764.000,00	4.530.223.000,00	-6.680.120.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			9.377.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.511.451.703,00	3.916.627.615,00	1.061.445.708,00	-2.450.005.995,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		4.450.578.533,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	70 Unit	1.445.146.000,00	1.480.177.000,00	541.167.934,00	-903.978.066,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.787.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	114.960.000,00	139.846.400,00	24.601.600,00	-90.358.400,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			192.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.598.122.240,00	1.938.679.977,00	225.000.000,00	-1.373.122.240,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	353.223.463,00	357.924.238,00	117.744.238,00	-235.479.225,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	4.470.900.000,00	4.500.000.000,00	5.719.376.698,17	1.248.476.698,17			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		5.082.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.470.900.000,00	4.500.000.000,00	5.719.376.698,17	1.248.476.698,17	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			5.082.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase FKTP Terakreditasi Prevalensi Wasting Success Rate TBC Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				100 %	100 %	203.291.568.180,00	169.470.767.751,04	187.490.309.536,71	70.796.962.920,00							274.088.531.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Yang Memiliki Sarana, Prasarana Dan Alkes Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Di Tingkat Provinsi Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				100 % 1:1000 :	100 % 1:1000 :	11.570.844.000,00	17.939.130.334,00	16.860.067.680,33	5.289.223.680,33			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		19.986.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	95.000.000,00	-105.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			242.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				3 Layanan	3 Layanan	75.000.000,00	75.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	275.000.000,00	219.018.000,00	119.018.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	8.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	150.050.000,00	5.350.050.000,00	5.000.005.000,00	4.849.955.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	34.044.140,00	-15.955.860,00	Kota Bandar Lampung, Enggal	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			176.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0017		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			632.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0020		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	3.840.140,00	-56.159.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0025		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	145.794.000,00	312.073.334,00	246.036.667,00	100.242.667,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			340.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0026		Pembangunan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00	0,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			500.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.01.0027		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000.000,00	11.418.507.000,00	11.088.623.733,33	2.088.623.733,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			14.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	190.668.504.180,00	150.308.263.417,04	170.073.019.121,38	-20.595.485.058,62			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		252.817.031.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				278199 Orang	7000 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	292.323.000,00	-707.677.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.02.1.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				137406 Orang	5000 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	283.938.000,50	-716.061.999,50	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				16 Dokumen	16 Dokumen	1.200.000.000,00	1.494.035.000,00	1.146.500.000,00	-53.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			5.474.234.700,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				17 Dokumen	17 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	474.437.000,00	-725.563.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	11.088.000,00	-38.912.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			341.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	1.100.000.000,00	124.300.000,00	-675.700.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.210.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	330.000.000,00	352.500.000,00	176.250.000,00	-153.750.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			875.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	2.450.000.000,00	2.886.554.000,00	1.670.721.506,67	-779.278.493,33	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.464.040.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	155.939.000,00	150.939.000,00	125.939.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0016		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	178.200.000.180,00	136.196.077.417,04	162.720.136.614,21	-15.479.863.565,79	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			230.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0017		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	752.416.000,00	324.599.000,00	258.200.000,00	-494.216.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0018		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	700.000.000,00	1.000.000.000,00	223.493.000,00	-476.507.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.365.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0019		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				15 Dokumen	15 Dokumen	400.000.000,00	987.371.000,00	619.085.000,00	219.085.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.333.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0020		Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0021		Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	3.500.000,00	-66.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0022		Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	1.971.088.000,00	1.962.588.000,00	1.256.288.000,00	-714.800.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0023		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0024		Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0025		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	4 Paket	30.000.000,00	78.600.000,00	63.600.000,00	33.600.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0026		Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0030		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2100000 Keluarga	2100000 Keluarga	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Kesehatan				100 %	100 %	500.000.000,00	771.154.000,00	443.942.000,00	-56.058.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	771.154.000,00	443.942.000,00	-56.058.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Rs Kelas B Dan Fasyankes Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	552.220.000,00	452.220.000,00	113.280.735,00	-438.939.265,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditiindaklanjuti Perizinan				9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	28.846.900,00	-71.153.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	52.220.000,00	52.220.000,00	20.586.935,00	-31.633.065,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				9 Unit	9 Unit	400.000.000,00	300.000.000,00	63.846.900,00	-336.153.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.833.215.215,00	2.289.693.215,00	372.806.700,00	3.660.373.635,00							5.493.588.850,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukm Ukp Provinsi				100 %	100 %	279.820.000,00	279.820.000,00	66.600.000,00	-213.220.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		2.684.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				16404 Orang	16404 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	41.600.000,00	-158.400.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.332.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				36323 Orang	36323 Orang	79.820.000,00	79.820.000,00	25.000.000,00	-54.820.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			352.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sdm Kesehatan Yang Bermutu Dan Kompeten Sesuai Dengan Standar Akreditasi				47 %	47 %	1.553.395.215,00	2.009.873.215,00	306.206.700,00	-1.247.188.515,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		2.809.588.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				185 Orang	185 Orang	1.367.617.215,00	1.961.023.215,00	240.744.700,00	-1.126.872.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Enggal	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	185.778.000,00	48.850.000,00	24.425.000,00	-161.353.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			346.500.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	195.000.000,00	195.000.000,00	52.000.000,00	305.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Penerbitan Pbf Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	27.000.000,00	-93.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																			
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				50 Sarana	50 Sarana	120.000.000,00	120.000.000,00	27.000.000,00	-93.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																			
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				3 Sarana	3 Sarana	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	625.000.000,00	625.000.000,00	225.908.000,00	110.735.550,00								735.735.550,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kerjasama, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kerjasama, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	63.908.000,00	-86.092.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		154.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kerjasama, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kerjasama, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	63.908.000,00	-86.092.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			154.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase PHBS Dalam Rangka Promotif Dan Preventif				100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		427.735.550,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			372.735.550,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Lampung				100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	12.000.000,00	-63.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat di Provinsi Lampung		154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	12.000.000,00	-63.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA							292.445.927.099,40	251.605.123.023,04	260.016.502.564,73	-32.429.424.534,67							394.652.462.783,20	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							292.445.927.099,40	251.605.123.023,04	260.016.502.564,73	-32.429.424.534,67							394.652.462.783,20	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							292.445.927.099,40	251.605.123.023,04	260.016.502.564,73	-32.429.424.534,67							394.652.462.783,20	
	1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	86.501.143.704,40	79.024.662.057,00	71.875.478.328,02	27.333.463.578,80							113.834.607.283,20	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.514.638.450,00	2.567.502.611,00	828.948.156,85	-1.685.690.293,15			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		4.455.442.750,20	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	3.727.942,00	3.727.942,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			3.914.339,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	5.746.060,00	5.746.060,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			6.033.363,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	4.939.700,00	4.939.700,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			5.186.685,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	3 Laporan	0,00	0,00	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			7.736.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.481.256.293,00	1.208.973.040,00	292.302.760,00	-1.188.953.533,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		1.568.526.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			51.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	227.290.000,00	227.290.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			228.426.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.394.492.340,00	7.041.645.520,00	6.755.696.644,00	-6.638.795.696,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		12.659.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	3 Laporan	0,00	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			95.760.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	3 Laporan	0,00	0,00	206.000.000,00	206.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			216.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.511.451.703,00	3.916.627.615,00	1.061.445.708,00	-2.450.005.995,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		4.450.578.533,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	7 Unit	0,00	0,00	6.704.000,00	6.704.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			7.039.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	1 Unit	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.299.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	37.947.936,00	37.947.936,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			39.845.333,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	106.090.000,00	106.090.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			111.394.500,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	203.291.568.180,00	169.470.767.751,04	187.490.309.536,71	70.796.962.920,00							274.088.531.100,00		
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	190.668.504.180,00	150.308.263.417,04	170.073.019.121,38	-20.595.485.058,62			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		252.817.031.100,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	1 Dokumen	0,00	0,00	420.720.000,00	420.720.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			441.756.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.833.215.215,00	2.289.693.215,00	372.806.700,00	3.660.373.635,00							5.493.588.850,00		
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.553.395.215,00	2.009.873.215,00	306.206.700,00	-1.247.188.515,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		2.809.588.850,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				-	2 Orang	0,00	0,00	41.037.000,00	41.037.000,00	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margorejo	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			43.088.850,00	DINAS KESEHATAN	
J U M L A H									292.445.927.099,40	251.605.123.023,04	260.016.502.564,73	479.167.077.423,58							394.652.462.783,20		



03

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK								494.027.732.829,38	524.870.220.829,38	560.626.191.269,77	66.598.458.440,39							501.920.000.000,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							494.027.732.829,38	524.870.220.829,38	560.626.191.269,77	66.598.458.440,39							501.920.000.000,00				
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							494.027.732.829,38	524.870.220.829,38	560.626.191.269,77	66.598.458.440,39							501.920.000.000,00				
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pembayaran belanja modal yang dibeli Persentase pembayaran belanja barang dan jasa yang dibeli				10 80 %	10 80 %	473.868.220.829,78	509.595.240.829,78	558.126.191.269,77	5.651.779.170,22							479.520.000.000,00				
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pelayanan rumah sakit				19 %	19 %	87.341.088.829,78	89.578.108.829,78	89.578.108.829,78	2.237.020.000,00							88.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK			
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								87.341.088.829,78	89.578.108.829,78	89.578.108.829,78	2.237.020.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			88.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK		
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				3 %	3 %	7.027.132.000,00	10.017.132.000,00	3.079.700.000,00	-3.947.432.000,00							11.520.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK			
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								7.027.132.000,00	10.017.132.000,00	3.079.700.000,00	-3.947.432.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			11.520.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK		
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD				79 %	79 %	379.500.000.000,00	410.000.000.000,00	465.468.382.439,99	85.968.382.439,99							380.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK			
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								379.500.000.000,00	410.000.000.000,00	465.468.382.439,99	85.968.382.439,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			380.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK		
	2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan sesuai standar Persentase alat kesehatan rumah sakit yang diadakan Persentase fasilitas gedung pelayanan rumah sakit			11 27 62 %	11 27 62 %	19.652.911.999,60	14.768.379.999,60	2.500.000.000,00	2.147.088.000,40							21.800.000.000,00				
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas pelayanan rumah sakit Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya fasilitas pelayanan rumah sakit sesuai kebutuhan				89 %	89 %	18.352.911.999,60	13.468.379.999,60	2.500.000.000,00	-15.852.911.999,60			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			20.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK			
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan								110 Unit	110 Unit	9.384.512.000,00	0,00	0,00	-9.384.512.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			10.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.02.1.01.0026	Pembangunan Rumah Sakit								1 Unit	1 Unit	8.968.399.999,60	13.468.379.999,60	2.500.000.000,00	-6.468.399.999,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			10.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar dan mutu pelayanan rumah sakit				11 %	11 %	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	-1.300.000.000,00							1.800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK			
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan								1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	-1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang sesuai standar kompetensi				40 %	40 %	506.600.000,00	506.600.000,00	0,00	93.400.000,00							600.000.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya SDM sesuai kopetensi yang dibutuhkan				40 %	40 %	506.600.000,00	506.600.000,00	0,00	-506.600.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				7 Orang	7 Orang	506.600.000,00	506.600.000,00	0,00	-506.600.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK
J U M L A H									494.027.732.829,38	524.870.220.829,38	560.626.191.269,77	479.167.077.423,58							501.920.000.000,00	



04

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT JIWA							51.719.174.834,58	62.467.447.834,58	64.003.714.947,17	12.284.540.112,59							29.065.410.002.812,09	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							51.719.174.834,58	62.467.447.834,58	64.003.714.947,17	12.284.540.112,59							29.065.410.002.812,09	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							51.719.174.834,58	62.467.447.834,58	64.003.714.947,17	12.284.540.112,59							29.065.410.002.812,09	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan				100 %	100 %	48.611.272.209,58	51.401.340.427,58	51.554.425.077,58	29.013.380.037.715,01							29.061.991.309.924,59	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100	100	245.122.600,00	245.122.600,00	262.879.690,00	17.757.090,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Pegawai		269.634.860,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	216.225.600,00	216.225.600,00	233.982.690,00	17.757.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		237.848.160,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	28.897.000,00	28.897.000,00	28.897.000,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		31.786.700,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						26.431.353.006,31	29.837.661.706,31	29.890.536.116,31	3.459.183.110,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		29.037.593.398.801,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan	26.397.778.606,31	29.804.087.306,31	29.856.961.706,31	3.459.183.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		29.037.556.466.941,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	33.574.400,00	33.574.400,00	33.574.410,00	10,00	Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		36.931.860,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						822.279.170,27	683.638.688,27	1.532.638.188,27	710.359.018,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		904.507.087,29	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	121.289.500,00	121.289.500,00	121.289.500,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		133.418.450,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	575.999.800,00	437.359.318,00	1.287.359.318,00	711.359.518,00	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		633.599.780,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	32.833.000,00	32.833.000,00	32.833.000,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		36.116.300,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	92.156.870,27	92.156.870,27	91.156.370,27	-1.000.500,00	Kab. Pesawaran, Gedong Tataan, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		101.372.557,29	RUMAH SAKIT JIWA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100	100	2.854.774.433,00	2.377.174.433,00	1.610.628.083,00	-1.244.146.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Pegawai		3.140.251.876,30	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	700.099.833,00	700.099.833,00	700.099.833,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			770.109.816,30	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	13 Laporan	2.154.674.600,00	1.677.074.600,00	910.528.250,00	-1.244.146.350,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.370.142.060,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100	100	257.743.000,00	257.743.000,00	257.743.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Pegawai		283.517.300,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	38.856.000,00	38.856.000,00	38.856.000,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			42.741.600,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	7 Unit	218.887.000,00	218.887.000,00	218.887.000,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			240.775.700,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				100	100	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Pegawai		19.800.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			19.800.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan jenis layanan kesehatan jiwa dan non jiwa perorangan dan masyarakat				100 %	100 %	2.549.802.225,00	10.619.261.707,00	11.762.444.169,59	254.980.222,50							2.804.782.447,50	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	2.167.266.125,00	10.236.725.607,00	11.379.908.069,59	9.212.641.944,59			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Masyarakat		2.383.992.737,50	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	5.082.139.828,00	5.082.139.828,00	4.582.139.828,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		550.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	1.572.648.350,00	5.059.968.004,00	5.874.210.466,59	4.301.562.116,59	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		1.729.913.185,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	39.965.400,00	39.965.400,00	363.820.400,00	323.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		43.961.940,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	54.652.375,00	54.652.375,00	59.737.375,00	5.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		60.117.612,50	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	382.536.100,00	382.536.100,00	382.536.100,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat	420.789.710,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	145.157.400,00	145.157.400,00	145.157.400,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan		159.673.140,00	RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				15 Dokumen	15 Dokumen	171.536.600,00	171.536.600,00	171.536.600,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			188.690.260,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis				2 Orang	2 Orang	30.103.600,00	30.103.600,00	30.103.600,00	0,00	Kab. Pesawaran, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			33.113.960,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.738.500,00	35.738.500,00	35.738.500,00	0,00	Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			39.312.350,00	RUMAH SAKIT JIWA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM RSJ				100 %	100 %	558.100.400,00	446.845.700,00	686.845.700,00	55.810.040,00							613.910.440,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-						558.100.400,00	446.845.700,00	686.845.700,00	128.745.300,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Pegawai		613.910.440,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	50 Orang	558.100.400,00	446.845.700,00	686.845.700,00	128.745.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Kurungan Nyawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			613.910.440,00	RUMAH SAKIT JIWA
J U M L A H									51.719.174.834,58	62.467.447.834,58	64.003.714.947,17	479.167.077.423,58							29.065.410.002.812,09	



05 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							507.389.838.466,64	773.361.625.814,64	1.053.808.369.085,89	546.418.530.619,25							834.107.559.600,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							507.389.838.466,64	773.361.625.814,64	1.053.808.369.085,89	546.418.530.619,25							834.107.559.600,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	60.531.440.466,05	61.461.038.414,05	52.890.118.459,89	-1.420.838.366,05							59.110.602.100,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	12 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	740.500.000,00	713.614.000,00	401.197.345,84	-339.302.654,16			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		544.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	455.000.000,00	424.626.000,00	253.786.745,84	-201.213.254,16	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			410.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	1.550.000,00	-6.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			9.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	2.050.000,00	-7.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			11.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	4.625.000,00	-15.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			21.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	4.625.000,00	-15.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			21.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	57.060.000,00	15.671.600,00	-54.328.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			72.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	157.500.000,00	173.928.000,00	118.889.000,00	-38.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 18 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 251 Orang/ Bulan	12 Dokumen 18 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 251 Orang/ Bulan	30.598.504.566,05	42.707.681.514,05	42.591.103.514,05	11.992.598.948,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		30.818.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				251 Orang/ Bulan	251 Orang/ Bulan	30.419.712.566,05	42.532.729.514,05	42.532.729.514,05	12.113.016.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			30.600.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.379.000,00	14.379.000,00	2.651.500,00	-11.727.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			26.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.459.000,00	12.459.000,00	2.171.500,00	-10.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			15.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	134.195.000,00	130.355.000,00	50.054.500,00	-84.140.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	17.759.000,00	17.759.000,00	3.496.500,00	-14.262.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			26.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	410.300.000,00	402.115.000,00	110.670.100,00	-299.629.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		400.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	306.161.000,00	301.691.000,00	75.684.100,00	-230.476.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.189.000,00	48.424.000,00	17.369.000,00	-32.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	53.950.000,00	52.000.000,00	17.617.000,00	-36.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Orang 1 Dokumen 2 Paket 400 Orang 4 Unit 500 Orang	10 Orang 1 Dokumen 2 Paket 400 Orang 4 Unit 500 Orang	1.180.649.100,00	1.059.172.100,00	264.578.900,00	-916.070.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.626.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.168.000,00	78.446.000,00	27.510.000,00	-52.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			62.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	27.897.000,00	26.472.000,00	9.338.000,00	-18.559.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			52.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	1.400.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			62.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					10 Orang	10 Orang	94.507.400,00	93.062.400,00	35.843.400,00	-58.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			210.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					400 Orang	200 Orang	348.511.700,00	240.681.700,00	46.075.500,00	-302.436.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			420.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					500 Orang	480 Orang	622.165.000,00	613.110.000,00	144.412.000,00	-477.753.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			820.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket 1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 2 Paket 4 Paket	12 Paket 1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 2 Paket 4 Paket	2.101.187.300,00	2.184.094.300,00	921.034.100,00	-1.180.153.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.060.017.300,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.013.000,00	55.013.000,00	27.506.500,00	-27.506.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			61.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	77.438.800,00	77.438.800,00	7.741.800,00	-69.697.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			125.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	29.384.000,00	29.384.000,00	14.692.000,00	-14.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			31.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14 Paket	669.811.500,00	789.331.500,00	340.626.800,00	-329.184.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			567.367.300,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	77.878.000,00	77.878.000,00	19.469.500,00	-58.408.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			65.650.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.382.000,00	100.382.000,00	50.191.000,00	-50.191.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			210.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4 Laporan	119.168.000,00	111.720.000,00	27.020.000,00	-92.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	816.226.000,00	787.181.000,00	298.794.000,00	-517.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			700.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	155.886.000,00	155.766.000,00	134.992.500,00	-20.893.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				125 Unit 1 Unit 2 Paket 2 Unit 3 Unit	125 Unit 1 Unit 2 Paket 2 Unit 3 Unit	5.951.444.000,00	4.783.230.000,00	604.725.000,00	-5.346.719.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			8.132.975.800,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	1.574.314.000,00	321.100.000,00	0,00	-1.574.314.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.07.0003		Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	0,00	-2.640.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			4.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	359.158.000,00	359.158.000,00	0,00	-359.158.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				125 Unit	106 Unit	863.622.000,00	948.622.000,00	90.375.000,00	-773.247.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			832.975.800,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	514.350.000,00	514.350.000,00	514.350.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	16.475.140.000,00	6.507.520.000,00	6.516.305.000,00	-9.958.835.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		12.418.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	3.150.000,00	-4.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			8.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	966.600.000,00	966.600.000,00	966.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			910.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.501.040.000,00	5.533.420.000,00	5.546.555.000,00	-9.954.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			11.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi				12 Unit 1 Unit 200 Unit 36 Unit 4 Unit	12 Unit 1 Unit 200 Unit 36 Unit 4 Unit	3.073.715.500,00	3.103.611.500,00	1.480.504.500,00	-1.593.211.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		3.111.609.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	37 Unit	1.227.186.000,00	1.139.656.000,00	351.141.000,00	-876.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.108.405.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				12 Unit	40 Unit	528.618.000,00	528.618.000,00	131.433.000,00	-397.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			600.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	328 Unit	641.465.000,00	772.045.000,00	337.113.000,00	-304.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			577.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3 Unit	676.446.500,00	663.292.500,00	660.817.500,00	-15.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			825.704.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi				77,067 %	77,067 %	441.322.801.000,59	707.382.560.400,59	998.972.851.936,00	328.747.838.999,41							770.070.640.000,00	
1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Jumlah Jembatan yang Dibangun Jumlah Jembatan yang Diganti Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi Panjang Jalan / Jembatan yang Disurvey Kondisinya Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi Panjang Jalan yang Dibangun Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Panjang Jalan yang Direhabilitasi Panjang Jalan yang Direkonstruksi Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi				0,3 Km 10 Jembatan 110 Km 11 Km 15 Jembatan 1.695,479 Km 180 Jembatan 1 DOKUMEN 1 Jembatan 26 DOKUMEN 3 Km 41 Km 4 DOKUMEN 5 Jembatan 80 %	0,3 Km 10 Jembatan 110 Km 11 Km 15 Jembatan 1.695,479 Km 180 Jembatan 1 DOKUMEN 1 Jembatan 26 DOKUMEN 3 Km 41 Km 4 DOKUMEN 5 Jembatan 80 %	441.322.801.000,59	707.382.560.400,59	998.972.851.936,00	557.650.050.935,41			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		770.070.640.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0024		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				1.695,479 KM	1.695,479 KM	2.164.818.000,00	3.829.937.800,00	3.680.480.200,00	1.515.662.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.180.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0025		Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				7 Jembatan	7 Jembatan	6.509.392.000,00	8.131.596.920,00	13.146.351.320,00	6.636.959.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			5.492.500.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.10.1.01.0026		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				180 Jembatan	180 Jembatan	3.990.386.000,00	3.885.840.000,00	3.247.740.000,00	-742.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.957.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0028		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				1.695,479 KM	1.695,479 KM	1.275.432.000,00	1.258.448.000,00	554.664.000,00	-720.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.600.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0030		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				16 KM	8,73 KM	110.644.406.000,00	61.346.306.827,00	132.185.936.027,00	21.541.530.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			309.676.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0031		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				8,5 KM	32,6 KM	161.819.005.000,00	448.411.327.546,59	630.136.340.287,00	468.317.335.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWAN)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			200.840.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0032		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	4 Jembatan	24.902.413.000,00	27.890.352.000,00	26.071.420.000,00	1.169.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			11.439.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0033		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				181,83 KM	181,82 KM	44.962.586.080,00	44.931.548.680,00	43.845.376.680,00	-1.117.209.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			44.834.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0036		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti				5 Jembatan	10 Jembatan	33.964.302.000,00	22.800.923.985,00	30.475.232.885,00	-3.489.069.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			36.395.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.10.1.01.0038		Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2,9 KM	2,1 KM	10.637.124.000,00	7.734.480.430,00	13.237.014.030,00	2.599.890.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			11.007.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				-	1 KM	0,00	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			101.069.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				26 Dokumen	69 Dokumen	11.907.761.920,59	23.407.257.339,00	21.060.234.934,00	9.152.473.013,41	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			13.069.140.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	25.217.414.000,00	47.330.865.378,00	50.114.998.078,00	24.897.584.078,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			23.562.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1695,479 KM	1695,479 KM	3.048.034.000,00	5.808.139.035,00	5.615.467.035,00	2.567.433.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.300.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	279.727.000,00	615.536.460,00	601.596.460,00	321.869.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.650.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
3.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Target Orang yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi				50 %	50 %	5.535.597.000,00	4.518.027.000,00	1.945.398.690,00	-609.279.500,00							4.926.317.500,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Ahli yang Disediakan Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Difasilitasi Sertifikasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Persentase SDM yang Mendapatkan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi				1 Dokumen 400 orang 400 Orang 400 tkk 50 % 5 Lembaga	1 Dokumen 400 orang 400 Orang 400 tkk 50 % 5 Lembaga	3.632.791.400,00	2.866.077.400,00	957.921.500,00	-2.674.869.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.568.582.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				400 Orang	400 Orang	1.816.858.800,00	1.231.782.800,00	309.069.200,00	-1.507.789.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.002.490.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11.1.01.0012		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	280.407.600,00	230.825.600,00	68.923.400,00	-211.484.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			399.369.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11.1.01.0013		Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	441.266.000,00	416.370.000,00	365.329.000,00	-75.937.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			326.722.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11.1.01.0014		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				400 Orang	400 Orang	838.919.000,00	732.399.000,00	151.854.900,00	-687.064.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			600.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11.1.01.0016		Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya				5 Lembaga	4 Lembaga	255.340.000,00	254.700.000,00	62.745.000,00	-192.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			240.000.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Dokumen 60 orang 60 Pengelola	1 Dokumen 60 orang 60 Pengelola	368.523.900,00	287.365.900,00	67.217.300,00	-301.306.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			392.067.000,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11.1.02.0008		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	53.830.000,00	53.510.000,00	19.370.000,00	-34.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			159.736.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
1.03.11.1.02.0009		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Orang	110 Orang	314.693.900,00	233.855.900,00	47.847.300,00	-266.846.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			232.330.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jalan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten / Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten / Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten / Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Dokumen 20 Badan Usaha 20 Bangunan 20 Bangunan Konstruksi 20 Paket 20 Paket Pekerjaan 5 Lembaga	1 Dokumen 20 Badan Usaha 20 Bangunan 20 Bangunan Konstruksi 20 Paket 20 Paket Pekerjaan 5 Lembaga	1.534.281.700,00	1.364.583.700,00	920.259.890,00	-614.021.810,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			965.668.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					20 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	58.959.100,00	57.947.100,00	17.425.500,00	-41.533.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			159.736.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				20 Bangunan Konstruksi	20 Bangunan Konstruksi	128.439.100,00	127.619.100,00	45.875.500,00	-82.563.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			159.736.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				5 Lembaga	15 Lembaga	359.398.900,00	270.296.900,00	67.074.890,00	-292.324.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			159.736.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	100.531.100,00	98.061.100,00	20.363.500,00	-80.167.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			159.736.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	886.953.500,00	810.659.500,00	769.520.500,00	-117.433.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			326.722.500,00	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
			J U M L A H						507.389.838.466,64	773.361.625.814,64	1.053.808.369.085,89	479.167.077.423,58							834.107.559.600,00	



06 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							101.854.793.265,00	180.423.467.265,00	201.968.864.561,55	100.114.071.296,55							240.056.131.675,67			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							101.854.793.265,00	180.423.467.265,00	201.968.864.561,55	100.114.071.296,55							240.056.131.675,67			
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	55.232.102.855,00	58.445.066.095,00	55.507.747.925,00	391.895.220,42							55.623.998.075,42			
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.484.400,00	63.484.400,00	10.624.700,00	-52.859.700,00			-	-	-		65.403.215,99	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	16.884.400,00	16.884.400,00	3.024.700,00	-13.859.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.394.730,99	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																				
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	11.900.000,00	11.900.000,00	1.925.000,00	-9.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.259.677,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	13.100.000,00	13.100.000,00	2.075.000,00	-11.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.495.947,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	1.800.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.126.430,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	1.800.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.126.430,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	35.681.378.155,00	48.220.178.155,00	48.204.353.155,00	12.522.975.000,00			-	-	-		35.486.352.185,92	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	35.666.578.155,00	48.205.378.155,00	48.201.928.155,00	12.535.350.000,00	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.471.104.855,92	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	575.000,00	-2.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.605.787,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																				
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	18 Laporan	11.300.000,00	11.300.000,00	1.850.000,00	-9.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.641.542,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	89.349.000,00	89.349.000,00	15.328.110,00	-74.020.890,00			-	-	-		132.177.867,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	77.649.000,00	77.649.000,00	13.303.110,00	-64.345.890,00	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.124.235,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.850.000,00	5.850.000,00	1.012.500,00	-4.837.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.026.816,25	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.850.000,00	5.850.000,00	1.012.500,00	-4.837.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.026.816,25	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	54.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00			-	-			55.632.150,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	1 Orang	0,00	54.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.632.150,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.107.950.800,00	1.865.121.940,00	457.527.540,00	-650.423.260,00			-	-			4.056.277.591,52	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	0,00	775.984.140,00	58.482.000,00	58.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			1.809.614.422,78	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.600.803,57	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.436.800,00	14.436.800,00	3.609.200,00	-10.827.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.884.751,60	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.453.375,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.093.514.000,00	1.074.701.000,00	395.436.340,00	-698.077.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-			2.167.724.238,57	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			434.112.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			434.112.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.695.553.500,00	6.855.045.600,00	6.047.100.470,00	-11.648.453.030,00			-	-			13.807.263.156,99	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	504.000.000,00	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			854.415.043,30	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	17.191.553.500,00	6.351.045.600,00	5.543.100.470,00	-11.648.453.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			12.952.848.113,69	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	594.387.000,00	1.297.887.000,00	767.413.950,00	173.026.950,00			-	-			1.586.779.907,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				65 Unit	65 Unit	563.537.000,00	563.537.000,00	560.988.440,00	-2.548.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			574.463.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	30.850.000,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.299.620,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	1 Unit	0,00	703.500.000,00	175.575.510,00	175.575.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			972.017.287,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan provinsi				94 %	94 %	46.622.690.410,00	121.978.401.170,00	146.461.116.636,55	137.809.443.190,25							184.432.133.600,25	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikelola dan Dikembangkan</i>				91.24 %	91.24 %	10.987.311.700,00	66.196.335.571,25	77.204.164.922,19	66.216.853.222,19			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			75.566.644.920,75	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>				0,041 KM	2,91 KM	4.756.083.000,00	39.429.763.743,17	48.095.797.792,17	43.339.714.792,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			37.849.354.887,22	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi</i>				2 Lembaga	2 Lembaga	28.998.000,00	103.000.000,00	44.347.100,00	15.349.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			52.567.230,62	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			117.211.891,94	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	98.085.400,00	94.262.200,00	71.962.890,00	-26.122.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			534.085.123,60	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	49.910.000,00	152.910.000,00	10.998.950,00	-38.911.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			147.662.149,25	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.36 KM	0.36 KM	1.754.216.400,00	6.809.729.728,44	6.454.583.680,38	4.700.367.280,38	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			13.236.345.223,15	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.1.01.0101		Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.4 KM	0.15 KM	303.323.000,00	150.000.000,00	141.270.750,00	-162.052.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			570.868.277,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.1.01.0103		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	193.814.400,00	193.814.400,00	159.327.690,00	-34.486.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			226.391.325,61	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.1.01.0116		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				0 Titik	0 Titik	0,00	545.795.509,23	2.308.900.052,00	2.308.900.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.700.267.683,36	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.1.01.0117		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			0,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.1.01.0119		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				3 Dokumen	0 Dokumen	88.922.600,00	488.922.600,00	79.386.260,00	-9.536.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.842.992.785,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.1.01.0120		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0 Unit	12 Unit	211.686.000,00	12.607.074.490,41	16.722.760.047,64	16.511.074.047,64	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			11.464.592.084,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02.1.01.0121		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	1.462.120.800,00	1.880.910.800,00	1.085.200.500,00	-376.920.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.774.001.813,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				10 Dokumen	8 Dokumen	2.040.152.100,00	3.740.152.100,00	2.029.629.210,00	-10.522.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.050.304.447,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				92.82 % 94 %	92.82 % 94 %	35.635.378.710,00	55.782.065.598,75	69.256.951.714,36	33.621.573.004,36			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			108.865.488.679,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				0 Bendung	5 Bendung	0,00	5.563.722.202,90	12.224.731.641,00	12.224.731.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			14.372.138.035,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				11,9 KM	13,64 KM	23.815.892.740,00	32.151.216.825,85	39.501.367.483,36	15.685.474.743,36	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			48.569.436.406,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				8,95 KM	8,95 KM	7.923.276.170,00	12.114.947.370,00	11.932.468.480,00	4.009.192.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			16.782.498.664,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				17 Bendung	17 Bendung	1.838.348.200,00	2.800.000.000,00	2.681.938.540,00	843.590.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			16.782.498.664,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				11 Dokumen	11 Dokumen	1.893.537.900,00	2.988.754.900,00	2.778.521.270,00	884.983.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			12.048.221.655,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi																		
			Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya				18 DI	18 DI	164.323.700,00	163.424.300,00	137.924.300,00	-26.399.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			310.695.255,50	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
J U M L A H									101.854.793.265,00	180.423.467.265,00	201.968.864.561,55	479.167.077.423,58							240.056.131.675,67	



07

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																	50.289.378.618,83	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							49.738.514.618,83	180.678.752.874,83	345.909.511.725,89	296.170.997.107,06							49.729.378.618,83	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							22.844.297.540,00	66.441.074.312,02	117.371.641.763,29	94.527.344.223,29							22.844.297.540,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	20.298.514.618,83	21.178.752.874,83	18.101.161.805,62	-9.136.000,00							20.289.378.618,83	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 4 Dokumen 6 Dokumen	100 % 4 Dokumen 6 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatkan Kesesuaian Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum Jumlah dokumen rencama, strategi dan teknik SPAM yang tersusun Persentase ketersediaan kajian pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum lintas kabupaten/ kota Jumlah kepala keluarga yang terlayani SPAM jaringan perpipaan				100 1 2.800.000, 000 5000 % Dokumen Rupiah KK	100 1 2.800.000, 000 5000 % Dokumen Rupiah KK	2.152.805.200,00	2.728.127.371,00	2.492.295.642,00	0,00							2.152.805.200,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perjanjian kerjasama Jumlah dokumen rencama, strategi dan teknik SPAM yang tersusun Jumlah kepala keluarga yang terlayani SPAM jaringan perpipaan Persentase ketersediaan kajian pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum lintas kabupaten/ kota				0 Dokumen 100 & 1 Dokumen 5000 KK 5000 Orang	0 Dokumen 100 & 1 Dokumen 5000 KK 5000 Orang	2.152.805.200,00	2.728.127.371,00	2.492.295.642,00	339.490.442,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		2.152.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2.152.805.200,00	2.728.127.371,00	2.492.295.642,00	339.490.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.152.805.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
3.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatkan Kesesuaian Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Persampahan Regional				100 %	100 %	1.749.136.940,00	2.006.649.882,00	1.377.750.864,00	0,00							1.749.136.940,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/ SPA Kewenangan Provinsi Persentase pengelolaan persampahan regional				100 % 2 Dokumen	100 % 2 Dokumen	1.749.136.940,00	2.006.649.882,00	1.377.750.864,00	-371.386.076,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.749.136.940,00	2.006.649.882,00	1.377.750.864,00	-371.386.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.749.136.940,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	2.452.355.400,00	2.406.297.059,02	1.720.109.968,04	0,00							2.452.355.400,00		
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-				-	-	2.452.355.400,00	2.406.297.059,02	1.720.109.968,04	-732.245.431,96			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.452.355.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.452.355.400,00	2.406.297.059,02	1.720.109.968,04	-732.245.431,96	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.452.355.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Yang Sesuai Standar Dan Berkelanjutan				100 %	100 %	14.739.520.400,00	52.508.545.300,00	80.121.804.211,00	0,00							14.739.520.400,00		
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi, direnovasi, dan terbahsui untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah gedung yang terencana, terbangun, dan diawasi untuk kepentingan strategis daerah provinsi "Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya" Persentase kesesuaian bangunan gedung sesuai dengan peraturan yang ada Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan				100 % 15 Lokasi 15 Unit 20 Lokasi 20 Unit 2 kab/kota	100 % 15 Lokasi 15 Unit 20 Lokasi 20 Unit 2 kab/kota	14.739.520.400,00	52.508.545.300,00	80.121.804.211,00	65.382.283.811,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			14.739.520.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.08.1.01.0016	Pembaharuan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan				15 Bangunan Gedung	15 Bangunan Gedung	833.788.110,00	17.775.871.960,00	43.659.616.232,00	42.825.828.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			833.788.110,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				20 Dokumen	20 Dokumen	13.905.732.290,00	34.732.673.340,00	36.462.187.979,00	22.556.455.689,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			13.905.732.290,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
6.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatkan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya				100 %	100 %	260.479.600,00	2.541.454.700,00	24.672.564.469,00	0,00							260.479.600,00		
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan dalam suatu kawasan yang tertangani Jumlah dokumen perencanaan Jumlah kegiatan pengawasan Persentase bangunan dan lingkungan yang terbangun Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan				100 % 1 Dokumen 1 Lokasi 2 Lokasi 2 Unit	100 % 1 Dokumen 1 Lokasi 2 Lokasi 2 Unit	260.479.600,00	2.541.454.700,00	24.672.564.469,00	24.412.084.869,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			260.479.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	29.440.400,00	2.124.495.300,00	22.478.943.027,00	22.449.502.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			29.440.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	113.709.200,00	208.750.000,00	1.294.966.874,00	1.181.257.674,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			113.709.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Mendapatkan Supervisi dalam Penataan				1 Dokumen	1 Dokumen	117.330.000,00	208.209.400,00	898.654.568,00	781.324.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			117.330.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
7.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	1.440.000.000,00	4.200.000.000,00	6.937.116.609,25	0,00							1.440.000.000,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-				-	-	260.000.000,00	940.000.000,00	2.086.123.600,00	1.826.123.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				15 Dokumen	15 Dokumen	260.000.000,00	940.000.000,00	2.086.123.600,00	1.826.123.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-				-	-	400.000.000,00	1.070.000.000,00	1.296.694.050,00	896.694.050,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	400.000.000,00	1.070.000.000,00	1.296.694.050,00	896.694.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-				-	-	430.000.000,00	740.000.000,00	1.074.425.400,00	644.425.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				15 Dokumen	15 Dokumen	430.000.000,00	740.000.000,00	1.074.425.400,00	644.425.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-				-	-	350.000.000,00	1.450.000.000,00	2.479.873.559,25	2.129.873.559,25			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				15 Dokumen	15 Dokumen	350.000.000,00	1.450.000.000,00	2.479.873.559,25	2.129.873.559,25	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							26.894.217.078,83	114.237.678.562,81	228.537.869.962,60	201.643.652.883,77							26.885.081.078,83	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	20.298.514.618,83	21.178.752.874,83	18.101.161.805,62	-9.136.000,00							20.289.378.618,83	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 4 Dokumen 6 Dokumen	100 % 4 Dokumen 6 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tertasarnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				100 % 14 Rupiah 18 Dokumen 5 Dokumen	100 % 14 Rupiah 18 Dokumen 5 Dokumen	8.430.377.339,88	13.135.015.595,88	12.362.425.505,62	3.932.048.165,74			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		8.430.377.339,88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	8.348.579.339,88	13.053.217.595,88	12.343.347.805,62	3.994.768.465,74	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			8.348.579.339,88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	45.360.000,00	45.360.000,00	9.069.200,00	-36.290.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			45.360.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	36.438.000,00	36.438.000,00	10.008.500,00	-26.429.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			36.438.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah pada skpd jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada skpd Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana				100 % 2 Dokumen	100 % 2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	19.969.700,00	-30.030.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.532.400,00	-14.467.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	9.437.300,00	-15.562.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan pelatihan dan pendidikan Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				100 % 40 Orang	100 % 40 Orang	178.074.000,00	178.074.000,00	84.758.000,00	-93.316.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		178.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	178.074.000,00	178.074.000,00	84.758.000,00	-93.316.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			178.074.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Ketersediaan Bahan / Material Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bulan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah bulan tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang tersedia Jumlah bulan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Persentase layanan Administrasi Umum yang terlaksana				100 % 12 Dokumen 12 Unit 15 Unit	100 % 12 Dokumen 12 Unit 15 Unit	3.393.255.678,95	3.245.711.678,95	1.317.179.000,00	-2.076.076.678,95			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		3.393.255.678,95	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	24.924.400,00	-25.075.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.077.554.751,30	709.354.751,30	256.432.000,00	-821.122.751,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.077.554.751,30	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	78.000.000,00	19.517.000,00	-30.483.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.03.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	75.000.000,00	18.520.000,00	-31.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.03.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.193.000,00	48.849.000,00	16.315.600,00	-14.877.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			31.193.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.134.507.927,65	2.284.507.927,65	981.470.000,00	-1.153.037.927,65	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			2.134.507.927,65	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	74.000.000,00	64.864.000,00	0,00	-74.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			64.864.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.03.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	74.000.000,00	64.864.000,00	0,00	-74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			64.864.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 12 paket	100 % 12 paket	7.294.385.600,00	3.746.453.600,00	3.678.923.600,00	-3.615.462.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			7.294.385.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	6.544.385.600,00	2.996.453.600,00	2.928.923.600,00	-3.615.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			6.544.385.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan gedung dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah bulan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara dan terohong Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pemeliharaan				100 % 12 Bulan 1 paket 3 paket	100 % 12 Bulan 1 paket 3 paket	728.422.000,00	608.634.000,00	487.906.000,00	-240.516.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		728.422.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12 Unit	12 Unit	400.000.000,00	261.620.000,00	245.852.000,00	-154.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	124.550.000,00	19.590.000,00	-80.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	228.422.000,00	222.464.000,00	222.464.000,00	-5.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		228.422.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah terbangun Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Persentase dokumen pendataan yang disusun untuk korban bencana atau relokasi program provinsi				100 1 3 3 6 % Dokumen Dokumen Laporan	100 1 3 3 6 % Dokumen Dokumen Laporan	300.000.000,00	276.640.000,00	120.569.500,00	0,00							300.000.000,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi Persentase dokumen pendataan yang disusun untuk korban bencana atau relokasi program provinsi				1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	300.000.000,00	276.640.000,00	120.569.500,00	-179.430.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	276.640.000,00	120.569.500,00	-179.430.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Kawasan Kumuh Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina				100 % 1 Unit 20 % Kab/Kota	100 % 1 Unit 20 % Kab/Kota	2.700.000.000,00	10.223.360.000,00	13.360.875.883,00	0,00							2.700.000.000,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan/Permukiman Kumuh dan Terhadap Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani presentase penanganan kawasan kumuh				100 % 15 kab/kota 15 Lokasi 1 Lokasi 200 Orang 200 Unit 20 kab/kota	100 % 15 kab/kota 15 Lokasi 1 Lokasi 200 Orang 200 Unit 20 kab/kota	1.800.000.000,00	8.819.231.900,00	11.351.140.601,00	9.551.140.601,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina				20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00	7.026.948.000,00	8.626.285.970,00	7.426.285.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	1.792.283.900,00	2.724.854.631,00	2.124.854.631,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.04.03.1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				100 % 11 Lokasi 15 kab/kota 15 Lokasi 20 Kegiatan 2 Lokasi	100 % 11 Lokasi 15 kab/kota 15 Lokasi 20 Kegiatan 2 Lokasi	900.000.000,00	1.404.128.100,00	2.009.735.282,00	1.109.735.282,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.04.03.1.02.0003		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				200 Unit Rumah	200 Unit Rumah	900.000.000,00	1.404.128.100,00	2.009.735.282,00	1.109.735.282,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatkan Jumlah Pembangunan Psu Pada Kawasan Permukiman				100 %	100 %	3.645.702.460,00	82.608.925.687,98	197.005.262.773,98	0,00							3.645.702.460,00	
1.04.05.1.01		Usuran Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah bantuan PSU yang terbangun Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Permukiman Persentase ketersediaan PSU pada Kawasan Permukiman				100 % 10 dokumen 10 Dokumen 40 Unit 50 %	100 % 10 dokumen 10 Dokumen 40 Unit 50 %	3.645.702.460,00	82.608.925.687,98	197.005.262.773,98	193.359.560.313,98			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		3.645.702.460,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.04.05.1.01.0001		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				10 Dokumen	10 Dokumen	526.071.400,00	9.911.088.890,00	15.943.252.580,00	15.417.181.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			526.071.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1.04.05.1.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				40 Lokasi	40 Lokasi	3.119.631.060,00	72.697.636.797,98	181.062.010.193,98	177.942.379.133,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			3.119.631.060,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							560.000.000,00	1.300.000.000,00	2.651.683.586,63	2.091.683.586,63							560.000.000,00	
2.10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							560.000.000,00	1.300.000.000,00	2.651.683.586,63	2.091.683.586,63							560.000.000,00	
1.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-				-	-	260.000.000,00	600.000.000,00	832.546.500,00	0,00							260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	260.000.000,00	600.000.000,00	832.546.500,00	572.546.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur	-		260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				15 Dokumen	15 Dokumen	260.000.000,00	600.000.000,00	832.546.500,00	572.546.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-				-	-	300.000.000,00	700.000.000,00	1.819.137.086,63	0,00							300.000.000,00	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	300.000.000,00	700.000.000,00	1.819.137.086,63	1.519.137.086,63			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi</i>				15 Laporan	15 Laporan	300.000.000,00	700.000.000,00	1.819.137.086,63	1.519.137.086,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
J U M L A H									50.298.514.618,83	181.978.752.874,83	348.561.195.312,52	479.167.077.423,58							50.289.378.618,83	



08 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										58.552.953.583,90	61.167.316.685,90	54.984.391.305,63	-3.568.562.278,27						59.690.168.800,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							58.552.953.583,90	61.167.316.685,90	54.984.391.305,63	-3.568.562.278,27							59.690.168.800,00		
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							58.552.953.583,90	61.167.316.685,90	54.984.391.305,63	-3.568.562.278,27							59.690.168.800,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Pemda Sesuai Peraturan				100 %	100 %	53.416.895.583,90	56.154.323.185,90	53.269.215.640,63	-173.776.783,90							53.243.118.800,00		
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Tepat Waktu				100 persen	100 persen	409.933.400,00	459.933.400,00	92.860.705,00	-317.072.695,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			783.096.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	47.550.200,00	47.550.200,00	9.227.600,00	-38.322.600,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			52.354.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.383.200,00	37.383.200,00	6.990.705,00	-30.392.495,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	63.189.900,00	-136.810.100,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			540.742.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	-	125.000.000,00	175.000.000,00	13.452.500,00	-111.547.500,00	-	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	22.811.731.574,90	43.451.559.176,63	43.451.559.176,63	20.639.827.601,73			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			20.601.541.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/ Bulan	13 Orang/ Bulan	22.811.731.574,90	43.451.559.176,63	43.451.559.176,63	20.639.827.601,73	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			20.601.541.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	9.300.330,00	-40.699.670,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	4.275.180,00	-20.724.820,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	5.025.150,00	-19.974.850,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	843.503.199,00	993.503.199,27	135.139.570,00	-708.363.629,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		1.742.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	122.040.000,00	122.040.000,00	18.324.500,00	-103.715.500,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.05.0007		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				7 Laporan	7 Laporan	30.515.000,00	30.515.000,00	5.464.940,00	-25.050.060,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			30.515.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				120 Orang	100 Orang	340.948.199,00	490.948.199,27	67.219.530,00	-273.728.669,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	44.130.600,00	-105.869.400,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			582.155.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.474.761.280,00	1.474.761.280,00	370.076.471,00	-1.104.684.809,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		2.247.470.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.991.000,00	13.991.000,00	6.914.500,00	-7.076.500,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	137.831.850,00	137.831.850,00	1.633.213,00	-136.198.637,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			477.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	3.928.000,00	-12.072.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	13.070.000,00	-36.930.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	7.462.500,00	-52.537.500,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	1.196.938.430,00	1.196.938.430,00	337.068.258,00	-859.870.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.578.470.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.011.624.780,00	8.859.224.780,00	8.679.830.550,00	-18.331.794.230,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			26.615.738.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	213.624.780,00	213.624.780,00	202.696.000,00	-10.928.780,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	26.798.000.000,00	8.645.600.000,00	8.477.134.550,00	-18.320.865.450,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			26.415.738.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	815.341.350,00	865.341.350,00	530.448.838,00	-284.892.512,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.202.603.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	656.791.350,00	706.791.350,00	511.201.338,00	-145.590.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			734.141.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	38.600.000,00	38.600.000,00	19.247.500,00	-19.352.500,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			38.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	119.950.000,00	119.950.000,00	0,00	-119.950.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			429.862.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	5.136.058.000,00	5.012.993.500,00	1.715.175.665,00	1.310.992.000,00							6.447.050.000,00						
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Trantibum Dilingkup Pemprov Lampung Sesuai SOP				100 persen	100 persen	4.494.742.000,00	4.244.742.000,00	1.446.672.170,00	-3.048.069.830,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		5.797.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																							
			Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Orang	40 Orang	200.000.000,00	225.000.000,00	79.876.630,00	-120.123.370,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																							
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	225.000.000,00	69.175.230,00	-130.824.770,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																							
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				50 laporan	40 laporan	3.547.050.000,00	3.547.050.000,00	1.248.204.060,00	-2.298.845.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			3.547.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																							
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				35 Laporan	35 Laporan	547.692.000,00	247.692.000,00	49.416.250,00	-498.275.750,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-				-	-	460.000.000,00	586.935.500,00	199.858.595,00	-260.141.405,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				11 Laporan	11 Laporan	250.000.000,00	277.648.000,00	77.562.100,00	-172.437.900,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	309.287.500,00	122.296.495,00	-87.703.505,00	Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS Provinsi				100 persen	100 persen	181.316.000,00	181.316.000,00	68.644.900,00	-112.671.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				12 Laporan	12 Laporan	181.316.000,00	181.316.000,00	68.644.900,00	-112.671.100,00	Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		J U M L A H																	58.552.953.583,90	61.167.316.685,90	54.984.391.305,63	479.167.077.423,58		59.690.168.800,00	



09

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
									11.077.188.631,57	55.101.546.015,57	43.093.003.145,57	32.015.814.514,00							70.184.400,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.077.188.631,57	55.101.546.015,57	43.093.003.145,57	32.015.814.514,00							70.184.400,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							11.077.188.631,57	55.101.546.015,57	43.093.003.145,57	32.015.814.514,00							70.184.400,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	9.151.448.031,57	11.675.386.315,57	10.522.531.875,57	-9.151.448.031,57							0,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	149.066.000,00	373.266.000,00	309.906.420,00	160.840.420,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	7 Dokumen	65.500.000,00	289.700.000,00	258.372.020,00	192.872.020,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	39.200.000,00	39.200.000,00	14.379.830,00	-24.820.170,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	44.366.000,00	44.366.000,00	37.154.570,00	-7.211.430,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.523.278.331,57	6.796.835.715,57	6.735.605.065,57	1.212.326.734,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	5.448.278.331,57	6.721.835.715,57	6.721.835.715,57	1.273.557.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.438.400,00	32.438.400,00	5.877.810,00	-26.560.590,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	42.561.600,00	42.561.600,00	7.891.540,00	-34.670.060,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	20.079.940,00	-29.920.060,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.039.970,00	-14.960.030,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Enggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	10.039.970,00	-14.960.030,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	53.376.400,00	53.376.400,00	11.159.810,00	-42.216.590,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	31.590.000,00	31.590.000,00	5.947.780,00	-25.642.220,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	21.786.400,00	21.786.400,00	5.212.030,00	-16.574.370,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Enggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.138.149.800,00	1.933.212.700,00	1.267.377.360,00	-870.772.440,00			-	-	-		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.428.200,00	8.423.200,00	4.211.600,00	-4.216.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Enggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	370.190.000,00	370.190.000,00	370.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Enggal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.969.000,00	14.969.000,00	5.769.000,00	-9.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.070.000,00	19.070.000,00	10.308.000,00	-8.762.000,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.176.000,00	10.176.000,00	2.544.000,00	-7.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.085.506.600,00	1.510.384.500,00	874.354.760,00	-1.211.151.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	916.655.500,00	1.142.487.500,00	1.060.790.000,00	144.134.500,00			-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	736.655.500,00	962.487.500,00	880.790.000,00	144.134.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	320.922.000,00	1.326.208.000,00	1.117.613.280,00	796.691.280,00			-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	298.142.000,00	503.428.000,00	306.257.780,00	8.115.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	800.000.000,00	799.965.500,00	799.965.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	22.780.000,00	22.780.000,00	11.390.000,00	-11.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	1.925.740.600,00	43.426.159.700,00	32.570.471.270,00	-1.855.556.200,00							70.184.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				100 %	100 %	146.510.400,00	3.145.294.400,00	1.955.197.910,00	1.808.687.510,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung		70.184.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan				1 Dokumen	4 Dokumen	70.184.400,00	1.174.708.400,00	72.683.730,00	2.499.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		70.184.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	76.326.000,00	1.970.586.000,00	1.882.514.180,00	1.806.188.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang terlaksana				100 %	100 %	725.120.000,00	37.379.003.000,00	28.916.596.780,00	28.191.476.780,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				0 Kawasan	7 Kawasan	0,00	31.050.000.000,00	24.240.227.090,00	24.240.227.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	126.234.000,00	110.486.250,00	110.486.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				100 Orang	80 Orang	203.175.000,00	298.875.000,00	0,00	-203.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	293.323.000,00	11.097.500,00	11.097.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontinjensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	1 Dokumen	95.600.000,00	164.426.000,00	0,00	-95.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.252.700,00	142.652.700,00	111.876.750,00	17.624.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																		
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	30 Orang	34.840.300,00	63.876.300,00	16.374.130,00	-18.466.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana					0 Keluarga	500 Keluarga	0,00	4.000.000.000,00	4.076.800.000,00	4.076.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					1 Dokumen	1 Dokumen	178.834.000,00	203.034.000,00	82.307.030,00	-96.526.970,00	Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					60 Orang	60 Orang	118.418.000,00	1.036.582.000,00	267.428.030,00	149.010.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				100 %	100 %	615.000.000,00	1.784.778.100,00	1.242.851.480,00	627.851.480,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung		0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1500 Orang	1500 Orang	390.000.000,00	1.070.903.800,00	928.156.670,00	538.156.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana					1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	671.258.300,00	295.750.740,00	95.750.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	42.616.000,00	18.944.070,00	-6.055.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	439.110.200,00	1.117.084.200,00	455.825.100,00	16.714.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung		0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					60 Keluarga	60 Keluarga	99.350.000,00	221.450.000,00	181.015.510,00	81.665.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.05.03.1.04.0007		Penanganan Pasca Bencana Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	222.319.200,00	614.534.200,00	111.142.350,00	-111.176.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04.0014		Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)																			
			Jumlah penduduk terlah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04.0016		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah																			
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04.0018		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																			
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.481.000,00	92.201.000,00	35.475.840,00	-31.005.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Enggal, Pahoman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04.0019		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																			
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.960.000,00	188.899.000,00	128.191.400,00	77.231.400,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04.0021		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi																			
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04.0023		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				0 kabupaten/kota	0 kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup				0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
J U M L A H									11.077.188.631,57	55.101.546.015,57	43.093.003.145,57	479.167.077.423,58						70.184.400,00			



10 DINAS SOSIAL

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							31.365.132.466,55	55.073.379.196,55	40.634.885.146,82	9.269.752.680,27							52.945.172.553,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							31.365.132.466,55	55.073.379.196,55	40.634.885.146,82	9.269.752.680,27							52.945.172.553,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							31.365.132.466,55	55.073.379.196,55	40.634.885.146,82	9.269.752.680,27							52.945.172.553,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	21.136.296.900,55	24.282.965.630,55	22.423.200.767,22	18.997.939.774,45							40.134.236.675,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	41.911.180,00	-108.088.820,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		183.995.070,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	48.559.200,00	48.559.200,00	16.778.320,00	-31.780.880,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			65.011.591,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	50.275.800,00	50.275.800,00	9.050.580,00	-41.225.220,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			57.651.789,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	51.165.000,00	51.165.000,00	16.082.280,00	-35.082.720,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			61.331.690,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.893.724.605,20	19.208.267.335,20	18.654.097.595,20	1.760.372.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		36.422.441.859,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				157 Orang/ Bulan	148 Orang/ Bulan	16.822.724.605,20	18.884.267.335,20	18.384.267.335,20	1.561.542.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			23.929.176.366,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	275.000.000,00	256.024.240,00	231.024.240,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.450.333.310,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.300.000,00	10.300.000,00	2.207.720,00	-8.092.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.266.338,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	1.130.640,00	-3.969.360,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.133.169,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.450.000,00	25.450.000,00	8.941.860,00	-16.508.140,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			18.399.507,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.150.000,00	8.150.000,00	1.525.800,00	-3.624.200,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.133.169,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	4.746.720,00	-15.253.280,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			105.919.014,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.145.560,00	-3.854.440,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.453.267,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			16.119.508,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			13.799.630,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.038.240,00	-3.961.760,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.146.609,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.562.920,00	-7.437.080,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.400.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	43.000.000,00	66.547.600,00	41.613.020,00	-1.386.980,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		24.292.160,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	28.000.000,00	51.547.600,00	32.040.020,00	4.040.020,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.025.822,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	9.573.000,00	-5.427.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.266.338,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.079.680.482,00	1.845.554.882,00	493.078.788,20	-586.601.693,80			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.590.958.219,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	180.000.000,00	55.218.000,00	25.218.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			36.799.014,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	264.333.400,00	35.870.020,00	10.870.020,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			258.819.733,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	160.969.000,00	447.900.000,00	13.471.800,00	-147.497.200,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			14.719.606,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			49.065.352,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.025.482,00	91.025.482,00	18.217.868,20	-72.807.613,80	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			55.198.521,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	145.000.000,00	145.000.000,00	24.000.000,00	-121.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			236.066.236,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	38.967.400,00	-6.032.600,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			49.065.352,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	552.686.000,00	642.296.000,00	281.333.700,00	-271.352.300,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			881.024.405,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			10.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	2.144.306.000,00	1.327.010.000,00	2.074.402.220,00	-69.903.780,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.585.836.269,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.112.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.133.169,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	470.000.000,00	519.890.000,00	49.890.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			455.738.547,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	12.434.000,00	-37.566.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			46.489.421,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.619.194.000,00	801.898.000,00	1.536.966.220,00	-82.227.780,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.077.475.132,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	805.585.813,35	1.665.585.813,35	1.113.351.243,82	307.765.430,47			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		220.794.084,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				29 Unit	29 Unit	544.770.000,00	594.770.000,00	621.212.000,00	76.442.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			24.532.676,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				50 Unit	50 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	4.875.000,00	-14.625.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			24.532.676,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	8 Unit	210.151.279,20	820.151.279,20	399.432.600,00	189.281.320,80	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.665.845,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	31.164.534,15	231.164.534,15	87.831.643,82	56.667.109,67	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			141.062.887,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	320.000.000,00	534.500.000,00	277.970.340,00	390.148.479,00							710.148.479,00	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	10.142.880,00	-29.857.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		98.130.704,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	10.142.880,00	-29.857.120,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			98.130.704,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-				-	-	280.000.000,00	494.500.000,00	267.827.460,00	-12.172.540,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			612.017.775,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.02.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				60 Orang	60 Orang	73.250.000,00	73.250.000,00	2.448.720,00	-70.801.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			107.503.905,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.02.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				229 Orang	229 Orang	73.250.000,00	287.750.000,00	218.985.200,00	145.735.200,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			108.030.865,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.02.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				40 Keluarga	40 Keluarga	6.369.800,00	6.369.800,00	18.413.600,00	12.043.800,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.769.467,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.02.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				30 Lembaga	30 Lembaga	127.130.200,00	127.130.200,00	27.979.940,00	-99.150.260,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			344.713.538,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-				-	-	185.999.500,00	185.999.500,00	176.808.418,00	120.904.277,00							306.903.777,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-				-	-	185.999.500,00	185.999.500,00	176.808.418,00	-9.191.082,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			306.903.777,00	DINAS SOSIAL
1.06.03.1.01.0001		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	185.999.500,00	185.999.500,00	176.808.418,00	-9.191.082,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			306.903.777,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	7.791.159.389,00	9.707.087.389,00	6.536.790.908,50	1.690.456.746,00							9.481.616.135,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-				-	-	1.078.562.599,00	1.288.562.599,00	880.014.089,90	-198.548.509,10			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.507.545.793,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan					40 Orang	50 Orang	573.637.500,00	573.637.500,00	559.509.000,00	-14.128.500,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			687.623.556,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang					40 Orang	50 Orang	89.906.700,00	89.906.700,00	67.929.289,90	-21.977.410,10	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			107.773.052,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	23.000.000,00	233.000.000,00	15.567.500,00	-7.432.500,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			57.719.376,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			84.660.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	53.109.000,00	53.109.000,00	47.309.000,00	-5.800.000,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			63.662.294,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	296.435.399,00	296.435.399,00	164.547.500,00	-131.887.899,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			331.217.352,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	15.884.000,00	15.884.000,00	9.833.800,00	-6.050.200,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0008		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	14.850.000,00	14.850.000,00	9.422.000,00	-5.428.000,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	4.740.000,00	4.740.000,00	1.896.000,00	-2.844.000,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			16.790.163,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				40 Orang	50 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Raya Kota Bandar Lampung, Kemiling, Kemiling Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-				-	-	3.588.691.325,00	4.623.715.325,00	2.901.716.428,60	-686.974.896,40			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			4.466.135.163,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0001		Pengasuhan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	373.038.050,00	373.038.050,00	45.804.571,00	-327.233.479,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			389.321.303,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0002		Penyediaan Makanan					165 Orang	165 Orang	1.590.405.000,00	1.590.405.000,00	1.552.067.900,00	-38.337.100,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.952.732.323,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0003		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	240.487.000,00	240.487.000,00	222.882.100,00	-17.604.900,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			335.205.286,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0004		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huri Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	186.145.600,00	1.221.169.600,00	22.785.435,00	-163.360.165,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			150.304.346,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	50.917.103,00	50.917.103,00	44.051.700,00	-6.865.403,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			54.023.163,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	349.572.810,00	349.572.810,00	311.029.110,00	-38.543.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			342.953.929,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	174.465.820,00	174.465.820,00	134.828.600,00	-39.637.220,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			203.761.907,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0008		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	7.450.000,00	7.450.000,00	2.955.000,00	-4.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			20.400.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	587.469.800,00	587.469.800,00	547.541.370,00	-39.928.430,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			927.253.585,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	16.580.000,00	16.580.000,00	6.617.000,00	-9.963.000,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			85.079.321,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				165 Orang	165 Orang	12.160.142,00	12.160.142,00	11.153.642,60	-1.006.499,40	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton Kota Bandar Lampung, Way Halim, Gunungsuluh Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Air Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	1.552.940.279,00	1.553.064.279,00	1.122.112.114,00	-430.828.165,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.662.057.968,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0001		Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	920.852.000,00	920.852.000,00	911.852.000,00	-9.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.126.286.571,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0002		Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	65.612.279,00	65.612.279,00	65.612.279,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			79.389.212,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	294.126.000,00	294.250.000,00	35.653.975,00	-258.472.025,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			30.665.845,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0004		Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	14.250.000,00	14.250.000,00	14.219.000,00	-31.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			17.203.539,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	35.153.700,00	35.153.700,00	35.153.700,00	0,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			59.200.291,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	169.934.300,00	169.934.300,00	18.278.300,00	-151.656.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			211.643.397,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0008		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	1.074.060,00	-1.425.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.550.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	7.100.000,00	7.100.000,00	2.868.000,00	-4.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			8.586.437,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	1.996.000,00	-3.004.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih, Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				85 Orang	85 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	1.996.000,00	-3.004.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0012		Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	20.452.000,00	20.452.000,00	20.448.800,00	-3.200,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			24.532.676,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-				-	-	527.674.726,00	737.674.726,00	406.533.176,00	-121.141.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		708.254.823,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0001		Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	273.750.000,00	273.750.000,00	273.750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			335.791.003,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0002		Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	19.302.500,00	19.302.500,00	19.302.500,00	0,00	Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			34.348.813,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0003		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	220.000.000,00	2.532.750,00	-7.467.250,00	Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.815.501,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0004		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	6.304.429,00	6.304.429,00	6.304.429,00	0,00	Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			7.557.144,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.04.1.04.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	51.570.000,00	51.570.000,00	51.554.600,00	-15.400,00	Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			61.822.344,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0006		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	122.911.597,00	122.911.597,00	16.465.997,00	-106.445.600,00	Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			156.220.794,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0007		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	24.611.200,00	24.611.200,00	24.611.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			42.491.821,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0008		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	795.000,00	-1.205.000,00	Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0009		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	7.225.000,00	7.225.000,00	7.218.700,00	-6.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			6.255.832,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0010		Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	1.998.000,00	-3.002.000,00	Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			33.732.429,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0011		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Pesawaran, Teluk Pandan, Hurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			12.119.142,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-				-	-	1.043.290.460,00	1.504.070.460,00	1.226.415.100,00	183.124.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.137.622.388,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	80 Orang	104.625.000,00	324.280.200,00	274.523.340,00	169.898.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			124.380.668,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	80 Orang	25.208.000,00	25.208.000,00	25.208.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			102.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																			
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	80 Orang	403.267.400,00	726.246.000,00	588.363.420,00	185.096.020,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			291.938.845,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	80 Orang	335.395.400,00	369.198.800,00	311.999.580,00	-23.395.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			540.491.653,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																			
			<i>Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	80 Orang	171.811.000,00	56.153.800,00	23.337.260,00	-148.473.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			78.811.222,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	80 Orang	2.983.660,00	2.983.660,00	2.983.500,00	-160,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	520.000.000,00	785.000.000,00	626.887.470,00	392.569.189,00								912.569.189,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-				-	-	520.000.000,00	785.000.000,00	626.887.470,00	106.887.470,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		912.569.189,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				700 Keluarga	700 Keluarga	100.000.000,00	175.000.000,00	115.340.000,00	15.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumur Putri Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			128.857.881,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota</i>				700 Keluarga	700 Keluarga	70.000.000,00	70.000.000,00	29.833.520,00	-40.166.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			477.711.308,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>				700 Orang	700 Orang	350.000.000,00	540.000.000,00	481.713.950,00	131.713.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			306.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	1.117.505.677,00	15.992.505.677,00	10.330.379.143,10	-136.929.210,00							980.576.467,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-				-	-	1.117.505.677,00	15.992.505.677,00	10.330.379.143,10	9.212.873.466,10			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		980.576.467,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi</i>				1000 Orang	1000 Orang	28.500.000,00	28.500.000,00	27.747.500,00	-752.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			16.436.893,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi</i>				500 Orang	500 Orang	19.640.000,00	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				2 Unit	2 Unit	287.755.300,00	287.755.300,00	290.169.930,00	2.414.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Tanjungkarang Barat, Gedong Aie Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			220.794.085,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	417.810.377,00	492.810.377,00	418.600.114,10	789.737,10	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			306.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				500 Orang	500 Orang	363.800.000,00	15.163.800.000,00	9.574.221.599,00	9.210.421.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			386.345.489,00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-				-	-	294.171.000,00	3.585.321.000,00	262.848.100,00	124.950.831,00							419.121.831,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-				-	-	294.171.000,00	3.585.321.000,00	262.848.100,00	-31.322.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			419.121.831,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	44.171.000,00	3.274.226.000,00	64.944.700,00	20.773.700,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang Kota Bandar Lampung, Kedaton, Surabaya Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			144.742.789,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				2 Makam	2 Makam	250.000.000,00	311.095.000,00	197.903.400,00	-52.096.600,00	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang Kota Bandar Lampung, Kedaton, Surabaya Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Sumur Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			274.379.042,00	DINAS SOSIAL
			J U M L A H						31.365.132.466,55	55.073.379.196,55	40.634.885.146,82	479.167.077.423,58							52.945.172.553,00	



11 DINAS TENAGA KERJA

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							33.466.566.619,65	43.669.611.267,65	39.445.178.687,65	5.978.612.068,00							35.581.566.619,65	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.466.566.619,65	43.669.611.267,65	39.445.178.687,65	5.978.612.068,00							35.581.566.619,65	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							33.466.566.619,65	43.669.611.267,65	39.445.178.687,65	5.978.612.068,00							35.581.566.619,65	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	27.745.170.669,65	28.559.099.267,65	27.311.365.707,65	-15.000.000,00							27.730.170.669,65	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rancangan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Berkualitas dan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	196.662.000,00	225.000.000,00	80.000.000,00	-116.662.000,00							197.062.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	46.662.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-21.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			47.062.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas				100 Persen	100 Persen	24.716.444.669,65	25.826.212.707,65	25.569.132.707,65	852.688.038,00							24.706.444.669,65	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				180 Orang/ Bulan	163 Orang/ Bulan	24.641.444.669,65	25.726.212.707,65	25.500.132.707,65	858.688.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.641.444.669,65	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	25.000.000,00	19.000.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Berkualitas				100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	40.000.000,00	18.800.000,00	-26.200.000,00							40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	10.000.000,00	8.800.000,00	-16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	62.528.560,00	0,00	-80.000.000,00							80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	0 Orang	50.000.000,00	32.528.560,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	774.104.000,00	792.000.000,00	467.000.000,00	-307.104.000,00			-	-	Administrasi Umum PD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung		774.104.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				42 Laporan	42 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	398.104.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-198.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			398.104.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Target				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	Peralatan dan Mesin PD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.352.960.000,00	960.420.000,00	806.433.000,00	-546.527.000,00			-	-	Jasa Penunjang Urusan PD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung		1.352.560.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	450.000.000,00	350.249.000,00	-149.751.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	852.960.000,00	510.420.000,00	456.184.000,00	-396.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			852.560.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas				100 Persen	100 Persen	480.000.000,00	552.938.000,00	370.000.000,00	-110.000.000,00			-	-	Barang/Gedung Milik PD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung		480.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	350.000.000,00	417.340.000,00	350.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	55.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.598.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/kota yang menyusun RTK				80 %	80 %	175.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00	0,00							175.000.000,00		
2.07.02.1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	175.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00	-150.000.000,00			-	-		Dokumen Rencana Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.02.1.01.0001		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.02.1.01.0003		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.02.1.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																			
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				30 Orang	0 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase peserta Pelatihan kerja yang bersertifikat kompetensi				68.57 %	70 %	1.600.000.000,00	11.600.000.000,00	10.635.000.000,00	1.450.000.000,00							3.050.000.000,00		
2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Klaster Kompetensi Yang Bersertifikat				100 Persen	100 Persen	1.200.000.000,00	11.200.000.000,00	10.500.000.000,00	9.300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pencari Kerja		2.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.1.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																			
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				612 Orang	992 Orang	1.200.000.000,00	11.200.000.000,00	10.500.000.000,00	9.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Metro, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan		2.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		
2.07.03.1.01.0003		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																			
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	-65.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.1.02.0001		Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				15 LPK	10 LPK	100.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase Perusahaan Menengah yang Mendapat Konsultasi Produktivitas Tingkat Daerah				20 Persen	20 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perusahaan/UMKM		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.1.03.0001		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah																		
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				10 Perusahaan	30 Perusahaan	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pengukuran Tingkat Produktivitas Tingkat Daerah				20 Persen	20 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Tenaga Kerja di Perusahaan		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.1.04.0001		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	920.000.000,00	860.000.000,00	149.095.000,00	230.000.000,00							1.150.000.000,00	
2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Melalui Layanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25 Persen	25 Persen	450.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	-400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pencari Kerja		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.1.01.0002		Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				100 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.1.01.0003		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	0 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				100 Orang	50 Orang	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				12 Orang	8 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Layanan Informasi Pasar Kerja Online				30 Persen	30 Persen	120.000.000,00	110.000.000,00	69.095.000,00	-50.905.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pencari Kerja		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KariHub)				200 Orang	100 Orang	120.000.000,00	110.000.000,00	69.095.000,00	-50.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Pra CPMI/PMI Purna Yang Mendapat Perlindungan				30 Persen	30 Persen	350.000.000,00	300.000.000,00	30.000.000,00	-320.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pencari Kerja		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				100 Orang	50 Orang	350.000.000,00	300.000.000,00	30.000.000,00	-320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																			
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	2.271.395.950,00	1.750.512.000,00	1.104.836.980,00	230.000.000,00							2.501.395.950,00		
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan				20 Persen	20 Persen	2.001.395.950,00	1.350.512.000,00	964.836.980,00	-1.036.558.970,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Perusahaan		2.151.395.950,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial																			
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WPKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja																			
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				20 Laporan	9400 Laporan	2.001.395.950,00	1.350.512.000,00	964.836.980,00	-1.036.558.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			2.151.395.950,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan				100 Persen	100 Persen	170.000.000,00	250.000.000,00	90.000.000,00	-80.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perusahaan dan Pekerja		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20 Perkara	20 Perkara	70.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																			
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				30 Perusahaan	30 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Dokumen UMP/UMK, UMSP dan UMSK Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	UMP/UMK		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.1.03.0001		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				12 Surat Keputusan	12 Surat Keputusan	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.1.03.0005		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-				-	-	755.000.000,00	750.000.000,00	219.881.000,00	220.000.000,00							975.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan				100 Persen	100 Persen	755.000.000,00	750.000.000,00	219.881.000,00	-535.119.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Perusahaan dan Pekerja		975.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.06.1.01.0001		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				50 Perusahaan	50 Perusahaan	325.000.000,00	300.000.000,00	94.881.000,00	-230.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.06.1.01.0002		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				15 Kasus	20 Kasus	155.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.06.1.01.0003		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				25 Perusa aan	13 Perusa aan	275.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
J U M L A H									33.466.566.619,65	43.669.611.267,65	39.445.178.687,65	479.167.077.423,58							35.581.566.619,65	



12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.128.091.760,80	16.488.088.926,80	12.892.473.920,80	-1.235.617.840,00							16.229.130.127,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							13.850.621.760,80	16.160.618.926,80	12.742.473.920,80	-1.108.147.840,00							15.896.580.972,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	11.512.122.560,80	13.225.408.926,80	10.784.016.120,80	1.428.781.356,20							12.940.903.917,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	59.660.503,00	-90.339.497,00							164.116.143,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	59.660.503,00	-90.339.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			164.116.143,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.286.007.760,80	9.766.094.926,80	9.611.046.051,80	1.325.038.291,00							8.990.900.749,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/ Bulan	66 Orang/ Bulan	8.169.170.760,80	9.419.257.926,80	9.419.257.926,80	1.250.087.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			8.863.068.498,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	305.000.000,00	176.786.125,00	101.786.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			82.058.071,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	41.837.000,00	41.837.000,00	15.002.000,00	-26.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			45.774.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	39.000.000,00	39.000.000,00	10.000.000,00	-29.000.000,00							42.670.197,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	10.000.000,00	-29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			42.670.197,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	15.750.000,00	-59.250.000,00							82.058.071,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	9.500.000,00	-40.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			54.705.381,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	-18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			27.352.690,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.430.110.800,00	1.645.480.000,00	423.424.500,00	-1.006.686.300,00							1.909.466.202,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.280.000,00	28.280.000,00	7.070.000,00	-21.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			30.941.363,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			62.972.458,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			8.752.860,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	-18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			27.352.690,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.000.000,00	33.000.000,00	6.000.000,00	-27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			36.105.551,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			15.317.506,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.321.830.800,00	1.437.200.000,00	398.604.500,00	-923.226.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			1.728.023.774,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	249.902.000,00	461.174.000,00	161.163.500,00	-88.738.500,00			-	-			273.419.681,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	161.174.000,00	161.174.000,00	161.163.500,00	-10.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			176.341.701,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	88.728.000,00	300.000.000,00	0,00	-88.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			97.077.980,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	650.500.000,00	457.058.000,00	381.831.566,00	-268.668.434,00			-	-			586.277.568,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165.500.000,00	165.500.000,00	143.043.166,00	-22.456.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			181.074.811,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	485.000.000,00	291.558.000,00	238.788.400,00	-246.211.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			405.202.757,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	631.602.000,00	631.602.000,00	121.140.000,00	-510.462.000,00			-	-			891.995.306,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	377.642.000,00	377.642.000,00	101.400.000,00	-276.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			413.180.989,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				113 Unit	113 Unit	58.960.000,00	58.960.000,00	19.740.000,00	-39.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			64.508.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	-195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			414.305.732,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung				100 %	100 %	618.098.000,00	700.166.300,00	392.574.600,00	90.990.958,00							709.088.958,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	[deleted] 1 [deleted] 2 Persentase Lembaga PUG Provinsi dan Kab/Kota yang Berfungsi Optimal				100 %	100 %	108.403.000,00	100.000.000,00	48.615.000,00	-59.788.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota		119.583.774,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi				60 Orang	60 Orang	108.403.000,00	100.000.000,00	48.615.000,00	-59.788.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			119.583.774,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi				100 %	100 %	356.745.000,00	550.000.000,00	306.001.400,00	-50.743.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Dinas PPPA Kabupaten/Kota		411.220.348,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				405 Orang	405 Orang	356.745.000,00	550.000.000,00	306.001.400,00	-50.743.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			411.220.348,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-				-	-	152.950.000,00	50.166.300,00	37.958.200,00	-114.991.800,00			-	-	-		178.284.836,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi				1 Unit	1 Unit	152.950.000,00	50.166.300,00	37.958.200,00	-114.991.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		178.284.836,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak				100 %	100 %	888.904.200,00	1.530.714.200,00	1.212.633.000,00	73.888.621,00							962.792.821,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	503.424.200,00	503.424.200,00	345.702.700,00	-157.721.500,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		586.988.737,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	175.424.200,00	175.424.200,00	103.172.700,00	-72.251.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			228.121.438,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	328.000.000,00	328.000.000,00	242.530.000,00	-85.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		358.867.299,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				100 %	100 %	235.480.000,00	977.290.000,00	866.181.900,00	630.701.900,00			-	-	-		257.640.462,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				50 Layanan	50 Layanan	235.480.000,00	977.290.000,00	866.181.900,00	630.701.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		257.640.462,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Perlindungan Perempuan dalam Konflik Sosial				100 %	100 %	150.000.000,00	50.000.000,00	748.400,00	-149.251.600,00			-	-	-		118.163.622,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	748.400,00	-149.251.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		118.163.622,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga				100 %	100 %	110.852.000,00	76.000.000,00	51.385.000,00	143.255.246,00							254.107.246,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Keluarga dan Ketahanan Keluarga Persentase Kabupaten/Kota yang Terpapar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PPPA melalui Internet				100 %	100 %	110.852.000,00	76.000.000,00	51.385.000,00	-59.467.000,00			-	-			254.107.246,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	110.852.000,00	76.000.000,00	51.385.000,00	-59.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			154.107.246,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Cakupan Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung				100 %	100 %	150.849.200,00	158.533.700,00	29.949.300,00	41.549.624,00							192.398.824,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Data dan Informasi yang di Up Date				100 %	100 %	150.849.200,00	158.533.700,00	29.949.300,00	-120.899.900,00			-	-			192.398.824,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	87.560.000,00	99.690.500,00	29.949.300,00	-57.610.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			106.742.014,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	63.289.200,00	58.843.200,00	0,00	-63.289.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			85.656.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kab/kota layak anak yang mendapatkan predikat minimal madya				100 %	100 %	422.200.000,00	322.200.000,00	45.131.900,00	94.437.616,00							516.637.616,00	
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terakreditasi				100 %	100 %	422.200.000,00	322.200.000,00	45.131.900,00	-377.068.100,00			-	-			516.637.616,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			163.240.856,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	272.200.000,00	212.200.000,00	29.908.900,00	-242.291.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			281.185.658,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																		
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	25.000.000,00	15.223.000,00	-34.777.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			72.211.102,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				100 %	100 %	147.595.800,00	147.595.800,00	226.784.000,00	173.055.790,00							320.651.590,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif di Masyarakat				100 %	100 %	78.575.800,00	78.575.800,00	46.655.900,00	-31.919.900,00			-	-			134.028.183,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	78.575.800,00	78.575.800,00	46.655.900,00	-31.919.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			134.028.183,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	111.108.100,00	111.108.100,00			-	-			111.108.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				-	50 Layanan	0,00	0,00	111.108.100,00	111.108.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			111.108.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan				100 %	100 %	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00			-	-			75.515.307,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			75.515.307,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							277.470.000,00	327.470.000,00	150.000.000,00	-127.470.000,00							332.549.155,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP				100 %	100 %	44.800.000,00	25.000.000,00	0,00	20.627.635,00							65.427.635,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	persentase stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang mendapatkan pelatihan pendidikan kependudukan				22 %	22 %	44.800.000,00	25.000.000,00	0,00	-44.800.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		65.427.635,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	44.800.000,00	25.000.000,00	0,00	-44.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM			65.427.635,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten/Kota				100 %	100 %	53.470.000,00	82.000.000,00	0,00	24.202.134,00							77.672.134,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan KIE Tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				40 %	40 %	53.470.000,00	82.000.000,00	0,00	-53.470.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		77.672.134,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	53.470.000,00	82.000.000,00	0,00	-53.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM			77.672.134,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kab/kota yang melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera				100 %	100 %	179.200.000,00	220.470.000,00	150.000.000,00	10.249.386,00							189.449.386,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/kota yang Mendapatkan KIE tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				100 %	100 %	115.200.000,00	70.470.000,00	0,00	-115.200.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		121.788.891,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		
			Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	1 Dokumen	115.200.000,00	70.470.000,00	0,00	-115.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM			121.788.891,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Edukasi Pembangunan Keluarga				100 %	100 %	64.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	86.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM	-		67.660.495,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																		
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1 Organisasi	1 Organisasi	64.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM			67.660.495,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
J U M L A H									14.128.091.760,80	16.488.088.926,80	12.892.473.920,80	479.167.077.423,58							16.229.130.127,00	



13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							17.611.680.724,40	18.529.438.108,40	15.837.511.783,84	-1.774.168.940,56							21.595.980.640,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.611.680.724,40	18.529.438.108,40	15.837.511.783,84	-1.774.168.940,56							21.595.980.640,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							17.611.680.724,40	18.529.438.108,40	15.837.511.783,84	-1.774.168.940,56							21.595.980.640,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	15.403.618.724,40	16.321.376.108,40	15.127.961.574,34	1.671.612.275,60							17.075.231.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	77.676.400,00	77.676.400,00	8.280.540,00	-69.395.860,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	70.616.400,00	70.616.400,00	7.574.540,00	-63.041.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		75.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	7.060.000,00	7.060.000,00	706.000,00	-6.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		39.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.746.067.959,00	9.954.825.343,40	9.914.405.343,40	1.168.337.384,40			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		8.790.586.809,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	8.698.021.959,00	9.906.779.343,40	9.906.779.343,40	1.208.757.384,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		8.717.540.809,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.046.000,00	23.046.000,00	2.938.000,00	-20.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		23.046.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	4.688.000,00	-20.312.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	-23.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		23.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	-23.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		23.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	-26.250.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	-26.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	-		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	876.965.365,00	881.107.365,00	93.213.036,50	-783.752.328,50			-	Reformasi Birokrasi	-		1.511.535.191,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	199.500.000,00	184.100.000,00	0,00	-199.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	2.987.600,00	-5.012.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	-18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.722.365,00	119.264.365,00	6.267.436,50	-93.454.928,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			122.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	509.743.000,00	509.743.000,00	77.708.000,00	-432.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			821.185.191,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	28.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-28.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		238.331.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	28.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			238.331.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	981.000.000,40	690.000.000,00	690.000.000,00	-291.000.000,40			-	Reformasi Birokrasi	-		980.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,40	300.000.000,00	300.000.000,00	-0,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			418.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	681.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00	-291.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			562.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	435.609.000,00	437.467.000,00	110.151.000,00	-325.458.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		675.638.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	174.833.000,00	176.691.000,00	94.926.000,00	-79.907.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			162.406.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.900.000,00	60.900.000,00	15.225.000,00	-45.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			90.232.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				0 Unit	0 Unit	199.876.000,00	199.876.000,00	0,00	-199.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			423.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.303.161.654,44	103.161.654,44			-	Reformasi Birokrasi	-		4.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	4.303.161.654,44	103.161.654,44	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			4.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	282.197.000,00	282.197.000,00	111.446.600,00	155.454.944,00							437.651.944,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-				-	-	126.467.700,00	126.467.700,00	59.822.250,00	-66.645.450,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-	151.484.288,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengkomodir RPPLH Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	126.467.700,00	126.467.700,00	59.822.250,00	-66.645.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			151.484.288,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-				-	-	155.729.300,00	155.729.300,00	51.624.350,00	-104.104.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		286.167.656,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS																		
			Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.941.000,00	73.941.000,00	19.019.600,00	-54.921.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			203.700.656,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	81.788.300,00	81.788.300,00	32.604.750,00	-49.183.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			82.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	447.208.000,00	447.208.000,00	150.719.750,00	330.539.479,00							777.747.479,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	347.381.000,00	347.381.000,00	128.966.600,00	-218.414.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		544.423.236,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	155.337.000,00	155.337.000,00	66.300.600,00	-89.036.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			248.490.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	192.044.000,00	192.044.000,00	62.666.000,00	-129.378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			295.932.916,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	56.673.000,00	56.673.000,00	21.753.150,00	-34.919.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		132.217.071,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	56.673.000,00	56.673.000,00	21.753.150,00	-34.919.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			132.217.071,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	43.154.000,00	43.154.000,00	0,00	-43.154.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		101.107.172,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kevenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.154.000,00	43.154.000,00	0,00	-43.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			101.107.172,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	163.924.000,00	163.924.000,00	23.317.200,00	69.709.000,00							233.633.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-				-	-	163.924.000,00	163.924.000,00	23.317.200,00	-140.606.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		233.633.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				25 Unit	25 Unit	163.924.000,00	163.924.000,00	23.317.200,00	-140.606.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			233.633.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	188.518.000,00	188.518.000,00	43.790.299,00	134.271.221,00							322.789.221,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	188.518.000,00	188.518.000,00	43.790.299,00	-144.727.701,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		322.789.221,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				2 Dokumen	2 Dokumen	188.518.000,00	188.518.000,00	43.790.299,00	-144.727.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			322.789.221,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				-	-	139.020.000,00	139.020.000,00	40.121.760,50	200.000.000,00							339.020.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				-	-	139.020.000,00	139.020.000,00	40.121.760,50	-98.898.239,50			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		339.020.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.731.000,00	48.731.000,00	4.918.580,50	-43.812.419,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			118.657.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	90.289.000,00	90.289.000,00	35.203.180,00	-55.085.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			220.363.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	66.524.000,00	66.524.000,00	25.874.300,00	93.898.500,00							160.422.500,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	66.524.000,00	66.524.000,00	25.874.300,00	-40.649.700,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		160.422.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	66.524.000,00	66.524.000,00	25.874.300,00	-40.649.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			160.422.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	90.057.000,00	90.057.000,00	21.467.600,00	95.743.850,00							185.800.850,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	90.057.000,00	90.057.000,00	21.467.600,00	-68.589.400,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		185.800.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				21 Entitas	21 Entitas	90.057.000,00	90.057.000,00	21.467.600,00	-68.589.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			185.800.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	46.745.200,00	325.400.000,00							455.400.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	46.745.200,00	-83.254.800,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		455.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi</i>				3 Perkara	3 Perkara	60.000.000,00	60.000.000,00	20.339.200,00	-39.660.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			209.484.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																		
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				5 Pengaduan	5 Pengaduan	70.000.000,00	70.000.000,00	26.406.000,00	-43.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			245.916.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	700.614.000,00	700.614.000,00	246.067.500,00	907.670.646,00							1.608.284.646,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-				-	-	700.614.000,00	700.614.000,00	246.067.500,00	-454.546.500,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-			1.608.284.646,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	515.044.000,00	515.044.000,00	186.793.930,00	-328.250.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			1.190.130.638,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	185.570.000,00	185.570.000,00	59.273.570,00	-126.296.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			418.154.008,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J U M L A H									17.611.680.724,40	18.529.438.108,40	15.837.511.783,84	479.167.077.423,58							21.595.980.640,00	



14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			9.677.297.200,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.265.095.352,00	8.671.174.044,00	6.153.196.536,00	-2.111.898.816,00								9.677.297.200,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							8.265.095.352,00	8.671.174.044,00	6.153.196.536,00	-2.111.898.816,00								9.677.297.200,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Layanan Penunjang Urusan Pemda Provinsi				100 %	100 %	7.131.852.352,00	7.271.512.044,00	5.899.049.319,00	968.444.848,00								8.100.297.200,00		
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Panganggaran, Laporan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun				100 %	100 %	74.000.000,00	74.000.000,00	17.022.780,00	-56.977.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			111.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	4.694.420,00	-15.305.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	2.345.680,00	-7.654.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	2.592.860,00	-8.407.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	4.399.830,00	-15.600.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	2.989.990,00	-10.010.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi dan pengelolaan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	4.922.351.052,00	5.066.080.244,00	5.040.075.144,00	117.724.092,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		5.536.956.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	4.900.000.352,00	5.043.729.544,00	5.035.339.544,00	135.339.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.484.280.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.930.900,00	8.930.900,00	1.863.740,00	-7.067.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.930.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			16.192.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	13.419.800,00	13.419.800,00	2.871.860,00	-10.547.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			16.710.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.843.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	1.273.860,00	-8.726.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		19.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.273.860,00	-8.726.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			19.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	306.869.400,00	306.869.400,00	69.603.305,00	-237.266.095,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		439.787.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	13.525.200,00	13.525.200,00	761.580,00	-12.763.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	9.483.000,00	9.483.000,00	1.417.110,00	-8.065.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	32.161.000,00	32.161.000,00	7.877.425,00	-24.283.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			51.087.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	251.700.200,00	251.700.200,00	59.547.190,00	-192.153.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			351.700.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan layanan administrasi umum dan perkantoran pada perangkat daerah yang terlaksana				100 %	100 %	1.025.070.400,00	960.270.400,00	326.722.710,00	-698.347.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.057.694.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.717.400,00	7.717.400,00	3.858.700,00	-3.858.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			7.717.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.995.900,00	7.995.900,00	3.997.950,00	-3.997.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			7.995.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	-18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	195.100.100,00	195.100.100,00	32.581.240,00	-162.518.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			195.100.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	3.500.500,00	-26.499.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	759.257.000,00	694.457.000,00	276.534.320,00	-482.722.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			791.881.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia				100 %	100 %	115.668.500,00	115.668.500,00	0,00	-115.668.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		114.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	115.668.500,00	115.668.500,00	0,00	-115.668.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan layanan jasa dalam rangka menunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia				100 %	100 %	199.354.000,00	199.354.000,00	145.520.500,00	-53.833.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		237.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	127.120.500,00	127.120.500,00	127.120.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			143.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.233.500,00	72.233.500,00	18.400.000,00	-53.833.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			94.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara				100 %	100 %	478.539.000,00	539.269.500,00	298.831.020,00	-179.707.980,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		584.359.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	354.847.100,00	354.847.100,00	276.855.905,00	-77.991.195,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			364.681.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	106 Unit	93.691.900,00	93.691.900,00	21.975.115,00	-71.716.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			119.678.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	90.730.500,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk di kab/kota se-provinsi lampung				100 %	100 %	685.000.000,00	685.000.000,00	139.381.130,00	255.000.000,00							940.000.000,00		
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase dokumen pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota yang tersedia				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	5.972.275,00	-44.027.725,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	5.972.275,00	-44.027.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi bagi aparat pendaftaran kependudukan yang tersedia				100 %	100 %	570.000.000,00	570.000.000,00	108.602.765,00	-461.397.235,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	95.263.265,00	-254.736.735,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			480.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	13.339.500,00	-21.660.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk terhadap 15 Kab/Kota yang tersedia				100 %	100 %	65.000.000,00	65.000.000,00	24.806.090,00	-40.193.910,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	24.806.090,00	-40.193.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Provinsi Lampung				100 %	100 %	157.556.000,00	193.000.000,00	28.398.627,00	81.444.000,00							239.000.000,00		
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase laporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 15 Kab/Kota yang tersedia				100 %	100 %	29.556.000,00	65.000.000,00	1.338.400,00	-28.217.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota			39.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	29.556.000,00	65.000.000,00	1.338.400,00	-28.217.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			39.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-				-	-	63.000.000,00	63.000.000,00	1.825.752,00	-61.174.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan masyarakat			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				2 Dokumen	2 Dokumen	63.000.000,00	63.000.000,00	1.825.752,00	-61.174.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase laporan hasil pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil bagi Kab/Kota se-Provinsi Lampung yang tersedia				100 %	100 %	65.000.000,00	65.000.000,00	25.234.475,00	-39.765.525,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Disdukcapil Kabupaten/Kota			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	25.234.475,00	-39.765.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kab/Kota se-Provinsi Lampung				100 %	100 %	159.261.000,00	234.366.000,00	35.692.460,00	93.739.000,00							253.000.000,00		
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia				100 %	100 %	72.099.000,00	147.204.000,00	2.053.100,00	-70.045.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Aparat Pemerintah Desa / Pekon			163.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	72.099.000,00	147.204.000,00	2.053.100,00	-70.045.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kab/kota yang tersedia				100 %	100 %	87.162.000,00	87.162.000,00	33.639.360,00	-53.522.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kabupaten/Kota			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	1 Laporan	87.162.000,00	87.162.000,00	33.639.360,00	-53.522.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Provinsi Lampung				100 %	100 %	131.426.000,00	287.296.000,00	50.675.000,00	13.574.000,00							145.000.000,00		
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	<i>Persentase dokumen profil kependudukan yang tersedia</i>				100 %	100 %	131.426.000,00	287.296.000,00	50.675.000,00	-80.751.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	OPD Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota		145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																			
			<i>Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia</i>				15 Dokumen	15 Dokumen	131.426.000,00	287.296.000,00	50.675.000,00	-80.751.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			145.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
J U M L A H									8.265.095.352,00	8.671.174.044,00	6.153.196.536,00	479.167.077.423,58								9.677.297.200,00	



15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.269.775.280,05	20.824.012.628,05	15.989.800.201,30	-279.975.078,75							19.307.216.909,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							16.269.775.280,05	20.824.012.628,05	15.989.800.201,30	-279.975.078,75							19.307.216.909,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	13.484.710.280,05	15.106.749.228,05	12.804.819.546,30	1.637.241.628,95							15.121.951.909,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	57.402.000,00	-92.598.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							5 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	9.652.500,00	-35.347.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	11.499.500,00	-38.500.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	36.250.000,00	-18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.566.877.131,00	11.117.494.079,05	11.077.665.389,30	1.510.788.258,30			-	-	-		11.461.746.360,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							744 Orang/ Bulan	744 Orang/ Bulan	8.316.377.131,00	9.866.994.079,05	9.866.994.079,30	1.550.616.948,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		9.411.246.360,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
							3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	4.836.790,00	-20.163.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
							12 Laporan	12 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	5.834.520,00	-19.665.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			25.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	10.919.860,00	-59.080.140,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							1 Laporan	1 Laporan	25.959.000,00	25.959.000,00	5.933.850,00	-20.025.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			25.959.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							1 Laporan	1 Laporan	44.041.000,00	44.041.000,00	4.986.010,00	-39.054.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			44.041.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	360.000.000,00	25.000.000,00	-325.000.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	260.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.880.893.000,00	2.354.430.800,00	780.590.387,00	-1.100.302.613,00			-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			2.054.181.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	12 Paket	44.495.600,00	44.495.600,00	22.217.300,00	-22.278.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			44.495.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	12 Paket	241.067.400,00	485.343.400,00	0,00	-241.067.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			241.067.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	-22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	6.250.000,00	-18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	3.500.000,00	-31.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			34.908.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	1.136.835.000,00	1.242.875.000,00	636.904.767,00	-499.930.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			1.146.835.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	268.495.000,00	391.716.800,00	79.218.320,00	-189.276.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			331.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.032.440.149,05	553.324.349,00	448.662.087,00	-583.778.062,05			-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			661.524.349,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	140.000.149,05	126.484.349,00	87.642.087,00	-52.358.062,05	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			126.484.349,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	892.440.000,00	426.840.000,00	361.020.000,00	-531.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			535.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	434.500.000,00	501.500.000,00	404.579.823,00	-29.920.177,00			-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			374.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	4 Unit	250.000.000,00	320.000.000,00	313.857.823,00	63.857.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35 Unit	35 Unit	24.500.000,00	21.500.000,00	10.735.000,00	-13.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			24.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	79.987.000,00	-80.013.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penangguhangan Kemiskinan Penangguhangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa 5 (lima) kerjasama				25 %	25 %	170.560.000,00	2.170.560.000,00	2.000.000.000,00	0,00							170.560.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan				25 %	25 %	170.560.000,00	2.170.560.000,00	2.000.000.000,00	1.829.440.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.560.000,00	2.170.560.000,00	2.000.000.000,00	1.829.440.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	1.438.745.000,00	1.389.531.000,00	472.319.275,00	85.400.000,00							1.524.145.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-				-	-	1.438.745.000,00	1.389.531.000,00	472.319.275,00	-966.425.725,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		1.524.145.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	101.500.000,00	101.505.000,00	21.591.880,00	-79.908.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	410.000.000,00	374.000.000,00	187.153.680,00	-222.846.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	474.240.000,00	461.016.000,00	120.403.215,00	-353.836.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			319.640.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	101.505.000,00	101.505.000,00	21.618.280,00	-79.886.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			101.505.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	101.500.000,00	101.505.000,00	21.552.220,00	-79.947.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	1.175.760.000,00	2.157.172.400,00	712.661.380,00	1.314.800.000,00							2.490.560.000,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.175.760.000,00	2.157.172.400,00	712.661.380,00	-463.098.620,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		2.490.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	220.730.000,00	220.730.000,00	5.243.950,00	-215.486.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagannya				1 Lembaga	1 Lembaga	255.030.000,00	1.236.442.400,00	530.927.080,00	275.897.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	152.453.710,00	-47.546.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			170.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	24.036.640,00	-475.963.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							500.000.000,00	495.000.000,00	64.461.120,00	-435.538.880,00							500.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							500.000.000,00	495.000.000,00	64.461.120,00	-435.538.880,00							500.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	500.000.000,00	495.000.000,00	64.461.120,00	0,00							500.000.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	500.000.000,00	495.000.000,00	64.461.120,00	-435.538.880,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																		
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	200.000.000,00	155.000.000,00	14.369.110,00	-185.630.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				1 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	200.000.000,00	163.000.000,00	8.499.400,00	-191.500.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	177.000.000,00	41.592.610,00	-58.407.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI
		J U M L A H							16.769.775.280,05	21.319.012.628,05	16.054.261.321,30	479.167.077.423,58							19.807.216.909,00	



16 DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							22.831.681.352,21	23.917.738.736,21	18.330.988.252,21	-4.500.693.100,00							29.376.342.633,26	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.831.681.352,21	23.917.738.736,21	18.330.988.252,21	-4.500.693.100,00							29.376.342.633,26	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.831.681.352,21	23.917.738.736,21	18.330.988.252,21	-4.500.693.100,00							29.376.342.633,26	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	18.526.681.352,21	19.612.738.736,21	17.174.097.932,21	5.174.661.281,05							23.701.342.633,26	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	86.386.315,00	-413.613.685,00							650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	25.837.875,00	-124.162.125,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.310.650,00	-24.689.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	35.237.790,00	-264.762.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.216.385.250,26	15.077.542.633,26	15.045.870.233,21	2.829.484.982,95							17.959.342.633,26	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	160 Orang/ Bulan	12.156.385.250,26	15.017.542.633,26	15.017.542.633,21	2.861.157.382,95	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Sabah Balau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		17.859.342.633,26	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.833.600,00	-6.166.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	24.494.000,00	-25.506.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00							10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	509.000.000,00	509.000.000,00	11.584.000,00	-497.416.000,00							680.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				153 Paket	153 Paket	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	-153.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	181.000.000,00	181.000.000,00	11.584.000,00	-169.416.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	887.000.000,00	862.000.000,00	148.964.111,00	-738.035.889,00							1.047.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	32.999.750,00	-47.000.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117 Laporan	117 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	115.964.361,00	-484.035.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	310.400.000,00	335.400.000,00	0,00	-310.400.000,00		-	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	-82.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	125.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	3.493.896.101,95	1.718.796.102,95	1.592.579.273,00	-1.901.316.828,95		-	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		1.925.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	-8.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	330.000.000,00	330.000.000,00	240.559.600,00	-89.440.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.151.896.101,95	1.376.796.102,95	1.348.419.673,00	-1.803.476.428,95	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	288.714.000,00	-311.286.000,00		-	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		830.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	60.330.000,00	-29.670.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				11 Unit	11 Unit	415.000.000,00	415.000.000,00	204.484.000,00	-210.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	23.900.000,00	3.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	1.116.159.630,00	900.000.000,00							4.225.000.000,00	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-				-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan Provinsi				100 persen	100 persen	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	486.799.020,00	-1.113.200.980,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		1.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				400 Unit	400 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	486.799.020,00	-1.013.200.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Pengajaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				100 persen	100 persen	625.000.000,00	625.000.000,00	21.891.550,00	-603.108.450,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi				7 Unit	27 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	21.891.550,00	-428.108.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Pasar Liwa Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni Kab. Lampung Tengah, Seputih Surabaya, Gaya Baru I Kab. Lampung Utara, Abung Selatan, Bandar Kagungan Raya Kab. Tulang Bawang, Menggala, Menggala Kota Kota Metro, Metro Barat, Mulyojati Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Gadingrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.03.0011		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terdistribusi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-				-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	36.288.760,00	-143.711.240,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		325.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0001		Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	1.874.130,00	-28.125.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	23.049.350,00	-46.950.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0005		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	11.365.280,00	-18.634.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05.0007		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				110 Unit	110 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Keselamatan di Jalan Provinsi				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100 persen	100 persen	575.000.000,00	575.000.000,00	538.636.875,00	-36.363.125,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	13.636.875,00	-36.363.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	32.543.425,00	-42.456.575,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	32.543.425,00	-42.456.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran				100 %	100 %	950.000.000,00	950.000.000,00	40.730.690,00	450.000.000,00							1.400.000.000,00	
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Perusahaan Jasa Pelayaran		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	800.000.000,00	800.000.000,00	21.078.490,00	-778.921.510,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Pengguna Transportasi		1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	21.078.490,00	-178.921.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	19.652.200,00	-80.347.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	Perusahaan Jasa Pelayaran		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.12.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				12 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	19.652.200,00	-80.347.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00							50.000.000,00	
	2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.06.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
J U M L A H									22.831.681.352,21	23.917.738.736,21	18.330.988.252,21	479.167.077.423,58							29.376.342.633,26	



17 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																			37.641.640.225,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.321.019.728,00	51.311.498.420,00	41.648.917.980,00	6.327.898.252,00								37.641.640.225,00		
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							34.665.143.328,00	50.505.622.020,00	41.529.592.720,00	6.864.449.392,00								36.933.870.005,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	14.902.016.328,00	20.129.673.420,00	16.922.103.370,00	1.314.770.327,00								16.216.786.655,00		
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-						125.000.000,00	150.000.000,00	38.841.360,00	-86.158.640,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-			126.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	45.000.000,00	55.000.000,00	13.808.970,00	-31.191.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi				47.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	40.000.000,00	10.479.950,00	-24.520.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi				31.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	45.000.000,00	55.000.000,00	14.552.440,00	-30.447.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi				47.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						10.816.571.828,00	16.757.750.520,00	15.472.314.760,00	4.655.742.932,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-			12.017.728.030,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan	10.760.763.928,00	13.211.942.620,00	11.972.086.400,00	1.211.322.472,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi				11.959.129.735,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi				0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	3.480.000.000,00	3.480.000.000,00	3.480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi				0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	12.634.900,00	17.634.900,00	6.361.010,00	-6.273.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi				13.266.645,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.173.000,00	18.173.000,00	5.009.530,00	-8.163.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			13.831.650,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	8.857.820,00	-21.142.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			31.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-						25.000.000,00	35.000.000,00	12.884.700,00	-12.115.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		26.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	7.113.760,00	-2.886.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	5.770.940,00	-9.229.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			15.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						160.000.000,00	210.000.000,00	17.443.550,00	-142.556.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		160.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.277.550,00	-6.722.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	200.000.000,00	14.166.000,00	-135.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							811.282.500,00	974.382.500,00	161.563.000,00	-649.719.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			851.846.625,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	6.000.000,00	-54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			63.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	3.450.000,00	-11.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			15.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00	-32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			47.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	134.100.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	6.500.000,00	-43.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	621.282.500,00	645.282.500,00	133.113.000,00	-488.169.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			652.346.625,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						150.000.000,00	247.448.000,00	0,00	-150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	150.000.000,00	247.448.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.090.300.000,00	890.540.000,00	903.340.000,00	-1.186.960.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		2.102.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.088.300.000,00	888.540.000,00	902.340.000,00	-1.185.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	723.862.000,00	864.552.400,00	315.716.000,00	-408.146.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		732.362.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				16 Unit	16 Unit	514.862.000,00	698.414.000,00	300.966.000,00	-213.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			514.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84 Unit	84 Unit	59.000.000,00	59.000.000,00	14.750.000,00	-44.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	107.138.400,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemrov. Lampung				100 %	100 %	9.449.127.000,00	17.514.127.000,00	15.059.081.800,00	526.456.350,00							9.975.583.350,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-						9.449.127.000,00	17.514.127.000,00	15.059.081.800,00	5.609.954.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		9.975.583.350,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				3 Laporan	3 Laporan	5.722.000.000,00	12.622.000.000,00	12.354.674.950,00	6.632.674.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			6.008.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				365 Konten	365 Konten	650.000.000,00	850.000.000,00	666.054.320,00	16.054.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				100 % Persentase	100 % Persentase	50.000.000,00	325.000.000,00	13.691.700,00	-36.308.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	100 Persentase	387.109.100,00	332.509.100,00	159.542.230,00	-227.566.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			406.464.555,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				16 Laporan	16 Laporan	1.477.127.000,00	1.552.127.000,00	936.199.190,00	-540.927.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			1.550.983.350,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				3 Komunitas	3 Komunitas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			136.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	20 Permohonan	150.000.000,00	150.000.000,00	42.763.590,00	-107.236.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	100.000.000,00	820.000.000,00	480.455.540,00	380.455.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	3 Media	812.890.900,00	762.490.900,00	405.700.280,00	-407.190.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			853.535.445,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Provinsi Lampung				100 %	100 %	10.314.000.000,00	12.861.821.600,00	9.548.407.550,00	427.500.000,00							10.741.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-						100.000.000,00	100.000.000,00	870.710,00	-99.129.290,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	870.710,00	-99.129.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-						10.214.000.000,00	12.761.821.600,00	9.547.536.840,00	-666.463.160,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		10.636.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				24 Aplikasi	42 Aplikasi	614.000.000,00	561.821.600,00	421.074.150,00	-192.925.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			644.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	2.587.210,00	-97.412.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				0 kabupate n/kota	0 kabupate n/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				6 Aplikasi	6 Aplikasi	150.000.000,00	150.000.000,00	145.288.470,00	-4.711.530,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			157.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	1.783.550,00	-98.216.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	8.889.650.000,00	-110.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			9.366.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																			
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				12 Aplikasi	12 Aplikasi	150.000.000,00	250.000.000,00	87.153.460,00	-62.846.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			152.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																			
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																			
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				48 perangkat daerah	48 perangkat daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							350.876.400,00	400.876.400,00	58.122.810,00	-292.753.590,00							380.420.220,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pengumpulan, pengolahan dan analisis data Statistik Sektoral di lingkup Provinsi Lampung				100 %	100 %	350.876.400,00	400.876.400,00	58.122.810,00	29.543.820,00							380.420.220,00		
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-						350.876.400,00	400.876.400,00	58.122.810,00	-292.753.590,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			380.420.220,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																			
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				0 Orang	0 Orang	70.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			73.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																			
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				0 Persentase	0 Persentase	100.000.000,00	100.000.000,00	49.692.600,00	-50.307.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																			
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				0 Persentase	0 Persentase	70.000.000,00	70.000.000,00	8.430.210,00	-61.569.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			73.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																			
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				0 Dokumen	0 Dokumen	50.876.400,00	50.876.400,00	0,00	-50.876.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			53.420.220,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				0 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							305.000.000,00	405.000.000,00	61.202.450,00	-243.797.550,00							327.350.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi				100 %	100 %	305.000.000,00	405.000.000,00	61.202.450,00	22.350.000,00							327.350.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-						270.000.000,00	370.000.000,00	61.202.450,00	-208.797.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		299.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	20.747.570,00	-79.252.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	18.513.290,00	-31.486.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	130.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			84.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	40.000.000,00	90.000.000,00	21.941.590,00	-18.058.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-						35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	-		28.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			28.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
J U M L A H									35.321.019.728,00	51.311.498.420,00	41.648.917.980,00	479.167.077.423,58							37.641.640.225,00	



18 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.757.368.968,96	22.659.649.352,96	15.789.112.960,80	-3.968.256.008,16							19.305.000.000,00				
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							19.757.368.968,96	22.659.649.352,96	15.789.112.960,80	-3.968.256.008,16							19.305.000.000,00				
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintah daerah di opd				90 %	90 %	12.377.291.968,96	18.625.249.352,96	15.232.712.960,80	57.708.031,04							12.435.000.000,00				
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				90 %	90 %	252.537.000,00	151.735.000,00	26.605.825,00	-225.931.175,00					Administrasi Umum Perkantoran		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	11 Dokumen	187.824.000,00	117.766.000,00	19.393.675,00	-168.430.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	64.713.000,00	33.969.000,00	7.212.150,00	-57.500.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah				90 %	90 %	9.809.256.877,34	13.998.814.261,34	13.937.509.861,34	4.128.252.984,00					Administrasi Umum Perkantoran		10.075.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		10.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ Bulan	187 Orang/ Bulan	9.734.256.877,34	13.923.814.261,34	13.923.814.261,34	4.189.557.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	5.541.120,00	-24.458.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.953.500,00	-12.046.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	5.200.980,00	-24.799.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				90 %	90 %	30.000.000,00	30.000.000,00	6.385.800,00	-23.614.200,00					Administrasi Umum Perkantoran		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	3.192.900,00	-11.807.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	3.192.900,00	-11.807.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				90 %	90 %	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-25.000.000,00					Administrasi Umum Perkantoran		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah				90 %	90 %	620.718.800,00	670.700.800,00	156.414.224,46	-464.304.575,54					Administrasi Umum Perkantoran		555.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	26.000.000,00	12.877.500,00	-13.122.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	2.748.300,00	-17.251.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	-11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	6.920.000,00	-13.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	149.038.800,00	149.038.800,00	25.554.942,91	-123.483.857,09	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.680.000,00	25.680.000,00	6.420.000,00	-19.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	414.982.000,00	98.143.481,55	-251.856.518,45	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 %	90 %	189.084.291,62	1.188.118.291,62	0,00	-189.084.291,62			-	-	Administrasi Umum Perkantoran		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	37.429.291,62	77.429.291,62	0,00	-37.429.291,62	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	101.655.000,00	1.060.689.000,00	0,00	-101.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				90 %	90 %	909.600.000,00	1.989.000.000,00	862.080.000,00	-47.520.000,00			-	-	Administrasi Umum Perkantoran		750.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	243.600.000,00	258.600.000,00	258.600.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	666.000.000,00	1.730.400.000,00	603.480.000,00	-62.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90 %	90 %	541.095.000,00	586.881.000,00	243.717.250,00	-297.377.750,00			-	-	Administrasi Umum Perkantoran		525.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	210.000.000,00	203.016.000,00	173.038.500,00	-36.961.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			210.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	9 Unit	216.095.000,00	193.465.000,00	55.678.750,00	-160.416.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	23 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	175.400.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam				32,79 %	32,79 %	350.000.000,00	600.000.000,00	5.600.000,00	270.000.000,00							620.000.000,00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin usaha simpan pinjam</i>				6,56 %	6,56 %	175.000.000,00	490.000.000,00	0,00	-175.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Koperasi		260.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				4 Unit Usaha	0 Unit Usaha	175.000.000,00	490.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			260.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase koperasi simpan pinjam yang difasilitasi pembuatan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam</i>				6,56 %	6,56 %	175.000.000,00	110.000.000,00	5.600.000,00	-169.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Koperasi		360.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	175.000.000,00	110.000.000,00	5.600.000,00	-169.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			360.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat terhadap aturan perkoperasian sesuai dengan undang-undang yang berlaku				5,08 %	5,08 %	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00							300.000.000,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan</i>				10,17 %	10,17 %	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Koperasi		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan				32,79 %	32,79 %	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Koperasi		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang memiliki katagori sehat				24,59 %	24,59 %	200.000.000,00	200.000.000,00	5.600.000,00	0,00							200.000.000,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi				54,10 %	54,10 %	200.000.000,00	200.000.000,00	5.600.000,00	-194.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Koperasi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	15 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	5.600.000,00	-194.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang meningkat kompetensi dan pengetahuannya				3,22 %	3,22 %	5.161.677.000,00	816.000.000,00	60.000.000,00	-1.161.677.000,00							4.000.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM koperasi yang dilatih dan ditingkatkan kompetensi dan pengetahuannya				20,21 %	20,21 %	5.161.677.000,00	816.000.000,00	60.000.000,00	-5.101.677.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Koperasi dan UMKM		4.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				762 Orang	140 Orang	5.161.677.000,00	816.000.000,00	60.000.000,00	-5.101.677.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			4.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya				5,08 %	5,08 %	350.000.000,00	725.000.000,00	5.600.000,00	300.000.000,00							650.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang difasilitasi melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi				6,78 %	6,78 %	350.000.000,00	725.000.000,00	5.600.000,00	-344.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Koperasi		650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				30 Unit Usaha	20 Unit Usaha	50.000.000,00	175.000.000,00	5.600.000,00	-44.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya				3 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	275.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	275.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang meningkat daya saing usahanya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, kemudahan perizinan dan fasilitasi usaha				1.71 %	1.71 %	600.000.000,00	975.000.000,00	255.600.000,00	-200.000.000,00							400.000.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemberdayaan usaha kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				2,57 %	2,57 %	600.000.000,00	975.000.000,00	255.600.000,00	-344.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	UMKM		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				50 Unit Usaha	20 Unit Usaha	400.000.000,00	500.000.000,00	255.600.000,00	-144.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>				30 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil																		
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				30 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000,00	475.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-				-	-	568.400.000,00	568.400.000,00	224.000.000,00	131.600.000,00							700.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	<i>Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>				3,77 %	3,77 %	568.400.000,00	568.400.000,00	224.000.000,00	-344.400.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan	UMKM		700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil																		
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				50 Unit Usaha	30 Unit Usaha	368.400.000,00	368.400.000,00	224.000.000,00	-144.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil																		
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				25 Unit Usaha	0 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
J U M L A H									19.757.368.968,96	22.659.649.352,96	15.789.112.960,80	479.167.077.423,58							19.305.000.000,00	



19

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	20.559.690.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.181.560.966,86	19.489.840.094,86	16.921.537.234,86	-3.260.023.732,00							20.559.690.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							20.181.560.966,86	19.489.840.094,86	16.921.537.234,86	-3.260.023.732,00							20.559.690.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi				100 %	100 %	17.854.360.966,86	18.489.840.094,86	16.785.130.004,86	1.005.329.033,14							18.859.690.000,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD				100 %	100 %	188.241.000,00	188.241.000,00	34.808.670,00	-153.432.330,00			-	Reformasi Birokrasi	-		188.241.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	88.241.000,00	88.241.000,00	14.505.980,00	-73.735.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		88.241.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	10.022.750,00	-39.977.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	10.279.940,00	-39.720.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan				100 %	100 %	14.177.070.966,86	15.055.190.094,86	14.975.027.494,86	797.956.528,00			-	Reformasi Birokrasi	-		15.093.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/ Bulan	117 Orang/ Bulan	14.084.070.966,86	14.962.190.094,86	14.954.030.094,86	869.959.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi	-		15.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	8.870.430,00	-26.129.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	9.689.280,00	-35.310.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	2.437.690,00	-10.562.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	3.702.500,00	-16.297.500,00			-	Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.236.080,00	-7.763.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.466.420,00	-8.533.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.394.000.000,00	1.542.010.000,00	794.731.340,00	-599.268.660,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.480.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	75.530.000,00	-4.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	169.391.000,00	-10.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	39.924.000,00	-160.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	77.064.200,00	27.064.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	301.750.000,00	301.750.000,00	135.597.240,00	-166.152.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	28.515.000,00	-41.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	512.250.000,00	660.260.000,00	268.709.900,00	-243.540.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.261.600.000,00	857.800.000,00	608.500.000,00	-653.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.265.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	216.400.000,00	216.400.000,00	216.100.000,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.045.200.000,00	641.400.000,00	392.400.000,00	-652.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.045.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	693.449.000,00	706.599.000,00	368.360.000,00	-325.089.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			693.449.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	543.449.000,00	556.599.000,00	256.348.000,00	-287.101.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			543.449.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	37.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	37.412.000,00	-12.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				200 Unit	200 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	37.100.000,00	-12.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Lampung				7,5 %	2,6 %	450.000.000,00	200.000.000,00	2.000.000,00	-50.000.000,00							400.000.000,00		
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan dokumen evaluasi pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal di Provinsi Lampung				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM, Peta Potensi Investasi dan Kajian terkait Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Lampung				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	150.000.000,00	2.000.000,00	-348.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																			
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				0 0	0 0	100.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000,00	-98.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peringkat Realisasi Investasi Nasional				19 Peringkat	26 Peringkat	200.000.000,00	120.000.000,00	6.366.430,00	0,00							200.000.000,00		
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Bermat Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah calon investor yang bermat menanamkan modalnya di Provinsi Lampung				5 Calon Investor	5 Calon Investor	200.000.000,00	120.000.000,00	6.366.430,00	-193.633.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaku Usaha		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	120.000.000,00	6.366.430,00	-193.633.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Tepat Waktu Kewenangan Daerah				100 %	100 %	525.000.000,00	531.000.000,00	128.040.800,00	200.000.000,00							725.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	525.000.000,00	531.000.000,00	128.040.800,00	-396.959.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pelaku Usaha		725.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	75.000.000,00	160.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	400.000.000,00	236.000.000,00	53.040.800,00	-346.959.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha				80 Kegiatan Usaha	80 Kegiatan Usaha	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM				75 Proyek	16000 Proyek	1.077.200.000,00	99.000.000,00	0,00	-777.200.000,00							300.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pengendalian pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di Provinsi Lampung				378 Pelaku Usaha	378 Pelaku Usaha	1.077.200.000,00	99.000.000,00	0,00	-1.077.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaku Usaha		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				17 Kegiatan usaha	17 Kegiatan usaha	300.000.000,00	99.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				11 Kegiatan usaha	11 Kegiatan usaha	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				350 Pelaku Usaha	350 Pelaku Usaha	617.200.000,00	0,00	0,00	-617.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Mutu Prosedur Pelayanan				BB Peringkat	BB Peringkat	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00							75.000.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Yang Dikembangkan				1 Buah Aplikasi	1 Buah Aplikasi	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	stakeholder		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J U M L A H									20.181.560.966,86	19.489.840.094,86	16.921.537.234,86	479.167.077.423,58							20.559.690.000,00	



20 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							61.693.252.616,45	89.263.439.782,45	71.363.490.173,72	9.670.237.557,27							0,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.693.252.616,45	89.263.439.782,45	71.363.490.173,72	9.670.237.557,27							0,00	
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							61.693.252.616,45	89.263.439.782,45	71.363.490.173,72	9.670.237.557,27							0,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	44.193.252.616,45	65.563.439.782,45	58.480.921.368,72	-44.193.252.616,45							0,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	48.766.900,00	-201.233.100,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	28.330.650,00	-121.669.350,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 laporan Laporan	3 laporan Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	20.436.250,00	-79.563.750,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	32.645.754.616,20	57.930.641.782,20	53.871.229.512,20	21.225.474.896,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				122 org/12 bulan Orang/ Bulan	122 org/12 bulan Orang/ Bulan	11.095.754.616,20	16.460.641.782,20	16.460.641.782,20	5.364.887.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	21.500.000.000,00	41.420.000.000,00	37.400.800.000,00	15.900.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	3.874.820,00	-16.125.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				25 Dokumen	25 Dokumen	15.000.000,00	30.000.000,00	5.912.910,00	-9.087.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	25.000.000,00	6.727.570,00	6.727.570,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	15.000.000,00	2.988.870,00	2.988.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	10.000.000,00	3.738.700,00	3.738.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	215.000.000,00	215.000.000,00	74.643.550,00	-140.356.450,00			-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	10.695.000,00	-19.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	185.000.000,00	185.000.000,00	63.948.550,00	-121.051.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.411.700.000,25	2.019.776.000,25	655.007.410,02	-1.756.692.590,23			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.711.700.000,25	1.344.776.000,25	361.060.310,02	-1.350.639.690,23	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	96.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	-22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	12.885.000,00	-47.115.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	425.000.000,00	143.784.100,00	-306.215.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	18.778.000,00	-11.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	220.000.000,00	220.000.000,00	86.863.776,50	-133.136.223,50			-	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PAJAK DAERAH	-	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	6 Unit	220.000.000,00	220.000.000,00	86.863.776,50	-133.136.223,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																				
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.721.500.000,00	3.143.724.000,00	3.126.716.650,00	-3.594.783.350,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	25.000.000,00	8.750.000,00	-61.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	790.000.000,00	790.000.000,00	790.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.791.500.000,00	2.258.724.000,00	2.257.966.650,00	-3.533.533.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.729.298.000,00	1.759.298.000,00	610.966.000,00	-1.118.332.000,00			-	-	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	7 Unit	587.298.000,00	587.298.000,00	524.466.000,00	-62.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				35 Unit	35 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	18.000.000,00	-54.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM				0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	68.500.000,00	-931.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	4.650.000.000,00	6.050.000.000,00	3.640.945.710,00	-4.650.000.000,00							0,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	-				-	-	3.550.000.000,00	4.950.000.000,00	3.303.273.195,00	-246.726.805,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	950.000.000,00	950.000.000,00	605.237.170,00	-344.762.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	3.400.000.000,00	2.647.088.490,00	647.088.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	50.947.535,00	-299.052.465,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	337.672.515,00	-762.327.485,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda																		
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penuguhan kemandirian ekonomi pemuda				100 % Persentase	100 % Persentase	850.000.000,00	850.000.000,00	291.124.780,00	-558.875.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				5 Organisasi	5 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	46.547.735,00	-203.452.265,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	12.650.000.000,00	17.450.000.000,00	9.211.351.350,00	-12.650.000.000,00							0,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-				-	-	4.185.000.000,00	7.185.000.000,00	2.074.158.350,00	-2.110.841.650,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus				0 Dokumen	0 Dokumen	685.000.000,00	685.000.000,00	394.270.850,00	-290.729.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																		
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				30 Unit	30 Unit	3.500.000.000,00	6.500.000.000,00	1.679.887.500,00	-1.820.112.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-				-	-	5.465.000.000,00	5.965.000.000,00	4.993.256.945,00	-471.743.055,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				160 Orang	160 Orang	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.874.216.235,00	-125.783.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	464.410.710,00	-535.589.290,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.465.000.000,00	1.965.000.000,00	1.654.630.000,00	189.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-				-	-	2.500.000.000,00	3.800.000.000,00	1.976.080.615,00	-523.919.385,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	200 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	292.314.205,00	-707.685.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				50 Orang	50 Orang	0,00	450.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	900.000.000,00	900.000.000,00	672.700.000,00	-227.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																		
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				50 Orang	50 Orang	600.000.000,00	1.450.000.000,00	636.066.410,00	36.066.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	167.855.440,00	-332.144.560,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				6 Dokumen	6 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	167.855.440,00	-332.144.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	30.271.745,00	-200.000.000,00							0,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	30.271.745,00	-169.728.255,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi																		
			<i>Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas</i>				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	30.271.745,00	-169.728.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Utara, Kupang Teba	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
J U M L A H									61.693.252.616,45	89.263.439.782,45	71.363.490.173,72	479.167.077.423,58						0,00		



21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.640.675.024,85	17.305.043.408,85	15.540.962.938,85	-99.712.086,00							20.094.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							14.835.675.024,85	16.607.372.408,85	15.374.927.878,85	539.252.854,00							18.984.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan				100 %	100 %	13.730.675.024,85	14.921.961.408,85	14.381.541.283,85	2.293.324.975,15							16.024.000.000,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja				100 %	100 %	110.000.000,00	110.000.000,00	24.437.180,00	-85.562.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	8.966.200,00	-31.033.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	8.973.460,00	-31.026.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	6.497.520,00	-23.502.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Data Keuangan, evaluasi Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah				100 %	100 %	11.704.575.024,85	12.860.932.408,85	12.780.609.508,85	1.076.034.484,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		12.600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan	11.604.575.024,85	12.780.932.408,85	12.764.612.408,85	1.160.037.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			12.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	39.920.000,00	7.967.300,00	-42.032.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	40.080.000,00	8.029.800,00	-41.970.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	3.589.295,00	-16.410.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	1.685.800,00	-8.314.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.903.495,00	-8.096.505,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur melalui pendidikan dan pelatihan				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	338.400.000,00	317.166.500,00	178.117.800,00	-160.282.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		1.524.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 0	0 0	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			974.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	5.120.000,00	-14.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.625.000,00	-6.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	49.960.500,00	49.960.500,00	-10.039.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	83.600.000,00	83.600.000,00	32.000.000,00	-51.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	110.800.000,00	99.606.000,00	80.412.300,00	-30.387.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.349.700.000,00	1.373.432.500,00	1.164.357.500,00	-185.342.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		1.250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	529.600.000,00	515.200.000,00	408.125.000,00	-121.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	820.100.000,00	858.232.500,00	756.232.500,00	-63.867.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						198.000.000,00	230.430.000,00	230.430.000,00	32.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		420.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	190.000.000,00	208.350.000,00	208.350.000,00	18.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	8.000.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	14.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP)				50 %	50 %	930.000.000,00	1.169.327.200,00	572.965.100,00	1.730.000.000,00							2.660.000.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah yang di Bina				50 %	50 %	650.000.000,00	691.175.400,00	332.509.450,00	-317.490.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		2.080.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	50.000.000,00	32.678.000,00	7.313.450,00	-42.686.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	23.438.000,00	5.834.370,00	-44.165.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0007	Pembangunan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				6 Layanan	6 Layanan	200.000.000,00	327.345.400,00	173.755.400,00	-26.244.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2510 Eksemplar	2510 Eksemplar	200.000.000,00	189.200.000,00	89.845.890,00	-110.154.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	150.000.000,00	118.514.000,00	55.760.340,00	-94.239.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Tingkat kegemaran Membaca				66,77 %	66,77 %	280.000.000,00	478.151.800,00	240.455.650,00	-39.544.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		580.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				15 0	15 0	230.000.000,00	230.000.000,00	31.153.850,00	-198.846.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	50.000.000,00	248.151.800,00	209.301.800,00	159.301.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Konten Lokal				65 %	65 %	175.000.000,00	516.083.800,00	420.421.495,00	125.000.000,00							300.000.000,00	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase bahan pustaka koleksi lokal yang terkumpul				70 Eksemplar	70 Eksemplar	100.000.000,00	441.083.800,00	404.668.600,00	304.668.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				15 Eksemplar	15 Eksemplar	100.000.000,00	441.083.800,00	404.668.600,00	304.668.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Terbitan dokumen KID dan Bibliografi				64 %	64 %	75.000.000,00	75.000.000,00	15.752.895,00	-59.247.105,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				55 Entry	55 Entry	75.000.000,00	75.000.000,00	15.752.895,00	-59.247.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							805.000.000,00	697.671.000,00	166.035.060,00	-638.964.940,00							1.110.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen arsip yang terpelihara				100 %	100 %	805.000.000,00	697.671.000,00	166.035.060,00	305.000.000,00							1.110.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase arsip dinamis yang dikelola				48 Laporan	48 Laporan	180.000.000,00	133.847.000,00	45.145.400,00	-134.854.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Kepatuhan Tata Kelola Arsip		260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				350 0	350 0	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				2000 Arsip	2000 Arsip	100.000.000,00	133.847.000,00	45.145.400,00	-54.854.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang dikelola				100 %	100 %	160.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Kepatuhan Tata Kelola Arsip		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																		
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				1 Arsip	1 Arsip	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				175 Arsip	175 Arsip	80.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang terbit arsip				100 %	100 %	465.000.000,00	453.824.000,00	120.889.660,00	-344.110.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Kepatuhan Tata Kelola Arsip		650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				140 Pengguna	140 Pengguna	30.000.000,00	77.984.000,00	33.370.000,00	3.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				48 Laporan	48 Laporan	435.000.000,00	375.840.000,00	87.519.660,00	-347.480.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
J U M L A H									15.640.675.024,85	17.305.043.408,85	15.540.962.938,85	479.167.077.423,58					20.094.000.000,00			



22 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							39.411.861.638,80	29.239.772.150,80	22.535.388.901,55	-16.876.472.737,25							41.649.222.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							39.411.861.638,80	29.239.772.150,80	22.535.388.901,55	-16.876.472.737,25							41.649.222.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	21.651.495.638,80	23.179.772.150,80	21.528.617.466,55	1.052.726.361,20							22.704.222.000,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	30.414.860,00	-129.585.140,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	13.897.185,00	-51.102.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	11.901.150,00	-38.098.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	3.037.825,00	-21.962.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	1.578.700,00	-18.421.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.257.173.107,80	17.797.649.619,80	17.731.995.484,55	2.474.822.376,75			-	Reformasi Birokrasi			15.425.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	171 Orang/ Bulan	15.207.173.107,80	17.747.649.619,80	17.723.169.619,55	2.515.996.511,75	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			15.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	4.732.290,00	-20.267.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	4.093.575,00	-20.906.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	55.000.000,00	6.445.175,00	-48.554.825,00			-	-			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	754.700,00	-14.245.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	5.690.475,00	-14.309.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	1.647.000,00	-13.353.000,00			-	Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	1.647.000,00	-13.353.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	7.260.000,00	-67.740.000,00			-	-			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				185 Paket	185 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	0 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	7.260.000,00	-22.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.340.100.531,00	1.390.100.531,00	135.592.747,00	-1.204.507.784,00			-	-			1.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	1.800.675,00	-13.199.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	3.938.250,00	-36.061.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	15.339.330,00	-44.660.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.257.150,00	-7.742.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	4.508.400,00	-85.491.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	24 Laporan	1.090.100.531,00	1.140.100.531,00	107.748.942,00	-982.351.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			1.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	130.000.000,00	130.000.000,00	1.724.200,00	-128.275.800,00			-	-			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	1.724.200,00	-78.275.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.979.222.000,00	2.907.022.000,00	3.175.328.000,00	-803.894.000,00			-	-	-		3.899.222.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	520.000.000,00	520.000.000,00	472.880.000,00	-47.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		475.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.459.222.000,00	2.387.022.000,00	2.702.448.000,00	-756.774.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		3.424.222.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	640.000.000,00	650.000.000,00	438.210.000,00	-201.790.000,00			-	-	-		1.050.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				30 Unit	30 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	435.210.000,00	-64.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	-27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	110.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-				-	-	640.000.000,00	640.000.000,00	147.815.470,00	80.000.000,00							720.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	430.000.000,00	430.000.000,00	92.940.680,00	-337.059.320,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		510.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				152096 Ha	152096 Ha	125.000.000,00	125.000.000,00	28.539.900,00	-96.460.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi				10 Ha	2 Ha	120.000.000,00	50.000.000,00	12.784.780,00	-107.215.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	12.616.000,00	-62.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	19.000.000,00	-41.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan																		
			Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	-	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	8.732.790,00	-51.267.210,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengeloaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				5 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	8.732.790,00	-51.267.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	46.142.000,00	-103.858.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	37.120.000,00	-37.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				3 Kelompok	3 Kelompok	75.000.000,00	75.000.000,00	9.022.000,00	-65.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	12.345.000.000,00	2.245.000.000,00	229.271.235,00	1.395.000.000,00							13.740.000.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-				-	-	825.000.000,00	725.000.000,00	52.552.665,00	-772.447.335,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		290.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	47.973.865,00	-302.026.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				100 Unit	25 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	829.400,00	-199.170.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				100 Unit	1000 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00	3.749.400,00	-271.250.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	9.219.000,00	-240.781.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	5.204.300,00	-44.795.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat				100 Unit	100 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	4.014.700,00	-195.985.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	320.000.000,00	320.000.000,00	53.191.355,00	-266.808.645,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																		
			Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				80 Persentase	80 Persentase	20.000.000,00	20.000.000,00	1.662.300,00	-18.337.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil																		
			Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	51.529.055,00	-248.470.945,00	-	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	10.550.000.000,00	650.000.000,00	73.004.985,00	-10.476.995.015,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		12.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan																			
			Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan				5 Pelabuhan Perikanan	5 Pelabuhan Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	6.347.300,00	-93.652.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	10.000.000.000,00	100.000.000,00	9.801.200,00	-9.990.198.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			12.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																			
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5 Layanan	1 Layanan	450.000.000,00	450.000.000,00	56.856.485,00	-393.143.515,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-				-	-	400.000.000,00	300.000.000,00	41.303.230,00	-358.696.770,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																			
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	400.000.000,00	300.000.000,00	41.303.230,00	-358.696.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	2.760.366.000,00	1.270.000.000,00	273.522.560,00	-820.366.000,00							1.940.000.000,00		
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	7.500.000,00	-32.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	40.000.000,00	40.000.000,00	7.500.000,00	-32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	730.000.000,00	696.698.000,00	83.930.000,00	-646.070.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	216.698.000,00	68.230.000,00	-181.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				5 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	1.440.000,00	-48.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	14.260.000,00	-65.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan																		
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan				15 Unit	0 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	1.990.366.000,00	533.302.000,00	182.092.560,00	-1.808.273.440,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		1.250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit	1 Unit	500.000.000,00	533.302.000,00	182.092.560,00	-317.907.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	1.490.366.000,00	0,00	0,00	-1.490.366.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TE MATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANJIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-				-	-	665.000.000,00	665.000.000,00	65.410.000,00	135.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	590.000.000,00	590.000.000,00	65.410.000,00	-524.590.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi																		
			<i>Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani</i>				1 Perkara	1 Perkara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			<i>Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan</i>				24 Hari Operasi	20 Hari Operasi	135.000.000,00	248.000.000,00	39.180.000,00	-95.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			<i>Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat</i>				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	112.000.000,00	8.000.000,00	-67.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			85.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			<i>Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																		
			<i>Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30.000.000,00	110.000.000,00	8.494.000,00	-21.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				100 Kelompok Masyarakat	50 Kelompok Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	9.736.000,00	-110.264.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah																		
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan				2 Forum	2 Forum	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	-		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				20 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				20 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				20 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	1.350.000.000,00	1.240.000.000,00	290.752.170,00	395.000.000,00							1.745.000.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	145.000.000,00	210.000.000,00	18.329.250,00	-126.670.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	170.000.000,00	2.780.000,00	-72.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri																		
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	40.000.000,00	40.000.000,00	15.549.250,00	-24.450.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	555.000.000,00	580.000.000,00	195.506.500,00	-359.493.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				3 Kegiatan	2 Kegiatan	480.000.000,00	480.000.000,00	195.506.500,00	-284.493.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Kegiatan	0 Kegiatan	75.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	650.000.000,00	450.000.000,00	76.916.420,00	-573.083.580,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	61.138.420,00	-88.861.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi</i>				10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	500.000.000,00	300.000.000,00	15.778.000,00	-484.222.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
J U M L A H									39.411.861.638,80	29.239.772.150,80	22.535.388.901,55	479.167.077.423,58							41.649.222.000,00	



23

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							21.779.612.318,88	27.476.180.356,88	16.140.309.286,88	-5.639.303.032,00							22.368.289.318,88			
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							21.779.612.318,88	27.476.180.356,88	16.140.309.286,88	-5.639.303.032,00							22.368.289.318,88			
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	14.830.235.218,88	16.926.803.256,88	13.721.266.496,88	37.935.100,00							14.868.170.318,88			
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	225.000.000,00	163.000.000,00	-62.000.000,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			225.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	98.000.000,00	-52.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.734.034.618,88	10.860.630.656,88	10.860.630.656,88	2.126.596.038,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			8.734.034.618,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			8.659.034.618,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/ Bulan	117 Orang/ Bulan	8.659.034.618,88	10.785.630.656,88	10.785.630.656,88	2.126.596.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				8.659.034.618,88	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.450.000,00	75.450.000,00	41.362.500,00	-34.087.500,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			76.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	17 Orang	45.450.000,00	45.450.000,00	11.362.500,00	-34.087.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			46.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.094.921.600,00	2.564.361.600,00	782.738.640,00	-1.312.182.960,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			2.148.433.700,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.873.400,00	18.873.400,00	9.436.700,00	-9.436.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	100.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.979.800,00	34.979.800,00	8.744.950,00	-26.234.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			43.401.300,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.000.000,00	47.000.000,00	5.609.000,00	-41.391.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			47.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	86.780.000,00	-83.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			170.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.714.068.400,00	2.033.508.400,00	669.667.990,00	-1.044.400.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			1.763.032.400,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	116.127.000,00	366.127.000,00	0,00	-116.127.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	116.127.000,00	366.127.000,00	0,00	-116.127.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.672.702.000,00	1.414.274.000,00	1.177.616.200,00	-1.495.085.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			2.672.702.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	392.226.000,00	392.226.000,00	192.225.200,00	-200.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			392.226.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.280.476.000,00	1.022.048.000,00	985.391.000,00	-1.295.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.280.476.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	892.000.000,00	1.400.960.000,00	675.918.500,00	-216.081.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			892.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	700.000.000,00	610.960.000,00	495.052.500,00	-204.947.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	152.000.000,00	750.000.000,00	155.866.000,00	3.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			152.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kualitas daya tarik destinasi pariwisata yang ditingkatkan				100 %	100 %	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	107.000.000,00	75.000.000,00							1.715.000.000,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase kawasan daya tarik wisata daerah yang difasilitasi pengembangannya				100 %	100 %	400.000.000,00	412.000.000,00	0,00	-400.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				8 Lokasi	0 Lokasi	400.000.000,00	412.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase kawasan destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi pengembangannya				100 %	100 %	1.115.000.000,00	1.103.000.000,00	107.000.000,00	-1.008.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Sadar Wisata		1.115.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	108.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	0 Unit	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			215.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Lokasi	0 Lokasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				490 Orang	100 Orang	650.000.000,00	630.000.000,00	107.000.000,00	-543.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase usaha pariwisata yang dilakukan pembinaan serta fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha				100 %	100 %	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaku Industri Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				50 Usaha	50 Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			125.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan				100 %	100 %	2.500.000.000,00	4.200.000.000,00	1.371.000.000,00	0,00							2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase peningkatan promosi pariwisata				100 %	100 %	2.500.000.000,00	4.200.000.000,00	1.371.000.000,00	-1.129.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Dokumen	8 Dokumen	2.100.000.000,00	3.800.000.000,00	1.371.000.000,00	-729.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			2.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	0 Kegiatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	978.097.100,00	1.578.097.100,00	219.356.000,00	154.421.900,00							1.132.519.000,00	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-				-	-	746.097.100,00	1.246.097.100,00	219.356.000,00	-526.741.100,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		850.519.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik																		
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				1 Dokumen	1 Dokumen	746.097.100,00	1.246.097.100,00	219.356.000,00	-526.741.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			850.519.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	232.000.000,00	332.000.000,00	0,00	-232.000.000,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		282.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah																		
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			155.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				75 Orang	0 Orang	77.000.000,00	177.000.000,00	0,00	-77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			77.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	1.831.280.000,00	3.131.280.000,00	721.686.790,00	321.320.000,00							2.152.600.000,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-				-	-	1.407.700.000,00	1.407.700.000,00	620.286.790,00	-787.413.210,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		1.677.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	0 Orang	277.700.000,00	277.700.000,00	0,00	-277.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			277.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																				
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				210 Orang	60 Orang	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	620.286.790,00	-509.713.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			1.400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	423.580.000,00	1.723.580.000,00	101.400.000,00	-322.180.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			474.900.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																				
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				200 Orang	50 Orang	423.580.000,00	1.723.580.000,00	101.400.000,00	-322.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			474.900.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
J U M L A H									21.779.612.318,88	27.476.180.356,88	16.140.309.286,88	479.167.077.423,58						22.368.289.318,88		



24 DINAS PERKEBUNAN



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERKEBUNAN							25.341.489.991,32	27.970.071.351,32	21.911.493.546,00	-3.429.996.445,32							32.068.810.030,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							25.341.489.991,32	27.970.071.351,32	21.911.493.546,00	-3.429.996.445,32							32.068.810.030,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							25.341.489.991,32	27.970.071.351,32	21.911.493.546,00	-3.429.996.445,32							32.068.810.030,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	17.593.047.491,32	17.686.360.311,32	16.795.618.957,00	2.050.806.602,68							19.643.854.094,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	255.698.337,92	259.331.237,92	68.829.884,00	-186.868.453,92			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan		450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	7 Dokumen	104.698.337,92	125.537.237,92	37.624.574,00	-67.073.763,92	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	56.000.000,00	45.820.000,00	9.140.160,00	-46.859.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	2 Data	95.000.000,00	87.974.000,00	22.065.150,00	-72.934.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan		150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.911.911.153,40	15.255.058.973,40	15.214.491.673,00	1.302.580.519,60			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Aparatur Sipil Negara	15.598.854.094,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ Bulan	121 Orang/ Bulan	13.865.238.653,40	15.218.136.473,40	15.209.976.473,00	1.344.737.819,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan		15.543.854.094,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	46.672.500,00	36.922.500,00	4.515.200,00	-42.157.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan		55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	MLAH PELAYANAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				2 dokumen	2 dokumen	50.000.000,00	44.500.000,00	5.644.850,00	-44.355.150,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemerintah Provinsi Lampung	55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	44.500.000,00	5.644.850,00	-44.355.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan		55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	24.000.000,00	0,00	-30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pembangunan ekonomi dan pemerataan Pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Aparatur Sipil Negara	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				106 Orang	1 Orang	30.000.000,00	24.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	941.956.000,00	743.288.100,00	222.938.100,00	-719.017.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung		945.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	825.000,00	-19.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	11.000.000,00	2.750.000,00	-32.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.300.000,00	55.300.000,00	2.052.000,00	-43.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	129.000.000,00	17.459.200,00	-87.540.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	11.250.000,00	-33.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			60.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	691.656.000,00	482.988.100,00	188.601.900,00	-503.054.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-350.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	200.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.146.980.000,00	743.680.000,00	1.012.733.700,00	-134.246.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	1.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3.27.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	260.000.000,00	182.499.700,00	-87.500.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			280.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	876.980.000,00	483.680.000,00	830.234.000,00	-46.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			920.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	906.502.000,00	606.502.000,00	270.980.750,00	-635.521.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	995.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3.27.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya				24 Unit	24 Unit	521.502.000,00	521.502.000,00	258.480.750,00	-263.021.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			475.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	12 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			15.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			430.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				85 Unit	19 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00	-37.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			75.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	575.000.000,00	828.871.000,00	415.403.180,00	474.455.936,00							1.049.455.936,00	
3.27.02.1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-				-	-	150.000.000,00	403.871.000,00	298.682.450,00	148.682.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan	208.455.936,00	DINAS PERKEBUNAN	
3.27.02.1.01.0001		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	403.871.000,00	298.682.450,00	148.682.450,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			208.455.936,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah pengawasan mutu dan penyediaan benih/bibit perkebunan</i>				2 dokumen	2 dokumen	425.000.000,00	425.000.000,00	116.720.730,00	-308.279.270,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan		841.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																			
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				30 Sertifikat	30 Sertifikat	175.000.000,00	175.000.000,00	61.923.730,00	-113.076.270,00	-	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			316.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																			
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				2 laporan	2 laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	54.797.000,00	-195.203.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			525.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	3.385.880.000,00	5.964.165.000,00	3.655.196.210,00	2.799.120.000,00							6.185.000.000,00		
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	3.385.880.000,00	5.964.165.000,00	3.655.196.210,00	269.316.210,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan		6.185.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																			
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				16 Dokumen	16 Dokumen	2.725.000.000,00	5.484.165.000,00	3.505.827.260,00	780.827.260,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DBH SAWIT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			5.520.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																			
			<i>Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara</i>				3 Unit	2 Unit	260.880.000,00	80.000.000,00	0,00	-260.880.000,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan			315.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	149.368.950,00	-250.631.050,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	550.000.000,00	550.000.000,00	198.343.865,00	165.000.000,00							715.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	550.000.000,00	550.000.000,00	198.343.865,00	-351.656.135,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan		715.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				150 Ha	100 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00	109.700.410,00	-190.299.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				50 Ha	50 Ha	100.000.000,00	100.000.000,00	31.836.005,00	-68.163.995,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			155.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50 Ha	50 Ha	150.000.000,00	150.000.000,00	56.807.450,00	-93.192.550,00	Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			160.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	62.596.780,00	-35.000.000,00							215.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	62.596.780,00	-187.403.220,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan		215.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>				1 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	62.596.780,00	-187.403.220,00	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mesuji, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tulang Bawang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			215.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	2.987.562.500,00	2.690.675.040,00	784.334.554,00	1.272.937.500,00							4.260.500.000,00		
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	2.887.562.500,00	2.590.675.040,00	784.334.554,00	-2.103.227.946,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan		3.710.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																			
			<i>Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>				1 Dokumen	5 Dokumen	2.637.562.500,00	2.340.675.040,00	784.334.554,00	-1.853.227.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DBH SAWIT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			3.410.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																			
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				10 Kelompok	9 Kelompok	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Way Kanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kelompok Tani Perkebunan		550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																			
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			550.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
J U M L A H									25.341.489.991,32	27.970.071.351,32	21.911.493.546,00	479.167.077.423,58								32.068.810.030,00	



25 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							30.069.084.327,16	34.903.751.275,16	25.968.575.810,45	-4.100.508.516,71							35.409.199.427,16	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							30.069.084.327,16	34.903.751.275,16	25.968.575.810,45	-4.100.508.516,71							35.409.199.427,16	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	20.819.084.327,16	22.898.283.275,16	21.831.758.240,45	393.756.500,00							21.212.840.827,16	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi				100 %	100 %	278.943.500,00	278.943.500,00	55.662.605,00	-223.280.895,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	15 Dokumen	138.943.500,00	138.943.500,00	31.231.350,00	-107.712.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	8.371.575,00	-41.628.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	11 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	16.059.680,00	-73.940.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada				100 %	100 %	18.393.008.227,49	20.202.825.175,49	20.193.975.010,49	1.800.966.783,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			18.418.008.227,49	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/ Bulan	167 Orang/ Bulan	18.383.008.227,49	20.192.825.175,49	20.192.825.175,49	1.809.816.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			18.383.008.227,49	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.149.835,00	-8.850.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Yang Ada				100 %	100 %	15.000.000,00	55.000.000,00	3.854.000,00	-11.146.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	55.000.000,00	3.854.000,00	-11.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	22.500.000,00	22.440.000,00	5.610.000,00	-16.890.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				135 Orang	167 Orang	22.500.000,00	22.440.000,00	5.610.000,00	-16.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	494.832.599,67	500.659.599,67	159.023.624,96	-335.808.974,71			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			534.832.599,67	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.994.300,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	90.000.000,00	39.922.000,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	22.714.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	24.476.299,67	6.119.074,96	-17.880.925,04	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			24.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.111.000,00	1.527.750,00	-18.472.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	310.832.599,67	353.442.000,00	141.376.800,00	-169.455.799,67	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			310.832.599,67	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	884.800.000,00	845.942.000,00	792.802.500,00	-91.997.500,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	393.000.000,00	373.000.000,00	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			330.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	564.800.000,00	452.942.000,00	419.802.500,00	-144.997.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			570.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	730.000.000,00	992.473.000,00	620.830.500,00	-109.169.500,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		920.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				39 Unit	39 Unit	620.000.000,00	861.603.000,00	568.113.000,00	-51.887.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			620.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	30.000.000,00	50.870.000,00	12.717.500,00	-17.282.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak di Provinsi Lampung				2497131 ST	2497131 ST	7.645.500.000,00	7.445.500.000,00	3.069.690.295,00	1.320.858.600,00							8.966.358.600,00	
3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelahiran Ternak Kambing di UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Jumlah Ternak Kambing yang Memiliki Surat Keterangan Layak Bibit di Provinsi Lampung				40 Ekor 50 Ekor	40 Ekor 50 Ekor	800.000.000,00	800.000.000,00	650.000.000,00	-150.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	UPTD		800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.03.0003		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	650.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Gedung Tataan, Negeri Sakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok yang Difasilitasi Alat dan Mesin Peternakan untuk Menunjang Penyediaan Pakan Jumlah Kelompok yang Difasilitasi untuk Mampu Mandiri Pakan Jumlah Kelompok yang Difasilitasi untuk Menerapkan Teknologi Pengolahan Pakan Jumlah Pengujian Sampel Pakan/Bahan Pakan di UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan Jumlah Produk Pakan yang Beredar Seusai SNI				3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 5 Produk 60 Sampel	3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 5 Produk 60 Sampel	690.000.000,00	690.000.000,00	261.602.345,00	-428.397.655,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	UPTD dan Kelompok Tani		1.950.858.600,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.04.0001		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	560.000.000,00	560.000.000,00	145.552.665,00	-414.447.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			1.450.858.600,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.04.0004		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	1 laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	116.049.680,00	-13.950.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyediaan Bibit Ternak Nor-Ruminansia di Kelompok Ternak Jumlah Populasi Ternak Sapi di UPTD Pembibitan Ternak Sapi Jumlah Produksi Semen Baku Berkualitas SNI Persentase Terlaksananya Pengawasan Benih/Bibit Ternak Sesuai Target				100 % 180 Ekor 500 Ekor 550 Ekor 80000 Straw	100 % 1500 Ekor 180 Ekor 50000 Straw	6.130.500.000,00	5.930.500.000,00	2.150.000.000,00	-3.980.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-		6.165.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05.0003		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	21.805.000,00	-3.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05.0004		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				2 laporan	2 laporan	2.400.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Campang Tiga Kab. Lampung Tengah, Terbanggi Besar, Poncowati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			2.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.05.0005		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1 Dokumen	1 Dokumen	3.705.500.000,00	3.405.500.000,00	128.195.000,00	-3.577.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			3.705.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Penambahan Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Syarat				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	8.087.950,00	-16.912.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Distributor Obat Hewan		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.02.1.06.0001		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	8.087.950,00	-16.912.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Capaian Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana yang Sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	130.000.000,00	2.735.468.000,00	6.945.790,00	2.545.000.000,00							2.675.000.000,00	
3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Kawasan Komoditas Peternakan yang Terfasilitasi Jumlah Penyediaan Prasarana untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase Capaian Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan UPTD Sesuai Kebutuhan				100 % 1 Dokumen 2 Unit	100 % 1 Dokumen 2 Unit	130.000.000,00	2.735.468.000,00	6.945.790,00	-123.054.210,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	UPTD dan Kelompok Tani		2.675.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03.1.01.0001		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	6.945.790,00	-123.054.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			575.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03.1.01.0010		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	2.605.468.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			2.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03.1.01.0016		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH Persentase Derajat Kesehatan Ternak di Wilayah Provinsi Lampung				15 87 %	15 87 %	965.000.000,00	1.315.000.000,00	909.811.135,00	355.000.000,00							1.320.000.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan oleh UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				30 % 5000 Ekor	30 % 5000 Ekor	450.000.000,00	600.000.000,00	451.199.370,00	1.199.370,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	UPTD, Peternak, Hewan Kesayangan		600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan					1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	350.000.000,00	339.752.560,00	139.752.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	111.446.810,00	-138.553.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-				-	-	90.000.000,00	90.000.000,00	32.836.270,00	-57.163.730,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Peternak dan Unit Usaha Peternakan		115.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	25.858.070,00	-39.141.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			65.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	6.978.200,00	-18.021.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Penambahan Puskesmas yang Memenuhi Standar Jumlah Penambahan Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Jumlah Pengujian Sampel (Feses, Darah, Kerokan Kulit, Kotoran Telinga, Urin, Organoleptik (Susu, Daging, Telur, Produk Olahan), Boraks, Formalin, Kandungan Babi, Bangkai Ayam, Uji Alkohol (Susu Segar)) Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan Jumlah Produk Hewan yang Terdaftar di Kementerian Pertanian Terlaksananya Kampanye Gizi Produk Peternakan				10 Unit 1 Produk 200 Sampel 2 Produk 2 Unit 3 Kegiatan	10 Unit 1 Produk 200 Sampel 2 Produk 2 Unit 3 Kegiatan	425.000.000,00	625.000.000,00	425.775.495,00	775.495,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Peternak dan Unit Usaha Peternakan		575.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				15 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	35.953.370,00	-64.046.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	30.431.115,00	-19.568.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	250.000.000,00	250.040.000,00	200.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan																		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan				200 Orang	100 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan																		
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan				1 Produk	1 Produk	25.000.000,00	25.000.000,00	9.351.010,00	-15.648.990,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan																		
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Izin Usaha Sesuai Target				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	30.370.350,00	100.000.000,00							200.000.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Penerapan Izin Usaha Pertanian (PIRT/NIB)				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.370.350,00	-69.629.650,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Peternak dan Unit Usaha Peternakan		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.370.350,00	-69.629.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	409.500.000,00	409.500.000,00	120.000.000,00	625.500.000,00							1.035.000.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Informasi Harga dan Supply Demand Komoditas Peternakan Jumlah Dokumen Promosi Produk Peternakan Jumlah Kelompok Ternak Implementasi dan Pemantapan Kartu Petani Berjaya Jumlah Laporan Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Jumlah Laporan Pembinaan dan Pendampingan Akses Pembiayaan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pendampingan Kemitraan Usaha Peternakan				1 Dokumen 1 Laporan 50 Kelompok	1 Dokumen 1 Laporan 50 Kelompok	409.500.000,00	409.500.000,00	120.000.000,00	-289.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Peternak dan Unit Usaha Peternakan		800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					1 Dokumen	1 Dokumen	259.500.000,00	259.500.000,00	80.000.000,00	-179.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				50 Kelompok	20 Kelompok	150.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			175.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			75.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
J U M L A H									30.069.084.327,16	34.903.751.275,16	25.968.575.810,45	479.167.077.423,58							35.409.199.427,16	



26

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.900.000.000,00	13.829.878.000,00	738.980.000,00	-2.161.020.000,00							3.542.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2.900.000.000,00	13.829.878.000,00	738.980.000,00	-2.161.020.000,00							3.542.000.000,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berguna				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00							155.000.000,00	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah lumbung pangan yang terbina				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00							155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-				155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-				0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan				91.2 %	91.2 %	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	20.740.000,00	295.000.000,00							1.795.000.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen prognosa dan harga pangan				3 laporan	3 laporan	200.000.000,00	150.000.000,00	20.740.000,00	-179.260.000,00					15 kab/kota		306.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	20.740.000,00	-79.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi lampung				30 ton	30 ton	400.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-400.000.000,00					15 kab/kota		412.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara				25 Ton	0 Ton	400.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			412.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah promosi dan sosialisasi B2SA				1 dokumen	1 dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	15 kab/kota	1.077.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Pengenakargaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Jumlah Promosi Pengenakargaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	0 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		927.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				100 %	100 %	300.000.000,00	250.000.000,00	0,00	9.000.000,00							309.000.000,00		
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase daerah rencana rawan pangan				1 dokumen	1 dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-300.000.000,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-	309.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis		309.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji.				100 %	100 %	250.000.000,00	11.429.878.000,00	14.140.000,00	157.500.000,00							407.500.000,00		
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji				100 %	100 %	250.000.000,00	11.429.878.000,00	14.140.000,00	-235.860.000,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	-	407.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																			
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				400 Sertifikat	0 Sertifikat	150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan		154.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	14.140.000,00	-85.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan		103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.079.878.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMPERATIF PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	44.595.554.696,00	46.336.712.080,00	43.928.170.952,00	2.380.964.197,80							46.976.518.893,80	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						3.740.040.000,00	2.129.040.000,00	1.893.000.000,00	-1.847.040.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			3.852.241.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	700.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			824.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						1.248.042.000,00	1.368.042.000,00	284.660.000,00	-963.382.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.883.525.260,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	4 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	4.100.000,00	-45.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			51.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							56.944.649.688,75	61.694.716.072,75	54.476.576.952,00	-2.468.072.736,75							75.433.926.736,33	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							56.944.649.688,75	61.694.716.072,75	54.476.576.952,00	-2.468.072.736,75							75.433.926.736,33	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen pelaksanaan tahapan perencanaan dan evaluasi kinerja PD				2 Dokumen	2 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	11.307.667,00	-123.692.333,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			139.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	5.406.772,00	-54.593.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			61.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	5.900.895,00	-69.099.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			77.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib				100 %	100 %	38.087.472.696,00	41.434.630.080,00	41.356.901.180,00	3.269.428.484,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			38.180.152.433,80	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				316 Orang/ Bulan	316 Orang/ Bulan	38.027.472.696,00	41.374.630.080,00	41.346.630.080,00	3.319.157.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			38.118.352.433,80	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	2.653.100,00	-12.346.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			15.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	2.548.000,00	-12.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			15.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			15.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	2.670.000,00	-12.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			15.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				4 dokumen	4 dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	14.656.800,00	-25.343.200,00		-		Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			41.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	7.353.400,00	-12.646.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			20.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	7.303.400,00	-12.696.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			20.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan pendapatan asli daerah DKPTPH				1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	7.355.240,00	-12.644.760,00		-		Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			20.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	7.355.240,00	-12.644.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			20.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00		-		Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			176.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			51.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						1.275.000.000,00	1.160.000.000,00	360.290.065,00	-914.709.935,00		-		Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.683.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	17.495.500,00	-17.504.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			36.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			41.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	65.000.000,00	20.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			72.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	70.000.000,00	7.000.000,00	-73.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			82.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	4.950.000,00	-45.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			51.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	900.000.000,00	290.844.565,00	-709.155.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.050.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.740.040.000,00	2.129.040.000,00	1.893.000.000,00	-1.847.040.000,00							3.852.241.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.940.040.000,00	1.329.040.000,00	1.193.000.000,00	-1.747.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			3.028.241.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						1.248.042.000,00	1.368.042.000,00	284.660.000,00	-963.382.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			2.883.525.260,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				67 Unit	67 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.198.042.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				0 Unit	0 Unit	1.198.042.000,00	1.198.042.000,00	280.560.000,00	-917.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.233.983.260,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	0 Unit	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.				2 %	2 %	929.000.000,00	1.629.000.000,00	116.138.000,00	4.777.870.000,00							5.706.870.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	<i>Jumlah laporan peredaran sarana pertanian</i>				1 laporan	1 laporan	379.000.000,00	1.079.000.000,00	52.660.000,00	-326.340.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	15 kab/kota		4.890.370.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			4.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	379.000.000,00	1.079.000.000,00	52.660.000,00	-326.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			390.370.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>				3 laporan	3 laporan	550.000.000,00	550.000.000,00	63.478.000,00	-486.522.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	15 kab/kota		566.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>				50 Sertifikat	0 Sertifikat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			154.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran & tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				1 laporan	0 laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			51.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>				0 Batang	0 Batang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek																		
			<i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak</i>				0 Setek	0 Setek	100.000.000,00	100.000.000,00	17.832.000,00	-82.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				0 Ton	0 Ton	150.000.000,00	150.000.000,00	45.646.000,00	-104.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			154.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme																		
			Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai				10 Varietas Unggul Baru (VUB)	10 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung Ubi Kayu) dan Hortikultura (Cabai Besar, Bawang Merah, Pisang dan Nanas)				100 %	100 %	10.520.094.992,75	12.829.003.992,75	10.698.528.000,00	10.975.602.849,78							21.495.697.842,53	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.				100 %	100 %	10.520.094.992,75	12.829.003.992,75	10.698.528.000,00	178.433.007,25			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			21.495.697.842,53	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian																		
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				15 Dokumen	15 Dokumen	1.384.000.000,00	11.794.000.000,00	10.533.480.000,00	9.149.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			11.425.520.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	935.000.000,00	560.000.000,00	0,00	-935.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			963.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian																		
			Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	150.000.000,00	34.580.000,00	-65.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			103.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	205.003.992,75	205.003.992,75	50.468.000,00	-154.535.992,75	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			211.154.112,53	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	7.896.091.000,00	0,00	0,00	-7.896.091.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			8.132.973.730,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				18 Unit	18 Unit	0,00	120.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Rasio Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 %	100 %	400.000.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00							412.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 hektar	100 hektar	400.000.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00	-340.000.000,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	15 kab/kota	412.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	50 Ha	400.000.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00	-340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			412.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kelompok Petani Melalui Penyuluhan				15000 Kelompok	15000 Kelompok	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	377.840.000,00	368.340.000,00							1.718.340.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan				0 unit	0 unit	0,00	0,00	177.840.000,00	177.840.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM	15 kab/kota	177.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	39 Orang	0,00	0,00	177.840.000,00	177.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			177.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Dokumen Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				1 dokumen	1 dokumen	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	200.000.000,00	-1.150.000.000,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			1.390.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			154.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				40 Kelompok	10 Kelompok	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			1.236.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan kualitas hidup SDM Peningkatan kualitas hidup SDM			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG
J U M L A H									59.844.649.688,75	75.524.594.072,75	55.215.556.952,00	479.167.077.423,58							78.975.926.736,33	



27 DINAS KEHUTANAN



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEHUTANAN							71.103.378.387,85	72.465.195.335,85	65.320.924.366,43	-5.782.454.021,42							78.213.716.227,14	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							71.103.378.387,85	72.465.195.335,85	65.320.924.366,43	-5.782.454.021,42							78.213.716.227,14	
3.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							71.103.378.387,85	72.465.195.335,85	65.320.924.366,43	-5.782.454.021,42							78.213.716.227,14	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	65.871.632.087,85	66.910.449.035,85	64.572.182.693,43	6.587.163.209,29							72.458.795.297,14	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Pangangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	20.036.680,00	-64.963.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		93.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	10.554.900,00	-34.445.100,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		49.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	9.481.780,00	-30.518.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		44.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	59.855.540.042,85	60.687.356.990,85	60.643.950.091,43	788.410.048,58			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	65.841.094.047,14	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				513 Orang/ Bulan	513 Orang/ Bulan	59.833.287.542,85	60.665.104.490,85	60.637.624.491,43	804.336.948,58	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		65.816.616.297,14	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.252.500,00	22.252.500,00	6.325.600,00	-15.926.900,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		24.477.750,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	262.300,00	-44.737.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	49.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	262.300,00	-44.737.700,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		49.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.377.881.045,00	1.377.881.045,00	518.370.687,00	-859.510.358,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	1.515.669.150,00	DINAS KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.28.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	44.872.500,00	44.872.500,00	22.437.600,00	-22.434.900,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			49.359.750,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	7.292.000,00	-8.708.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			17.600.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.340.999,00	68.340.999,00	19.116.000,00	-49.224.999,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			75.175.099,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	80.224.200,00	80.224.200,00	34.790.000,00	-45.434.200,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			88.246.620,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	260.040.000,00	260.040.000,00	123.870.000,00	-136.170.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			286.044.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	858.403.346,00	858.403.346,00	310.865.087,00	-547.538.259,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			944.243.681,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
							-	-	465.000.000,00	465.000.000,00	48.571.250,00	-416.428.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		511.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	38.750,00	-49.961.250,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	3.250,00	-14.996.750,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			16.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	29.250,00	-349.970.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			385.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.620.800.000,00	1.827.800.000,00	1.419.050.685,00	-201.749.315,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		1.782.880.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.280.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	435.000.000,00	435.000.000,00	311.550.685,00	-123.449.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			478.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.181.000.000,00	1.388.000.000,00	1.105.100.000,00	-75.900.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.299.100.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.322.411.000,00	2.322.411.000,00	1.921.941.000,00	-400.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		2.554.652.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				222 Unit	222 Unit	1.658.900.000,00	1.658.900.000,00	1.598.440.000,00	-60.460.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.824.790.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				222 Unit	222 Unit	151.121.000,00	151.121.000,00	151.121.000,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			166.233.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	137.390.000,00	137.390.000,00	127.380.000,00	-10.010.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			151.129.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	375.000.000,00	375.000.000,00	45.000.000,00	-330.000.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			412.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas tutupan lahan				231 Hektar	231 Hektar	2.482.076.000,00	2.805.076.000,00	221.356.464,00	248.207.600,00							2.730.283.600,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH				100 %	100 %	282.076.000,00	282.076.000,00	8.053.500,00	-274.022.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)		310.283.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	32.076.000,00	32.076.000,00	7.484.800,00	-24.591.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			35.283.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)																		
			Dokumen RKTP yang disahkan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	568.700,00	-249.431.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			275.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan				100 %	100 %	90.000.000,00	90.000.000,00	657.600,00	-89.342.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)		99.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	657.600,00	-89.342.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			99.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan				1 %	1 %	325.000.000,00	325.000.000,00	6.397.600,00	-318.602.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kawasan hutan produksi dan hutan lindung		357.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	6.030.700,00	-93.969.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			110.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				13 Dokumen	13 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	366.900,00	-224.633.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			247.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi				231 hektar	231 hektar	515.000.000,00	515.000.000,00	20.687.252,00	-494.312.748,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Lahan kritis di luar kawasan hutan negara		566.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	3.256.900,00	-61.743.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			71.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				231 Ha	231 Ha	250.000.000,00	250.000.000,00	5.418.652,00	-244.581.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			275.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	12.011.700,00	-187.988.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			220.000.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				374965 hektar	374965 hektar	1.015.000.000,00	1.338.000.000,00	151.554.000,00	-863.446.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kawasan hutan produksi dan hutan lindung		1.116.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	730.000,00	-19.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	900.000,00	-24.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				437 Ha	437 Ha	950.000.000,00	850.000.000,00	131.300.000,00	-818.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			1.045.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)				7 Operasi	7 Operasi	20.000.000,00	443.000.000,00	18.624.000,00	-1.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			22.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase kenaikan produksi Hasil Hutan bukan Kayu				1.2 %	1.2 %	160.000.000,00	160.000.000,00	28.596.812,00	-131.403.188,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah		176.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH				11 Unit Managemen	11 Unit Managemen	35.000.000,00	35.000.000,00	3.770.000,00	-31.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			38.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				17 Unit Managemen	17 Unit Managemen	125.000.000,00	125.000.000,00	24.826.812,00	-100.173.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			137.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Jumlah Produksi Hasil Hutan kayu				770800 m3	770800 m3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Unit Managemen PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah		66.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			38.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah				17 Unit Managemen	17 Unit Managemen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			27.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	5.409.700,00	-29.590.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelaku usaha perbenihan tanaman hutan		38.500.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																		
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	5.409.700,00	-29.590.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			38.500.000,00	DINAS KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan di Tahura				40 %	40 %	991.216.000,00	991.216.000,00	196.360.209,00	99.121.600,00							1.090.337.600,00	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi				40 hektar	40 hektar	879.336.000,00	879.336.000,00	182.403.809,00	-696.932.191,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman		967.269.600,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti				1 Permohonan	1 Permohonan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.04.1.01.0007	Keajaiban Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				10 Desa	10 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	946.600,00	-49.053.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		5.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				5 Ha	5 Ha	313.773.000,00	313.773.000,00	152.358.000,00	-161.415.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		345.150.300,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				28 Ha	28 Ha	450.563.000,00	450.563.000,00	19.600.000,00	-430.963.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		495.619.300,00	DINAS KEHUTANAN	
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan				20 Ha	20 Ha	50.000.000,00	50.000.000,00	9.499.209,00	-40.500.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		55.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar				90 %	90 %	75.789.000,00	75.789.000,00	13.413.400,00	-62.375.600,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		83.367.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	75.789.000,00	75.789.000,00	13.413.400,00	-62.375.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			83.367.900,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase kegiatan pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola				90 %	90 %	36.091.000,00	36.091.000,00	543.000,00	-35.548.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		39.700.100,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				170 Orang	170 Orang	36.091.000,00	36.091.000,00	543.000,00	-35.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			39.700.100,00	DINAS KEHUTANAN
4.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial				5 %	5 %	1.634.539.300,00	1.634.539.300,00	314.721.000,00	163.453.930,00							1.797.993.230,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan				5 %	5 %	1.634.539.300,00	1.634.539.300,00	314.721.000,00	-1.319.818.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kelompok Masyarakat Pemegang Izin Perhutanan Sosial		1.797.993.230,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				366 Kelompok	366 Kelompok	501.888.200,00	501.888.200,00	59.490.000,00	-442.398.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			552.077.020,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				135 Orang	135 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	90.000.000,00	-360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			495.000.000,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				210,125 Hektar	210,125 Hektar	682.651.100,00	682.651.100,00	165.231.000,00	-517.420.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			750.916.210,00	DINAS KEHUTANAN
5.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi				25 %	25 %	123.915.000,00	123.915.000,00	16.304.000,00	12.391.500,00							136.306.500,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah provinsi				25 %	25 %	123.915.000,00	123.915.000,00	16.304.000,00	-107.611.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Wilayah DAS		136.306.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				30 Orang	30 Orang	81.405.000,00	81.405.000,00	5.181.100,00	-76.223.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			89.545.500,00	DINAS KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS</i>				2 Lembaga	2 Lembaga	42.510.000,00	42.510.000,00	11.122.900,00	-31.387.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			46.761.000,00	DINAS KEHUTANAN
J U M L A H									71.103.378.387,85	72.465.195.335,85	65.320.924.366,43	479.167.077.423,58						78.213.716.227,14		



28

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																				
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							22.697.328.522,90	23.470.926.342,90	19.023.626.455,50	-3.673.702.067,40							34.338.448.523,40	
3.29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							22.697.328.522,90	23.470.926.342,90	19.023.626.455,50	-3.673.702.067,40							34.338.448.523,40	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	18.167.328.523,40	18.940.926.343,40	17.733.081.026,00	66.120.000,00							18.233.448.523,40	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan RKA-SKPD dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	167.356.000,00	167.356.000,00	60.310.500,00	-107.045.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		167.356.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	16.126.000,00	16.126.000,00	2.894.800,00	-13.231.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			16.126.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	116.230.000,00	116.230.000,00	44.598.340,00	-71.631.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			116.230.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	12.817.360,00	-22.182.640,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah				100 %	100 %	14.583.075.122,40	15.681.092.942,40	15.672.959.642,40	1.089.884.520,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		14.587.395.122,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1582 Orang/ Bulan	1582 Orang/ Bulan	14.572.955.122,40	15.670.972.942,40	15.670.972.942,40	1.098.017.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			14.577.275.122,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10.120.000,00	10.120.000,00	1.986.700,00	-8.133.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			10.120.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	11.351.550,00	-38.648.450,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.637.090,00	-12.362.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	8.714.460,00	-26.285.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	38.200.000,00	33.880.000,00	16.940.000,00	-21.260.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	38.200.000,00	33.880.000,00	16.940.000,00	-21.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Administrasi Umum				100 %	100 %	859.908.486,00	859.908.486,00	250.274.018,60	-609.634.467,40			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		859.908.486,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	16.790.000,00	16.790.000,00	5.791.750,00	-10.998.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			16.790.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				460 Paket	460 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	11.500.000,00	-34.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			46.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2347 Paket	2347 Paket	168.432.000,00	168.432.000,00	42.917.500,00	-125.514.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			168.432.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				415 Laporan	415 Laporan	25.775.000,00	25.775.000,00	5.198.750,00	-20.576.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			25.775.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148 Laporan	148 Laporan	602.911.486,00	602.911.486,00	184.866.018,60	-418.045.467,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			602.911.486,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	713.493.000,00	713.493.000,00	550.022.750,00	-163.470.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		713.493.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	108.293.000,00	108.293.000,00	22.750,00	-108.270.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			108.293.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	-55.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			55.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			550.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan				100 %	100 %	967.661.915,00	647.561.915,00	647.014.565,00	-320.647.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		967.661.915,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	197.558.915,00	197.558.915,00	197.292.815,00	-266.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			197.558.915,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	770.103.000,00	450.003.000,00	449.721.750,00	-320.381.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			770.103.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	787.634.000,00	787.634.000,00	524.208.000,00	-263.426.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		787.634.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				7 Unit	7 Unit	397.246.000,00	397.246.000,00	284.861.000,00	-112.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			397.246.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				88 Unit	88 Unit	37.030.000,00	37.030.000,00	9.257.500,00	-27.772.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			37.030.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	353.358.000,00	353.358.000,00	230.089.500,00	-123.268.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			353.358.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Gegeologian				100 %	100 %	553.410.000,00	553.410.000,00	132.860.800,00	1.176.590.000,00							1.730.000.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100 %	100 %	248.755.000,00	248.755.000,00	67.641.070,00	-181.113.930,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		870.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				44 Dokumen	44 Dokumen	194.252.500,00	194.252.500,00	53.140.150,00	-141.112.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				45 Laporan	45 Laporan	54.502.500,00	54.502.500,00	14.500.920,00	-40.001.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			370.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100 %	100 %	304.655.000,00	304.655.000,00	65.219.730,00	-239.435.270,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		860.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				15 Dokumen	15 Dokumen	54.502.500,00	54.502.500,00	14.922.650,00	-39.579.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			195.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				15 Laporan	15 Laporan	195.650.000,00	195.650.000,00	35.541.470,00	-160.108.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			275.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				15 Laporan	15 Laporan	54.502.500,00	54.502.500,00	14.755.610,00	-39.746.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			390.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Mineral dan Batubara				100 %	100 %	1.019.250.000,00	1.019.250.000,00	177.708.790,00	1.880.750.000,00							2.900.000.000,00		
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	53.873.190,00	-546.126.810,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				7 Laporan	7 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	53.873.190,00	-546.126.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut				100 %	100 %	419.250.000,00	419.250.000,00	123.835.600,00	-295.414.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				11 Laporan	11 Laporan	279.500.000,00	279.500.000,00	80.613.030,00	-198.886.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				11 Laporan	11 Laporan	139.750.000,00	139.750.000,00	43.222.570,00	-96.527.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan				100 %	100 %	1.053.715.000,00	1.053.715.000,00	414.128.840,00	2.846.285.000,00							3.900.000.000,00	
	3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase Jumlah Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang tertatausahakan selama 1 Tahun				100 %	100 %	223.600.000,00	223.600.000,00	78.395.390,00	-145.204.610,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun																		
			Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun				4 Laporan	4 Laporan	223.600.000,00	223.600.000,00	78.395.390,00	-145.204.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Persentase Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi				100 %	100 %	572.975.000,00	572.975.000,00	269.081.050,00	-303.893.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		2.050.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa																		
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1 Dokumen	1 Dokumen	111.800.000,00	111.800.000,00	29.675.450,00	-82.124.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas				3 Laporan	3 Laporan	111.800.000,00	111.800.000,00	30.908.380,00	-80.891.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biogas																		
			Jumlah dokumen data potensi biogas				5 Dokumen	5 Dokumen	69.875.000,00	69.875.000,00	18.409.660,00	-51.465.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas																		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				1 Laporan	1 Laporan	279.500.000,00	279.500.000,00	190.087.560,00	-89.412.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup			1.000.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	[deleted]						33.540.000,00	33.540.000,00	8.886.270,00	-24.653.730,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi																		
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi				3 Laporan	3 Laporan	33.540.000,00	33.540.000,00	8.886.270,00	-24.653.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral				100 %	100 %	111.800.000,00	111.800.000,00	53.714.130,00	-58.085.870,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur	-		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah rencana kegiatan konservasi energi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	111.800.000,00	111.800.000,00	53.714.130,00	-58.085.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	<i>Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi</i>				100 %	100 %	111.800.000,00	111.800.000,00	4.052.000,00	-107.748.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat																		
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat</i>				8 laporan	8 laporan	111.800.000,00	111.800.000,00	4.052.000,00	-107.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Ketenagalistrikan				100 %	100 %	1.903.624.999,50	1.903.624.999,50	565.846.999,50	5.671.375.000,50							7.575.000.000,00	
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	<i>Persentase Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri dalam 1 Tahun</i>				100 %	100 %	180.000.000,00	180.000.000,00	49.154.360,00	-130.845.640,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			805.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>				8 Laporan	8 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	49.154.360,00	-130.845.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur			805.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Persentase Penataan Izin Operasi selama 1 Tahun</i>				100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	62.482.940,00	-287.517.060,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>				23 Laporan	23 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	62.482.940,00	-287.517.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	<i>Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</i>				100 %	100 %	210.000.000,00	210.000.000,00	107.723.460,00	-102.276.540,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri																		
			<i>Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</i>				7 Laporan	7 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	107.723.460,00	-102.276.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan</i>				100 %	100 %	1.163.624.999,50	1.163.624.999,50	346.486.239,50	-817.138.760,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.670.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		
			<i>Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				220 Keluarga	220 Keluarga	963.624.999,50	963.624.999,50	317.829.679,50	-645.795.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			5.250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				7 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	28.656.560,00	-171.343.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan			420.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
J U M L A H									22.697.328.522,90	23.470.926.342,90	19.023.626.455,50	479.167.077.423,58							34.338.448.523,40	



29

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							23.996.753.621,40	39.640.402.723,40	30.201.464.455,80	6.204.710.834,40							26.610.000.000,00			
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							20.260.968.621,40	24.033.596.223,40	18.370.321.455,80	-1.890.647.165,60							22.285.000.000,00			
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	17.555.968.621,40	18.927.596.223,40	17.026.666.555,80	-100.968.621,40							17.455.000.000,00			
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan				100 %	100 %	325.000.000,00	332.000.000,00	96.362.000,00	-228.638.000,00			-	-		Perangkat Daerah	330.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	250.000.000,00	257.000.000,00	60.698.000,00	-189.302.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	35.664.000,00	-39.336.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan				100 %	100 %	13.167.240.024,40	15.297.467.626,40	15.207.467.626,40	2.040.227.602,00			-	-	ASN		13.040.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan	13.092.240.024,40	14.972.467.626,40	14.922.467.626,40	1.830.227.602,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	275.000.000,00	261.250.000,00	236.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.250.000,00	-13.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi BMD				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	23.000.000,00	-27.000.000,00			-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.500.000,00	-13.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	11.500.000,00	-13.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian				100 %	100 %	125.000.000,00	125.000.000,00	8.000.000,00	-117.000.000,00			-	-	ASN		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	1 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	8.000.000,00	-117.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	991.717.597,00	1.084.317.597,00	233.347.929,40	-758.369.667,60			-	-	Perangkat Daerah		1.165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	300.000.000,00	384.200.000,00	19.291.000,00	-280.709.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			325.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	-8.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	30.320.000,00	-94.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	13.000.000,00	-37.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	20 Laporan	421.717.597,00	430.117.597,00	133.736.929,40	-287.980.667,60	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	1.980.000.000,00	1.132.000.000,00	999.118.000,00	-980.882.000,00			-	-	Perangkat Daerah		1.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.705.000.000,00	832.000.000,00	699.118.000,00	-1.005.882.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan				15 %	15 %	917.011.000,00	906.811.000,00	459.371.000,00	-457.640.000,00			-	-	BMD		970.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	9 Unit	600.011.000,00	529.811.000,00	418.751.000,00	-181.260.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			625.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	210.000.000,00	0,00	-190.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	35 Unit	127.000.000,00	167.000.000,00	40.620.000,00	-86.380.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan implementasi pasar lelang komoditas (PLK)				50 -	50 -	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	20.000.000,00							100.000.000,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pelaksanaan pasar lelang komoditas				2 kali	2 kali	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas																		
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				75 Orang	0 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Andil Inflasi bahan makanan				<2 %	<2 %	640.000.000,00	841.000.000,00	561.000.000,00	790.000.000,00							1.430.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					-	-	590.000.000,00	791.000.000,00	561.000.000,00	-29.000.000,00			-	-			1.340.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	91.000.000,00	61.000.000,00	-29.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				10 Laporan	10 Laporan	500.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan		1.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	-			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase IKM yang berhasil melakukan ekspor dari IKM yang memperoleh fasilitasi				10 %	10 %	550.000.000,00	750.000.000,00	321.000.000,00	800.000.000,00							1.350.000.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<i>Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi promosi dagang</i>				20 %	20 %	550.000.000,00	750.000.000,00	321.000.000,00	-229.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	IKM, Calon Eksporir dan Eksporir		1.350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				4 Produk	2 Produk	300.000.000,00	500.000.000,00	71.000.000,00	-229.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	1.060.000.000,00	3.060.000.000,00	386.654.900,00	315.000.000,00							1.375.000.000,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	48.060.000,00	-251.940.000,00			-	-			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			<i>Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>				1 BPSK	1 BPSK	300.000.000,00	300.000.000,00	48.060.000,00	-251.940.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Pengujian Mutu</i>				5 %	5 %	625.000.000,00	625.000.000,00	304.594.900,00	-320.405.100,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pelaku Usaha/Eksporir		775.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi																		
			<i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i>				10 Sertifikat	5 Sertifikat	147.500.000,00	147.500.000,00	32.186.500,00	-115.313.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian																		
			<i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i>				1500 laporan	1100 laporan	156.136.000,00	156.136.000,00	51.034.600,00	-105.101.400,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			375.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk																		
			<i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i>				6 Produk	6 Produk	321.364.000,00	321.364.000,00	221.373.800,00	-99.990.200,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			275.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	135.000.000,00	2.135.000.000,00	34.000.000,00	-101.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	8 Laporan	115.000.000,00	2.115.000.000,00	34.000.000,00	-81.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Kasus yang Ditangani				2 Kasus	2 Kasus	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk				2 %	2 %	375.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00	200.000.000,00							575.000.000,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang dipromosikan				25 %	25 %	275.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00	-200.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				25 UMKM	25 UMKM	275.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase IKM binaan yang mendapatkan fasilitasi				10 %	10 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	IKM		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				2 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							3.735.785.000,00	15.606.806.500,00	11.831.143.000,00	8.095.358.000,00							4.325.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung				10 %	10 %	3.385.785.000,00	15.230.806.500,00	11.821.143.000,00	589.215.000,00							3.975.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan IBS di Provinsi Lampung Persentase pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung Pertumbuhan IKM yang telah memiliki Standarisasi Industri				10 % 20 % 8 %	10 % 20 % 8 %	3.385.785.000,00	15.230.806.500,00	11.821.143.000,00	8.435.358.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	IBS, IKM,		3.975.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	68.300.600,00	-81.699.400,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	113.876.900,00	-236.123.100,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	589.700.000,00	-560.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			1.150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	950.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.385.785.000,00	12.580.806.500,00	10.984.665.500,00	9.598.880.500,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	14.600.000,00	-35.400.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-				-	-	250.000.000,00	250.000.000,00	10.000.000,00	0,00							250.000.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah verifikasi teknis rekomendasi IUI besar				15 kali	15 kali	250.000.000,00	250.000.000,00	10.000.000,00	-240.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	IBS		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	6.000.000,00	-69.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				0 0	0 0	175.000.000,00	175.000.000,00	4.000.000,00	-171.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri besar, Sedang dan IKM serta perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS				35 %	35 %	100.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00							100.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah waktu pengelolaan data dan informasi industri				12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	126.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	IKM		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	126.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
J U M L A H									23.996.753.621,40	39.640.402.723,40	30.201.464.455,80	479.167.077.423,58							26.610.000.000,00	



30 SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu				100 Persen	100 Persen	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro yang Diselaraskan				100 Persen	100 Persen	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya jasa penunjang urusan umum biro		2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	117.350.000,00	117.350.000,00	9.234.820,00	-108.115.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			174.827.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Biro Organisasi yang sesuai aturan Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 100 Persentase	100 % 100 Persentase	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Biro		27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	23.181.000,00	23.181.000,00	7.649.800,00	-15.531.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	805.288.900,00	805.288.900,00	199.432.870,00	-605.856.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			1.478.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Umum Biro yang disusun				100 Persen	100 Persen	27.611.162.800,00	22.530.750.300,00	20.079.921.225,00	-7.531.241.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya jasa penunjang urusan umum biro		24.826.371.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.568.800,00	175.568.800,00	128.560.830,00	-47.007.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			174.827.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-				-	-	1.378.611.300,00	1.738.611.300,00	676.999.970,00	53.561.700,00							1.432.173.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	-				-	-	365.593.000,00	365.593.000,00	56.933.120,00	-308.659.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		465.358.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				8 Dokumen	8 Dokumen	20.810.000,00	20.810.000,00	7.926.980,00	-12.883.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			25.358.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	181.761.000,00	181.761.000,00	42.138.070,00	-139.622.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				3 Dokumen	3 Dokumen	163.022.000,00	163.022.000,00	6.868.070,00	-156.153.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Daerah/Kecamatan/Kelurahan				3 Dokumen	3 Dokumen	741.815.000,00	1.101.815.000,00	485.010.720,00	-256.804.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Otonomi Daerah		741.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD					12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	174.983.090,00	-225.016.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan					3 Dokumen	3 Dokumen	141.815.000,00	141.815.000,00	36.261.660,00	-105.553.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			141.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	560.000.000,00	273.765.970,00	73.765.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Dokumen/naskah kerjasama yang selesai dilegitimasi				6 Dokumen	6 Dokumen	271.203.300,00	271.203.300,00	135.056.130,00	-136.147.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya fasilitasi kerjasama daerah		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	235.700.500,00	235.700.500,00	127.348.500,00	-108.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				8 Dokumen	8 Dokumen	15.254.800,00	15.254.800,00	5.581.830,00	-9.672.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				7 Laporan	7 Laporan	20.248.000,00	20.248.000,00	2.125.800,00	-18.122.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolan dan penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan serta Fasilitasi Administrasi Tata Usaha Pimpinan				100 % 100 % persen	100 % 100 % persen	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[deleted] Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan yang berlaku Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu Presentase Laporan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Presentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100 % 100 % Persentase	100 % 100 % Persentase	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	81.700.000,00	104.391.500,00	20.720.000,00	-60.980.000,00	Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu				100 %	100 %	72.821.136.132,40	85.624.150.006,40	83.354.378.290,40	10.533.242.158,00		-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		73.018.110.665,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	53.797.000,00	110.250.200,00	24.820.170,00	-28.976.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu, Persentase pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian				100 %	100 %	1.228.182.700,00	1.676.801.300,00	356.600.290,00	-871.582.410,00		-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		1.461.181.260,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	0 Orang	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	-34.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Biro Organisasi yang sesuai aturan, Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah, Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu, Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00		-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	77.229.000,00	130.001.500,00	12.200.000,00	-65.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	12 Laporan	247.943.000,00	248.503.000,00	112.551.200,00	-135.391.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu, Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai aturan, Presentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	27.611.162.800,00	22.530.750.300,00	20.079.921.225,00	-7.531.241.575,00		-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		24.826.371.760,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	347.990.000,00	676.328.000,00	553.128.000,00	205.138.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Telukbetung Selatan, Talang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis kesejahteraan rakyat bidang non pelayanan dasar Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar Persentase kebijakan strategis kesejahteraan rakyat bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang terealisasi				100 95 98 % % %	100 95 98 % % %	60.710.042.000,00	92.989.226.800,00	93.397.815.300,00	-16.605.282.520,00							44.104.759.480,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial bidang bina mental spiritual yang tersalurkan Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial bidang non pelayanan dasar Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial bidang pelayanan dasar				100 % 95 %	100 % 95 %	57.530.042.000,00	88.959.230.200,00	92.425.266.400,00	34.895.224.400,00			Memperkuat penyalangan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			40.124.759.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																	11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				478 Unit	864 Unit	11.000.000.000,00	20.777.376.000,00	17.597.625.000,00	6.597.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyalangan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis				
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																	29.124.759.480,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	3 Lembaga	46.530.042.000,00	68.181.854.200,00	74.827.641.400,00	28.297.599.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat penyalangan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis				
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial bidang pelayanan dasar				95 %	95 %	1.950.000.000,00	2.624.867.000,00	348.960.800,00	-1.601.039.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			2.580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	197.672.000,00	100.052.000,00	-49.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis				
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																	800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				4 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	803.000.000,00	245.431.800,00	-504.568.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis				
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																	1.580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				5 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000.000,00	1.624.195.000,00	3.477.000,00	-1.046.523.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial bidang non pelayanan dasar				100 %	100 %	1.230.000.000,00	1.405.129.600,00	623.588.100,00	-606.411.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				4 Dokumen	4 Dokumen	980.000.000,00	1.060.131.600,00	523.576.900,00	-456.423.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				3 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	344.998.000,00	100.011.200,00	-149.988.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO HUKUM																			
									230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu pada Biro Hukum				100 %	100 %	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	10 Dokumen	114.663.000,00	100.607.000,00	33.387.640,00	-81.275.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			124.663.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	79.403.000,00	126.284.000,00	0,00	-79.403.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			80.403.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	100 Laporan	1.039.336.000,00	977.179.000,00	224.547.000,00	-814.789.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			1.049.336.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	27.611.162.800,00	22.530.750.300,00	20.079.921.225,00	-7.531.241.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.826.371.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121.680.000,00	361.680.000,00	267.640.000,00	145.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			131.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang diharmonisasikan				100 %	100 %	1.220.259.000,00	1.249.591.000,00	321.814.550,00	51.000.000,00							1.271.259.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan				100 %	100 %	581.120.400,00	586.675.400,00	215.036.700,00	-366.083.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Diharmonisasikan		612.120.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				46 Dokumen	29 Dokumen	248.963.000,00	258.977.000,00	87.957.400,00	-161.005.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			258.963.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				550 Dokumen	300 Dokumen	64.485.400,00	47.518.400,00	9.345.500,00	-55.139.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			65.485.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya				15 Dokumen	400 Dokumen	127.821.500,00	140.337.500,00	43.062.000,00	-84.759.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			137.821.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				15 Dokumen	15 Dokumen	139.850.500,00	139.842.500,00	74.671.800,00	-65.178.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			149.850.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang di fasilitasi				100 %	100 %	639.138.600,00	662.915.600,00	106.777.850,00	-532.360.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penyelesaian Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) Se-Provinsi Lampung		659.138.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				12 Kasus	4 Kasus	278.323.400,00	278.323.400,00	27.819.350,00	-250.504.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			288.323.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				15 Kasus	5 Kasus	360.815.200,00	384.592.200,00	78.958.500,00	-281.856.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			370.815.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	3.392.636.900,00	6.841.834.400,00	1.447.659.790,00	-1.944.977.110,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		4.518.960.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.090.400,00	11.090.400,00	2.343.000,00	-8.747.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.345.400,00	8.345.400,00	0,00	-8.345.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.228.182.700,00	1.676.801.300,00	356.600.290,00	-871.582.410,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		1.461.181.260,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	97.495.000,00	97.495.000,00	0,00	-97.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			97.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.931.800,00	14.931.800,00	0,00	-14.931.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	892.011.200,00	892.011.200,00	214.186.000,00	-677.825.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			892.011.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.611.162.800,00	22.530.750.300,00	20.079.921.225,00	-7.531.241.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		24.826.371.760,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	3.300.000,00	-9.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	141.569.700,00	141.569.700,00	115.049.700,00	-26.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			141.569.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.872.636.300,00	1.872.636.300,00	541.954.400,00	-109.884.200,00								1.762.752.100,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	-				-	-	392.905.200,00	392.905.200,00	180.255.900,00	-212.649.300,00			-	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan				392.905.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	95.400.500,00	95.400.500,00	108.276.000,00	12.875.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			95.400.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				1 Dokumen	1 Dokumen	297.504.700,00	297.504.700,00	71.979.900,00	-225.524.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			297.504.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	-				-	-	833.009.000,00	833.009.000,00	113.108.000,00	-719.901.000,00			-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemerintah Provinsi Lampung		833.009.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	445.970.000,00	445.970.000,00	54.215.000,00	-391.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			445.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	290.237.000,00	290.237.000,00	34.083.000,00	-256.154.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			290.237.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	1 Dokumen	96.802.000,00	96.802.000,00	24.810.000,00	-71.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			96.802.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	-				-	-	646.722.100,00	646.722.100,00	248.590.500,00	-398.131.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Pemerintah Provinsi Lampung		536.837.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	336.275.500,00	336.275.500,00	208.906.400,00	-127.369.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			336.275.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	109.884.200,00	109.884.200,00	12.094.300,00	-97.789.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.562.400,00	200.562.400,00	27.589.800,00	-172.972.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			200.562.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA																		
									230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa				100 %	100 %	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	45.147.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		24.574.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	22.340.000,00	22.340.000,00	3.509.860,00	-18.830.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				24.574.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu				100 %	100 %	72.821.136.132,40	85.624.150.006,40	83.354.378.290,40	10.533.242.158,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		73.018.110.665,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
	4.01.01.1.02.0003		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	240.784.000,00	240.784.000,00	204.675.394,00	-36.108.606,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				264.862.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.392.636.900,00	6.841.834.400,00	1.447.659.790,00	-1.944.977.110,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		4.518.960.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
	4.01.01.1.03.0006		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	18.309.000,00	18.309.000,00	1.589.560,00	-16.719.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				20.139.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.228.182.700,00	1.676.801.300,00	356.600.290,00	-871.582.410,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		1.461.181.260,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
	4.01.01.1.05.0009		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	75.123.000,00	75.123.000,00	325.480,00	-74.797.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				82.835.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Biro Organisasi yang sesuai aturan Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 100 Persentase	100 % 100 Persentase	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	4.01.01.1.06.0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	152.695.000,00	152.695.000,00	59.200.960,00	-93.494.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				167.964.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	4 Laporan	196.292.000,00	196.292.000,00	57.860.136,00	-138.431.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			215.921.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	12.563.812.200,00	17.667.665.200,00	11.338.712.650,00	-1.225.099.550,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		15.210.100.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	124.665.000,00	124.665.000,00	61.941.000,00	-62.724.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			137.131.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Realisasi Penggunaan e- purchasing dalam proses PBJ Persentase realisasi transaksi pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik				95 %	95 %	2.628.749.000,00	2.628.749.000,00	576.189.502,00	262.873.600,00							2.891.622.600,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 %	100 %	903.994.000,00	903.994.000,00	265.669.093,00	-638.324.907,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	UMKM, Perusahaan yang terdaftar di e-katalog, Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Lampung		994.393.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa					4 Laporan	2 Laporan	152.400.000,00	152.400.000,00	7.308.800,00	-145.091.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			167.640.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					12 Laporan	12 Laporan	530.280.000,00	550.280.000,00	231.895.044,00	-298.384.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			583.308.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa					12 Laporan	12 Laporan	221.314.000,00	201.314.000,00	26.465.249,00	-194.848.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			243.445.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				100 %	100 %	845.047.000,00	845.047.000,00	219.512.465,00	-625.534.535,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		929.551.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik					12 Laporan	2 Laporan	367.379.000,00	367.379.000,00	91.667.720,00	-275.711.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			404.117.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					2 Laporan	2 Laporan	247.445.000,00	247.445.000,00	92.844.745,00	-154.600.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			272.189.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	2 Laporan	230.223.000,00	230.223.000,00	35.000.000,00	-195.223.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			253.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Laporan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 %	100 %	879.708.000,00	879.708.000,00	91.007.944,00	-788.700.056,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung (Pejabat Pengadaan, PPTK)		967.678.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	100 Orang	369.925.000,00	369.925.000,00	9.816.600,00	-360.108.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			406.917.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	241.531.000,00	241.531.000,00	5.645.144,00	-235.885.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			265.684.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	4 Dokumen	268.252.000,00	268.252.000,00	75.546.200,00	-192.705.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			295.077.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah yang Dilakukan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Persentase Dokumen Perencanaan yang sesuai aturan Presentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui keprotokolian dan penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan serta Fasilitasi Administrasi Tata Usaha Pimpinan				100 % 100 % 100 % % persen	100 % 100 % 100 % % persen	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10								173.900.104.665,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[deleted] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan yang berlaku Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu Presentase Laporan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Presentase Penyelesaian dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 100 % Persentase 17 Dokumen	100 % 100 % Persentase 17 Dokumen	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	64.832.000,00	64.832.000,00	10.000.000,00	-54.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu				100 % 12 Dokumen	100 % 12 Dokumen	72.821.136.132,40	85.624.150.006,40	83.354.378.290,40	10.533.242.158,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		73.018.110.665,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	183.563.000,00	183.563.000,00	122.600.000,00	-60.963.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu				100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	3.392.636.900,00	6.841.834.400,00	1.447.659.790,00	-1.944.977.110,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		4.518.960.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.033.200,00	-6.966.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 orang	11 orang	1.228.182.700,00	1.676.801.300,00	356.600.290,00	-871.582.410,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		1.461.181.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					11 Orang	11 Orang	56.078.000,00	56.078.000,00	8.000.000,00	-48.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Layanan Administrasi Umum Biro Organisasi yang sesuai aturan Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 100 Persentase 1 Laporan 1 Paket	100 % 100 Persentase 1 Laporan 1 Paket	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	202.840.000,00	502.840.000,00	17.000.000,00	-185.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	391.406.000,00	511.406.000,00	173.568.800,00	-217.837.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.08	PROGRAM KEBLIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Perangkat Daerah yang pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaannya				90 %	90 %	1.086.281.000,00	1.086.281.000,00	164.214.665,00	1.713.719.000,00							2.800.000.000,00	
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				3 Laporan 4 Laporan	3 Laporan 4 Laporan	407.968.000,00	407.968.000,00	69.041.165,00	-338.926.835,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		1.314.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					3 Laporan	3 Laporan	132.788.000,00	132.788.000,00	19.000.000,00	-113.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			414.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				3 Laporan	3 Laporan	78.518.000,00	78.518.000,00	13.968.800,00	-64.549.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				4 Laporan	4 Laporan	196.662.000,00	196.662.000,00	36.072.365,00	-160.589.635,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	678.313.000,00	678.313.000,00	95.173.500,00	-583.139.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung		1.486.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	182.036.000,00	182.036.000,00	30.266.000,00	-151.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				15 Laporan	15 Laporan	360.599.000,00	360.599.000,00	41.620.000,00	-318.979.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	135.678.000,00	135.678.000,00	23.287.500,00	-112.390.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			286.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
									230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.				100 %	100 %	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN ASET DAERAH BIRO ORGANISASI YANG TEPAT WAKTU				100 %	100 %	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	MENINGKATNYA KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, ASET DAERAH BIRO ORGANISASI DAN EVALUASI KINERJA SETDA PROVINSI LAMPUNG YANG TEPAT WAKTU		2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	74.697.000,00	74.697.000,00	16.144.790,00	-58.552.210,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	96.047.700,00	96.047.700,00	14.550.000,00	-81.497.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI UMUM BIRO ORGANISASI YANG SESUAI ATURAN				100 %	100 %	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM		27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.002.477.000,00	1.002.477.000,00	200.715.539,00	-801.761.461,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG SESUAI ATURAN				100 %	100 %	27.611.162.800,00	22.530.750.300,00	20.079.921.225,00	-7.531.241.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	MENINGKATNYA PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		24.826.371.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	266.728.800,00	266.728.800,00	15.457.000,00	-251.271.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168.248.000,00	168.248.000,00	120.209.670,00	-48.038.330,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan ukuran serta penyusunan Anjab dan Analisis Beban Kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				80 %	80 %	1.591.801.500,00	1.591.801.500,00	204.907.235,00	118.198.500,00							1.710.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	PERSENTASE DOKUMEN FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN YANG SESUAI ATURAN				100 %	100 %	513.198.300,00	513.198.300,00	60.029.530,00	-453.168.770,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	MENINGKATNYA FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN		535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	224.895.300,00	224.895.300,00	38.969.120,00	-185.926.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	59.171.000,00	59.171.000,00	9.550.200,00	-49.620.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				49 Dokumen	49 Dokumen	229.132.000,00	229.132.000,00	11.510.210,00	-217.621.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	PERSENTASE DOKUMEN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU -PERSENTASE DOKUMEN FASILITASI TATALAKSANA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU				100 %	100 %	1.078.603.200,00	1.078.603.200,00	144.877.705,00	-933.725.495,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	MENINGKATNYA FASILITASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS KINERJA, DAN BUDAYA KERJA, TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK		1.175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	191.708.000,00	191.708.000,00	28.744.180,00	-162.963.820,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				6 Dokumen	6 Dokumen	249.988.000,00	249.988.000,00	57.095.700,00	-192.892.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				2 Laporan	2 Laporan	148.255.000,00	148.255.000,00	6.122.030,00	-142.132.970,00	-	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	174.217.000,00	174.217.000,00	13.236.295,00	-160.980.705,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	314.435.200,00	314.435.200,00	39.679.500,00	-274.755.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100 %	100 %	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	499.641.600,00	990.788.800,00	211.147.550,00	-288.494.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			488.083.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	359.437.500,00	809.983.800,00	160.669.475,00	-198.768.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			165.154.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	225.513.950,00	808.175.500,00	160.101.750,00	-65.412.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			153.145.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	460.208.000,00	664.724.000,00	170.090.150,00	-290.117.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			579.829.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu				100 %	100 %	72.821.136.132,40	85.624.150.006,40	83.354.378.290,40	10.533.242.158,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		73.018.110.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				430 Orang/ Bulan	430 Orang/ Bulan	70.884.539.532,40	82.441.937.106,40	82.441.937.106,40	11.557.397.574,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			70.768.522.065,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	645.422.500,00	1.011.071.000,00	215.170.700,00	-430.251.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			672.658.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	335.175.000,00	668.645.000,00	154.964.700,00	-180.210.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			277.288.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	477.855.100,00	967.899.700,00	190.210.220,00	-287.644.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			699.779.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.392.636.900,00	6.841.834.400,00	1.447.659.790,00	-1.944.977.110,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		4.518.960.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	232.014.900,00	496.087.800,00	107.719.290,00	-124.295.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			479.180.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.164.485.700,00	1.866.817.000,00	296.547.150,00	-867.938.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.849.342.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	617.916.700,00	1.485.431.600,00	326.934.500,00	-290.982.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			786.509.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	595.008.000,00	1.369.551.400,00	326.857.140,00	-268.150.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			848.077.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	730.466.800,00	1.571.201.800,00	377.635.950,00	-352.830.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			485.712.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	1.228.182.700,00	1.676.801.300,00	356.600.290,00	-871.582.410,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		1.461.181.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	270.000.000,00	350.000.000,00	67.530.050,00	-202.469.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			319.172.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	294.774.100,00	350.000.000,00	77.667.950,00	-217.106.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			319.172.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	417.472.000,00	730.864.700,00	193.393.310,00	-224.078.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			403.137.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	644.550.000,00	652.424.400,00	163.106.100,00	-481.443.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			643.983.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1.433.672.000,00	2.104.664.000,00	1.002.546.350,00	-431.125.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.550.803.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.425.000,00	449.346.000,00	196.131.500,00	155.706.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			87.263.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	375.693.000,00	622.959.000,00	154.456.000,00	-221.237.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			457.480.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	57.170.450,00	199.784.100,00	49.946.025,00	-7.224.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			212.551.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	292.500.000,00	281.545.000,00	140.772.500,00	-151.727.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			299.538.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.764.000,00	199.750.600,00	32.526.955,00	-10.237.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			280.606.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.179.519.800,00	15.708.504.600,00	5.423.698.200,00	-755.821.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			13.448.416.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	270.000.000,00	350.000.000,00	30.230.150,00	-239.769.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			319.172.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	3.005.556.000,00	6.717.843.000,00	3.951.298.590,00	945.742.590,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		3.587.168.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	2.817.875.000,00	3.819.649.000,00	2.950.367.340,00	132.492.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.822.882.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.915.000,00	1.356.250.000,00	448.028.250,00	431.113.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			52.095.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	113.585.000,00	729.468.000,00	241.919.250,00	128.334.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			522.392.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	23.465.000,00	330.770.000,00	252.340.000,00	228.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			140.714.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	33.716.000,00	481.706.000,00	58.643.750,00	24.927.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			49.083.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	27.611.162.800,00	22.530.750.300,00	20.079.921.225,00	-7.531.241.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		24.826.371.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	243.935.500,00	512.317.000,00	123.496.550,00	-120.438.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			239.379.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	8.759.932.400,00	8.710.732.600,00	8.610.732.600,00	-149.199.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.116.461.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.099.580.000,00	2.746.945.000,00	2.392.596.250,00	293.016.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.565.459.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.251.287.500,00	7.615.990.300,00	6.839.594.125,00	-7.411.693.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			10.593.408.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	12.563.812.200,00	17.667.665.200,00	11.338.712.650,00	-1.225.099.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		15.210.100.100,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		4.601.318.200,00	SEKRETARIAT DAERAH					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	3.570.884.000,00	4.324.922.800,00	3.109.107.100,00	-461.776.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			6.861.068.700,00	SEKRETARIAT DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				139 Unit	139 Unit	6.150.496.200,00	6.448.932.800,00	5.402.211.200,00	-748.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				917.475.400,00	SEKRETARIAT DAERAH			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	772.500.000,00	1.270.984.000,00	317.742.500,00	-454.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																					397.908.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	380.000.000,00	763.832.000,00	190.958.000,00	-189.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					1.741.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	26 Unit	1.282.900.000,00	3.957.087.300,00	2.062.442.525,00	779.542.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						553.498.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	282.367.000,00	777.241.300,00	194.310.325,00	-88.056.675,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kth Dan Wkth Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	8.286.436.394,50	8.384.206.394,50	8.383.987.394,50	97.551.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		10.564.912.200,00	SEKRETARIAT DAERAH						
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																						2.326.839.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.235.840.284,50	2.235.840.284,50	2.235.840.284,50	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																							425.563.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																							106.390.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	102.230.000,00	100.000.000,00	99.781.000,00	-2.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																							7.706.119.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	5.548.366.110,00	5.548.366.110,00	5.548.366.110,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtangaan Pimpinan Dan Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	9.188.713.000,00	13.385.219.800,00	13.253.092.000,00	4.064.379.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Lampung		9.767.876.630,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	1.058.450.000,00	1.131.450.000,00	1.131.450.000,00	73.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.095.088.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	989.112.500,00	989.112.500,00	989.112.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.130.896.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	6.991.591.700,00	11.115.098.500,00	11.115.098.500,00	4.123.506.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			6.377.377.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	18.565.145.247,25							229.872.670.845,00		
	1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-			-	-	159.572.146.526,90	197.731.227.300,90	152.741.776.252,15	14.327.958.138,10							173.900.104.665,00		
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.240.259.050,00	3.977.765.600,00	829.207.735,00	-1.411.051.315,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			2.356.488.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21 Dokumen	21 Dokumen	82.785.300,00	82.785.300,00	13.845.890,00	-68.939.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			91.063.830,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.228.182.700,00	1.676.801.300,00	356.600.290,00	-871.582.410,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			1.461.181.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	70.785.600,00	70.785.600,00	9.683.500,00	-61.102.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			77.864.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	18.050.612.150,00	29.821.192.555,00	9.390.532.787,00	-8.660.079.363,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			27.286.932.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	444.909.000,00	444.909.000,00	21.866.000,00	-423.043.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			489.399.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.046.880.000,00	3.126.720.455,00	896.340.702,00	-2.150.539.298,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			3.351.586.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.611.162.800,00	22.530.750.300,00	20.079.921.225,00	-7.531.241.575,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			24.826.371.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	112.604.000,00	112.604.000,00	17.427.400,00	-95.176.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			123.864.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	908.838.100,00	1.028.838.100,00	892.729.100,00	-16.109.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			999.721.910,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-				-	-	9.188.713.000,00	13.385.219.800,00	13.253.092.000,00	4.064.379.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			9.767.876.630,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	149.558.800,00	149.558.800,00	17.431.000,00	-132.127.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			164.514.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	502.527.700,00	422.687.245,00	28.095.700,25	-474.431.999,75			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		552.780.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.13.0001		Penyiapan Materi Pimpinan																		
			<i>Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan</i>				1350 Dokumen	1350 Dokumen	288.583.100,00	208.742.645,00	8.385.500,25	-280.197.599,75	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			317.441.410,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.13.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				36 Laporan	36 Laporan	70.722.200,00	70.722.200,00	10.210.200,00	-60.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			77.794.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.13.0003		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i>				751 Laporan	751 Laporan	143.222.400,00	143.222.400,00	9.500.000,00	-133.722.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			157.544.640,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan	-				-	-	681.111.500,00	681.111.500,00	328.289.800,00	-352.821.700,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		749.222.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.14.0001		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i>				500 Laporan	500 Laporan	348.777.700,00	348.777.700,00	281.115.500,00	-67.662.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			383.655.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.14.0002		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				132 Laporan	132 Laporan	274.964.000,00	274.964.000,00	39.414.000,00	-235.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			302.460.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.14.0003		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				36 Laporan	36 Laporan	57.369.800,00	57.369.800,00	7.760.300,00	-49.609.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			63.106.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
J U M L A H									230.060.526.626,90	300.888.124.200,90	248.625.671.874,15	479.167.077.423,58							229.872.670.845,00	



31 SEKRETARIAT DPRD



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							390.000.000.000,00	413.140.289.346,00	361.240.458.154,00	-28.759.541.846,00							390.000.000.000,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							390.000.000.000,00	413.140.289.346,00	361.240.458.154,00	-28.759.541.846,00							390.000.000.000,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	100 Persen	172.932.114.712,00	179.622.404.058,00	157.256.432.496,00	0,00							172.932.114.712,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 Dokumen	29 Dokumen	3.865.165.500,00	4.365.165.500,00	4.000.000.000,00	134.834.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.865.165.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	958.250.000,00	1.058.250.000,00	944.279.500,00	-13.970.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			958.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	807.455.500,00	907.455.500,00	907.455.500,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			807.455.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.157.900.000,00	1.357.900.000,00	1.187.887.000,00	29.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.157.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	941.560.000,00	1.041.560.000,00	960.378.000,00	18.818.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			941.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	17.988.420.893,00	20.227.810.239,00	18.372.163.946,00	383.743.053,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.988.420.893,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	15.255.499.600,00	16.694.888.946,00	16.694.888.946,00	1.439.389.346,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.255.499.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	430.539.920,00	630.539.920,00	350.000.000,00	-80.539.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			430.539.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	443.256.600,00	643.256.600,00	200.192.600,00	-243.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			443.256.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	588.461.000,00	788.461.000,00	504.889.000,00	-83.572.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			588.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	510.359.200,00	610.359.200,00	274.553.400,00	-235.805.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			510.359.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	270.540.773,00	270.540.773,00	83.816.000,00	-186.724.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			270.540.773,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	489.763.800,00	589.763.800,00	263.824.000,00	-225.939.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			489.763.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	3.971.519.400,00	3.971.519.400,00	1.672.924.500,00	-2.298.594.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.971.519.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				21 Orang	21 Orang	3.971.519.400,00	3.971.519.400,00	1.672.924.500,00	-2.298.594.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.971.519.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	18.915.027.249,00	21.520.027.249,00	15.707.895.880,00	-3.207.131.369,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		18.915.027.249,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.125.283.600,00	1.325.283.600,00	692.000.000,00	-433.283.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.125.283.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.715.967.320,00	6.115.967.320,00	5.472.299.000,00	-243.668.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.715.967.320,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	850.000.000,00	1.100.000.000,00	659.207.500,00	-190.792.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.226.886.849,00	1.426.886.849,00	1.183.003.000,00	-43.883.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.226.886.849,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	3.297.354.600,00	3.047.354.600,00	2.571.062.000,00	-726.292.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.297.354.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	915.739.900,00	1.165.739.900,00	1.165.739.900,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			915.739.900,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.579.306.500,00	1.679.306.500,00	900.000.000,00	-679.306.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.579.306.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	741.240.000,00	1.241.240.000,00	248.248.000,00	-492.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			741.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.435.500.000,00	2.735.500.000,00	1.575.820.000,00	-859.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.435.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	180.686.000,00	635.686.000,00	300.000.000,00	119.314.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			180.686.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	847.062.480,00	1.047.062.480,00	940.516.480,00	93.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			847.062.480,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	5.422.570.000,00	5.722.570.000,00	3.857.607.300,00	-1.564.962.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.422.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	1.154.312.300,00	1.154.312.300,00	1.154.312.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				163 Unit	163 Unit	5.422.570.000,00	4.568.257.700,00	2.703.295.000,00	-2.719.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.422.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	7.521.055.800,00	7.471.955.800,00	6.129.856.000,00	-1.391.199.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.521.055.800,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	289.000.000,00	289.000.000,00	186.471.000,00	-102.529.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			289.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.227.216.000,00	1.477.216.000,00	1.296.262.000,00	69.046.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.227.216.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.400.000.000,00	1.800.000.000,00	1.147.198.000,00	-252.802.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.604.839.800,00	3.905.739.800,00	3.499.925.000,00	-1.104.914.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.604.839.800,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	9.313.237.900,00	9.440.177.400,00	6.177.065.000,00	-3.136.172.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9.313.237.900,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				35 Unit	35 Unit	1.292.620.800,00	1.492.620.800,00	1.187.856.000,00	-104.764.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.292.620.800,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2370 Unit	2370 Unit	1.350.000.000,00	1.425.000.000,00	650.000.000,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1510 Unit	1510 Unit	3.141.471.000,00	3.216.471.000,00	2.229.000.000,00	-912.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.141.471.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.529.146.100,00	3.306.085.600,00	2.110.209.000,00	-1.418.937.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.529.146.100,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				12 Bulan	12 Bulan	74.583.204.470,00	74.228.204.470,00	74.036.768.470,00	-546.436.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		74.583.204.470,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																				
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	71.430.297.470,00	71.430.297.470,00	71.430.297.470,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			71.430.297.470,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2.690.000.000,00	2.235.000.000,00	2.145.000.000,00	-545.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.690.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				85 Orang	85 Orang	462.907.000,00	562.907.000,00	461.471.000,00	-1.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			462.907.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD				12 Bulan	12 Bulan	31.351.913.500,00	32.674.974.000,00	27.302.151.400,00	-4.049.762.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD		31.351.913.500,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	351.564.000,00	351.564.000,00	250.000.000,00	-101.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			351.564.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	800.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	29.250.349.500,00	30.050.349.500,00	25.179.090.900,00	-4.071.258.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			29.250.349.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.150.000.000,00	1.473.060.500,00	1.473.060.500,00	323.060.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang di Hasilkan				100 Persen	100 Persen	217.067.885.288,00	233.517.885.288,00	203.984.025.658,00	0,00							217.067.885.288,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD				6 Raperda	6 Raperda	12.681.572.600,00	14.681.572.600,00	12.469.072.600,00	-212.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pembahasan Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD		12.681.572.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.761.105.200,00	2.261.105.200,00	2.048.605.200,00	287.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.761.105.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				6 Dokumen	6 Dokumen	7.200.786.800,00	7.200.786.800,00	5.200.786.800,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			7.200.786.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				14 Dokumen	14 Dokumen	2.172.271.000,00	2.672.271.000,00	2.672.271.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.172.271.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	1.025.000.000,00	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.025.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				7500 Dokumen	7500 Dokumen	522.409.600,00	1.022.409.600,00	1.022.409.600,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			522.409.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	4.140.525.800,00	4.490.525.800,00	2.219.821.660,00	-1.920.704.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.140.525.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	1.420.000.000,00	1.770.000.000,00	1.418.123.100,00	-1.876.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.720.525.800,00	2.720.525.800,00	801.698.560,00	-1.918.827.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.720.525.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				30 kali	30 kali	7.088.167.600,00	8.088.167.600,00	5.226.631.940,00	-1.861.535.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		7.088.167.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.828.549.800,00	2.328.549.800,00	579.224.390,00	-1.249.325.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.828.549.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.788.549.800,00	2.288.549.800,00	1.808.999.200,00	20.449.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.788.549.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	971.068.000,00	971.068.000,00	338.408.350,00	-632.659.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			971.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD				184 Orang	184 Orang	143.053.432.288,00	155.353.432.288,00	149.320.910.258,00	6.267.477.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tenaga Ahli DPRD		143.053.432.288,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.941.297.200,00	6.941.297.200,00	5.116.655.600,00	-1.824.641.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			6.941.297.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.04.0004		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				93 Orang	93 Orang	6.700.231.400,00	5.800.231.400,00	3.800.231.400,00	-2.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			6.700.231.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.04.0005		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				93 Orang	93 Orang	1.032.997.200,00	1.032.997.200,00	1.032.997.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.032.997.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.04.0006		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	22.284.590.628,00	29.384.590.628,00	29.384.590.628,00	7.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			22.284.590.628,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.04.0007		Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.496.300.000,00	2.946.300.000,00	738.419.570,00	-1.757.880.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.496.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1000000 Dokumen	1000000 Dokumen	103.598.015.860,00	109.248.015.860,00	109.248.015.860,00	5.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			103.598.015.860,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																		
			Dokumen Aspirasi Masyarakat				1000000 Dokumen	1000000 Dokumen	46.682.814.800,00	46.682.814.800,00	31.673.203.000,00	-15.009.611.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Dokumen Aspirasi Masyarakat		46.682.814.800,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	3.820.152.000,00	3.820.152.000,00	2.804.538.000,00	-1.015.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.820.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.05.0002		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.178.081.000,00	1.178.081.000,00	1.178.081.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.178.081.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.05.0003		Pelaksanaan Reses																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	41.684.581.800,00	41.684.581.800,00	27.690.584.000,00	-13.993.997.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			41.684.581.800,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.165.376.200,00	1.665.376.200,00	1.418.390.200,00	253.014.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		1.165.376.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.1.06.0001		Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				150 Dokumen	150 Dokumen	1.165.376.200,00	1.665.376.200,00	1.418.390.200,00	253.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.165.376.200,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Layanan Fasilitasi Tugas DPRD				85 Anggota Dewan	85 Anggota Dewan	2.255.996.000,00	2.555.996.000,00	1.655.996.000,00	-600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Layanan Fasilitasi Tugas DPRD		2.255.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				9 Dokumen	9 Dokumen	1.355.996.000,00	1.655.996.000,00	1.655.996.000,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.355.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
J U M L A H									390.000.000.000,00	413.140.289.346,00	361.240.458.154,00	479.167.077.423,58					390.000.000.000,00			



32

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				0,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00								0,00		
	5.01	PERENCANAAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00								0,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	26.209.094.491,00	27.186.813.619,00	24.967.945.170,00	-26.209.094.491,00								0,00		
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	744.374.000,00	702.274.000,00	384.189.651,00	-360.184.349,00				Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	385.216.000,00	365.400.000,00	179.627.501,00	-205.588.499,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	359.158.000,00	336.874.000,00	204.562.150,00	-154.595.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.977.526.603,00	21.743.769.831,00	21.627.807.831,00	650.281.228,00				Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan	20.715.428.603,00	21.463.947.731,00	21.463.947.731,00	748.519.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	262.098.000,00	279.822.100,00	163.860.100,00	-98.237.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	159.818.400,00	146.336.000,00	88.009.000,00	-71.809.400,00				Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	159.818.400,00	146.336.000,00	88.009.000,00	-71.809.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	290.424.700,00	324.272.600,00	30.846.600,00	-259.578.100,00				Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	130 Paket	71.500.000,00	102.778.000,00	0,00	-71.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				80 Orang	80 Orang	218.924.700,00	221.494.600,00	30.846.600,00	-188.078.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	770.491.008,00	781.821.708,00	537.019.208,00	-233.471.800,00				Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.834.000,00	63.334.000,00	0,00	-54.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33.955.000,00	27.309.000,00	32.955.900,00	-999.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.144.000,00	51.620.000,00	46.451.000,00	11.307.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.006.900,00	33.597.500,00	41.773.200,00	5.766.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	120.108.000,00	120.108.000,00	69.181.300,00	-50.926.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	485.853.208,00	346.657.808,00	346.657.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	NON URUSAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01	PERENCANAAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	368.575.500,00	573.272.000,00	14.433.000,00	-354.142.500,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	23.250.000,00	83.864.000,00	0,00	-23.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	6.500.000,00	13.000.000,00	14.433.000,00	7.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	476.408.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	NON URUSAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01	PERENCANAAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.921.742.280,00	2.194.031.280,00	1.829.084.680,00	-92.657.600,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	377.200.000,00	377.200.000,00	357.200.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.538.042.280,00	1.816.831.280,00	1.471.884.680,00	-66.157.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	976.142.000,00	721.036.200,00	456.555.200,00	-519.586.800,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	404.052.000,00	333.055.000,00	333.055.000,00	-70.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				280 Unit	280 Unit	0,00	92.530.000,00	100.120.000,00	100.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	NON URUSAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01	PERENCANAAN							40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	-9.248.979.321,00							0,00	
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	459.500.000,00	295.451.200,00	23.380.200,00	-436.119.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	5.813.110.400,00	6.558.110.400,00	3.425.935.300,00	-5.813.110.400,00							0,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	2.415.554.000,00	2.375.554.000,00	1.171.874.000,00	-1.243.680.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	253.884.000,00	253.884.000,00	33.905.600,00	-219.978.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				1 Berita Acara	1 Berita Acara	856.675.000,00	856.675.000,00	178.070.000,00	-678.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	1.304.995.000,00	1.264.995.000,00	959.898.400,00	-345.096.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.495.514.400,00	2.395.514.400,00	1.326.015.400,00	-169.499.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	33.660.000,00	-166.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				75 Orang	75 Orang	388.585.200,00	1.288.585.200,00	998.620.200,00	610.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				60 Orang	60 Orang	156.414.800,00	156.414.800,00	16.014.800,00	-140.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				2 Buku	2 Buku	750.514.400,00	750.514.400,00	277.720.400,00	-472.794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.439.120.000,00	1.330.423.000,00	759.688.300,00	-679.431.700,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	223.550.000,00	223.550.000,00	112.088.900,00	-111.461.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	708.000.000,00	599.303.000,00	342.243.400,00	-365.756.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				3 Dokumen	3 Dokumen	507.570.000,00	507.570.000,00	305.356.000,00	-202.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	462.922.000,00	456.619.000,00	168.357.600,00	-294.564.400,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	62.994.000,00	-62.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	227.922.000,00	221.619.000,00	59.425.800,00	-168.496.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembiayaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	45.937.800,00	-64.062.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	8.126.065.500,00	8.373.165.500,00	2.505.410.600,00	-8.126.065.500,00							0,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	2.703.458.800,00	2.296.288.800,00	950.058.600,00	-1.753.400.200,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	582.600.800,00	269.407.500,00	51.034.400,00	-531.566.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	255.303.000,00	212.553.600,00	138.843.600,00	-116.459.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	293.093.700,00	346.425.300,00	160.792.000,00	-132.301.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	300.845.500,00	121.841.800,00	44.291.400,00	-256.554.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	575.976.200,00	329.768.100,00	60.056.150,00	-515.920.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	133.186.800,00	214.304.000,00	141.111.200,00	7.924.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	239.990.000,00	308.998.500,00	176.713.150,00	-63.276.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	322.462.800,00	492.990.000,00	177.216.700,00	-145.246.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	2.595.209.400,00	2.696.209.400,00	778.075.400,00	-1.817.134.000,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	527.792.800,00	539.403.800,00	72.174.000,00	-455.618.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	300.255.300,00	350.580.500,00	172.291.500,00	-127.963.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	187.902.400,00	209.308.400,00	106.031.900,00	-81.870.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	389.051.600,00	450.872.100,00	86.764.100,00	-302.287.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	404.927.400,00	505.806.000,00	236.785.900,00	-168.141.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	304.855.800,00	316.940.200,00	36.831.200,00	-268.024.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	285.338.000,00	154.000.000,00	29.614.400,00	-255.723.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	195.086.100,00	169.298.400,00	37.582.400,00	-157.503.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	2.827.397.300,00	3.380.667.300,00	777.276.600,00	-2.050.120.700,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	368.204.000,00	98.130.000,00	-251.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	279.787.200,00	87.403.600,00	-412.596.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	113.000.000,00	49.180.700,00	-50.819.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	177.397.300,00	305.122.300,00	89.722.300,00	-87.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	975.000.000,00	908.777.800,00	174.150.000,00	-800.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	182.200.000,00	65.412.000,00	-109.588.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	125.000.000,00	43.066.100,00	-56.933.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1.098.576.000,00	170.211.900,00	-279.788.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
J U M L A H									40.148.270.391,00	42.118.089.519,00	30.899.291.070,00	479.167.077.423,58							0,00	



33

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.913.355.913.758,42	1.625.110.295.100,76	1.464.461.129.860,74	-448.894.783.897,68							61.476.204.042,20			
	5.02	KEUANGAN							1.913.355.913.758,42	1.625.110.295.100,76	1.464.461.129.860,74	-448.894.783.897,68							61.476.204.042,20			
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	121.329.341.571,12	158.492.420.677,49	169.868.955.716,30	-113.210.628.443,12							8.118.713.128,00			
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	493.006.998,00	493.006.998,00	120.454.860,00	-372.552.138,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		559.466.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	149.413.798,00	149.413.798,00	46.233.850,00	-103.179.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			164.355.178,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48.400.000,00	48.400.000,00	7.969.100,00	-40.430.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			58.564.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48.400.000,00	48.400.000,00	8.779.840,00	-39.620.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			58.564.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29.596.600,00	29.596.600,00	8.690.400,00	-20.906.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.811.886,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29.596.600,00	29.596.600,00	4.911.400,00	-24.685.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.811.886,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.600.000,00	60.600.000,00	10.426.170,00	-50.173.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			66.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	127.000.000,00	127.000.000,00	33.444.100,00	-93.555.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			139.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	112.861.757.373,12	151.877.203.879,49	167.720.518.751,30	54.858.761.378,18			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		402.627.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				139 Orang/ Bulan	139 Orang/ Bulan	100.490.799.373,12	136.479.995.879,49	146.624.725.741,30	46.133.926.368,18	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.053.958.000,00	15.080.208.000,00	21.017.010.750,00	8.963.052.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	5.442.670,00	-19.557.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			36.602.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	242.000.000,00	242.000.000,00	62.480.050,00	-179.519.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			292.820.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	10.859.540,00	-39.140.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			73.205.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	8.626.550,00	-41.373.450,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		73.205.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	4.884.970,00	-20.115.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			36.602.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	3.741.580,00	-21.258.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			36.602.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.021.971.600,00	933.883.600,00	12.300.000,00	-1.009.671.600,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.035.893.760,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	123.000.000,00	123.000.000,00	12.300.000,00	-110.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			135.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	382.721.600,00	382.721.600,00	0,00	-382.721.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			420.993.760,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	500 Orang	516.250.000,00	428.162.000,00	0,00	-516.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			479.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.459.007.700,00	3.104.788.500,00	867.454.115,00	-2.591.553.585,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		4.455.243.518,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	979.938.000,00	625.718.800,00	164.098.270,00	-815.839.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			522.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.485.300,00	49.485.300,00	18.053.130,00	-31.432.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			137.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52.838.400,00	52.838.400,00	12.344.880,00	-40.493.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			126.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	37.522.400,00	37.522.400,00	0,00	-37.522.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			96.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	198.445.600,00	198.445.600,00	32.975.785,00	-165.469.815,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			275.038.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	555.205.000,00	555.205.000,00	93.497.800,00	-461.707.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			869.721.380,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.585.573.000,00	1.585.573.000,00	546.484.250,00	-1.039.088.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.427.183.638,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	219.547.100,00	219.547.100,00	1.720.530,00	-217.826.570,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		574.978.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	133.802.700,00	133.802.700,00	1.720.530,00	-132.082.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			269.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	85.744.400,00	85.744.400,00	0,00	-85.744.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			305.478.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.316.600.000,00	969.589.800,00	734.575.860,00	-1.582.024.140,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.316.600.000,00	969.589.800,00	734.575.860,00	-1.582.024.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	907.450.800,00	844.400.800,00	403.305.050,00	-504.145.750,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			1.017.297.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	546.330.600,00	483.280.600,00	332.118.730,00	-214.211.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				611.963.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	55 Unit	361.120.200,00	361.120.200,00	71.186.320,00	-289.933.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				405.334.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	1.784.579.683.667,30	1.459.170.985.903,27	1.289.872.481.756,44	-1.737.613.962.885,10								46.965.720.782,20	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	3.163.080.490,00	3.163.080.490,00	3.028.110.131,00	-134.970.359,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			3.257.469.809,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	201.744.300,00	201.744.300,00	201.744.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	201.799.000,00	201.799.000,00	201.799.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				221.978.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	189.528.200,00	189.528.200,00	189.528.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				208.481.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	189.528.200,00	189.528.200,00	189.528.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				208.481.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD																			
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	55.779.495,00	55.779.495,00	46.638.796,00	-9.140.699,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				61.357.444,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	48 Dokumen	55.779.495,00	55.779.495,00	55.779.495,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				61.357.444,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	988.951.800,00	988.951.800,00	988.951.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				1.087.846.980,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	996.751.800,00	996.751.800,00	996.751.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				1.096.426.980,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	182.218.200,00	182.218.200,00	96.711.240,00	-85.506.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				200.440.020,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				6 Dokumen	6 Dokumen	101.000.000,00	101.000.000,00	60.677.300,00	-40.322.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				111.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.328.155.200,00	1.328.155.200,00	795.906.890,00	-532.248.310,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-			1.460.970.720,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	380.873.200,00	380.873.200,00	241.508.800,00	-139.364.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi				418.960.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	373.884.200,00	373.884.200,00	240.554.400,00	-133.329.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			411.272.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	254.741.900,00	254.741.900,00	179.195.100,00	-75.546.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			280.216.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				15 Dokumen	15 Dokumen	182.102.500,00	182.102.500,00	67.587.700,00	-114.514.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.312.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	136.553.400,00	136.553.400,00	67.060.890,00	-69.492.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			150.208.740,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	1.565.456.050,00	1.565.456.050,00	822.123.250,00	-743.332.800,00		-	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.722.001.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12000 Dokumen	12000 Dokumen	545.600.000,00	545.600.000,00	272.800.000,00	-272.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			600.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	60.500.000,00	60.500.000,00	11.828.600,00	-48.671.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				48 Dokumen	48 Dokumen	123.033.050,00	123.033.050,00	123.033.050,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			135.336.355,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	106.211.300,00	106.211.300,00	20.610.100,00	-85.601.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			116.832.430,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	229.900.000,00	229.900.000,00	44.000.900,00	-185.899.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			252.890.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000,00	121.000.000,00	41.608.700,00	-79.391.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			133.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	145.200.000,00	145.200.000,00	74.230.200,00	-70.969.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			159.720.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				7 Dokumen	7 Dokumen	234.011.700,00	234.011.700,00	234.011.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			257.412.870,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.904.016.655,00	1.904.016.655,00	993.445.345,00	-910.571.310,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.094.418.320,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				14 Laporan	14 Laporan	119.187.500,00	119.187.500,00	31.712.000,00	-87.475.500,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			131.106.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	337.816.875,00	337.816.875,00	330.106.935,00	-7.709.940,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			371.598.562,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	935.763.180,00	935.763.180,00	400.745.360,00	-535.017.820,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.029.339.498,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	162.553.100,00	162.553.100,00	117.120.350,00	-45.432.750,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			178.808.410,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				36 Orang	36 Orang	67.046.000,00	67.046.000,00	18.637.500,00	-48.408.500,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			73.750.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																		
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	281.650.000,00	281.650.000,00	95.123.200,00	-186.526.800,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			309.815.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	1.774.283.929.565,30	1.448.875.231.801,27	1.282.958.529.429,74	-491.325.400.135,56			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		35.862.310.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				13 Laporan	13 Laporan	129.600.000,00	129.600.000,00	83.897.700,00	-45.702.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			142.560.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				-	1 Laporan	0,00	1.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	PAJAK DAERAH	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	32.472.500.000,00	42.472.500.000,00	11.236.250.000,00	-21.236.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			35.719.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	1.741.681.829.565,30	1.405.273.131.801,27	1.260.638.381.729,74	-481.043.447.835,56	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	2.335.045.707,00	2.335.045.707,00	1.274.366.710,70	-1.060.678.996,30			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.568.550.277,70	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	379.551.907,00	379.551.907,00	220.932.730,70	-158.619.176,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			417.507.097,70	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.389.517.500,00	1.389.517.500,00	969.555.550,00	-419.961.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.528.469.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				222 Orang	222 Orang	565.976.300,00	565.976.300,00	83.878.430,00	-482.097.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			622.573.930,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	7.446.888.520,00	7.446.888.520,00	4.719.692.388,00	-1.055.118.388,00							6.391.770.132,00		
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	7.446.888.520,00	7.446.888.520,00	4.719.692.388,00	-2.727.196.132,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		6.391.770.132,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	437.520.000,00	437.520.000,00	286.197.370,00	-151.322.630,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			481.272.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	62.310.000,00	62.310.000,00	11.591.220,00	-50.718.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			68.541.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	154.678.100,00	154.678.100,00	11.400.990,00	-143.277.110,00	-	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			170.145.910,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	315.453.800,00	315.453.800,00	40.899.320,00	-274.554.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			349.137.360,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	174.566.400,00	98.869.000,00	22.046.300,00	-152.520.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	360.900.000,00	473.179.400,00	343.773.100,00	-17.126.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.001.615.120,00	3.270.715.600,00	3.019.703.100,00	18.087.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.301.776.632,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	480.972.200,00	386.341.020,00	146.335.412,00	-334.636.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			529.069.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	530.928.300,00	356.459.000,00	117.148.156,00	-413.780.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			584.021.130,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	587.783.800,00	587.783.800,00	325.420.000,00	-262.363.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			646.562.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.050.548.200,00	953.777.200,00	254.971.600,00	-795.576.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	52.117.600,00	112.306.600,00	47.288.600,00	-4.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	237.495.000,00	237.495.000,00	92.917.220,00	-144.577.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			261.244.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
J U M L A H									1.913.355.913.758,42	1.625.110.295.100,76	1.464.461.129.860,74	479.167.077.423,58							61.476.204.042,20		



34 BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							145.132.309.417,97	134.872.046.337,97	109.892.189.337,97	-35.240.120.080,00							146.500.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN							145.132.309.417,97	134.872.046.337,97	109.892.189.337,97	-35.240.120.080,00							146.500.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kualitas Pelayanan Umum Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga, Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku				93,62 %	93,62 %	128.406.206.417,97	117.391.135.337,97	95.542.091.037,97	-834.206.417,97							127.572.000.000,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan				100 %	100 %	235.700.000,00	52.465.800,00	11.894.800,00	-223.805.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program		149.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	32.100.000,00	39.700.000,00	6.100.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	203.600.000,00	12.765.800,00	5.794.800,00	-197.805.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			116.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	106.689.596.194,97	105.720.933.114,97	84.911.904.914,97	-21.777.691.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		106.055.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				403 Orang/ Bulan	543 Orang/ Bulan	106.645.777.194,97	105.677.114.114,97	84.868.085.914,97	-21.777.691.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			106.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43.819.000,00	43.819.000,00	43.819.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	25.675.000,00	25.675.000,00	25.675.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		26.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.575.000,00	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	131.300.000,00	131.300.000,00	31.380.000,00	-99.920.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	1 Orang	131.300.000,00	131.300.000,00	31.380.000,00	-99.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.385.548.200,00	3.910.116.000,00	3.436.028.000,00	-949.520.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.992.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.947.000,00	39.947.000,00	39.947.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	16 Paket	2.682.457.000,00	2.306.830.000,00	2.512.465.000,00	-169.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			6.700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	140.317.200,00	140.317.000,00	140.317.000,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			280.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	395.575.600,00	395.501.000,00	79.990.000,00	-315.585.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			395.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	116.992.000,00	116.992.000,00	116.992.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			147.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	1.010.259.400,00	910.529.000,00	546.317.000,00	-463.942.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			1.430.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.053.000.000,00	561.600.000,00	561.600.000,00	-491.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	8 Unit	1.053.000.000,00	561.600.000,00	561.600.000,00	-491.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	9.264.060.023,00	5.618.363.423,00	5.369.256.323,00	-3.894.803.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.580.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.912.212.423,00	2.158.116.423,00	2.104.780.323,00	192.567.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			1.980.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	622.232.000,00	622.232.000,00	438.032.000,00	-184.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	6.729.615.600,00	2.838.015.000,00	2.826.444.000,00	-3.903.171.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.900.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.621.327.000,00	1.370.682.000,00	1.194.352.000,00	-5.426.975.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					23 Unit	25 Unit	905.922.000,00	905.922.000,00	729.592.000,00	-176.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			630.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	1 Unit	5.445.385.000,00	194.740.000,00	194.740.000,00	-5.250.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			3.200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				260 Unit	252 Unit	270.020.000,00	270.020.000,00	270.020.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			270.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				1,72 %	1,72 %	16.726.103.000,00	17.480.911.000,00	14.350.098.300,00	2.201.897.000,00							18.928.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				100 %	100 %	16.726.103.000,00	17.480.911.000,00	14.350.098.300,00	-2.376.004.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Pendapatan Daerah		18.928.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	195.000.000,00	393.000.000,00	128.775.000,00	-66.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.253.698.800,00	1.093.471.000,00	325.874.000,00	-927.824.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.323.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.630.209.800,00	1.630.209.000,00	1.298.609.800,00	-331.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.660.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Sarana dan Prasarana	3 Sarana dan Prasarana	3.411.702.000,00	4.315.800.000,00	4.574.697.800,00	1.162.995.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.970.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	64.400.000,00	64.400.000,00	7.500.000,00	-56.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			216.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				42 Laporan	42 Laporan	4.758.172.000,00	4.652.797.000,00	4.844.170.000,00	85.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			5.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				15 Dokumen SSPD	15 Dokumen SSPD	4.456.204.400,00	4.685.478.000,00	2.699.120.400,00	-1.757.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			4.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				42 Laporan	42 Laporan	629.000.000,00	318.040.000,00	284.351.300,00	-344.648.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			629.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	327.716.000,00	327.716.000,00	187.000.000,00	-140.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			330.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
J U M L A H									145.132.309.417,97	134.872.046.337,97	109.892.189.337,97	479.167.077.423,58						146.500.000.000,00			



35 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							116.137.261.386,32	22.081.788.116,34	20.149.737.040,94	-95.987.524.345,38							121.944.124.455,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							116.137.261.386,32	22.081.788.116,34	20.149.737.040,94	-95.987.524.345,38							121.944.124.455,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	113.636.661.386,32	18.831.188.116,34	17.975.893.050,94	5.681.833.068,68							119.318.494.455,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	135.000.000,00	165.500.000,00	47.218.060,00	-87.781.940,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		141.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	22.608.230,00	-52.391.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			78.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	60.000.000,00	90.500.000,00	24.609.830,00	-35.390.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	110.876.231.622,32	16.740.058.352,34	16.715.120.312,34	-94.161.111.309,98			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		116.420.043.203,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	110.836.231.622,32	16.700.058.352,34	16.700.058.352,34	-94.136.173.269,98	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			116.378.043.203,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	15.061.960,00	-24.938.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	791.350.309,00	796.850.309,00	299.930.323,60	-491.419.985,40			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		830.917.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	4.458.400,00	-7.541.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			12.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	4.729.700,00	-15.270.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	5.017.600,00	-19.982.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			26.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	11.184.500,00	-38.815.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			52.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	61 Laporan	676.350.309,00	676.350.309,00	270.540.123,60	-405.810.185,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			710.167.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.269.948.055,00	564.648.055,00	558.518.655,00	-711.429.400,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.333.445.458,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	247.248.055,00	247.248.055,00	241.118.655,00	-6.129.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			259.610.458,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.022.700.000,00	317.400.000,00	317.400.000,00	-705.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.073.835.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	564.131.400,00	564.131.400,00	355.105.700,00	-209.025.700,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		592.337.970,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	533.131.400,00	533.131.400,00	347.145.700,00	-185.985.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			559.787.970,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	31.000.000,00	31.000.000,00	7.960.000,00	-23.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			32.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	2.500.600.000,00	3.250.600.000,00	2.173.843.990,00	125.030.000,00							2.625.630.000,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	805.600.000,00	805.600.000,00	173.284.245,00	-632.315.755,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		845.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	99.327.870,00	-300.672.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				615 Dokumen	615 Dokumen	44.600.000,00	44.600.000,00	9.468.710,00	-35.131.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			46.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	51.441.240,00	-148.558.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				185 Dokumen	185 Dokumen	91.000.000,00	91.000.000,00	3.267.355,00	-87.732.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			95.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				15000 Dokumen	15000 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	9.779.070,00	-60.220.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			73.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	789.000.000,00	1.539.000.000,00	1.469.692.245,00	680.692.245,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		828.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				850 Dokumen	850 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	8.549.260,00	-31.450.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				14 Laporan	14 Laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	11.142.985,00	-37.857.015,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			51.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	700.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			735.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	780.000.000,00	780.000.000,00	503.992.705,00	-276.007.295,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		819.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				595 Orang	595 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	36.966.645,00	-113.033.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			157.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				-	-	365.000.000,00	365.000.000,00	342.805.600,00	-22.194.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			383.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				350 Dokumen	350 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	92.925.775,00	-107.074.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				200 Dokumen	200 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	31.294.685,00	-33.705.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			68.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	126.000.000,00	126.000.000,00	26.874.795,00	-99.125.205,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		132.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	15.377.490,00	-59.622.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			78.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				15 Orang	15 Orang	51.000.000,00	51.000.000,00	11.497.305,00	-39.502.695,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			53.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
J U M L A H									116.137.261.386,32	22.081.788.116,34	20.149.737.040,94	479.167.077.423,58							121.944.124.455,00	



36

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH									28.940.145.455,70	30.761.962.403,70	24.128.201.573,79	-4.811.943.881,91							32.526.517.242,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							28.940.145.455,70	30.761.962.403,70	24.128.201.573,79	-4.811.943.881,91						32.526.517.242,00		
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							28.940.145.455,70	30.761.962.403,70	24.128.201.573,79	-4.811.943.881,91						32.526.517.242,00		
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan				100 %	100 %	20.349.229.455,70	22.021.046.403,70	19.350.729.883,79	1.289.890.762,30						21.639.120.218,00		
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	25.650.000,00	-124.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	2.183.070,00	-20.316.930,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		22.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	2.218.520,00	-25.281.480,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		27.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	14.962.750.255,80	16.383.767.203,80	16.320.219.493,80	1.357.469.238,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-	15.589.817.190,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 orang Orang/ Bulan	80 orang Orang/ Bulan	14.887.750.255,80	16.308.767.203,80	16.308.767.203,80	1.421.016.948,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		15.523.192.190,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.048.000,00	27.048.000,00	5.333.690,00	-21.714.310,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		30.750.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				18 laporan Laporan	18 laporan Laporan	47.952.000,00	47.952.000,00	6.118.600,00	-41.833.400,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		35.875.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	28.990.500,00	28.990.500,00	5.774.810,00	-23.215.690,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-	32.570.310,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.670.500,00	15.670.500,00	4.906.410,00	-10.764.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		15.983.910,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.320.000,00	13.320.000,00	868.400,00	-12.451.600,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		16.586.400,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	192.256.800,00	352.256.800,00	46.043.610,00	-146.213.190,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		285.331.536,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 dokumen Dokumen	4 dokumen Dokumen	10.049.900,00	10.049.900,00	488.560,00	-9.561.340,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			53.580.498,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 orang Orang	25 orang Orang	182.206.900,00	342.206.900,00	45.555.050,00	-136.651.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			231.751.038,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.990.001.200,00	2.290.001.200,00	780.443.995,00	-1.209.557.205,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.374.460.025,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.484.200,00	36.484.200,00	9.121.050,00	-27.363.150,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			38.144.231,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.175.000,00	55.175.000,00	11.393.750,00	-43.781.250,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			57.685.463,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.367.600,00	10.367.600,00	2.591.900,00	-7.775.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			10.839.326,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.996.500,00	29.996.500,00	7.499.125,00	-22.497.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			31.361.341,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	157.062.800,00	157.062.800,00	3.897.870,00	-153.164.930,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			111.972.112,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	21.180.000,00	21.180.000,00	10.000.000,00	-11.180.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			61.200.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 laporan Laporan	130 laporan Laporan	1.666.737.500,00	1.966.737.500,00	735.255.600,00	-931.481.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.050.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12.997.600,00	12.997.600,00	684.700,00	-12.312.900,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			13.257.552,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	51.126.500,00	191.126.500,00	79.148.685,00	28.022.185,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	51.126.500,00	191.126.500,00	79.148.685,00	28.022.185,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			600.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.767.734.199,90	1.418.534.199,90	1.382.201.789,99	-385.532.409,91			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.565.369.724,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	792.940.000,00	792.940.000,00	774.940.000,00	-18.000.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			808.798.800,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	974.794.199,90	625.594.199,90	607.261.789,99	-367.532.409,91	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			756.570.924,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditingkatkan				100 %	100 %	1.206.370.000,00	1.206.370.000,00	711.247.500,00	-495.122.500,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.041.571.433,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit Unit	7 unit Unit	650.484.000,00	650.484.000,00	572.276.000,00	-78.208.000,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			683.414.753,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				550 Unit	550 Unit	355.922.000,00	355.922.000,00	88.980.500,00	-266.941.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			154.193.400,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 UNIT Unit	18 UNIT Unit	199.964.000,00	199.964.000,00	49.991.000,00	-149.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			203.963.280,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase peserta pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum				100 % 15.00 % 16.5 % 22.50 % % % %	100 % 15.00 % 16.5 % 22.50 % % % %	8.590.916.000,00	8.740.916.000,00	4.777.471.690,00	2.296.481.024,00							10.887.397.024,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang menerima pengembangan kompetensi teknis minimal 20 JP/tahun				22.50 %	22.50 %	983.010.000,00	983.010.000,00	458.190.860,00	-524.819.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.800.116.023,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				420 orang Orang	180 orang Orang	983.010.000,00	983.010.000,00	458.190.860,00	-524.819.140,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.800.116.023,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang menerima pengembangan kompetensi manajerial fungsional minimal 20 JP/tahun dan lulus sertifikasi				15.00 %	15.00 %	7.607.906.000,00	7.757.906.000,00	4.319.280.830,00	-3.288.625.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			9.087.281.001,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	39.767.900,00	39.767.900,00	10.156.760,00	-29.611.140,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			40.762.098,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				100 Orang	100 Orang	146.712.000,00	195.171.000,00	66.376.700,00	-80.335.300,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			178.054.800,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				4 Laporan	4 Laporan	327.445.100,00	428.986.100,00	120.516.730,00	-206.928.370,00	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			306.659.603,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				3 Dokumen	3 Dokumen	35.300.000,00	35.300.000,00	1.325.000,00	-33.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			36.182.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1530 Orang	1530 Orang	6.941.001.000,00	6.941.001.000,00	4.097.388.190,00	-2.843.612.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			8.405.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	117.680.000,00	117.680.000,00	23.517.450,00	-94.162.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			120.622.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
J U M L A H									28.940.145.455,70	30.761.962.403,70	24.128.201.573,79	479.167.077.423,58							32.526.517.242,00	



37

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.077.209.408,12	12.780.377.446,12	10.063.379.003,52	-2.013.830.404,60							510.022.400,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							12.077.209.408,12	12.780.377.446,12	10.063.379.003,52	-2.013.830.404,60							510.022.400,00	
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	9.586.653.157,12	10.388.354.195,12	9.278.952.565,52	-9.076.630.757,12							510.022.400,00	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Kesesuaian Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	71.384.885,00	66.409.885,00	66.409.885,00	-4.975.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	ASN Balitbangda		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	32.460.985,00	27.485.985,00	27.485.985,00	-4.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				18 Laporan	18 Laporan	30.043.900,00	30.043.900,00	30.043.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				0 Laporan	0 Laporan	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Gaji Dan Tunjangan ASN</i>				100 Persen	100 Persen	7.298.434.472,12	8.350.802.510,12	8.350.802.510,52	1.052.368.038,40			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	ASN Balitbangda		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	7.298.434.472,12	8.350.802.510,12	8.350.802.510,52	1.052.368.038,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Kebutuhan Barang Dan Aset</i>				100 Persen	100 Persen	40.120.100,00	40.120.100,00	40.120.100,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	ASN Balitbangda		30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	25.120.100,00	25.120.100,00	25.120.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	-19.700.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	ASN Balitbangda		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.05.01.1.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2 Orang	2 Orang	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	-19.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 Persen	100 Persen	1.041.842.100,00	1.145.350.100,00	199.434.190,00	-842.407.910,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	ASN Balitbangda		8.940.800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	12 Paket	8.288.000,00	8.288.000,00	8.288.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	12 Paket	153.327.000,00	166.327.000,00	0,00	-153.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 Paket	12 Paket	8.128.000,00	8.128.000,00	4.214.000,00	-3.914.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			8.940.800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Paket	12 Paket	21.243.600,00	21.243.600,00	21.243.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.729.500,00	31.729.500,00	9.298.750,00	-22.430.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	86.400.000,00	86.400.000,00	21.600.000,00	-64.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	732.726.000,00	823.234.000,00	134.789.840,00	-597.936.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	100 Persen	820.435.600,00	471.235.600,00	444.949.880,00	-375.485.720,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi	ASN Balitbangda		194.678.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	137.940.000,00	137.940.000,00	137.940.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			151.734.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.040.000,00	39.040.000,00	19.670.000,00	-19.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			42.944.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	643.455.600,00	294.255.600,00	287.339.880,00	-356.115.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	294.736.000,00	294.736.000,00	177.236.000,00	-117.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN Balitbangda		276.403.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	251.276.000,00	251.276.000,00	177.236.000,00	-74.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			276.403.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	43.460.000,00	43.460.000,00	0,00	-43.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase peningkatan hasil penelitian dan pengembangan daerah				100 %	100 %	2.490.556.251,00	2.392.023.251,00	784.426.438,00	-2.490.556.251,00								0,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Dokumen Hasil Kajian Bidang Pemerintahan Umum dan Hasil Kajian Peraturan Daerah				100 Persen	100 Persen	507.319.767,00	477.141.767,00	166.559.730,00	-340.760.037,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat dan Perangkat Daerah Terkait			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	91.012.000,00	91.228.000,00	80.720.000,00	-10.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	142.563.000,00	107.198.000,00	15.986.320,00	-126.576.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	32.579.767,00	32.575.767,00	0,00	-32.579.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				2 Laporan	2 Laporan	241.165.000,00	246.140.000,00	69.853.410,00	-171.311.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				100 Persen	100 Persen	320.417.000,00	320.417.000,00	193.305.920,00	-127.111.080,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat dan Perangkat Daerah Terkait		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.02.0001		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	97.071.000,00	97.071.000,00	83.556.000,00	-13.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.02.0003		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.02.0010		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	223.346.000,00	223.346.000,00	109.749.920,00	-113.596.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi Dan Pembangunan				100 Persen	100 Persen	1.127.640.984,00	1.067.224.984,00	295.305.128,00	-832.335.856,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat dan Perangkat Daerah Terkait		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.03.0001		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	154.441.500,00	154.441.500,00	96.618.660,00	-57.822.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.03.0004		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	3 Dokumen	433.618.600,00	382.682.900,00	131.021.890,00	-302.596.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.03.0005		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	147.167.300,00	147.114.800,00	0,00	-147.167.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.03.0007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	2 Dokumen	239.059.200,00	229.631.400,00	10.960.990,00	-228.098.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.03.0010		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	153.354.384,00	153.354.384,00	56.703.588,00	-96.650.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pemenuhan Dokumen Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pengembangan Inovasi Dan Teknologi				100 Persen	100 Persen	535.178.500,00	527.239.500,00	129.255.660,00	-405.922.840,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Masyarakat dan Perangkat Daerah Terkait		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	127.470.000,00	119.527.000,00	0,00	-127.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	266.412.500,00	266.416.500,00	47.498.330,00	-218.914.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	3 Laporan	141.296.000,00	141.296.000,00	81.757.330,00	-59.538.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
J U M L A H									12.077.209.408,12	12.780.377.446,12	10.063.379.003,52	479.167.077.423,58							510.022.400,00	



38 BADAN PENGHUBUNG



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGHUBUNG							20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	-2.785.520.200,00							21.989.809.524,84	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	-2.785.520.200,00							21.989.809.524,84	
5.07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG							20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	-2.785.520.200,00							21.989.809.524,84	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	18.934.361.285,84	19.071.161.285,84	16.896.164.485,84	850.448.238,00							19.784.809.523,84	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	42.137.500,00	42.137.500,00	39.137.500,00	-3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	-		46.456.594,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	9.763.000,00	9.763.000,00	9.763.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			10.763.708,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	32.374.500,00	32.374.500,00	29.374.500,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			35.692.886,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	7.591.467.585,84	9.375.067.585,84	9.375.067.585,84	1.783.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	-		10.202.101.157,84	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	7.554.066.885,84	9.337.666.885,84	9.337.666.885,84	1.783.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			10.160.866.885,84	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	37.400.700,00	37.400.700,00	37.400.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			41.234.272,00	BADAN PENGHUBUNG
5		NON URUSAN							20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	-2.785.520.200,00							21.989.809.524,84	
5.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	-2.785.520.200,00							21.989.809.524,84	
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	-2.785.520.200,00							21.989.809.524,84	
5.07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG							20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	-2.785.520.200,00							21.989.809.524,84	
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	30.760.500,00	30.760.500,00	30.720.500,00	-40.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	-		34.304.950,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	24.815.000,00	24.815.000,00	24.815.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			27.358.538,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5.945.500,00	5.945.500,00	5.905.500,00	-40.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			6.946.412,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	-63.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		71.662.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				21 Orang	21 Orang	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	-63.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			71.662.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah</i>				100 %	100 %	3.690.403.500,00	3.504.047.500,00	2.338.528.700,00	-1.351.874.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		4.802.107.588,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				13 Paket	13 Paket	202.826.000,00	202.826.000,00	0,00	-202.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			172.261.215,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				35 Paket	35 Paket	1.162.508.500,00	976.152.500,00	279.271.500,00	-883.237.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.142.410.523,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	57.150.000,00	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			57.150.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				25 Paket	25 Paket	40.132.000,00	40.132.000,00	27.609.200,00	-12.522.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			40.132.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	290.600.000,00	290.600.000,00	290.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			320.386.500,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				120 Laporan	120 Laporan	1.906.193.000,00	1.906.193.000,00	1.655.904.000,00	-250.289.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			2.035.596.465,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	30.994.000,00	30.994.000,00	27.994.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			34.170.885,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah</i>				100 %	100 %	4.015.842.200,00	2.448.242.200,00	2.448.242.200,00	-1.567.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		1.545.842.200,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	763.523.200,00	763.523.200,00	763.523.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			763.523.200,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	12 Laporan	3.252.319.000,00	1.684.719.000,00	1.684.719.000,00	-1.567.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			782.319.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	3.500.750.000,00	3.607.906.000,00	2.664.468.000,00	-836.282.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		3.082.334.534,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	1.521.282.000,00	1.594.698.000,00	1.531.322.000,00	10.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.718.380.755,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	250.680.000,00	266.360.000,00	251.360.000,00	680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			250.901.200,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 lokasi Unit	9 lokasi Unit	1.728.788.000,00	1.746.848.000,00	881.786.000,00	-847.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.113.052.579,00	BADAN PENGHUBUNG	
1.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase tingkat kualitas pelayanan Badan Penghubung				100 %	100 %	1.941.798.600,00	1.941.798.600,00	1.194.475.200,00	263.201.401,00							2.205.000.001,00		
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Masyarakat Lampung Diluar Daerah				100 %	100 %	1.941.798.600,00	1.941.798.600,00	1.194.475.200,00	-747.323.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-		2.205.000.001,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	12 Laporan	974.248.500,00	974.248.500,00	662.946.000,00	-311.302.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.074.108.971,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	205.307.500,00	205.307.500,00	106.545.400,00	-98.762.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			226.351.519,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																			
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				7 Laporan	7 Laporan	279.865.400,00	279.865.400,00	183.172.400,00	-96.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			308.551.604,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																			
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				3 Laporan	3 Laporan	349.970.100,00	349.970.100,00	139.111.400,00	-210.858.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			385.858.573,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>				12 Laporan	12 Laporan	132.407.100,00	132.407.100,00	102.700.000,00	-29.707.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			210.129.334,00	BADAN PENGHUBUNG
J U M L A H									20.876.159.885,84	21.012.959.885,84	18.090.639.685,84	479.167.077.423,58							21.989.809.524,84	



39 INSPEKTORAT

PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							58.412.533.787,32	58.600.723.133,32	48.606.026.666,82	-9.806.507.120,50							58.850.640.542,32	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							58.412.533.787,32	58.600.723.133,32	48.606.026.666,82	-9.806.507.120,50							58.850.640.542,32	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							58.412.533.787,32	58.600.723.133,32	48.606.026.666,82	-9.806.507.120,50							58.850.640.542,32	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Inspektorat				100 80 % Nilai	100 80 % Nilai	50.721.700.787,32	50.402.690.133,32	46.167.849.766,82	188.106.755,00							50.909.807.542,32	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Pangangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	110.000.000,00	110.000.000,00	15.651.260,00	-94.348.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	10.557.500,00	-49.442.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				16 Laporan	16 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	5.093.760,00	-44.906.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	46.412.538.787,32	46.072.328.133,32	43.980.736.286,82	-2.431.802.500,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Inspektorat Provinsi Lampung		46.411.675.542,32	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				162 Orang/ Bulan	162 Orang/ Bulan	46.397.538.787,32	46.057.328.133,32	43.975.984.286,82	-2.421.554.500,50	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			46.396.675.542,32	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	4.752.000,00	-10.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah</i>				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Inspektorat Provinsi Lampung		20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	984.239.000,00	984.239.000,00	156.078.000,00	-828.161.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Inspektorat Provinsi Lampung		1.004.239.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					162 Orang	162 Orang	954.239.000,00	954.239.000,00	156.078.000,00	-798.161.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			954.239.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					162 Orang	162 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.714.294.000,00	1.824.294.000,00	837.529.000,00	-876.765.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi	-		1.814.294.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	12 Paket	39.208.200,00	39.208.200,00	27.420.600,00	-11.787.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			39.208.200,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	474.562.800,00	584.562.800,00	0,00	-474.562.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			574.562.800,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material					12 Paket	12 Paket	61.000.000,00	61.000.000,00	38.061.000,00	-22.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			61.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	173.000.000,00	173.000.000,00	105.600.000,00	-67.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi			173.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	921.523.000,00	921.523.000,00	639.447.400,00	-282.075.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			921.523.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	899.599.000,00	810.799.000,00	704.629.220,00	-194.969.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			899.599.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	345.120.000,00	345.120.000,00	293.583.220,00	-51.536.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			345.120.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	554.479.000,00	465.679.000,00	411.046.000,00	-143.433.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			554.479.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	581.030.000,00	581.030.000,00	473.226.000,00	-107.804.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Inspektorat Provinsi Lampung		650.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	336.350.000,00	336.350.000,00	333.997.000,00	-2.353.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			336.350.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	82 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	43.680.000,00	-56.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	144.680.000,00	144.680.000,00	95.549.000,00	-49.131.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			213.650.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Yang Sudah Diselesaikan				88 %	88 %	6.812.888.000,00	7.320.088.000,00	2.259.933.100,00	250.000.000,00							7.062.888.000,00	
6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan Kriteria > BB				70 %	70 %	6.092.460.000,00	6.599.660.000,00	1.965.488.700,00	-4.126.971.300,00			-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah		6.342.460.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				280 Laporan	280 Laporan	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	327.911.200,00	-872.088.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.300.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				120 Laporan	120 Laporan	754.000.000,00	911.200.000,00	149.759.400,00	-604.240.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			754.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01.0003		Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				95 Laporan	95 Laporan	249.500.000,00	249.500.000,00	62.789.000,00	-186.711.000,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			249.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01.0004		Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				190 Laporan	190 Laporan	444.050.000,00	444.050.000,00	110.904.700,00	-333.145.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			444.050.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01.0005		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				80 Laporan	80 Laporan	1.789.270.000,00	1.789.270.000,00	523.408.000,00	-1.265.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.819.270.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	624.261.600,00	-475.738.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	555.640.000,00	605.640.000,00	166.454.800,00	-389.185.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			575.640.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Pengawasan Pengaduan yang tertangani.				100 %	100 %	720.428.000,00	720.428.000,00	294.444.400,00	-425.983.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah		720.428.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	10.797.400,00	-34.202.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				32 Laporan	32 Laporan	675.428.000,00	675.428.000,00	283.647.000,00	-391.781.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			675.428.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase unit kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Sesuai Peraturan Capaian Nilai MCP oleh KPK				10 80 93.5 % % Nilai	10 80 93.5 % % Nilai	877.945.000,00	877.945.000,00	178.243.800,00	0,00							877.945.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang ditetapkan dan diimplementasikan				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	10.356.600,00	-139.643.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				0 0	0 0	90.000.000,00	90.000.000,00	10.356.600,00	-79.643.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase ASN yang melaksanakan Wajib Laporan LHKASN dan LHKPN. Prosentase Capaian Perangkat Daerah yang melaksanakan Penerapan rencana aksi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.				100 %	100 %	727.945.000,00	727.945.000,00	167.887.200,00	-560.057.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah		727.945.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	217.800.000,00	217.800.000,00	52.831.200,00	-164.968.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			217.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	112.249.000,00	112.249.000,00	18.854.500,00	-93.394.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			112.249.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				16 Kegiatan	16 Kegiatan	191.983.000,00	191.983.000,00	55.511.000,00	-136.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			191.983.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	205.913.000,00	205.913.000,00	40.690.500,00	-165.222.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			205.913.000,00	INSPEKTORAT
J U M L A H									58.412.533.787,32	58.600.723.133,32	48.606.026.666,82	479.167.077.423,58						58.850.640.542,32		



40 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PERUBAHAN RKPD 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH									24.649.995.549,78	27.078.639.769,78	22.295.443.019,78	-2.354.552.530,00								27.117.041.000,00	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							24.649.995.549,78	27.078.639.769,78	22.295.443.019,78	-2.354.552.530,00							27.117.041.000,00		
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							24.649.995.549,78	27.078.639.769,78	22.295.443.019,78	-2.354.552.530,00							27.117.041.000,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	18.899.995.549,78	21.328.639.769,78	20.099.941.669,78	224.003.950,22							19.123.999.500,00		
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah				90 %	90 %	98.738.900,00	150.000.000,00	150.000.000,00	51.261.100,00							218.876.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	45.275.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	16.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-						
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																	32.286.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	12.878.700,00	21.500.000,00	21.500.000,00	8.621.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-						
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	21.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	12.407.400,00	18.250.000,00	18.250.000,00	5.842.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-						
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	32.697.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15.030.600,00	23.850.000,00	23.850.000,00	8.819.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-						
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	22.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11.727.300,00	19.950.000,00	19.950.000,00	8.222.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-						
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	32.678.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.994.900,00	22.750.000,00	22.750.000,00	7.755.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-						
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	31.689.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	15.700.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-						
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan				85 %	85 %	16.588.020.949,78	19.030.860.669,78	19.028.207.469,78	2.440.186.520,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).				16.377.669.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	6.598.268.549,78	7.505.834.369,78	7.505.834.369,78	907.565.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			7.135.765.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	9.945.162.400,00	11.453.808.800,00	11.453.808.800,00	1.508.646.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			9.175.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22.414.000,00	35.367.500,00	32.714.300,00	10.300.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			33.854.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	22.176.000,00	35.850.000,00	35.850.000,00	13.674.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			32.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset				90 %	90 %	35.962.000,00	35.962.000,00	17.980.550,00	-17.981.450,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			51.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24.278.000,00	24.278.000,00	12.139.000,00	-12.139.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	11.684.000,00	11.684.000,00	5.841.550,00	-5.842.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			17.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian				75 %	75 %	81.650.000,00	79.450.000,00	4.180.000,00	-77.470.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			91.020.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				154 Orang	154 Orang	12.650.000,00	10.450.000,00	4.180.000,00	-8.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			18.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum				75 %	75 %	1.198.088.300,00	1.211.941.700,00	320.938.250,00	-877.150.050,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		1.459.303.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.858.200,00	23.858.200,00	17.893.650,00	-5.964.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			21.890.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	138.756.000,00	161.336.000,00	0,00	-138.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			512.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.784.000,00	27.784.000,00	13.892.000,00	-13.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.175.000,00	34.978.400,00	21.310.000,00	1.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			32.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.06.0007		Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	115.580.000,00	115.580.000,00	10.919.600,00	-104.660.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			146.574.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	871.935.100,00	848.405.100,00	256.923.000,00	-615.012.100,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			733.589.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				75 %	75 %	475.254.400,00	371.904.400,00	342.004.400,00	-133.250.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		549.015.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
8.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	116.466.000,00	160.116.000,00	160.116.000,00	43.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			261.265.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	358.788.400,00	211.788.400,00	181.888.400,00	-176.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			287.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah				60 %	60 %	422.281.000,00	448.521.000,00	236.631.000,00	-185.650.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		376.364.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	401.821.000,00	401.821.000,00	224.451.000,00	-177.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			236.364.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				75 Unit	75 Unit	20.460.000,00	46.700.000,00	12.180.000,00	-8.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase meningkatnya rasa patriotisme, cinta tanah air dan bangsa				97 %	97 %	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	1.502.837.400,00	1.228.817.500,00							3.978.817.500,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	1.502.837.400,00	-1.247.162.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		3.978.817.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			55.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			55.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2925 Orang	2925 Orang	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	-258.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			1.165.369.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				425 Orang	425 Orang	211.800.000,00	211.800.000,00	0,00	-211.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			121.198.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				15 Laporan	15 Laporan	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	-97.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0007	Penggantian Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			2.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				35 Orang	35 Orang	2.153.000.000,00	2.153.000.000,00	1.502.837.400,00	-650.162.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung				74,09 %	74,09 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	201.773.200,00	-386.825.000,00							613.175.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				15 %	15 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	201.773.200,00	-798.226.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		613.175.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	17.105.600,00	17.105.600,00	457.900,00	-16.647.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			15.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			16.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				500 Orang	500 Orang	496.560.600,00	496.560.600,00	82.555.500,00	-414.005.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			225.000.000,00	BADAN KESATUAN DAERAH POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1250 Orang	1250 Orang	116.833.800,00	116.833.800,00	101.045.600,00	-15.788.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			343.575.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	369.500.000,00	369.500.000,00	17.714.200,00	-351.785.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	475.000.000,00	475.000.000,00	106.747.180,00	10.500.600,00							485.500.600,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	475.000.000,00	475.000.000,00	106.747.180,00	-368.252.820,00			-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			485.500.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			31.785.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			27.296.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1476 Orang	1476 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	98.391.860,00	-301.608.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			181.629.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1325 Orang	1325 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			215.289.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	8.355.320,00	-66.644.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			29.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase meningkatnya toleransi antar agama, suku dan etnis				85 %	85 %	525.000.000,00	525.000.000,00	99.919.030,00	804.536.500,00							1.329.536.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Presentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya</i>				15 %	15 %	525.000.000,00	525.000.000,00	99.919.030,00	-425.080.970,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		1.329.536.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			26.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			35.684.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				1525 Orang	1525 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	91.563.710,00	-358.436.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			670.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				1250 Orang	1250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			569.852.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				15 Laporan	15 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	8.355.320,00	-66.644.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase upaya pencegahan konflik sosial oleh pemerintah				90 %	90 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	284.224.540,00	586.011.900,00							1.586.011.900,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Presentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>				15 %	15 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	284.224.540,00	-715.775.460,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	-		1.586.011.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	115.941.900,00	115.941.900,00	3.562.040,00	-112.379.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				1100 Orang	1100 Orang	359.720.800,00	359.720.800,00	76.177.990,00	-283.542.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			483.515.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1250 Orang	1250 Orang	94.605.700,00	94.605.700,00	36.843.790,00	-57.761.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			444.628.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	192.193.600,00	192.193.600,00	72.796.540,00	-119.397.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				6 Dokumen	6 Dokumen	237.538.000,00	237.538.000,00	94.844.180,00	-142.693.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bandar Lampung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis			405.368.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
J U M L A H									24.649.995.549,78	27.078.639.769,78	22.295.443.019,78	479.167.077.423,58							27.117.041.000,00	